



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2017

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD PERUBAHAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2016-2021



2017

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan merupakan pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan dimana dengan adanya perencanaan yang baik maka setiap program dan kebijakan kepala daerah berjalan di atas rel yang seharusnya dalam upaya pencapaian visi dan misi serta tujuan untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan merupakan suatu amanah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 23 Tahun 2014, RPJMD Perubahan merupakan penjabaran dari visi misi dan Program Kepala Daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan ini berisikan mengenai gambaran umum kondisi daerah, potensi daerah, kondisi keuangan daerah serta proyeksi keuangan dimasa yang akan datang dan juga menyajikan Program Prioritas Daerah yang menjadi dasar bagi seluruh OPD dalam Menyusun Rencana Strategis OPD dalam menyusun kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Demikian Dokumen RPJMD Perubahan ini untuk dapat menjadi dasar Renstra OPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Manna, 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan daerah yang disusun menjadi arah dan panduan bagi pencapaian cita-cita pembangunan baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi dari kontrak politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dari proses pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, yang mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang, mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta kondisi sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Disamping itu juga memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Bengkulu, agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan sehingga saling mendukung, konsisten, sinergis, sejalan dan selaras serta menghindari terjadinya tumpang tindih yang pada akhirnya diharapkan berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunannya juga mempedomani Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2025, dengan tujuan agar pencapaian visi dan misi sesuai *track* yang telah ditentukan, serta untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tangguh dan berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Perubahan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 ini dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut : *Pertama terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Itu merupakan salah satu momentum dari telah terjadinya perubahan kebijakan di tingkat nasional. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan konsekuensi terhadap harus dilakukannya perubahan kelembagaan perangkat daerah disemua daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 282 dan pasal 283 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan



Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan bahwa perubahan kebijakan nasional merupakan salah satu bagian dari perubahan mendasar yang menjadi dasar harus dilakukannya perubahan RPJMD melalui peraturan daerah.

Kedua Berdasarkan diktum kedua instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Ketiga Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Keempat, dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai pelaksanaan dari amanat PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kelima, dalam rangka penyusunan RAPBD tahun anggaran 2018, diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan Tahun 2017. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda pemerintahan daerah. Mengingat rancangan APBD tahun anggaran 2018 sudah mengacu kepada kelembagaan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka diperlukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD dan RKPD sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Keempat dokumen tersebut merupakan lampiran dari rancangan apbd yang akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, dalam rangka menguji kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaannya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Rancangan Awal RPJM Daerah Tahun 2016-2021 digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD. Lebih lanjut, RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sehingga visi, misi, dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih yang dilantik oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 17 Februari 2016 sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan kepada publik pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu :



1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya :

1. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA.
2. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan OPD dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD).
3. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan.
4. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.
5. RPJMD menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan RPJMD terdiri dari 7 (tujuh) tahap utama yaitu : *tahap pertama* : persiapan penyusunan RPJMD meliputi pembentukan tim, orientasi dan penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data/informasi. *Tahap kedua* : penyusunan rancangan awal RPJMD dimana didalamnya terdapat proses *Desk* dengan OPD, pembahasan dengan Bappeda untuk proses penselarasan. *Tahap ketiga* : Penyebaran surat edaran Bupati kepada OPD untuk menyampaikan rancangan renstra OPD. *Tahap keempat* : penyusunan rancangan RPJMD berdasarkan masukan dari rancangan Renstra OPD. *Tahap kelima* : Musrenbang RPJMD. *Tahap keenam* : penyusunan rancangan akhir RPJMD meliputi : perumusan rancangan akhir RPJMD, pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan OPD dan kepala daerah, penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan kepala



daerah, konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Gubernur Bengkulu dan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi. Dan *Tahap ketujuh*: penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik, konsisten, komprehensif dan terintegrasi dengan perencanaan nasional maupun provinsi, maka akan mampu menjadikan setiap program dan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan diatas rel yang seharusnya dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat menuju Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan di daerah dapat berjalan dan terintegrasi dengan pembangunan provinsi dan nasional. Untuk itu, dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 mempedomani dasar hukum antara lain:

1. Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4817);

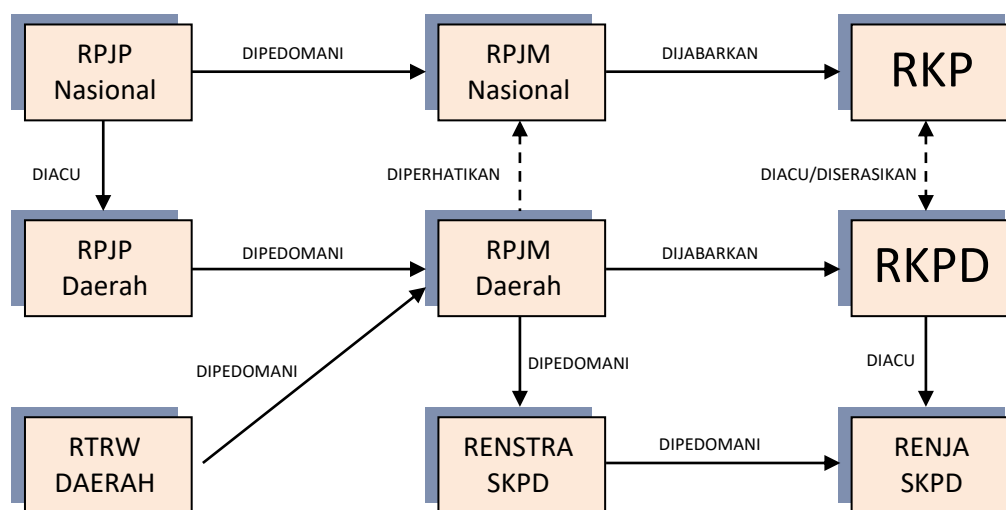
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/Sj dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 Tentang Petujuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 06);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum penyusunan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, secara substansi memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan itu adalah sebagai berikut:



1. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional, yang berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, RPJP Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 merupakan dokumen yang berisikan perencanaan pembangunan di Propinsi Bengkulu. Sementara RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang, dan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 merupakan rencana jangka menengah yang penyusunannya mempedomani dokumen-dokumen tersebut agar terdapat sinkronisasi dan koordinasi dalam implementasinya;
2. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan seperti di dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan; dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Di samping untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi, pengacuan semacam itu dimaksudkan untuk memudahkan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021.
3. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 juga mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik itu RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri maupun RTRW Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur dan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan dengan harapan tercipta sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan yang berbasis tata ruang wilayah.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

A. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk



periode 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya, maka disusun RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode tahun 2005-2025.

Perumusan visi dan misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting karena mencerminkan keadaan yang diinginkan dan diharapkan dari hasil pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 adalah: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS AGROINDUSTRI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH".

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan tanggung jawab.
3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan.
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustry.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu.
6. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya yaitu dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program wajib belajar 9 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal iptek.

Pembangunan sektor ekonomi dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat difokuskan pada pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian dengan fokus



utama agroindustri yang merupakan keterkaitan pembangunan sektor pertanian yang telah direncanakan pada tahap pembangunan sebelumnya dengan sasaran pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat. Pada saat yang sama juga dikembangkan sektor jasa, perdagangan dan pariwisata sebagai pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Pembukaan dan penguatan peluang investasi di daerah semakin diperluas sebagai faktor pendorong bergerak majunya perekonomian menuju perekonomian yang stabil dan maju.

Sejalan dengan membaiknya kesejahteraan rakyat, semakin merata dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak; tercapainya kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mantapnya budaya serta karakter daerah.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, sejalan dengan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan pada bidang pemerintahan masih tetap difokuskan pada penataan kembali sistem birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Pada tahap ini masih dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah, sehingga aparatur memiliki kinerja yang baik, produktivitas tinggi serta kreativitas optimal. Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan pelayanan prima terhadap masyarakat dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selain itu pada tahap ini juga fokus pada peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, penegakan supremasi hukum dan HAM, peningkatan ketentraman dan ketertiban, peningkatan proses politik dan budaya politik, lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan.

Pembangunan bidang penataan ruang pelaksanaannya mempedomani RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan.

B. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Kebijakan penataan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 dalam rangka mendukung capaian RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 dilakukan untuk:



- a. peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten;
- b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
- c. pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
- e. pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah; dan
- f. pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.

Maksud penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai pedoman untuk :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten dan keserasian antar sektor; dan
- c. pengarahan lokasi investasi yang direncanakan lokasi investigasi yang dilaksanakan pemerintah dan ruang.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

C. RPJMD dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

D. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memuat



prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kabupaten Bengkulu Selatan serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasil pembangunan daerah.

BAB III. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

Penyajian isu-isu strategis daerah meliputi permasalahan-permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan-permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis daerah dapat berasal dari permasalahan-permasalahan daerah maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan



pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja per program termasuk pagu indikatif per tahunnya dan target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menjelaskan 2 (dua) hal yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Bagian pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilu pada periode berikutnya. Bagian kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD untuk menyusun Renstra OPD dan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan. Didalamnya juga terdapat rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional didalam perencanaan periode 2016-2021 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari RPJM Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum Pembangunan daerah 2016-2021;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam menyusun rencana strategis OPD periode tahun 2016-2021 dan rencana kerja



tahunan OPD termasuk di dalam menentukan program-program prioritas;

3. Sebagai pedoman di dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS, RAPBD 2016-2021;
4. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah seluas 5.949,14 km². Namun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan sehingga setelah pemekaran luas wilayahnya menjadi 1.186,10 km² atau 19,93 % yang merupakan wilayah daratan, sedangkan luas wilayah lautan dengan panjang garis pantai 60 km dan dengan luas pengelolaan 4 mil, maka luas keseluruhan wilayah lautan, yaitu 384 km² atau 38.400 ha. Dengan demikian Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan, yaitu 157.100 ha atau 1.570,10 km².

Kabupaten Bengkulu Selatan setelah pemekaran memiliki 11 (sebelas) kecamatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun luas wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Manna	33,17	2,80
2	Bunga Mas	35,08	2,96
3	Kota Manna	32,16	2,71
4	Pasar Manna	5,84	0,49
5	Kedurang	234,55	19,71
6	Kedurang Ilir	58,20	4,91
7	Seginim	61,52	5,19
8	Air Nipis	203,28	17,14
9	Pino	61,88	5,22
10	Ulu Manna	236,92	19,97
11	Pino Raya	233,50	18,84
	Jumlah	1.186,10	100 %

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2015

Ditinjau dari aspek kewilayahan (spatial) posisi Kabupaten Bengkulu Selatan cukup strategis, karena Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada jalur lintas yang menghubungkan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Selatan (melalui Tanjung Sakti).



Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung :

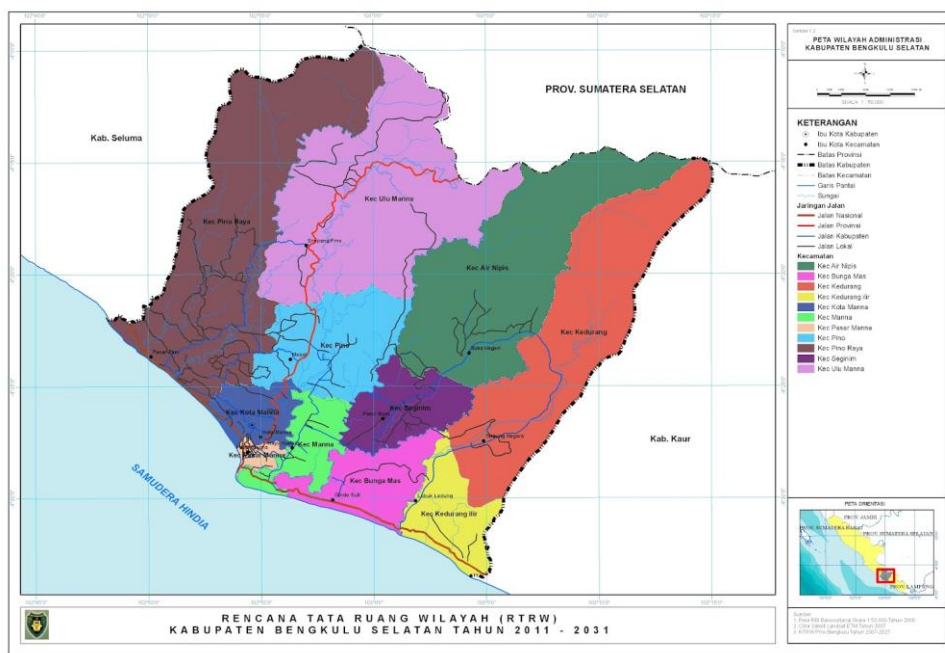
- Sebelah utara dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah timur dengan Propinsi Sumatera Selatan
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Kaur
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkulu Selatan secara geografis terletak pada 40 – 50 LS dan 1020 – 1030 BT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan setelah dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Kedadaan Topografi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari daerah datar dan berbukit. Berdasarkan atas ketinggian dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas: daerah yang berada pada ketinggian 0-25 m dpl seluas 7,73 %, pada ketinggian 25 - 100 m dpl seluas 45,39 %, pada ketinggian 100 - 500 m dpl seluas 33,59 %, pada ketinggian 500 – 1000 m dpl dengan luas 7,58 %, pada ketinggian > 1000 m dpl dengan luas 5,7 %.

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Sedangkan untuk tekstur tanah, berdasarkan data tahun 1995 dan 2005 pada Profil Daerah Tahun 2014 sebagai berikut:

- Tekstur halus dan agak halus 69,25 % dan 67,53 %
- Tekstur sedang 15,27 % dan 15,74 %
- Tekstur agak kasar 11,69 % dan 13,95 %, dan
- Tekstur kasar 3,78 % dan 2,78 %.



Data di atas menunjukkan bahwa tanah bertekstur halus dan agak halus masih mendominasi lahan seluas 67,53 % yang selama sepuluh tahun tidak banyak perubahan. Sedangkan tekstur sedang dan kasar tetap seimbang selama 10 tahun terakhir. Kedepan dapat dijadikan lahan sebagai potensi untuk pembangunan pertanian.

Kemiringan tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan bervariasi yaitu: wilayah yang mempunyai kemiringan 0-15 derajat seluas 45,86 %, kemiringan 15-25 Derajat seluas 39,66 %, kemiringan 25-40 derajat seluas 10,46 %, dan wilayah yang mempunyai kemiringan > 40 derajat seluas 4,02 %.

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sungai besar dan kecil yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada, seperti: Air Manna, Air Bengkenang, Air Kedurang, Air Nelengau, Air Nipis, Air Pino, Air Manna Hijau dan Air Selali. Sungai di Kabupaten Bengkulu Selatan selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga menjadi sumber air minum PDAM Tirta Manna.

Suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Suhu rata-rata maksimum yang dicatat di Kota Manna oleh BMKG Stasiun Klimatologi KL I Pulau Baai yaitu 310C, suhu rata-rata minimum 220C, sehingga suhu rata-rata hariannya sekitar 270C. Rata-rata kelembaban udara dalam beberapa tahun tercatat sebesar 84 persen. Curah hujan rata-rata tahunan dalam lima tahun terakhir tercatat sebesar 3.400 mm pada 167 hari hujan.

Iklim terbentuk oleh unsur-unsur cuaca, yaitu curah hujan, hari hujan, radiasi surya, penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Besarnya unsur-unsur pembentukan iklim dapat diuraikan sebagai berikut: menurut kriteria Schmid dan Ferguson dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim A, menurut kriteria Mohr, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim 1a, menurut kriteria Oldeman, dapat diklasifikasikan dalam tipe iklim B1, menurut kriteria Koppen, dapat diklasifikasikan kedalam tipe iklim Af.

Dalam pelaksanaan pembangunan, dilakukan penelaahan terhadap pemanfaatan dan pengembangan tata ruang yang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang penting dilakukan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya.

Dalam rencana pengembangan struktur ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan penataan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Salah satu yang akan dilakukan dalam rencana struktur ruang adalah penataan pusat perkantoran yang akan dipusatkan pada satu titik lokasi, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga disusun rencana jaringan energi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kurangnya energi yang dialami masyarakat selama ini.

Berkenaan dengan rencana pola ruang, perlu dilakukan evaluasi terhadap peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini penting mengingat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kawasan yang harus ditata dan dikelola kembali, terutama keberadaan dan peruntukan hutan. Berikut ini data mengenai luas dan persentase hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bengkulu Selatan.



Tabel 2.2
Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah
A.	Kawasan Suaka Alam/ Pelestarian Alam	53,7	0,1
	1. Taman Nasional	-	-
	2. Cagar Alam	-	-
	3. Taman Wisata Alam	5,5	0,0
	4. Taman Buru	-	-
	5. Taman Hutan Raya	48,2	0,1
B.	Kawasan Hutan		
	1. Hutan Lindung	33.079	67,13
	2. Hutan Produksi Terbatas	14,566,96	29,56
	3. Hutan Produksi Tetap	1.579	3,20
	4. Hutan Produksi Khusus Konversi		
C.	Area Penggunaan Lainnya	-	-
Jumlah		49,278,66	100,00

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Pertanian

Pertanian tanaman pangan merupakan komoditi penyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan dengan hasil produksi yang relatif meningkat setiap tahun. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk terus dikembangkan dalam rangka menopang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat karena Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki lahan pertanian yang cukup luas.

Pada tahun 2015, berdasarkan angka statistik pertanian yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 11.036 ha yang terdiri dari 8.131 ha lahan irigasi dan 2.905 ha lahan non irigasi. Sedangkan luas lahan pertanian bukan sawah tercatat seluas 75.067 ha, terdiri dari 27.544 ha lahan perkebunan, 13.595 ha hutan rakyat, 8.729 ha tegal/kebun, 976 ha ladang/ huma, 924 ha padang penggembalaan/ rumput, 8.752 ha lahan yang sementara tidak diusahakan dan 14.547 ha lahan lainnya. Selengkapnya mengenai luas lahan sawah diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Sawah dan Kecamatan Tahun 2011 - 2015

Kecamatan	Jenis Sawah									
	Irigasi					Non Irigasi				
	Teknis	Setengah Teknis	Sederhana	Irigasi Desa Non PU	Sub Total	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak/ Rawa	Polder dan Lainnya	Sub Total
Manna	0	0	105	50	155	435	0	0	0	435
Bunga Mas	0	0	25	140	165	498	0	0	0	498
Kota Manna	0	0	0	12	12	273	0	0	0	273
Pasar Manna	0	24	49	0	73	66	0	0	0	60
Kedurang	1.356	0	-	0	1.356	0	0	0	0	0
Kedurang Ilir	0	266	360	0	626	38	72	67	0	177
Seginim	1.800	508	66	0	2.374	10	0	0	0	10
Air Nipis	600	1.060	180	40	1.830	0	0	0	0	0
Pino	0	20	90	420	530	500	0	10	0	510
Ulu Manna	0	0	160	213	373	211	0	0	0	211
Pino Raya	0	125	125	387	637	646	0	85	0	731
Jumlah/ 2015	3.756	2.003	1.110	1.262	8.131	2.671	72	162	0	2.905
2014	3.669	2.015	1.314	1.282	8.280	2.724	84	202	0	3.010
2013	3.669	2.015	1.314	1.282	8.280	2.724	84	202	0	3.010
2012	3.669	2.015	1.314	1.282	8.280	2.724	84	202	0	3.010
2011	3.427	1.773	1.948	896	8.044	2.969	84	193	0	3.246

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015



Dihat dari data diatas luas lahan sawah irigasi maupun non irigasi pada tahun 2015 telah mengalami pengurangan, yaitu dari 8.280 hektar menjadi 8.131 hektar untuk lahan sawah irigasi dan 3.010 hektar menjadi 2.905 hektar untuk lahan sawah non irigasi. Hasil identifikasi dengan pencitraan satelit oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2015 menunjukkan bahwa luas lahan sawah telah mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan telah terjadi alih fungsi penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah atau menjadi lahan bukan pertanian. Selain karena pertumbuhan penduduk dan sarana perumahan, penurunan debit air irigasi/ non irigasi diduga menjadi penyebab alih fungsi lahan.

Tabel 2.4
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2011 - 2015

No	Kecamatan	Produksi (Ton)		
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
1	Manna	4.086	-	4.086
2	Bunga Mas	5.895	3	5.898
3	Kota Manna	1.899	-	1.899
4	Pasar Manna	1.186	-	1.186
5	Kedurang	12.687	-	12.687
6	Kedurang Ilir	4.970	125	5.095
7	Seginim	16.630	-	16.630
8	Air Nipis	16.777	-	16.777
9	Pino	8.846	-	8.846
10	Ulu Manna	3.699	18	3.717
11	Pino Raya	11.378	463	11.841
Jumlah/ 2015*		88.053	609	88.662
2014		87.393	705	88.098
2013		70.537	741	71.278
2012		77.102	1.385	78.486
2011		65.386	1.255	66.641

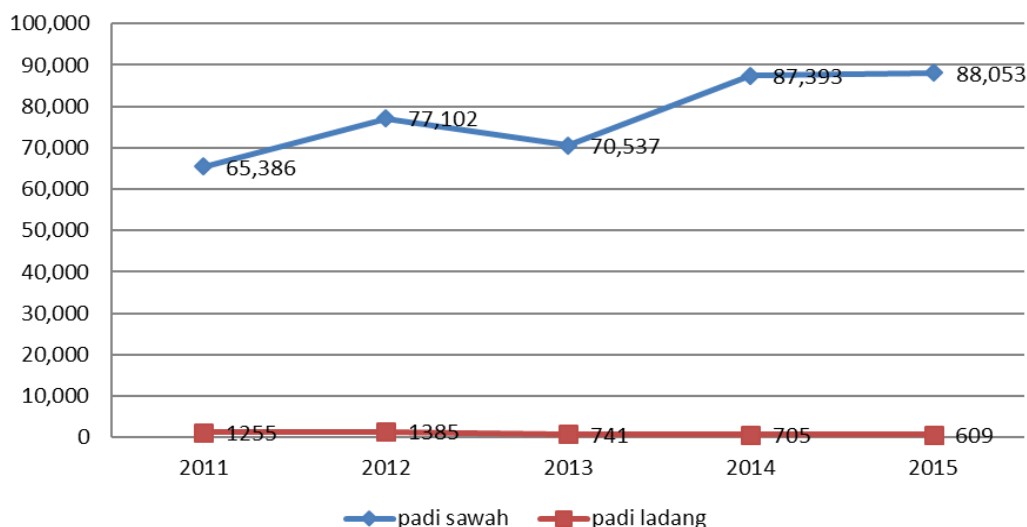
Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

*Angka sementara Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan Air Nipis, Seginim, dan Kedurang merupakan sentra produksi beras yang utama di Kabupaten Bengkulu Selatan masing-masing dengan produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 16.777 ton, 16.630 ton dan 12.687 ton. Salah satu faktor pendukung peningkatan produksi padi di wilayah ini adalah ketersediaan sumber air dan sarana irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh petani selain penggunaan varietas padi unggulan dan pengolahan lahan yang baik. Trend perkembangan produksi padi pada kurun 2011 – 2015 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.2
Produksi Padi Sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015



Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Gambar di atas menunjukkan produksi padi di Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung meningkat setiap tahun. Sebagaimana tercatat pada BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015 tercatat angka sementara produksi padi sawah sebesar 88.053 ton meningkat jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 65.386 ton. Sebaliknya, produksi padi ladang cenderung mengalami penurunan dari 1.255 ton pada tahun 2011 menjadi 609 ton pada tahun 2015.

Pada Tahun 2015 produktivitas padi sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan angka sementara (ASEM 2015) berada pada 5,01 ton/ha diatas rata – rata produktivitas Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 4,4 ton/ha, namun masih dibawah rata –rata produktivitas sekala Nasional yaitu sebesar 5,3 ton/ha. Sedangkan berdasarkan angka tetap (ATAP 2014) produktivitas padi sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan diatas rata – rata Provinsi dan Nasional yaitu 4,0 ton/ha dan 4,4 ton/ha.

Tabel 2.5
Produksi dan Konsumsi Beras Tahun 2013-2015

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Produksi padi sawah dan padi ladang	78.486 ton	88.307 ton	88.662 ton
2	Produksi beras	44.497 ton	50.229 ton	50.431 ton
3	Jumlah penduduk	147.106 jiwa	148.854 jiwa	150.601 jiwa
4	Kebutuhan perkapita pertahun	140 kg	140 kg	140 kg
5	Jumlah kebutuhan beras	20.615 ton	20.839 ton	21.084 ton
6	Surplus Beras	23.882 ton	29.390 ton	29.347 ton

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2015



Pada tahun 2015 terjadi peningkatan produksi padi di Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 335 ton jika dibandingkan tahun 2014. Dimana produksi padi tahun 2014 sebesar 88.307 ton sementara tahun 2015 sebesar 88.602 ton. Dengan produksi beras 50.431 ton dan konsumsi beras perkapita pertahun 140 kg, maka Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami surplus 29.347 ton beras.

Dengan kondisi produktivitas padi sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dipaparkan diatas, menunjukkan potensi yang besar dilakukannya pengelolaan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah bagi produksi sawah (beras), sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu pengelolaan pasca panen yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan program *packaging* untuk beras. Hal ini dilakukan agar produksi padi Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki daya saing dan mampu masuk ke pasar regional.

2.1.2.2. Perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu penyumbang pada pendapatan regional yang cukup berperan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Umumnya setiap kecamatan memiliki potensi perkebunan dengan berbagai jenis komoditi unggulan, seperti: kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan kelapa. Beberapa komoditas perkebunan lainnya juga diusahakan walaupun relatif kecil seperti lada, kayu manis, cengkeh, kemiri, pinang, aren, nilam dan jahe. Tanaman kelapa sawit adalah komoditi perkebunan yang paling dominan di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu seluas 14.276,37 ha, dan selanjutnya tanaman karet seluas 4.637,5 ha.

Usaha perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Selatan selain diusahakan oleh rumah tangga pertanian, ada juga yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan bekerjasama dengan petani di wilayah setempat (perkebunan inti rakyat). Sejak tahun 2013, hasil perkebunan seperti buah tandan segar kelapa sawit hampir tidak lagi dijual ke pabrik pengolahan sawit di luar kabupaten. Dengan demikian, hasil panen kelapa sawit masyarakat dapat ditampung dan diolah di daerah sendiri sehingga dapat mengurangi biaya transportasi yang tinggi. Kedua pabrik pengolahan buah tandan segar kelapa sawit itu adalah PT. Sinar Bengkulu Selatan di Kecamatan Pino Raya dengan kapasitas produksi maksimum 60 ton per jam dan PT. Bengkulu Selatan Lestari di Kecamatan Kedurang Ilir dengan kapasitas maksimum 30 ton per jam. Selain memproduksi CPO (*crude palm oil*) dan inti sawit (*kernel*) sebagai produk utama, pabrik juga mengeluarkan produk ikutan berupa kerak boiler, abu jongkos, dan cangkang sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar penggerak turbin. Saat ini kedua pabrik dilaporkan masih kekurangan pasokan bahan baku utama untuk memaksimalkan produktifitas pabriknya. Ke depan, diharapkan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memproduksi produk jadi sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat.

Berikut ini gambaran mengenai luas tanaman perkebunan rakyat menurut kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan:



Tabel 2.6
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Perkebunan dan Kec (Ha) Tahun 2011 - 2015

Kecamatan	Jenis Tanaman Perkebunan								
	Kopi	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Cengkeh	Lada	Coklat	Kayu Manis	Kemiri
Manna	68	121,5	133	1.421	1	-	67	-	-
Bunga Mas	12	701	61	1.566	-	-	75	-	-
Kota Manna	7	110	46	705,3	1,95	-	91	-	-
Pasar Manna	4	12	25,5	134	1	-	9	-	-
Kedurang	772	469	101,55	546	16,5	-	198	2	-
Kedurang Ilir	107	1.083	38,05	1.565	3,7	-	61	2	2
Seginim	130	145	133	277	0,5	1,5	90	-	-
Air Nipis	613	137	98,5	439,5	-	-	141,5	7	12,5
Pino	75	487,5	50	1.189,07	6	5	244	-	-
Ulu Manna	656	925	84	924	-	13	203	-	-
Pino Raya	227	463,5	181	5.325,5	4	5,5	242	-	4,25
Jumlah/ 2015*	2.700	4.637,5	956,6	14.276,40	34,65	25	1.421,5	11	18,75
2014	2.671	4.654,5	951,6	14.092,37	27,7	28,2	1.464	11	18,75
2013	2.716,5	4.608	951	13.729,87	25,20	37,2	1.473	15,65	19,25
2012	2.847	4.605	928,5	13.594,1	46,55	253,5	1.578,5	25,25	2,5
2011	2.965	4.585	1.024	13.806,3	48,3	130,25	1.529,75	41	34,75

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

*Laporan tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015



Tabel diatas menunjukkan luas tanaman perkebunan rakyat yang terbesar adalah komoditi kelapa sawit yang terdapat di Kecamatan Pino Raya dengan luas 5.325,5 Ha secara keseluruhan luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sekitar 14.276,40 Ha. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan memilih kelapa sawit sebagai tanaman komoditi unggulan perkebunan, melihat tingginya minat masyarakat untuk menanam kelapa sawit maka perlu penataan pemanfaatan lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan dan menghindari alih fungsi lahan.

Tabel 2.7.
Jumlah Produksi dan Produktivitas Beberapa Komoditi Perkebunan per Tahun, Tahun 2013 -2015

No	Komoditi	Produksi (Ton)			Produktivitas (Kg/Ha)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Kelapa Sawit	140.809.572,2	163.419.536,6	145.559.439,8	14.697	13.982	12.304
2	Karet	3.245.227,5	3.266.928	2.729.544	1.138,9	1.106,9	937,5
3	Kopi	3.245.227,5	1.491.915	1.568.733	1.106,9	586,0	616,7
4	Kelapa Dalam	813.136,5	862.488,1	862.488,1	1.142,2	1.150	1.151
5	Lada	5.860,5	4.927	3.559,5	232,6	197,1	142,4
6	Cengkeh	5.860	3.517,6	3.378,8	156,7	156,7	150,5
7	Pinang	125.539	118.292	118.292	620,2	577,9	577,9

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian 2015

Tabel diatas menunjukkan tingkat produksi berbagai komoditi perkebunan, komoditi yang paling besar produktivitasnya adalah kelapa sawit dengan produktivitas pertahun mencapai 12.304 Kg/Ha/Tahun atau sebesar 1.03 Ton/Ha/Bulan pada tahun 2015. Produktivitas kelapa sawit masih rendah hal ini disebabkan teknik budidaya dan pemeliharaan belum dilakukan secara intensif terutama pemeliharaan.

Produktivitas kelapa sawit yang merupakan komoditi primadona bagi masyarakat masih jauh dari produktivitas yang seharusnya secara teknis untuk luasan 1 ha mampu memproduksi pada kisaran 1,5-2,5 ton/ha/bulan.

2.1.2.3. Pertambangan dan Industri

Dibidang pertambangan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi bahan tambang yang prospeknya cukup baik untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan di masa yang akan datang sebagai penopang sumber perekonomian daerah. Akan tetapi dari potensi tersebut sampai saat ini baru bahan tambang galian C yang di eksploitasi. Kedepan diharapkan potensi-potensi yang masih terkandung di dalam perut bumi Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dieksploitasi dengan baik dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten yang maju, mandiri dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Eksplorasi dan pemanfaatan bahan galian pertambangan harus mendapat perhatian yang lebih dari para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah dan investor dengan tetap mengedepankan prinsip sustainable development serta kepentingan masyarakat, sehingga nantinya tidak akan memunculkan permasalahan dan ketidaksesuaian dengan kehendak masyarakat, yang mana pada saat ini masih sering



terjadi konflik berkaitan dengan usaha pertambangan galian C.

Beberapa potensi bahan galian pertambangan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Bahan Galian	Lokasi
1.	Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang Disekitar Air Bengkenang, Hulu Air Luwangan Pematang Gaung
2.	Batu Sarak/Batu Tulis	Desa Tanjung Tengah, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3.	Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4.	Posphat Guano	Gua Dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang
5.	Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6.	Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7.	Andesit	Bukit Raja Mendara (2.000 Ha)
8.	Marmer	Desa Sukarami Kec. Seginim
9.	Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10.	Batu Rijang	Hulu Air Bengkenang
11.	Mineral Ubahan	- Dijumpai di tempat-tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang - Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12.	Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masat
13.	Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14.	Minyak (Blok Bengkulu)	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur
15.	Emas	Seginim, Ulu Manna, Kedurang

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Kabupaten Bengkulu Selatan selain memiliki potensi bahan tambang yang masih memungkinkan untuk dikelola juga memiliki potensi sumber daya manusia produktif yang dapat mengeksplorasi produk-produk bahan-bahan pertambangan yang sampai saat ini belum termanfaatkan secara optimal.

Dibidang industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung ada di setiap kecamatan dengan jenis usaha industri yang beraneka ragam. Namun yang lebih mendominasi adalah jenis usaha kelompok Industri Aneka (IA) diantaranya bergerak dalam bidang meubeler, produksi makanan dan minuman, jasa, serta produksi bahan bangunan seperti batu bata. Usaha ini masih seadanya dan belum dikembangkan secara optimal.



Tabel 2.9.
Jumlah Usaha Industri Menurut Jenis Industri dan Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	Jumlah
1	Manna	7	16	1	24
2	Bunga Mas	-	3	1	4
3	Kota Manna	9	165	15	189
4	Pasar Manna	-	53	1	59
5	Kedurang	-	1	1	2
6	Kedurang Ilir	14	3	1	18
7	Seginim	1	5	3	9
8	Air Nipis	-	2	1	3
9	Pino	-	8	1	9
10	Ulu Manna	-	5	2	7
11	Pino Raya	-	5	2	7
Jumlah		31	266	29	321

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

2.1.2.4. Perikanan dan Kelautan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi menjadi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perairan umum. Potensi perikanan budidaya tampak berkembang khususnya di Kecamatan Air Nipis dan Seginim. Sedangkan untuk potensi perikanan laut hanya ada di lima kecamatan yaitu Kecamatan Manna, Bunga Mas, Kota Manna, Pasar Manna, Kedurang Ilir, dan Pino Raya. Berikut ini data produksi perikanan darat menurut kecamatan:

Tabel 2.10.
Produksi Perikanan Budidaya dan Perairan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2015

No	Kecamatan	Produksi (Ton)
1	Manna	102,00
2	Bunga Mas	8,00
3	Kota Manna	386,00
4	Pasar Manna	180,00
5	Kedurang	3.231,00
6	Kedurang Ilir	1.387,00
7	Seginim	4.709,00
8	Air Nipis	5.789,00
9	Pino	512,00
10	Ulu Manna	283,00
11	Pino Raya	298,00
Jumlah/ 2015		16.885,00
2014		5.384,21
2013		6.520,12
2011		5.384,21
2010		4.128,01

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015



Tabel diatas menunjukan wilayah yang memiliki produksi perikanan budidaya dan perikanan darat yang terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu Kecamatan Air Nipis sebesar 5.789 ton, Kecamatan Seginim sebesar 4.709 ton, dan Kecamatan Kedurang sebesar 3.231 ton. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung diantaranya tersedianya sumber air sebagai tempat usaha dan sumber daya alam yang sesuai dengan habitat ikan, permintaan akan konsumsi ikan air tawar yang semakin meningkat, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena itu, pemerintah daerah telah menetapkan kawasan Seginim, Air Nipis dan Kedurang sebagai kawasan Minapolitan dengan Keputusan Bupati Nomor : 250/408 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Selatan. Fluktuasi produksi Perikanan Budidaya sangat dipengaruhi oleh debit air irigasi yang saat ini telah mengalami penurunan debit air karena degradasi lahan dan hutan.

Tabel 2.11.
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Tahun 2011 -2015

No	Kecamatan	Produksi (Ton)
1	Manna	41,38
2	Bunga Mas	43,20
3	Kota Manna	29,30
4	Pasar Manna	1.206,65
5	Kedurang	-
6	Kedurang Ilir	98,28
7	Seginim	-
8	Air Nipis	-
9	Pino	-
10	Ulu Manna	-
11	Pino Raya	-
Jumlah/ 2015		1 559,63
2014		1.774,25
2013		1.222,25
2012		1.088,42
2011		1.189,82

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Produksi perikanan tangkap yang dihasilkan mengalami peningkatan sejak 2011 yaitu sebesar 1.189,82 ton pada tahun 2011, meningkat menjadi 1.774,25 ton pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap dilaporkan menurun menjadi 1.559,63 ton. Fluktuasi produksi ikan ini selain dipengaruhi oleh jumlah ikan yang memang menurun populasinya, kondisi alam yang tidak menentu, juga disebabkan oleh peralatan tangkap nelayan yang masih kurang memadai. Kendala lainnya adalah kondisi fisik muara sungai Air Manna sebagai alur masuk ke tempat pusat pendaratan kapal atau pelabuhan perikanan dalam kondisi dangkal sehingga tidak dapat dilalui oleh kapal dengan kapasitas diatas 5 GT – 30 GT dan selama ini hanya dapat dioperasikan kapal dibawah 3 GT. Produksi perikanan tangkap masih dapat ditingkatkan jika pemerintah daerah mampu mengatasi kendala yang ada salah satunya adalah dengan membangun dermaga (pelabuhan pendaratan kapal), karena Bengkulu Selatan memiliki potensi kelautan dengan panjang garis pantai mencapai 60 km.



Melihat potensi perikanan budidaya dan perairan umum serta perikanan tangkap yang ada, Kabupaten Bengkulu Selatan bisa menjadi lumbung perikanan dengan penerapan strategi pengembangan wilayah berbasis kawasan minapolitan, peningkatan akses pusat pendaratan ikan serta penyediaan peralatan tangkap yang lebih baik.

Tabel 2.12.
Jumlah Perahu Penangkap Ikan Menurut Jenis Perahu dan Kecamatan
Tahun 2011 - 2015

No	Kecamatan	Jenis Perahu/Kapal Penangkap Ikan			
		Perahu Tidak Bermotor	Motor Tempel	Kapal Motor	Jumlah
1	Manna	6	-	-	6
2	Bunga Mas	-	-	-	-
3	Kota Manna	-	7	-	7
4	Pasar Manna	4	130	-	134
5	Kedurang	-	-	-	-
6	Kedurang Ilir	-	3	-	3
7	Seginim	-	-	-	-
8	Air Nipis	-	-	-	-
9	Pino	-	-	-	-
10	Ulu Manna	-	-	-	-
11	Pino Raya	2	4	-	6
	Jumlah/ 2015	12	144	-	156
	2014	6	130	-	136
	2013	6	140	-	146
	2012	6	136	-	142
	2011	10	117	4	131

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan skala kecil dengan menggunakan perahu tradisional. Hampir seluruhnya terbuat dari kayu dan terbuka tanpa geladak. Pada tahun 2015, jumlah perahu tradisional yang menggunakan motor tempel ada sekitar 144 unit dan sisanya 12 unit perahu tanpa mesin bermotor. Seluruhnya masih di bawah kapasitas 3 GT ke bawah. Tabel diatas menunjukkan bahwa sekitar 86 persen perahu tradisional tersebut berada di Kecamatan Pasar Manna.

Tabel 2.13.
Jumlah Alat Penangkap Ikan Perairan Tangkap Menurut Jenisnya
Tahun 2012 - 2015

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Gill Net	5.621	5.900	5.200	5.090
2	Gill Net Dasar	3.841	4.000	4.080	4.100
3	Gill Net Permukaan	3.693	4.500	4.520	4.580
4	Pancing	1.980	1.990	2.014	2.114
5	Rawai	3.850	3.856	3.954	4.015
6	Bubu	25	25	-	-
7	Jaring Hiu	-	-	-	-
8	Jaring Milenium	400	450	484	493
9	Jaring Udang	197	197	208	214
10	Jaring Bawal	125	135	206	197
11	Lainnya	-	-	-	-

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015



Pada perairan tangkap, beberapa peralatan tangkap digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan atau hewan laut lainnya. Tabel diatas menunjukkan jumlah peralatan tangkap berdasarkan jenis alat tangkap di Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut data tahun 2012 – 2015, jumlah peralatan tangkap cenderung meningkat. Pada tahun 2015, jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan adalah jaring insang (*gill net*) sebanyak 5.090 unit, *gill net* permukaan sebanyak 4.580 unit, dan *gill net* dasar sebanyak 4.100 unit. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, jumlah penduduk yang bekerja di sub sektor perikanan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.879 nelayan perikanan tangkap dan 2.631 nelayan perikanan darat.

Tabel 2.14.
Tempat Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Tempat Pendaratan Ikan	Tempat Pelelangan Ikan	Desa/Kel
1	Manna	-	-	-
2	Bunga Mas	-	-	-
3	Kota Manna	-	-	-
4	Pasar Manna	1	1	Kel Ps Bawah
5	Kedurang	-	-	-
6	Kedurang Ilir	-	-	-
7	Seginim	-	-	-
8	Air Nipis	-	-	-
9	Pino	-	-	-
10	Ulu Manna	-	-	-
11	Pino Raya	-	-	-
Jumlah		1	1	

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan, 2015

Pada tabel diatas diketahui bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan hanya memiliki tempat pendaratan ikan serta tempat pelelangan ikan sebanyak 1 (satu) unit di Kecamatan Pasar Manna, ini menunjukkan masih kurangnya fasilitas yang dimiliki daerah sehingga mempengaruhi jumlah produksi perikanan laut.

2.1.2.5. Peternakan

Sub sektor peternakan memiliki potensi yang cukup besar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berbagai jenis ternak dan unggas diusahakan oleh rumah tangga pertanian baik pada skala besar maupun kecil (peternakan pribadi). Pada komponen pendapatan regional, sub kategori peternakan adalah bagian dari lapangan usaha atau kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berperan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis ternak yang paling banyak diusahakan adalah sapi dan kerbau, sedangkan kelompok unggas seperti ayam buras dan ayam ras pedaging. Jumlah populasi ternak dan unggas di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.15.
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak/ Unggas Tahun 2015

No	Kecamatan	Jenis Ternak dan Unggas					
		Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	Manna	2.187	466	2.080	23 660	0	1.568
2	Bunga Mas	1.985	512	1.946	25.557	0	1.378
3	Kota Manna	1.178	238	798	76.879	10.626	1.078
4	Pasar Manna	758	253	624	13.609	3.471	1.162
5	Kedurang	710	339	1.041	5.633	27.217	1.280
6	Kedurang Ilir	1.264	565	1.910	33.355	29.755	1.433
7	Seginim	1.257	434	3.040	29.678	3.222	6.495
8	Air Nipis	876	262	1.763	17.849	1.740	3.334
9	Pino	1.201	332	2.074	8.420	12.738	1.152
10	Ulu Manna	217	192	1.101	16.010	0	1.210
11	Pino Raya	2.447	278	2.480	45.837	0	2.736
Jumlah		14.080	3.871	18.857	296.487	88.769	22.826

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Dari tabel diatas populasi ternak berada diseluruh kecamatan akan tetapi populasi sapi terbesar di Kecamatan Pino Raya sebanyak 2.447 ekor sedangkan populasi ternak kerbau terbanyak di Kecamatan Kedurang Ilir sebanyak 565 ekor, untuk populasi kambing terbanyak di Kecamatan Seginim sebanyak 3.040 ekor, sementara populasi ayam buras terbanyak di Kecamatan Kota Manna yaitu sebesar 70.879 ekor, populasi ayam ras pedaging terbanyak di Kecamatan Kedurang Ilir sebanyak 29.755 ekor dan Kecamatan Seginim memiliki populasi itik terbesar dengan jumlah 6.495 ekor.

Tabel 2.16.
Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Daging Ternak Tahun 2011 - 2015

Kecamatan	Jenis Daging Ternak (Ton)					Jumlah
	Sapi	Kuda	Kerbau	Kambing	Domba	
Manna	18,38	-	12,59	2,08	-	33,05
Bunga Mas	16,69	-	13,83	1,94	-	32,46
Kota Manna	9,91	-	6,42	0,80	-	17,13
Pasar Manna	6,37	-	6,84	0,62	-	13,83
Kedurang	5,96	-	9,16	1,04	0,07	16,23
Kedurang Ilir	10,63	-	15,26	1,91	-	27,80
Seginim	10,57	-	11,76	3,04	-	25,37
Air Nipis	7,36	-	7,09	1,76	0,02	16,23
Pino	10,96	-	8,97	2,07	-	22,00
Ulu Manna	1,82	-	5,17	1,10	-	8,09
Pino Raya	20,57	-	7,51	2,48	0,17	30,73
Jumlah/ 2015	177,13	-	209,87	37,33	0,36	424,74
2014	177,13	-	209,87	37,33	0,36	424,74
2013	171,11	-	201,09	26,72	0,36	399,28
2012	148,05	-	61,88	40,38	0,43	250,74
2011	181,17	-	148,50	28,63	0,23	358,53

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015



Tabel 2.17.
Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Daging Unggas
Tahun 2011 - 2015

Kecamatan	Jenis Daging Unggas (Ton)					Jumlah
	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila	Entok	
Manna	3,59	-	-	0,19	0,17	3,95
Bunga Mas	3,88	0,03	-	0,17	0,15	4,23
Kota Manna	11,68	-	7,09	0,13	0,12	11,93
Pasar Manna	2,07	-	2,32	0,14	0,13	2,34
Kedurang	0,86	-	18,15	0,15	0,14	1,15
Kedurang Ilir	5,07	-	19,85	0,17	0,16	5,40
Seginim	4,51	-	2,15	0,78	0,71	6,00
Air Nipis	2,71	-	1,16	0,48	0,37	3,56
Pino	1,28	-	8,50	0,14	0,13	1,55
Ulu Manna	2,43	-	-	0,15	0,13	2,71
Pino Raya	6,96	-	-	0,33	0,30	7,59
Jumlah/ 2015	45,04	0,03	59,22	2,83	2,51	50,41
2014	76,83	0,03	92,40	6,23	4,52	180,01
2013	79,31	0,03	88,83			168,14
2012	82,35	0,030	86,23	0,80		169,41
2011	26,64	0,020	197,26	3,88		227,80

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Dilihat dari tabel diatas jumlah produksi daging dari beberapa jenis ternak pada tahun 2011 sebanyak 358,53 ton, namun menurun pada tahun 2015 menjadi sebanyak 242,92 ton. Untuk produksi daging dari beberapa jenis unggas mengalami penurunan. Pada tahun 2011 produksi daging unggas (belum termasuk entok) tercatat sebanyak 227,8 ton, turun menjadi 50,41 ton pada tahun 2015. Namun demikian, jumlah ini belum termasuk jumlah populasi unggas dari peternakan kemitraan yang dalam beberapa tahun terakhir meningkat sangat pesat. Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2015 diperkirakan ada sekitar 500.000 ekor ayam potong kemitraan telah diproduksi.



Tabel 2.18.
Konsumsi Daging Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak-Unggas Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Daging Ternak (Ton)										
	Sapi	Kuda	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/ Itik Manila	Entok
Manna	14,02	-	11,96	1,97	-	-	1,58	-	7,53	0,28	0,33
Bunga Mas	8,85	-	13,14	1,85	-	-	1,06	-	8,07	0,17	0,19
Kota Manna	5,60	-	6,10	0,76	-	-	1,06	0,03	5,25	0,10	0,12
Pasar Manna	12,47	-	6,49	0,59	-	-	1,58	-	11,43	0,23	0,27
Kedurang	7,85	-	8,70	0,99	0,07	-	1,06	-	7,25	0,13	0,16
Kedurang Ilir	9,21	-	14,50	1,81	-	-	1,06	-	8,43	0,25	0,29
Seginim	5,67	-	11,12	2,88	-	-	0,53	-	5,11	0,12	0,14
Air Nipis	14,79	-	6,73	1,67	0,02	-	0,53	-	13,43	0,22	0,25
Pino	10,15	-	8,52	1,97	-	-	1,06	-	9,38	0,30	0,35
Ulu Manna	4,67	-	4,92	1,04	-	-	0,53	-	4,14	0,07	0,08
Pino Raya	19,16	-	7,13	2,35	0,16	-	2,12	-	17,42	0,35	0,41
Jumlah	112,44	-	99,31	17,88	0,25	-	12,17	0,03	97,44	2,22	2,59

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015



Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa konsumsi daging masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan didominasi oleh hasil produksi dari sapi, kerbau dan ayam ras. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi daging ternak pada tahun 2015 tercatat sapi 112,44 ton, kerbau 99,31 ton dan ayam ras pedaging 97,44 ton. Jika komoditi hasil peternakan ayam potong kemitraan diperhitungkan produksinya maka akan ada kelebihan produksi daging di daerah ini. Selebihnya akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan daging di luar kabupaten atau provinsi. Jika melihat standar kecukupan gizi, daya akses masyarakat masih tergolong rendah. Standar kecukupan gizi nasional saat ini sebesar 4,9 kg/kapita/tahun, sedangkan saat ini tingkat konsumsi masyarakat hanya sebesar 2,65 kg/kapita/tahun.

2.1.2.6. Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Agama

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kabupaten induk yang kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas wilayah sebesar 1.186,10Km², yang berdasarkan administrasi pemerintahan memiliki 11 kecamatan dengan luas masing-masing seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19.
Nama Ibukota Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Manna	Kayu Kunyit
2	Bunga Mas	Gindo Suli
3	Kota Manna	Kota Medan
4	Pasar Manna	Pasar Bawah
5	Kedurang	Tanjung Alam
6	Kedurang Ilir	Lubuk Ladung
7	Seginim	Pasar Baru
8	Air Nipis	Suka Negeri
9	Pino	Masat
10	Ulu Manna	Simpang Pino
11	Pino Raya	Pasar Pino

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Dari 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 142 Desa dan 16 Kelurahan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan secara merata pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan pembangunan dari pinggiran (desa). Hal ini terlihat dari diluncurkannya Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

Kecamatan Kedurang memiliki 19 Desa, yaitu :

1. Desa Lawang Agung
2. Desa Durian Sebatang
3. Desa Pajar Bulan
11. Desa Rantau Sialang
12. Desa Batu Ampar
13. Desa Muara Tiga Ilir



4. Desa Tanjung Besar
5. Desa Muara Tiga
6. Desa Suka Nanti
7. Desa Tanjung Negara
8. Desa Tanjung Alam
9. Desa Keban Agung III
10. Desa Bumi Agung

14. Desa Nanti Agung
15. Desa Karang Agung
16. Desa Lubuk Resam
17. Desa Keban Agung II
18. Desa Keban Agung I
19. Desa Palak Siring

Kecamatan Kedurang Ilir memiliki 12 Desa, yaitu :

1. Desa Lubuk Ladung
2. Desa Air Sulau
3. Desa Suka Jaya
4. Desa Sukaraja
5. Desa Limus
6. Desa Penindaian
7. Desa Padang Bindu
8. Desa Nanjungan
9. Desa Pagar Banyu
10. Desa Suka Rami
11. Desa Betungan
12. Desa Karang Caya

Kecamatan Seginim memiliki 1 Kelurahan dan 22 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Pasar Baru
2. Desa Muara Payang
3. Desa Durian Seginim
4. Desa Banding Agung
5. Desa Pajar Bulan
6. Desa Padang Lebar
7. Desa Dusun Tengah
8. Desa Padang Siring
9. Desa Tanjung Menang
10. Desa Gunung Ayu
11. Desa Kota Bumi Baru
12. Desa Sukaraja
13. Desa Muara Pulutan
14. Desa Darat Sawah
15. Desa Kota Agung
16. Desa Muara Danau
17. Desa Babatan Ilir
18. Desa Babatan Ulu
19. Desa Tanjung Agung
20. Desa Dusun Baru
21. Desa Darat Sawah Ulu
22. Desa Sindang Bulan

Kecamatan Air Nipis memiliki 10 Desa, yaitu :

1. Desa Suka Bandung
2. Desa Maras
3. Desa Keban Jati
4. Desa Tanjung Beringin
5. Desa Palak Bengkerung
6. Desa Penandingan
7. Desa Suka Negeri
8. Desa Suka Rami
9. Desa Suka Maju
10. Desa Pino Baru

Kecamatan Pino memiliki 1 Kelurahan dan 15 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Masat
2. Desa Anggut
3. Desa Gedung Agung
4. Desa Tanjung Eran
5. Desa Tanung Aur I
6. Desa Puding
7. Desa Air Umban
8. Desa Padang Lebar
9. Desa Ulak Lebar
10. Desa Sebito
11. Desa Ganjuh
12. Desa Kota Bumi
13. Desa Batu Bandung
14. Desa Beringin Datar
15. Desa Padang Mumpo
16. Desa Padang Tambak

Kecamatan Ulu Manna memiliki 10 Desa, yaitu :

1. Desa Batu Panco
2. Desa Batu Kuning
3. Desa Bandar Agung
4. Desa Merambung
5. Desa Simpang Pino
6. Desa Talang Tinggi
7. Desa Kaban Jati
8. Desa Lubuk Tapi
9. Desa Kayu Ajaran
10. Desa Air Tenam



Kecamatan Pino Raya memiliki 21 Desa yaitu :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Desa Tanggo Raso | 12. Desa Napal Melintang |
| 2. Desa Air Kemang | 13. Desa Serang Bulan |
| 3. Desa Bandung Ayu | 14. Desa Kemang Manis |
| 4. Desa Tungkal I | 15. Desa Suka Bandung |
| 5. Desa Talang Padang | 16. Desa Cinto Mandi |
| 6. Desa Pasar Pino | 17. Desa Pagar Gading |
| 7. Desa Selali | 18. Desa Kembang Seri |
| 8. Desa Nanjungan | 19. Tanjung Aur II |
| 9. Telaga Dalam | 20. Padang Beriang |
| 10. Padang Serasan | 21. Desa Karang Cayo |
| 11. Tungkal II | |

Kecamatan Manna memiliki 1 Kelurahan dan 17 Desa, yaitu :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Kelurahan Kayu Kunyit | 10. Desa Mela'o |
| 2. Desa Terulung | 11. Desa Gunung Sakti |
| 3. Desa Manggul | 12. Desa Jeranglah Rendah |
| 4. Desa Tanjung Besar | 13. Desa Jeranglah Tinggi |
| 5. Desa Lubuk Sirih Ulu | 14. Desa Kembang Ayun |
| 6. Desa Lubuk Sirih Ilir | 15. Desa Tambangan |
| 7. Desa Tanjung Raman | 16. Desa Gunung Kembang |
| 8. Desa Ketaping | 17. Desa Padang Manis |
| 9. Desa Kota padang | 18. Desa Padang Pandan |

Kecamatan Bunga Mas memiliki 10 Desa, yaitu :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Desa Tumbuk Tebing | 6. Desa Tanjung Tebat |
| 2. Desa Padang Burnai | 7. Desa Padang Jawi |
| 3. Desa Gunung Kayo | 8. Desa Tanjung Aur |
| 4. Desa Gindo Suli | 9. Desa Padang Nibung |
| 5. Desa Talang Indah | 10. Desa Kuripan |

Kecamatan Kota Manna memiliki 6 Kelurahan dan 5 Desa, yaitu :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Kelurahan Kampung Baru | 7. Desa Tebat Kubu |
| 2. Kelurahan Padang Kapuk | 8. Desa Gelumbang |
| 3. Kelurahan Pasar Baru | 9. Desa Pagar Dewa |
| 4. Kelurahan Kota Medan | 10. Desa Padang Niur |
| 5. Kelurahan Gunung Ayu | 11. Desa Padang Berangin |
| 6. Kelurahan Ibul | |

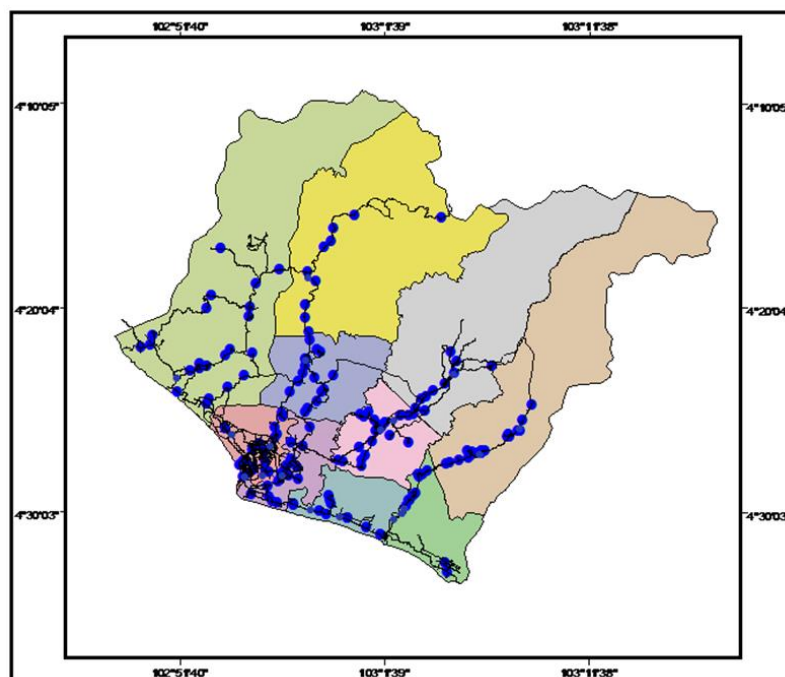
Kecamatan Pasar Manna memiliki 7 Kelurahan dan 2 Desa, yaitu :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Kelurahan Pasar Bawah | 6. Kelurahan Pasar Mulia |
| 2. Kelurahan Gunung Mesir | 7. Kelurahan Tanjung Mulia |
| 3. Kelurahan Ketapang Besar | 8. Desa Batu Kuning |
| 4. Kelurahan Padang Sialang | 9. Desa Batu Lambang |
| 5. Kelurahan Belakang Gedung | |

Berikut ini kantor atau pusat desa di Kabupaten Bengkulu selatan dalam peta tematik.



Gambar 2.3.
Peta tematik kantor atau pusat desa/ kelurahan di Kabupaten Bengkulu Selatan



Jumlah Instansi Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.20.
Daftar Nama Dinas/Instansi/Badan se Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Instansi	Alamat
1	Sekretariat Daerah	Jl Raya Padang Panjang No. 1 Manna
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl Affan Bachsin Manna (eks. Dinas Diknas)
3	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Jl Raya Padang Panjang (eks. Kantor Satpol PP Dan Korpri)
4	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	Jl Letnan Jahidin Manna (eks. Dinas Koperindag)
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jl Diponegoro No. 1 Manna (eks. Gedung Dinas PU)
6	Dinas Pertanian	Jl Letnan Tukiran No. 161 Manna (eks. Dinas Pertanian)
7	Dinas Perikanan	Jl Raya Padang Panjang (eks. DKP)
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Raya Padang Panjang(eks. Gedung Dinas DPPKAD)
9	Dinas Kesehatan	Jl Raya Padang Panjang
10	Dinas Sosial	Jl Kolonel Berlian Kota Medan (eks. Dinas Nakertransos)
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Jl. Fatmawati Manna (eks. Kantor KPTSP)
12	Dinas Perhubungan	Jl Serma Jakfar Manna(eks. Gedung Dinas Hubkominfo budpar)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jl Raya Padang Panjang (eks. Gedung



No	Nama Instansi	Alamat
		ULP)
14	Dinas Pariwisata	Jl Serma Jakfar Manna(eks. Gedung Dinas Hubkominfobudpar)
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl Zainab Bachmada Rustam
16	Sekretariat DPRD	Jl Fatmawati No. 1 Manna
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	Jl Affan Bachsin Manna (eks. Gedung Bappeda)
18	Inspektorat Daerah	Jl Affan Bachsin Manna
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jl Zainab Bachmada (eks. Gedung BMPD)
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jl Letnan Tukiran No. 151 Manna
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl Raya Padang Panjang (eks. Gedung BKD)
22	Badan Kesatuan Bangsa Politik	Jl Sersan M. Taha Manna
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl Kemas Jamaludin (eks. Kantor Perpusarda)
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Jl Raya Padang Panjang (eks. Gedung BP4K)
25	Dinas Ketahanan Pangan	Jl Zainab Bachmada (eks. Gedung DKPTK)
26	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Jl Raya Padang Panjang (eks. KLH)
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl Raya Padang Panjang Manna
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl Raya Padang Panjang (eks. Gedung Dinas Kehutanan Dan ESDM)
29	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Jl Diponegoro No. 1 Manna (eks. Gedung Bidang Pengairan Dinas PU)
30	Kecamatan Manna	Kel. Kayu Kunyit
31	Kecamatan Bunga Mas	Desa Gindo Suli
32	Kecamatan Kota Manna	Jl. Ahmad Yani Manna
33	Kecamatan Pasar Manna	Jl. Duayu Manna
34	Kecamatan Kedurang	Desa Tanjung Alam
35	Kecamatan Kedurang Ilir	Desa Lubuk Ladung
36	Kecamatan Seginim	Kel.Pasar Baru
37	Kecamatan Air Nipis	Desa Suka Negeri
38	Kecamatan Pino	Kel. Masat
39	Kecamatan Ulu Manna	Desa Simpang Pino
40	Kecamatan Pino Raya	Jl. Raya Manna – Bengkulu Km. 13

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 Dan Keputusan Bupati BS No.800.05/52 Tahun 2017

Tabel 2.21.
Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan
Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 - 2015

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
I	19	13	32
II	465	535	1.000
III	1.612	1.691	3.303
IV	824	626	1.450



Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
Jumlah/ 2015	2.920	2.865	5.785
2014	2.926	2.832	5.758
2013	3.271	2.414	5.685
2012	3.158	2.688	5.846
2011	3.153	2.850	6.003

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah PNS daerah cenderung berkurang selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 jumlah PNS daerah dari 6.003 pegawai turun menjadi 5.785 pegawai pada tahun 2015. Komposisi PNS daerah pada tahun 2015 yaitu 2.920 laki-laki dan 2.865 perempuan. Jumlah terbesar berada pada Golongan III sebanyak 55 persen dan terkecil adalah golongan I sebanyak 0,6 persen. Sekitar 69,2 persen pegawai daerah berpendidikan S1 keatas.

Selain kaya akan sumber daya alam, flora dan fauna Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki keanekaragaman seni, budaya dan adat istiadat. Selain kebudayaan lokal, proses asimilasi dari adanya migrasi penduduk mencerminkan kebhinekaan budaya nasional di daerah ini. Budaya dan adat istiadat lokal sebagai ciri khas daerah mampu berbaur, berpadu dan bekerjasama secara baik tanpa menimbulkan persoalan sosial atau konflik. Masing- masing pihak terjalin hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan berlangsung secara terus- menerus hingga saat ini. Hal ini tercermin misalnya pada prosesi 3 (tiga) siklus kehidupan manusia yaitu pada saat kelahiran (*aqiqah*), perkawinan (*walimatul ursy*) dan kematian (*takziyah*).

Suku melayu serawai adalah suku yang paling dominan di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sekitar 76,87 persen. Suku lainnya seperti melayu pasemah tercatat sekitar 13,39 persen sebagian besar menetap di wilayah Kecamatan Kedurang dan Kedurang Ilir. Berikut ini persentase suku/ anak suku yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 2.22.
Persentase Suku/ Anak Suku di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Suku	Persentase (%)
1	Melayu Serawai	76,87
2	Melayu Pasemah	13,39
3	Jawa	2,89
4	Minangkabau	2,21
5	Melayu lainnya	1,06
6	Sunda	0,95
7	Batak	0,73
8	Lainnya	1,89
	Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Penduduk 2000

Keberagaman suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi embrio munculnya beraneka macam kekayaan budaya dalam bentuk seni tradisi maupun adat istiadat yang apabila dikemas dan dikembangkan dengan baik akan dapat menjadi daya tarik wisata. Namun saat ini beberapa prosesi adat istiadat dan seni budaya lokal sudah mulai jarang dipentaskan sehingga diperlukan pembinaan dan upaya pelestariannya agar tidak



hilang. Berikut ini beberapa kekayaan seni budaya daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 2.23.
Kekayaan Seni Budaya (Tari-tarian dan Adat Istiadat)

No	Tari – Tarian	Adat Istiadat
1	Tari Sekapur Sirih	Seni Bedindang Mutus Tari
2	Tari Napa	Dundang Padi
3	Tari Rawas	Bimbang Adat
4	Tari Kain	Acara Kayiak Nari
5	Tari Piring	Berzanji
6	Tari Payung	Malam Gegerit
7	Tari Berempat	Padu Padan Kulau
8	Tari Setangan	
9	Tari Mak Inang	
10	Tari Andun	

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Selain keanekaragaman suku dan budaya ada, penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki keberagaman dalam keyakinan agama. Secara nyata terlihat bahwa kerukunan hidup antar umat beragama tetap terjaga dan terpelihara secara baik. Hal ini memberikan energi positif bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang saling asah, asih dan asuh. Mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan memeluk agama Islam yaitu sebanyak 98,79 persen penduduk dan sisanya 1,21 persen beragama non muslim seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Pemeluk Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Agama	Persentase (%)
1	Islam	98,79
2	Protestan	1,03
3	Katholik	0,16
4	Hindu	0,01
5	Budha	0,01

Sumber : Sensus Penduduk 2010

2.1.2.7. Pariwisata

Pada bidang kepariwisataan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi dan daya tarik wisata yang cukup besar, yang apabila dikelola dan dikembangkan secara maksimal akan mampu memberikan *value added* bagi daerah. Selain mampu mendatangkan wisatawan yang menikmati kekayaan alam, juga memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah dan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun saat ini upaya pengelolaan potensi wisata yang ada belum dilakukan secara maksimal oleh instansi terkait.



Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah, sebagai upaya mengembangkan potensi penggerak perekonomian masyarakat yang berpengaruh positif pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah. Secara nasional, pembangunan sektor pariwisata menjadi program prioritas sebagai upaya meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional.

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

Tabel 2.25.
Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Taman Merdeka	Jenderal Sudirman Kec. Kota Manna
4	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
5	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
6	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
7	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
8	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
9	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
10	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
11	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
12	Lubuk Supit	Desa Sukarami Kec. Air Nipis
13	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
14	Kolam Renang Pasar Bawah	Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
15	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
16	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
17	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
18	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
19	Telaga Rajak Besi	Kedurang
20	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
21	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
22	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
23	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
24	Danau Muara Danau	Desa Muara Danau Kecamatan Seginim
25	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
26	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2014-2025

Berdasarkan indikasi program penataan ruang bidang pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kerangka Acuan Kerja penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berbasis Tahun 2013 maka diprioritaskan untuk pengembangan :

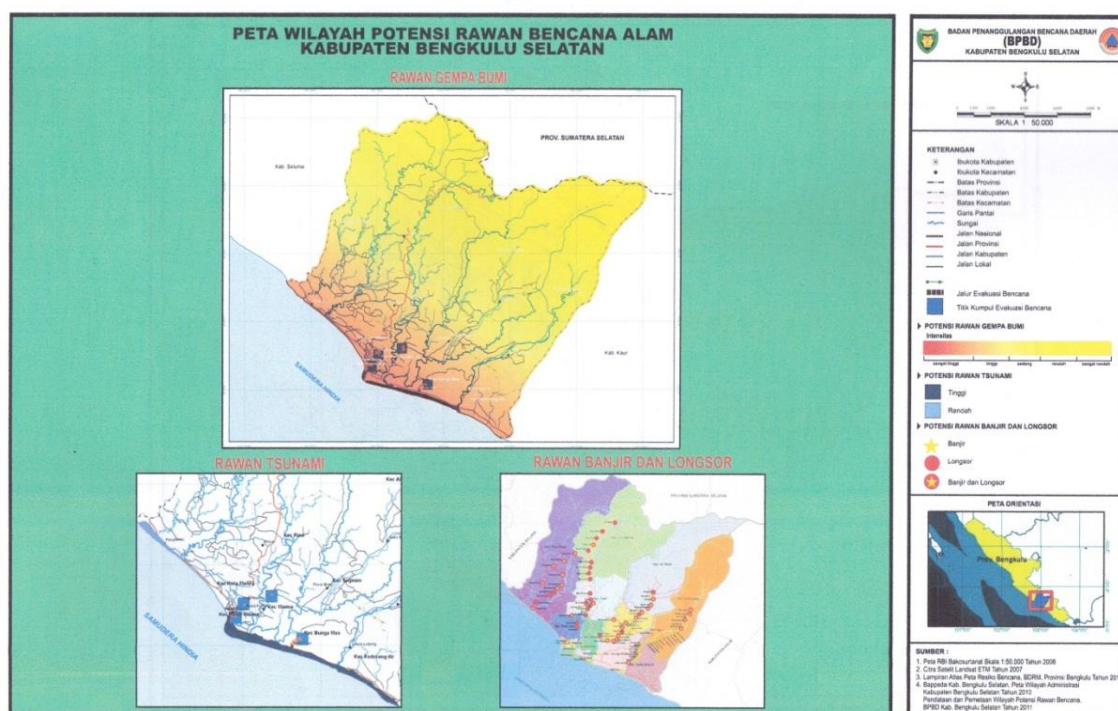


1. Kawasan wisata bahari terpadu di Kecamatan Pasar Manna, dengan lokasi Pantai Pasar Bawah, Tebat Rukis dan Tebat Gelumpai.
2. Pengembangan Taman Wisata Alam Lubuk Tapi – Kayu Ajaran, dengan lokasi Air Terjun Geluguran dan Arung Jeram Air Manna
3. Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya meliputi Danau Ulu Air Seginim, Pantai Kedurang, Pantai Bengkenang dan Pantai Makhudum.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki kerawanan terhadap bencana. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko atas bencana yang akan terjadi dan sebagai upaya untuk menjalankan mandat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana, diantaranya menetapkan strategi penyusunan mitigasi bencana dengan arah kebijakan antara lain meningkatkan kesiagaan dan pencegahan dini, melaksanakan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana karena Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada jalur *Ring Of Fire* sebagaimana ditunjukkan pada peta rawan bencana sebagai berikut :

Gambar 2.4.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2015

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa dan Tsunami paling tinggi adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai diantaranya Kecamatan Kedurang Ilir, Bunga Mas, Pasar Manna,



Manna dan Pino Raya sedangkan wilayah yang rawan terhadap bencana banjir dan longsor diantaranya adalah Kecamatan Ulu Manna, Seginim.

2.1.4. Demografi

Penduduk adalah modal dasar pembangunan yang harus diberdayakan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak justru dapat menjadi beban ekonomi jika pemberdayaan penduduk tidak berhasil dalam meningkatkan kualitas manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun taraf hidupnya. Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan menurut hasil proyeksi BPS di tahun 2015 mencapai 152.194 jiwa yang terdiri dari 76.473 laki-laki dan 75.721 perempuan. Selama kurun 2011–2015, laju pertumbuhan (*Growth Rate*) penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 1,2 % lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan nasional sebesar 1,5 %. Adapun jumlah penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut :

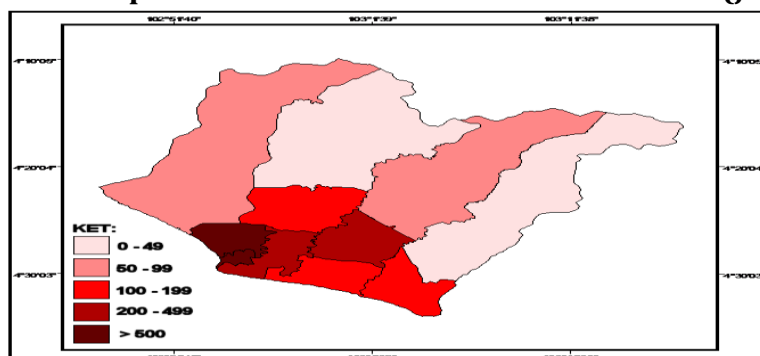
Tabel 2.26.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk Per Km ²
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Manna	6.863	6.969	13.832	417
2	Kota Manna	15.050	15.224	30.274	941
3	Kedurang	5.347	5.196	10.543	45
4	Bunga Mas	3.045	3.061	6.106	174
5	Pasar Manna	9.141	9.322	18.463	3.161
6	Kedurang Ilir	4.021	3.882	7.903	136
7	Seginim	7.950	7.755	15.705	255
8	Air Nipis	5.459	5.320	10.779	53
9	Pino	5.812	5.759	11.571	187
10	Pino Raya	9.891	9.570	19.461	87
11	Ulu Manna	3.894	3.663	7.557	32
	Jumlah	76.473	75.721	152.194	128

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Pasar Manna dan Kota Manna seperti tergambar dalam peta tematik berikut ini:

Gambar 2.5.
Peta Tematik Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa/ km²)





2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang dapat menggambarkan suatu kemampuan atau potensi sumber daya ekonomi suatu wilayah dan melihat pertumbuhannya secara keseluruhan pada setiap lapangan usaha atau sektor. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang diciptakan atau dihasilkan di suatu wilayah domestik yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non-residen. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku memperlihatkan besaran dari nilai tambah bruto masing-masing sektor sesuai dengan keadaan pada tahun tertentu. Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku dengan pendekatan produksi/ lapangan usaha:

Tabel 2.27.
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 -2014 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	886.545,6	993.238,7	1.112.464,9	1.226.862,9	1.367.309,3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	628.304,6	707.732,6	795.448,0	887.450,0	995.840,9
	a. Tanaman Pangan	349.934,3	396.037,1	447.234,9	494.807,6	542.275,2
	b. Tanaman Hortikultura	27.924,1	31.883,1	36.149,2	40.670,8	45.482,3
	c. Perkebunan	119.822,36	140.378,76	164.314,61	185.576,14	215.534,41
	f. Peternakan	113.635,83	120.419,67	126.451,10	142.681,13	164.710,03
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	16.987,93	19.013,91	21.298,28	23.714,41	27.838,93
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	21.763,35	23.638,00	25.518,95	27.883,40	30.342,41
	3 Perikanan	236.477,67	261.868,10	291.497,94	311.529,53	341.126,02
B	Pertambangan dan Penggalan	67.843,25	74.567,79	81.340,37	89.143,02	99.737,87



Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
C	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	67.843,25	74.567,79	81.340,37	89.143,02	99.737,87
	Industri Pengolahan	64.610,72	70.612,89	79.538,30	89.718,25	103.617,26
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	58.526,33	64.006,44	72.203,65	81.747,68	94.884,89
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	66,33	71,81	76,91	84,20	92,58
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	87,02	95,03	103,70	110,17	116,78
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	201,03	211,97	228,70	247,59	271,11
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.006,00	2.186,17	2.401,50	2.672,57	2.933,11
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	310,25	347,58	386,44	436,04	481,94
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.032,33	2.211,42	2.502,74	2.627,21	2.895,21
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	20,00	23,02	26,11	26,00	27,00
	15 Industri Furnitur	1.113,11	1.191,24	1.314,68	1.448,12	1.564,99
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	248,33	268,22	293,88	318,67	349,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.618,32	1.537,00	1.673,75	1.621,95	1.831,64
	1 Ketenagalistrikan	1.600,28	1.516,92	1.650,98	1.596,98	1.803,10
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	18,04	20,08	22,77	24,97	28,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.202,00	5.262,10	5.327,75	5.378,25	5.474,20
F	Konstruksi	102.137,13	121.663,66	142.600,98	166.819,66	190.244,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	333.500,02	376.661,05	418.142,34	462.354,77	521.319,65
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	79.942,12	90.763,49	101.097,86	113.108,20	126.275,72
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	253.557,90	285.897,56	317.044,48	349.246,58	395.043,93
H	Transportasi dan Pergudangan	123.757,83	136.602,46	153.033,87	165.560,18	181.214,52
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	118.428,55	130.524,57	146.101,38	157.489,43	172.383,30
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	5.329,28	6.077,89	6.932,49	8.070,75	8.831,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.220,67	38.266,96	44.794,54	50.323,63	57.738,93
	1 Penyediaan Akomodasi	1.895,34	2.127,58	2.489,84	2.813,57	3.191,21
	2 Penyediaan Makan Minum	31.325,33	36.139,37	42.304,70	47.510,07	54.547,72
J	Informasi dan Komunikasi	71.022,03	75.905,59	78.713,90	82.344,30	93.069,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	101.448,37	149.279,67	176.334,77	204.936,18	216.584,02
	1 Jasa Perantara Keuangan	92.358,02	138.960,61	164.766,71	191.892,33	201.844,10



Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
L M,N O P Q R,S T,U	2 Asuransi dan Dana Pensiun	280,66	321,00	353,95	397,52	446,51
	3 Jasa Keuangan Lainnya	8.771,69	9.957,06	11.169,11	12.597,33	14.236,41
	4 Jasa Penunjang Keuangan	38,00	41,00	45,00	49,00	57,00
	Real Estate	92.467,30	106.251,55	119.213,40	132.355,57	152.465,42
	Jasa Perusahaan	5.212,92	5.802,75	6.400,29	7.176,23	8.090,97
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	190.058,69	216.880,33	256.741,74	302.310,37	343.819,45
	Jasa Pendidikan	104.917,43	118.287,56	138.134,09	158.939,10	176.988,04
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.331,28	28.701,81	33.376,22	38.667,57	43.329,98
	Jasa lainnya	12.431,49	14.389,88	15.434,36	17.354,96	19.427,21
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.220.325,04	2.533.911,75	2.863.265,58	3.201.866,93	3.582.261,68

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

Tabel diatas menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha atau kategori utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan distribusi persentase sebesar 38,17 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,55 persen; serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,6 persen. Distribusi persentase pada PDRB harga berlaku menunjukkan struktur perekonomian atau peranan pada setiap lapangan usaha atau kategori ekonomi suatu wilayah tertentu.

Penyajian PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar tertentu (2010) pada setiap unit barang dan jasa yang dihasilkan, demikian juga dengan konsumsi antara ataupun nilai tambah masing-masing kategori dinilai berdasarkan harga tahun dasar. Penyajian seperti ini akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Berikut ini disajikan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan dengan pendekatan produksi/ lapangan usaha:

Tabel 2.28.
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	886.545,6	993.238,7	1.112.464,9	1.226.862,9	1.367.309,3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	628.304,6	707.732,6	795.448,0	887.450,0	995.840,9
	a. Tanaman Pangan	349.934,3	396.037,1	447.234,9	494.807,6	542.275,2
	b. Tanaman Hortikultura	27.924,1	31.883,1	36.149,2	40.670,8	45.482,3
	c. Perkebunan	119.822,36	140.378,76	164.314,61	185.576,14	215.534,41
	f. Peternakan	113.635,83	120.419,67	126.451,10	142.681,13	164.710,03
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	16.987,93	19.013,91	21.298,28	23.714,41	27.838,93
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	21.763,35	23.638,00	25.518,95	27.883,40	30.342,41
	3 Perikanan	236.477,67	261.868,10	291.497,94	311.529,53	341.126,02
	B Pertambangan dan Penggalian	67.843,25	74.567,79	81.340,37	89.143,02	99.737,87
B	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	67.843,25	74.567,79	81.340,37	89.143,02	99.737,87
	C Industri Pengolahan	64.610,72	70.612,89	79.538,30	89.718,25	103.617,26



Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	58.526,33	64.006,44	72.203,65	81.747,68	94.884,89
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	66,33	71,81	76,91	84,20	92,58
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	87,02	95,03	103,70	110,17	116,78
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	201,03	211,97	228,70	247,59	271,11
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.006,00	2.186,17	2.401,50	2.672,57	2.933,11
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	310,25	347,58	386,44	436,04	481,94
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.032,33	2.211,42	2.502,74	2.627,21	2.895,21
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	20,00	23,02	26,11	26,00	27,00
	15 Industri Furnitur	1.113,11	1.191,24	1.314,68	1.448,12	1.564,99
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	248,33	268,22	293,88	318,67	349,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.618,32	1.537,00	1.673,75	1.621,95	1.831,64
	1 Ketenagalistrikan	1.600,28	1.516,92	1.650,98	1.596,98	1.803,10
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	18,04	20,08	22,77	24,97	28,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.202,00	5.262,10	5.327,75	5.378,25	5.474,20
F	Konstruksi	102.137,13	121.663,66	142.600,98	166.819,66	190.244,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	333.500,02	376.661,05	418.142,34	462.354,77	521.319,65
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	79.942,12	90.763,49	101.097,86	113.108,20	126.275,72
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	253.557,90	285.897,56	317.044,48	349.246,58	395.043,93
H	Transportasi dan Pergudangan	123.757,83	136.602,46	153.033,87	165.560,18	181.214,52
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	118.428,55	130.524,57	146.101,38	157.489,43	172.383,30
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	5.329,28	6.077,89	6.932,49	8.070,75	8.831,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.220,67	38.266,96	44.794,54	50.323,63	57.738,93
	1 Penyediaan Akomodasi	1.895,34	2.127,58	2.489,84	2.813,57	3.191,21
	2 Penyediaan Makan Minum	31.325,33	36.139,37	42.304,70	47.510,07	54.547,72
J	Informasi dan Komunikasi	71.022,03	75.905,59	78.713,90	82.344,30	93.069,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	101.448,37	149.279,67	176.334,77	204.936,18	216.584,02
	1 Jasa Perantara Keuangan	92.358,02	138.960,61	164.766,71	191.892,33	201.844,10
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	280,66	321,00	353,95	397,52	446,51
	3 Jasa Keuangan Lainnya	8.771,69	9.957,06	11.169,11	12.597,33	14.236,41
	4 Jasa Penunjang Keuangan	38,00	41,00	45,00	49,00	57,00



Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
L	Real Estate	92.467,30	106.251,55	119.213,40	132.355,57	152.465,42
M,N	Jasa Perusahaan	5.212,92	5.802,75	6.400,29	7.176,23	8.090,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	190.058,69	216.880,33	256.741,74	302.310,37	343.819,45
P	Jasa Pendidikan	104.917,43	118.287,56	138.134,09	158.939,10	176.988,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.331,28	28.701,81	33.376,22	38.667,57	43.329,98
R,S, T,U	Jasa lainnya	12.431,49	14.389,88	15.434,36	17.354,96	19.427,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2.220.325,04	2.533.911,75	2.863.265,58	3.201.866,93	3.582.261,68

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

Pertumbuhan ekonomi pada suatu lapangan usaha atau kategori diperoleh dengan membandingkan nilai tambah kategori pada suatu tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dan harga konstan. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan diperkirakan tumbuh sebesar 5,56 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Angka ini lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu sebesar 5,49 persen. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai klimaknya dengan pertumbuhan sebesar 6,58 persen.

Penghitungan PDRB dapat juga didekati melalui pendekatan pengeluaran. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan (ekspor – impor) antar daerah.

Tabel 2.29.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 - 2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
1. Pengeluaran Konsumsi RT	1.342.384,51	1.527.195,98	1.736.365,60	1.982.116,81	2.277.701,73
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	682.012,46	766.803,32	864.709,45	982.289,48	1.133.290,25
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	60.503,20	71.021,84	80.125,66	92.918,74	107.043,44
1.c. Perumahan, Perkakas, Perleng. dan Penyel. RT	160.959,42	185.275,49	210.150,16	241.987,06	275.530,01
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	102.085,50	117.978,77	134.656,61	154.247,62	176.570,89
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	227.484,46	261.540,54	303.352,21	346.904,12	397.356,00
1.f. Hotel dan Restoran	62.719,00	71.505,24	81.986,33	93.497,16	106.905,27
1.g. Lainnya	46.620,47	53.070,78	61.385,18	70.272,62	81.005,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	59.925,99	69.039,07	78.652,77	87.548,91	97.507,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	454.424,87	528.514,03	600.232,93	672.571,29	754.164,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	838.902,19	975.678,35	1.116.160,96	1.274.936,72	1.456.078,07
5. Perubahan Inventori	24.993,52	32.277,80	40.282,39	50.394,59	58.250,32
6. Net Ekspor Antar Daerah	(500.306,04)	(598.793,48)	(708.429,07)	(865.701,39)	(1.061.440,39)
6.a. Ekspor	1.348.701,69	1.488.350,85	1.653.945,52	1.897.483,39	2.164.355,87



Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
6.b. Impor	1.849.007,73	2.087.144,33	2.362.374,59	2.763.184,77	3.225.796,26
P D R B	2.220.325,04	2.533.911,75	2.863.265,58	3.201.866,93	3.582.261,68
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2014

Data diatas menunjukkan konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi yang tinggi dalam PDRB menurut pengeluaran yaitu 63,58 persen pada tahun 2014 dan terus meningkat setiap tahunnya. Melimpahnya penawaran dan tersedianya berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Pada aktifitas pengeluaran lainnya, produk yang berasal dari impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan domestik terhadap ekonomi atau produk daerah/ negara lain baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Nilai impor antardaerah dari Rp. 1,85 trilyun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 3,2 trilyun pada tahun 2014. Secara umum, proporsi impor

Tabel 2.30.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010 - 2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	682.012,46	721.451,29	764.501,38	813.916,37	867.168,77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	60.503,20	64.616,58	68.959,19	74.359,43	79.791,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengk. dan Penyel. RT	160.959,42	171.102,42	181.996,94	194.465,70	207.287,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	102.085,50	108.800,17	116.320,95	124.403,70	132.412,30
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	227.484,46	245.019,09	264.859,82	283.682,85	304.615,72
1.f. Hotel dan Restoran	62.719,00	66.732,86	71.189,09	76.515,35	80.727,94
1.g. Lainnya	46.620,47	49.995,35	54.139,65	58.163,10	61.828,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	59.925,99	64.209,36	68.077,74	71.821,92	75.692,64
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	454.424,87	492.821,90	524.123,59	554.190,12	587.140,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	838.902,19	907.022,69	970.088,17	1.039.300,21	1.111.161,27
5. Perubahan Inventori	24.993,52	28.844,42	31.222,50	33.964,87	36.351,07
6. Net Ekspor Antar Daerah	(500.306,04)	(554.202,11)	(596.693,71)	(651.611,53)	(722.376,41)
6.a. Ekspor	1.348.701,69	1.417.094,67	1.478.837,14	1.567.413,20	1.667.559,45
6.b. Impor	1.849.007,73	1.971.296,78	2.075.530,85	2.219.024,73	2.389.935,85
P D R B	2.220.325,04	2.366.414,02	2.518.785,31	2.673.172,10	2.821.800,85

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2014

PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap komponen pengeluaran dari tahun ke tahun. Masa pemulihan ekonomi mendorong rumah tangga memperbaiki serta mengembalikan perilaku konsumsinya. Pada komponen pengeluaran rumah tangga, pertumbuhannya pada periode 2010 - 2014 berada pada kisaran 6 persen lebih tinggi jika dibandingkan



pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kisaran 5 persen. Pada komponen net ekspor antardaerah, tanda negatif menunjukkan bahwa nilai ekspor berada dibawah nilai impor antardaerah. Nilai net ekspor (ekspor dikurang impor) secara riil cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 pertumbuhannya diprediksi sekitar 10,86 persen.

2.2.2. PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan

PDRB Perkapita atau yang biasa disebut pendapatan perkapita (*per capita income*) adalah pendapatan regional per satu orang penduduk pada suatu wilayah tertentu. Seringkali PDRB perkapita dianggap cerminan akan tingkat kemakmuran suatu wilayah. Sebenarnya, PDRB tidak dapat mencerminkan pemerataan pendapatan dari kue ekonomi yang dihasilkan di suatu wilayah karena pendapatan dari usaha/perusahaan yang pemiliknya berasal dari daerah lain akan mengirimkan pendapatan tersebut ke luar wilayah. Sebaliknya, penduduk wilayah tersebut yang menanamkan modalnya di wilayah lain akan memperoleh pendapatan yang dikirim masuk ke wilayah tersebut. Mengingat penyusunan neraca yang menggambarkan transaksi arus pendapatan antar wilayah masih sulit dilakukan maka PDRB perkapita dianggap sebagai konsep yang paling mendekati untuk menggambarkan aspek kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Uraian ringkas PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha tahun 2010–2014 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.31.
Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 - 2014

No.	Keterangan	2010	2011	2012	2013*	2014**
A	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	2.220,325	2.533,912	2.863,266	3.201,867	3.582,262
B	PDRB harga Konstan (Milyar Rp)	2.220,325	2.366,414	2.518,785	2.673,172	2.821,801
C	Jumlah Penduduk Pertengahan tahun (Jiwa)	143.417	145.267	147.106	148.854	150.601
D	PDRB Perkapita Harga berlaku (Juta Rp)	15,48	17,44	19,46	21,51	23,79
E	PDRB Perkapita Harga Konstan (Juta Rp)	15,48	16,29	17,12	17,96	18,74

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari Rp. 15,48 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 23,79 juta pada tahun 2015. Artinya, rata- rata pendapatan satu orang penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan selama setahun sebesar Rp. 23,79 juta. Secara riil, PDRB perkapita tumbuh sebesar 21,06 persen pada periode 2010 – 2014 atau selama 4 tahun.



2.2.3. Laju Inflasi

Salah satu indeks yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam suatu kurun tertentu adalah indeks harga konsumen (IHK). Perubahan yang terjadi pada IHK menyebabkan inflasi atau deflasi yang hanya dihitung di satu kota saja yaitu Kota Bengkulu. Asumsi yang digunakan pada bahasan ini adalah pola konsumsi yang sama antara penduduk di Kota Bengkulu dan Kota Manna sehingga perubahan harga yang terjadi kurang lebih menunjukkan perkiraan perubahan harga yang juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya di Kota Manna atau wilayah perkotaan. Disamping IHK perkotaan, BPS juga menghitung IHK perdesaan.

Pada kurun waktu 2010 – 2015, inflasi yang terjadi berfluktuasi. Harga- harga kelompok tertentu menunjukkan gejala perubahan harga yang cukup tinggi. Misalnya, tahun 2010 kelompok bahan makanan sebesar 25,28 persen; tahun 2011 kelompok sandang sebesar 12,39 persen; tahun 2012 kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 12,32 persen; tahun 2013 dan 2014 kelompok bahan makanan sebesar 15,04 persen dan 17,76 persen, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 16,37 persen dan 13,96 persen; dan tahun 2015 kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 11,38 persen.

Perubahan harga yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap suatu produk barang dan jasa dan tidak diimbangi oleh ketersediaan barang dan jasa di pasaran. Pengurangan subsidi oleh pemerintah atau kenaikan harga BBM dapat menjadiefek domino bagi penyebab kenaikan harga komoditi barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga yang tidak terkendali dan lama akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Secara makro, hal ini dapat menjadi salah satu faktor perlambatan ekonomi suatu wilayah. Laju inflasi umum atau total pada tahun 2010-2015 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2011 - 2015 (%)*

Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
Umum	3,96	4,61	9,94	10,85	3,25
Bahan makanan	-1,68	3,35	15,04	17,76	0,51
Makanan jadi, Minuman, dan Rokok	6,32	7,31	6,36	6,64	6,02
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	7,39	1,54	6,54	8,23	3,36
Sandang	12,39	4,80	2,09	3,82	4,33
Kesehatan	5,61	5,67	6,92	6,53	7,54
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,94	12,32	3,11	5,62	11,38
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,06	4,10	16,37	13,96	-0,05

Keterangan: *) Merujuk kepada inflasi di Kota Bengkulu

2.2.4. Angka Kriminalitas

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah rendahnya angka kriminalitas.



Tingkat kriminalitas dipicu oleh situasi dan kondisi sosial dan politik di suatu wilayah/ negara. Tingginya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan kondisi sosial politik yang tidak stabil dapat menyebabkan angka kriminalitas meningkat.

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Jumlah tindak pidana yang dilaporkan ke Polres Bengkulu Selatan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 329 peristiwa, menurun menjadi 122 peristiwa pada tahun 2015. Penyelesaian tindak pidana oleh kepolisian apabila: a) berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan ke kejaksaan, b) dalam hal delik aduan pengaduan telah dicabut dalam tengat waktu yang ditentukan menurut undang- undang, c) telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *plichmatigheid*, d) kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian, e) tersangka meninggal dunia, dan f) kasus kadaluarsa. Pada tahun 2012, persentase penyelesaian peristiwa tindak pidana hanya sebesar 54 persen, namun pada tahun 2015 dapat ditingkatkan menjadi 100 persen.

Tabel 2.33
Angka Kriminalitas
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013-2015

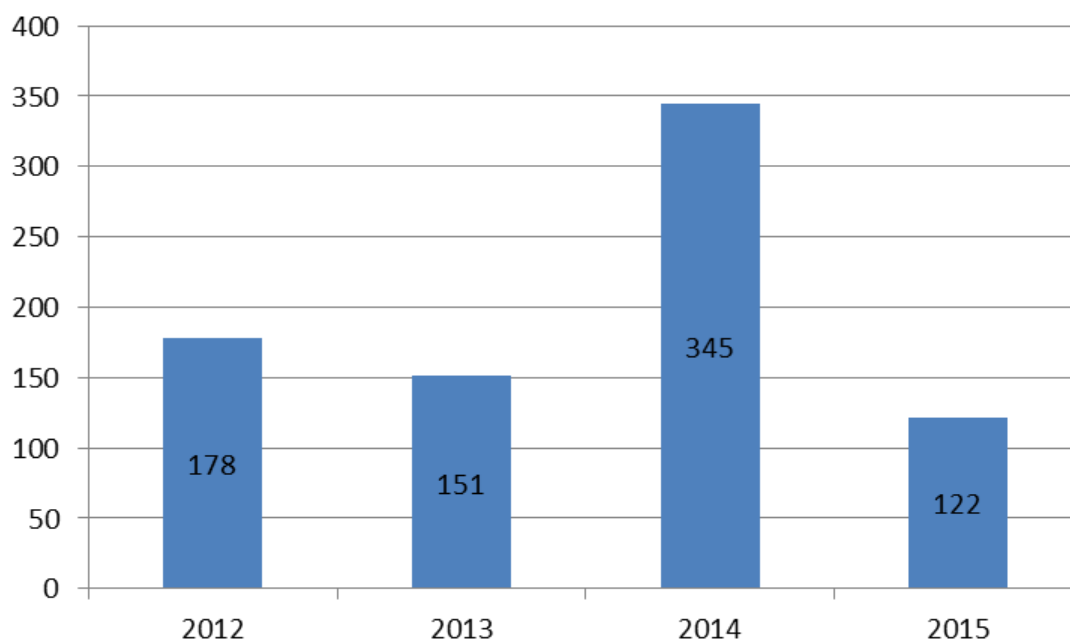
No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015
1.	Pencurian dengan Pemberatan	30	33	61
2.	Pencurian dengan Kekerasan	1	5	3
3.	Penganiayaan Berat Penculikan	7	40	-
4.	Pencurian Ranmor	3	13	40
5.	Pembakaran	-	-	2
6.	Pembunuhan	1	-	-
7.	Pemeriksaan	1	1	2
8.	Pemerasan	2	5	1
9.	Penculikan	-	-	-
10.	Senjata Api	-	-	-
11.	Narkotika	7	9	13
12.	Penyelundupan	-	-	-
13.	Lain- lain	99	239	-



No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015
14.	Jumlah	151	345	122
	Angka Kriminalitas	9.92	22.66	8.01

Sumber : Polres 623 Kabupaten Bengkulu Selatan

Gambar 2.6.
Grafik Jumlah Kriminalitas yang Ditangani Tahun 2012 - 2015



2.2.5. Angka kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di seluruh daerah atau negara manapun. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ketersediaan data mengenai kemiskinan penting dibutuhkan sebagai salah satu instrumen dalam pengambilan kebijakan yang berfokus kepada perbaikan kondisi hidup orang miskin. Dalam penghitungan kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data yang digunakan pada level kabupaten/ kota adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dalam konteks bahasan ini, kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan absolut.

Garis kemiskinan (GK) adalah penjumlahan dari nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang dikonsumsi atau setara 2100 kilokalori perkapita/ hari dan penjumlahan dari nilai kebutuhan minimum dari beberapa komoditi non makanan terpilih. Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita/ bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) merupakan ukuran rata- rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata- rata pengeluaran penduduk dari GK. Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara



penduduk miskin.

Tabel 2.34.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	P0 Persentase Penduduk Miskin	P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan	P2 Indeks Keparahan Kemiskinan
1	Bengkulu Selatan	287.029	33,07	22,76	4,53	1,34
2	Rejang Lebong	334.237	45,85	17,99	2,48	0,55
3	Bengkulu Utara	292.684	39,49	13,95	2,18	0,56
4	K a u r	256.321	25,19	21,96	3,37	0,82
5	Seluma	294.016	38,94	21,17	4,05	1,29
6	Muko Muko	321.002	21,71	12,48	1,47	0,28
7	Lebong	298.264	13,40	12,44	1,94	0,46
8	Kepahiang	285.124	20,55	15,65	2,14	0,47
9	Bengkulu Tengah	297.163	8,75	8,22	0,65	0,12
10	Kota Bengkulu	468.880	69,54	20,16	3,29	0,82
	BENGKULU	356.554	316,50	17,09	2,85	0,75

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Pada tahun 2015, BPS memprediksi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 22,76 persen atau meningkat bila dibandingkan angka tahun sebelumnya. Jika melihat perbandingan antarkabupaten, Kabupaten Kaur dan Bengkulu Selatan adalah yang tertinggi persentasenya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode 2010 – 2013 berturut-turut adalah 22,64 persen, 22,55 persen, 22,98 persen dan 22,59 persen. Angka lainnya yang dicermati adalah nilai P1 yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi Bengkulu. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauhi garis kemiskinan, sebaliknya kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin meningkat atau melebar (lihat pada P2).

Untuk analisis lebih lanjut, garis kemiskinan (GK) digunakan untuk membagi penduduk menurut status kemiskinannya. Pengeluaran perkapita/ bulan $\leq 0,8$ GK disebut sangat miskin, pengeluaran perkapita/ bulan ≤ 1 GK disebut miskin, $1 \text{ GK} < \text{pengeluaran perkapita/bulan} \leq 1,2$ GK disebut hampir miskin, dan $1,2 \text{ GK} < \text{pengeluaran perkapita/bulan} < 1,6$ GK disebut rentan miskin lainnya. Jika menggunakan konsep diatas maka batas pengeluaran untuk penduduk sangat miskin adalah $\leq \text{Rp. } 229.623,2$ perkapita/ bulan.

2.2.6 Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan “alat” dari pembangunan. Tujuan pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati umur yang panjang, sehat, dan menjalankan kehidupannya dengan produktif (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana pembangunan dapat mengakses hasil pembangunan



dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks komposit tersebut juga menunjukkan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah (kabupaten terhadap kabupaten lainnya atau provinsi terhadap provinsi lainnya) terhadap wilayah lainnya. IPM metode baru dibentuk dari empat indikator yaitu: Angka Harapan Hidup Saat lahir, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan.

Tabel 2.35.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan 2011 - 2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Harapan Hidup (AHH - tahun)	67,00	67,03	67,05	67,06	67,16
2	Angka Harapan Lama Sekolah (EYS - tahun)	12,55	12,61	12,99	13,42	13,45
3	Rata-rata Lama Sekolah (MYS - tahun)	8,24	8,36	8,71	8,75	8,76
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/ tahun)	8.526	8.566	8.606	8.777	8.951
	IPM	66,50	66,77	67,61	68,28	68,57

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

2.2.7 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.7.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.36.
Data Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	URAIAN	5 TAHUN TERAKHIR				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Melek Huruf	96,47	96,51	96,54	96,57	96,9
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	8,14	8,24	8,36	8,71	8,75
3	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	114,09	108,44	113,4	108,99	116,8
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/ Paket B	77,13	95,45	95,64	83,53	87,3
5	Angka Partisipasi Kasar SMA/ Paket B	86,3	79,86	72,38	90,26	98,1
6	Angka Pendidikan yang ditamatkan	11,59	11,88	12,20	12,78	13,22
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,35	92,27	96,83	98,2	98,4
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,18	70,28	72,65	76,37	80,2



9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	64,14	62,94	51,54	72,98	78,8
---	-----------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber : - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Bengkulu Selatan, 2014
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) B/S 2014, IPM BPS 2014

Data indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan data yang cukup dinamis, dimana terjadi penurunan namun juga mengalami peningkatan secara signifikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ini dipengaruhi oleh terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah yang cukup besar terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Angka Melek Huruf sebagai indikator pembentuk Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat tinggi mencapai angka 96,9 persen dengan angka rata-rata lama sekolah 8,75 tahun.

2.2.7.2 Angka Kematian Bayi

Di Kabupaten Bengkulu Selatan masih ditemukan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Hal ini menjadi sinyal, bahwa Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi ibu dan bayi yang baru lahir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih terjadinya kejadian kematian bayi maupun ibu melahirkan, diantaranya masih adanya ibu yang melahirkan dibantu dukun. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyediakan tenaga kesehatan (bidan) yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang baik sehingga kematian bayi dan ibu melahirkan dapat dicegah.

Tabel 2.37.
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2010 -2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AKB	17	20	33	12	7	33
AKI	4	1	1	2	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, 2016

Dari tabel diatas angka kematian bayi menunjukan trend fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka kematian bayi sebanyak 33 kasus dan turun menjadi 12 kasus pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2014 angka kematian bayi kembali turun menjadi 7 kasus dan angka ini masih cukup tinggi ditahun 2015 yaitu 33 kasus . Sedangkan angka kematian ibu melahirkan dari tahun 2013 sebanyak 2 Orang meningkat pada tahun 2014 sebanyak 3 Orang, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan ibu yang mengandung mengenai kesehatan, peralatan kesehatan yang kurang memadai serta wilayah yang terkadang jauh dari fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

2.2.7.3 Persentase Balita Kurang Gizi/Gizi Buruk di Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan



Tabel 2.38.
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010 - 2015

No	Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Balita Dengan Gizi Buruk	Persentase	Ket
1	2010	13.261	17	0,13	-
2	2011	13.450	19	0,14	-
3	2012	13.825	15	0,11	-
4	2013	13.946	11	0,08	-
5	2014	13.712	11	0,08	-
5	2015	13.284	7	0,05	-

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016, Data Diolah

Data dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah balita dengan gizi buruk dan tahun 2010 sebesar 0,13 % menjadi 0,05 % tahun 2015 atau hanya sebanyak 7 orang balita. Angka ini walaupun mengalami penurunan tetapi Balita Gizi Buruk masih tetap ada.

2.2.7.4 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Tabel 2.39.
Penduduk 15 Tahun Keatas Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2011 - 2015

Jenis Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	74.278	69.170	68.053	74.110	76.738
Bekerja	72.710	66.449	65.207	71.698	73.563
(%)	(73,78)	(67,65)	(66,65)	(66,84)	(67,52)
Pengangguran	1.568	2.721	2.846	2.412	3.175
Bukan Angkatan Kerja	26.402	32.695	34.052	33.158	32.204
Jumlah	100.680	101.865	102.105	107.268	108.942

Sumber : Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Bengkulu

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Jika seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu maka mereka disebut setengah penganggur. Tabel diatas menunjukkan bahwa sekitar 67,52 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja memiliki pekerjaan atau bekerja. Dari seluruh penduduk yang bekerja sekitar 57 persen bekerja di sektor pertanian, 18 persen bekerja di sektor jasa, dan 25 persen sektor lainnya.

2.2.7.5 Angka pengangguran

Pengangguran di Kabupaten Bengkulu Selatan jumlahnya masih cukup tinggi. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan akses yang luas bagi para tenaga kerja yang masih produktif untuk bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, guna menunjang kehidupannya. Adapun Jumlah pengangguran di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:



Tabel 2.40.
Jumlah Pengangguran Terbuka Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Pengangguran Terbuka		Jumlah
	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Belanja	
2015	1.131	2.044	3.175
2014	578	1.834	2.412
2013	1.069	1.777	2.846
2012	977	1.744	2.721
2011	979	589	1.568

Sumber : Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Bengkulu

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkulu selatan pada tahun 2015 sebanyak 3.175 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2011 sebanyak 1.568 orang. Pengangguran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan selain disebabkan pengangguran struktural, juga disebabkan oleh pengangguran musiman, yaitu mereka yang bekerja karena perubahan atau penggantian musim. Sebagai contoh, jika cuaca baik maka nelayan melaut, jika cuaca buruk maka nelayan berhenti mencari ikan. Termasuk didalamnya adalah kejadian pada musim paceklik atau kering. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya jam kerja normal selama seminggu. Mereka digolongkan sebagai setengah penganggur dan rentan menjadi pengangguran. Diperkirakan sekitar 50 persen penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki jam kerja kurang dari 35 jam seminggu.

2.2.7.6 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga (4 Jenis Data) : (Jumlah Grup Dan Gedung Kesenian, Jumlah Klub OR Dan Gedung OR).

Seni Budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat menjadi salah satu sumber potensi pendapatan daerah, karena Seni Budaya merupakan sebuah produk yang memiliki nilai jual untuk mendukung program prioritas Pemerintah Daerah dalam sektor kepariwisataan. Untuk itu, pembinaan Kelompok Pelaku Seni Budaya perlu dilakukan dengan serius dan pengembangan seni budaya harus didukung penuh dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.

Tabel 2.41.
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Grup	6	17	19	22	22	22

Sumber : Dinas Dikpora Bengkulu Selatan, 2016, Data Diolah

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pelayanan umum lebih menentukan keberhasilan pelaksana pembangunan terutama pelayanan umum yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu aspek pelayanan umum sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari para pelaksana pembangunan. Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.



2.3.1 Fokus Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diharapkan, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.

Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah, demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Tabel 2.41 memberikan gambaran capaian pembangunan bidang pendidikan, yang akan terus ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 2.42.
Data Fokus Pendidikan Tahun 2010 - 2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Pendidikan Dasar					
1	Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI)	98,90	99,49	99,37	99,90	99,95*
2	Angka Partisipasi Sekolah (SMP/MTs)	86,98	90,84	95,48	95,86	96,12*
3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	69,86	68,97	68,10	67,31	66,91
4	Rasio Guru/Murid	802,17	836,78	945,87	874,76	871,19
	Pendidikan Menengah					
1	Angka Partisipasi Sekolah	71,59	74,90	73,09	76,20	76,30*
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	25,30	31,22	30,84	31,71	31,35
3	Rasio Guru/Murid	831,81	875,83	917,53	1202,09	856,00
4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96,47	96,51	96,54	96,57	96,90*
	Fasilitas Pendidikan					
1	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	71,27	65,38	65,38	61,81	56,50
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	72,96	72,96	67,76	67,76	79,29
	Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3,849	3,849	3,849	3,582	3,771
	Angka Putus Sekolah					
1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,73	0,38	0,00	0,27	0,44
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,44	0,03	0,02	0,04	1,18
	Angka Kelulusan					
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	96,34	97,34	99,00	99,93	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,00	93,14	95,36	92,77	97,97
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98,20	93,99	94,80	92,77	99,00
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,01	97,34	97,16	97,67	106,53



No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	102,14	129,31	101,12
6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	59,8	64,31	70,59	70,50	77,00

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Selatan, 2015, Data Diolah

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk memberikan jaminan terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan guna mewujudkan terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan kualitas kesehatan yang baik. Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui upaya penyediaan sarana fisik atau fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan serta peningkatan layanan kesehatan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah memadainya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar dan bersertifikasi, sehingga mampu memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Semakin banyak fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia, maka akses terhadap kesehatan akan menjadi semakin mudah, sehingga derajat kesehatan masyarakat diharapkan akan meningkat.

1. Rasio Posyandu Persatuan Balita di Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.43.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2010 - 2015

No	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio	Ket.
1	2010	185	13.261	13,95	-
2	2011	190	13.450	14,13	-
3	2012	190	13.825	13,74	-
4	2013	191	13.946	13,70	-
5	2014	191	13.712	13,92	-
5	2015	191	13.248	14,42	-

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016, Data Diolah

2. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.44.
Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Tahun 2011- 2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2011	143,417	14	0.10	5	0.035	41	0.29
2	2012	145,267	14	0.10	3	0.021	41	0.28
3	2013	147,106	14	0.10	3	0.020	41	0.28
4	2014	150,601	14	0.09	3	0.020	41	0.27
5	2015	152,194	14	0.09	4	0.026	41	0.27

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016, Data Diolah



3. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 adalah sebesar 1 : 148.854

Ketersediaan tenaga medis menjadi salah satu cerminan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, karena dengan banyaknya tenaga medis yang memadai dan berkualitas, maka kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang cepat dan tanggap serta berkualitas dapat dipenuhi.

Tabel 2.45.
Jumlah Tenaga Medis menurut Uraian Jabatan
dan Pendidikan yang Ditamatkan
Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah Tenaga Medis
1	Dokter Spesialis	4
2	Dokter Umum	46
3	Dokter Gigi	6
4	Dokter Gigi Spesialis	1
5	Dokter (pegawai tidak tetap)	8
6	Bidan (DI/D3/DIV)	213
7	Bidan (pegawai tidak tetap)	131
8	Keperawatan (SKP/DIV/Akper/SPK)	389
9	Perawat Gigi (D3)	21
10	Tenaga Teknis Kefarmasian (SMF/D3/S1)	32
11	Apoteker (S1)	11
12	Kesehatan Masyarakat (SI/S2)	138
13	Kesehatan Lingkungan (D3)	13
14	Nutrisi (D3/SI)	21
15	Fisioterapi (D3)	5
16	Radiografer (D3)	10
17	Teknisi Elektromedis	-
18	Teknisi Gigi	-
19	Analisis Kesehatan	13
20	Reflasi Optisien	-
21	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	-
Jumlah		1.054

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2016

4. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Pelayanan

Angka kurang gizi adalah angka yang menunjukkan status keadaan rendahnya konsumsi energi dan kalori pada anak-anak. Di Kabupaten Bengkulu Selatan masih ditemui anak-anak yang menderita kurang gizi (gizi buruk). Pemerintah Daerah berkomitmen untuk selalu hadir dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam rangka menangani penderita gizi buruk dan mencegah terjadinya gizi buruk di kemudian hari.



Tabel 2.46
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Pelayanan Tahun 2010 -2015

No	Tahun	Jumlah Balita Dengan Gizi Buruk	Jumlah Balita Dengan Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	Persentase
1	2010	17	17	100
2	2011	19	19	100
3	2012	15	15	100
4	2013	11	11	100
5	2014	11	11	100
6	2015	7	7	100

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016, Data Diolah

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah balita yang mengalami gizi buruk mengalami penurunan sesuai dengan yang diharapkan atau 100 %. Pada tahun 2010 jumlah bayi yang mengalami gizi buruk sebanyak 17 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebanyak 19 kasus, akan tetapi terus menurun pada tahun. Selanjutnya pada tahun 2014 hanya ada 11 kasus balita dengan gizi buruk. Penurunan angka gizi buruk disebabkan masyarakat mulai menyadari manfaat gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta adanya penyuluhan dan pendampingan yang diadakan oleh pihak pemerintah daerah terutama untuk keluarga miskin, serta pelayanan kesehatan bagi bayi hingga balita secara gratis di Puskesmas, Posyandu dan Pustu.

5. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue masih di temukan di Kabupaten Bengkulu Selatan setiap tahun, untuk itu penanganan penyakit DBD dilakukan secara massif dan komprehensif di seluruh wilayah melalui upaya-upaya yang terkoordinasi dengan baik. Meskipun penanganan terhadap penderita penyakit DPD sudah maksimal, namun akan lebih baik dikedepankan upaya pencegahan terjadinya penyakit DBD, sehingga dapat diminimalisir jatuhnya korban jiwa.

Tabel 2.47.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2010 -2015

No	Tahun	Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
1	2010	4
2	2011	51
3	2012	37
4	2013	9
5	2014	38
6	2015	34

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016, Data Diolah

6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

Penderita Penyakit TBC BTA (+) masih di temukan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun dengan penanganan yang baik jumlah temuan penderita penyakit TBC BTA (+) menunjukkan trend penurunan setiap tahunnya, sebagaimana Tabel 2.46.



Tabel 2.48.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)
Tahun 2010 - 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)
1	2010	123
2	2011	124
3	2012	134
4	2013	129
5	2014	114
6	2015	122

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016, Data Diolah

7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit GHTR, Malaria dan Kusta

Penyakit Malaria masih di temukan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan penanganannya sudah dilakukan dengan maksimal. Namun Pemerintah Daerah menargetkan bahwa pada tahun 2018, Kabupaten Bengkulu Selatan bebas malaria.

Tabel 2.49.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Lainnya Tahun 2015

No	Penyakit				Ket.
	Rabies (GHTR)	Malaria	Kusta		
			PB	MB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	159	1.122	0	5	

Sumber : Dinas Kesehatan 2016, Data Diolah

Keterangan : GHPR = Gigitan Hewan Penularan Rabies

PB = Pausi Basiler

MB = Multi Basiler

8. Cakupan Kunjungan Bayi

Tabel 2.50.
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2010 - 2014

No	Tahun	Sasaran	Kunjungan	Persentase
1	2010	3.890	2.558	91,5
2	2011	3.661	3.144	85,9
3	2012	3.570	3.119	87,4
4	2013	2.923	2.901	99,2
5	2014	2.742	2.509	91,5
6	2015	2.745	2.515	91,6

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2015, Data Diolah



9. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Tabel 2.51.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2010 -2014

No	Tahun	Sasaran	20% Sasaran Bulin	Yang Ditangani	Persentase
1	2010	4.045	809	456	54,27
2	2011	3.043	609	410	64,18
3	2012	2.980	596	307	51,51
4	2013	2.842	568	411	69,03
5	2014	2.879	576	333	56,20
6	2015	3.131	626	378	60,38

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2015, Data Diolah

10. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan.

Tabel 2.52.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan Tahun 2010 - 2015

No	Tahun	Sasaran	Persalinan Oleh Nakes	Persentase
1	2010	4.045	3.293	81,41
2	2011	3.043	2.836	92,18
3	2012	2.980	2.612	87,65
4	2013	2.957	2,842	96,11
5	2014	2.879	2,574	89,40
6	2015	3.131	2.805	89,60

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016, Data Diolah

Dari beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan maka terlihat bahwa ketersediaan tenaga medis seperti dokter dan para medis serta sarana dan prasarana kesehatan masih sangat perlu ditingkatkan

3. Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2015, panjang jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sepanjang 1.343.937 km. sebesar 8.22 persen atau 110.447 km merupakan jalan nasional yang tanggung jawab dan wewenangnya dibawah Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan 7.39 persen atau 128.800 km merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab dinas permukiman dan prasarana wilayah. Sementara sisanya 84.39 persen atau 1.104.690 km merupakan tanggung jawab Kabupaten. Dari panjang jalan tersebut 52,36 persen kondisi jalannya baik dan yang lainnya beraneka kondisi jalan.



Tabel 2.53.
**Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Jalan		
		Negara	Provinsi	Kabupaten
1	2011	97.58	123.10	656.29
2	2012	110.447	123.10	689.53
3	2013	110.447	125.60	728.230
4	2014	110.447	128.80	773.510
5	2015	110.447	128.800	1.104.690

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016

4. Sosial

Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun 2015 mempunyai 6 unit panti yang terdiri dari panti asuhan 4 unit, panti jompo 2 unit. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.54.
Jumlah Fasilitas Sosial Menurut Jenis Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jenis Panti		
		Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Lainnya
1	2011	4	1	-
2	2012	5	1	-
3	2013	6	1	-
4	2014	7	1	-
5	2015	4	2	

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2016

5. Perhubungan

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terdapat hubungan erat antara transportasi dengan jangkauan dan lokasi kegiatan manusia, barang – barang dan jasa. Dalam kaitan dengan kehidupan manusia, transportasi memiliki peranan penting dalam aspek – aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik dan pertahanan keamanan. Dalam aspek perekonomian , transportasi mempunyai pengaruh yang besar. Angkutan penumpang di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari mobil penumpang bus dengan jumlah masing – masing sebanyak 2345 unit dan 213 unit.

Tabel 2.55.
**Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Jenis Kendaraan				
		Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus lainnya
1	2011	1445	30	667	21620	7
2	2012	1485	35	775	22794	17
3	2013	2528	141	1740	26557	-



4	2014	2020	28	1295	25632	21
5	2015	2345	213	1596	27690	15

Sumber : Polres 623 Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016

2.3.2 Fokus Urusan Pilihan

1. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

Di bidang Keluarga Berencana (KB) berdasarkan data dari BPPKB Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami penurunan dibanding tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah akseptor aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 32.135 pasangan. Akseptor aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik dan implan, dimana proporsinya masing – masing mencapai 39,40 persen dan 25,53 persen.

Tabel 2.56.
Jumlah Akseptor Baru Dan Alat Kontrasepsi Yang digunakan
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015

No	Tahun	Alat Kontrasepsi				
		Pil	Spiral IUD	Kondom	Suntik	Implant
1	2011	3230	176	632	5254	827
2	2012	2787	263	598	4974	845
3	2013	2606	431	537	3904	1832
4	2014	1429	205	440	4010	1204
5	2015	1744	165	332	2516	753

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Tahun 2016

2. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Koperasi (KUD maupun non KUD) diharapkan semakin besar peranannya dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang antara lain melalui pemberian tambahan modal kegiatan usaha, pembinaan manajemen, mengikutsertakan koperasi dalam mengelola berbagai bantuan pemerintah, dan lain-lain.

Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan non Koperasi Unit Desa (KUD) selama kurun waktu 2011-2015 tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan atau cenderung konstan, akan tetapi menurun pada tahun 2015 pada Non KUD. Pada tahun 2011, jumlah KUD tercatat sekitar 12 unit dan pada akhir tahun 2015 hanya bertambah 1 unit KUD menjadi 13 unit. Begitupun dengan koperasi swasta/koperasi non KUD, dimana pada tahun 2011 jumlah koperasi non KUD sebanyak 177 unit dan pada tahun 2015 tumbuh menjadi 206 unit.



Tabel 2.57.
Jumlah Koperasi Dan Anggota Menurut Jenisnya
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015

No	Tahun	KUD		NON KUD	
		Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1	2011	12	1247	177	11743
2	2012	13	1412	185	11258
3	2013	13	1247	186	11700
4	2014	13	1412	208	13827
5	2015	13	1419	206	11984

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016

3. Ketenagakerjaan

Angkata kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang dari 15 tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memiliki kecenderungan meningkat atau menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. Hal ini dikarenakan faktor alamiah, yakni kelahiran, kematian dan pergeseran jumlah penduduk. Angka pengangguran disefenisikan sebagai penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan , mempersiapkan usaha, merasa mungkin tidak mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 sebanyak 76.738 orang sedangkan tingkat pengangguran sebesar 4.14 persen.

Tabel 2.58.
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2015

No	Jenis Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	L+P
1	Angkatan Kerja	82.43	58.45	70.44
		(44.907)	(31.831)	(76.738)
	Bekerja	95.66	96.14	95.86
		(42.960)	(30.603)	(73.563)
	Pengangguran Terbuka	4.34	3.86	4.14
		(1.947)	(1.228)	(3.175)
	Pernah Bekerja/Berpengalaman	15.92	66.86	35.62
		(310)	(821)	(1.131)
	Tidak Pernah Bekerja/Belum Berpengalaman	84.04	33.14	64.38
		(1.637)	(407)	(2.044)
2	Bukan Angkatan Kerja	17.57	41.55	29.56
		(9.574)	(22.630)	(3.224)
	Sekolah	54.18	21.02	30.88
		(5.187)	(4.757)	(9.944)
	Mengurus Rumah Tangga	19.44	70.77	55.51
		(1.861)	(16.016)	(17.877)



	Lainnya	26.38	8.21	13.61
		(2.526)	(1.857)	(4.383)
	Jumlah/Total	100.00	100.00	100.00
		(54.481)	(54.461)	(108.942)

Sumber : Sakernas Agustus 2016 Kabupaten Bengkulu Selatan

4. Pembangunan Dan Pemberdayaan gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dalam setiap sektor pembangunan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sama seperti IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tergolong tinggi dibandingkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.59.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu 2010- 2014

No.	Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bengkulu Selatan	91,71	91,82	92,16	93,60	94,00
2	Rejang Lebong	91,57	92,26	92,43	92,44	92,55
3	Bengkulu Utara	89,87	90,29	90,57	91,09	91,32
4	Kaur	81,63	83,15	84,39	85,34	85,66
5	Seluma	81,33	82,81	83,29	83,51	84,80
6	Muko Muko	82,58	82,95	83,13	83,84	84,25
7	Lebong	89,02	89,83	89,85	90,45	91,11
8	Kepahiang	91,11	92,42	93,73	93,75	94,99
9	Bengkulu Tengah	78,38	78,53	80,54	80,83	84,68
10	Kota Bengkulu	91,48	92,59	93,53	94,34	95,71
	BENGKULU	88,88	89,47	90,51	90,55	91,02

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indikator-indikator itu adalah indeks keterwakilan parlemen, indeks pengambilan keputusan, dan indeks distribusi pendapatan. Nilai indeks bernilai antara 0 – 100 persen. Artinya, bila nilai IDJ semakin tinggi maka perempuan semakin berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah diatas 50, walaupun tidak terlalu tinggi ,akan tetapi keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi sudah mulai terlihat.



Tabel 2.60.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu 2012- 2014

No.	Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bengkulu Selatan	62,06	63,45	58,63
2	Rejang Lebong	56,69	57,23	57,76
3	Bengkulu Utara	64,38	64,81	65,15
4	Kaur	60,05	60,77	61,69
5	Seluma	58,98	68,56	66,86
6	Muko Muko	54,27	54,21	59,74
7	Lebong	69,50	69,77	77,91
8	Kepahiang	67,70	66,65	77,61
9	Bengkulu Tengah	62,70	64,50	66,22
10	Kota Bengkulu	75,21	75,64	75,97
	BENGKULU	69,57	73,45	68,76

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa sektor yang secara signifikan mampu memberikan kontribusi bagi terbentuknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana sektor-sektor tersebut bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB saat ini dibagi kedalam 17 kategori lapangan usaha dari sebelumnya 9 (sembilan) sektor. Adapun kategori atau lapangan usaha utama di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 38,17 persen terhadap total pendapatan regional, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor sebesar 14,55 persen, dan kategori rasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,6 persen. Meskipun terdapat 57 persen penduduk yang bekerja di sektor pertanian, namun kontribusinya terhadap pendapatan regional tercatat hanya 38,17 persen saja di tahun 2015.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pendukung pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka mobilitas kegiatan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh aktivitas transportasi yang merupakan tulang punggung distribusi baik distribusi barang maupun distribusi jasa penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bengkulu Selatan dilalui oleh jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Kaur yang merupakan jalan lintas barat. Adapun rincian jalan



berdasarkan Status Jalan tahun 2015 yaitu:

Berdasarkan status antara lain :

1. Panjang Jalan Negara : 110,477 Km
2. Panjang Jalan provinsi : 128,800 Km
3. Panjang Jalan Kabupaten : 1.343,937 Km

Terkait dengan penyediaan infrastruktur tersebut permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi), jalan sentra produksi dan lainnya merupakan prasarana penting dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan sedangkan pembangunan jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil. Adapun data jalan menurut kondisi dan kelas jalan sebagai berikut :

Tabel 2.61
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kelas Jalan
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 - 2015 (Km)

Kondisi dan Kelas Jalan	Tahun		
	2013	2014	2015
Kondisi Jalan			
Baik	663,765	672,218	578,470
Sedang	64,465	84,072	8,300
Rusak	-	6,400	86,610
Rusak Berat	-	10,820	431,310
Kelas Jalan			
I	27,000	27,000	-
II	0,665	0,665	-
III	0,835	0,835	-
III A	-	-	-
III B	244,320	244,320	-
III C	119,700	138,700	761,820
Tidak Dirinci/Lannya	335,710	361,990	342,870
Jumlah	728,230	773,510	1.104,690

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan 2015

Dari tabel menggambarkan kondisi dan kelas jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2013 – 2015. Pada tahun 2015, ada 110,447 km jalan negara, 128,8 km jalan provinsi, dan 1.343,937 km jalan kabupaten yang telah dibangun. Dari panjang jalan kabupaten yang ada, sekitar 47 persen dalam keadaan rusak. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah terhadap kualitas jalan yang tentu akan berpengaruh terhadap kelancaran transportasi baik di perkotaan maupun perdesaan yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dimana transportasi merupakan faktor penunjang utama dalam setiap kegiatan masyarakat.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu



yang memiliki PDRB dan pertumbuhan ekonomi menengah diantara seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Rendahnya tingkat PDRB ini mengindikasikan masih tertinggalnya proses pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, kondisi ini dapat juga mengindikasikan banyaknya permasalahan pembangunan yang harus yang dibenahi.

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kemampuan yang rendah untuk menarik investor. Banyak hal menjadi penyebab rendahnya minat investor masuk ke Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya perizinan yang relatif sulit, infrastruktur yang kurang memadai, jalur transportasi yang terbatas.

Tabel 2.54 memperlihatkan bahwa dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong tidak memiliki PMA dan PMDN yang tercatat di LKPM BKPM Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat diasumsikan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam menarik investor ke daerahnya. Kemampuan daerah ini sangat tergantung pada daya tarik yang dimiliki dan kemampuan pengelola daerah dalam memasarkan daerahnya.

Tabel 2.62.

Realisasi investasi Kabupaten/Kota berdasarkan LKPM di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Kabupaten/Kota	PMDN		PMA	
	LKPM	Investasi (Miliar Rp)	LKPM	Investasi (Miliar Rp)
Mukomuko	3	440	6	705
Bengkulu Utara	8	761	9	446
Kaur	-	-	1	188
Lebong	1	416	2	9,2
Bengkulu Selatan	-	-	1	188
Bengkulu Tengah	5	320	3	114
Kepahiang	-	-	1	7,7
Rejang Lebong	-	-	-	-
Seluma	5	128	1	4,1
Kota Bengkulu	5	2085	3	14,1
TOTAL	27	4145	26	1448,6

Sumber : BKPM Provinsi Bengkulu, Tahun 2015

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan



kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.63

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
	Pertumbuhan PDRB	-	14,12	13,00	12,65	12,30	11,51	(%)	
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	2.220,3	2.366,4	2.518,8	2.673,1	2.825,6	2970,9	(Juta Rupiah)	
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	2.220,3	2.533,9	2.863,3	3.225,3	3.621,9	4038,7	(Rp)	
	Pertumbuhan Ekonomi	-	6,58	6,44	6,17	5,67	5,14	(%)	
	Laju Inflasi Kabupaten	9,08	3,96	4,61	9,58	10,85	3,25	(%)	
	Indeks Gini	-	-	-	-	-	-		
	PDRB per kapita Berdasarkan Harga Berlaku	15,48	17,44	19,46	21,51	23,79		(juta Rp)	
	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan	15,48	16,29	17,12	17,96	18,74		(juta Rp)	
	IPM	65,84	66,50	66,77	67,61	68,28	68,57	(%)	
	Angka Kemiskinan	22,64	22,55	22,98	22,59	21,91	22,76	(%)	
	Fokus Kesejahteraan Sosial								
	Pendidikan								
	Angka Melek Huruf	96,47	96,51	96,54	96,57	96,9	97,6	(%)	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,14	8,24	8,36	8,71	8,75	8,76	(tahun)	
	Angka Partisipasi Murni :								
	SD	96,35	92,27	96,83	98,2	98,4	96,74	(%)	
	SLTP	68,18	70,28	72,65	76,37	80,2	89,62	(%)	
	SLTA	64,14	62,94	51,54	72,98	78,8	77,88	(%)	
	Angka Partisipasi Kasar :								



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SD	114,09	108,44	113,4	108,99	116,8	107,66	(%)	
	SLTP	77,13	95,45	95,64	83,53	87,3	104,7	(%)	
	SLTA	86,3	79,86	72,38	90,26	98,1	96,53	(%)	
	Angka Pendidikan yang tamat	11,59	11,88	12,20	12,78	13,22	13,45	(tahun)	
	Angka Partisipasi Sekolah (Orang) :								
	1. Pendidikan Dasar	96,7	92,8	97,1	98,3	98,4		(%)	
	2. Pendidikan Menengah	89,9	89,9	93,3	89,2	91,6		(%)	
	Persentase Kelulusan Siswa :								
	SD	96,34 %	97,34 %	99,00 %	99,93 %	100 %		(%)	
	SLTP	99,00 %	93,14 %	95,36 %	92,77 %	97,97 %		(%)	
	SLTA	98,20 %	93,99 %	94,80 %	92,77 %	99,00 %		(%)	
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah :								
	Pendidikan Dasar	71,5	66,3	69,9	66,3	70,2		(%)	
	Pendidikan Menengah	35,3	36,9	35,1	39,5	41,9		(%)	
	Jumlah Prestasi Olahraga Berskala Nasional	50,5	50,5	80,8	81,3	90,2		(%)	
	Jumlah Pemuda Pelopor	50,5	85,7	51,2	51,2	47,8		(%)	
	Kesehatan								
	Angka Kemataian Bayi per 1.000 kelahiran bayi	-	-	16	41	27	33	AKB	
	Usia Harapan Hidup	66,95	67,00	67,03	67,05	67,06	67,06	(tahun)	
	Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan	-	-	-	2	3	3	AKI	
	Persentase balita gizi buruk	0,13	0,14	0,11	0,08	0,08	0,05	(%)	
	Rasio Posyandu per satuan Balita	13,95	14,13	13,74	13,70	13,92	14,42	Rasio	
	Rasio Puskesmas. Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	Rasio	
	Persentase Penduduk yang menjadi peserta Jamkes/BPJS	-	-	-	-	-	63,01		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Rasio Penggunaan Tempat tidur (BOR) di RSUD	64,1 %	62,08 %	62,3 %	83,08 %	69,58 %		(%)	
	Rata-rata Lamanya Pasien dirawat (ALOS) di RSUD	-	3 Hari	3 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	(Hari)	
	Angka Perputaran tempat tidur (BTO) di RSUD	-	-	-	-	-		(Kali)	
	Nilai Tenggang Perputaran (TOI) di RSUD	3,10 Hari	2,7 Hari	2,4 Hari	0,82 Hari	2,35 Hari		(Kali)	
	Jumlah Penduduk Miskin Yang dilayani Jamkesda	36	184	97	194	-	12.478	Orang	
	Kesempatan Kerja								
	Persentase Penduduk yang bekerja	71.130 (74,23 %)	72.710 (73,78)	66.449 (67,90)	65.207 (66,65)	71.698 (66,84)	73.563 (67,52)	(%)	
	Pengangguran terbuka	2.446 (3,32)	1.568 (2,11)	2.721 (3,93)	2.846 (4,18)	2.611 (2,43)	3.175 (2,91)	(%)	
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan SLTA ke atas	26.121 (36,72 %)	27.990 (38,49)	26.532 (39,92)	25.285 (38,78)	26.753 (37,31)	31.518 (42,84)	(%)	
	Nilai UMR	780.000	815.000	930.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	(Rp.)	
	Sosial								
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	734	1.340	14.892	7.763	-	-	(Orang)	
	KRSE yang Mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	-	-	-	-	90		
	Kriminalitas								
	Angka kriminalitas yang tertangani	165	184	178	151	345	122		
	Jumlah Kasus KDRT	16	1	12	14	62		Kali	
	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	4	3	2	1	17		Kali	
	Jumlah Kasus Kejahatan Internet (Cyber Crime)							kali	
	KEPENDUDUKAN								
	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,32 143.41	1,29 145.267	1,27 147.106	1,19 150.601	1,17	1,06 152.194	(%)	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7							
	Jumlah Penduduk	142.964	145.153	146.891	148.854	150.601	152.194	(Jiwa)	
	Rasio Akseptor KB	63,87	63,87	89,16	91,42	93,55	93,42	(%)	
	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	28.806	28.806	30.027	31.251	32.524	34.398		
	Jumlah Peserta KB	18.398	18.398	26.934	28.569	30.427	32.135	(Orang)	
	KEAGAMAAN								
	Jumlah Tempat Ibadah	354	354	361	375	375	375	(Unit)	
	Seni Budaya dan Olahraga								
	Jumlah Grup Kesenian	3	4	6	6	6	6		
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Jumlah Jenis Perizinan Yang Dilayani	-	-	1	39	40		kali	
	Rata-Rata Lama Waktu Penyelesaian Perizinan	-	-	3 Hari	3 Hari	3 Hari		hari	
	Perhubungan								
	Jumlah Pelabuhan terminal bis	1	1	1	1	1	1		
	Frekuensi Angkutan Darat								
	Jumlah Kasus Kecelakaan Transfortasi Darat	-	-	82	48	42			
	Pelayanan Penunjang								
	Penanaman Modal								
	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri	-	-	-	6 (PT)	72			
	Jumlah UMKM	-	-	-	-	1.234		orang	
	Persentase UMKM Yang difasilitasi Permodalan	-	-	-	-	-		unit	
	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	13	12	13	13	13	13		
	Jumlah Koperasi Non KUD	164	177	185	186	202	206	unit	
	Pertanahan								
	Persentase Luas lahan bersertifikat	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %		%	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	Persentase	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa/Kelurahan Yang Menerapkan TTG								
	Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerapkan BBGR	0,75 %	0,33 %	0,72 %	0,50 %	0,56 %	0,59 %		
	Jumlah LSM	18	23	20	22	24	23		
	Perpustakaan								
	Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	60	61	unit	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	5.213	6.481	11.033	10.413	13.514	8.125 (sd bulan Oktober)	orang	
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masy								
	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	53/10.000	55/10.000	58/10.000	58/10.000	54/10.000	-	rasio	
	Persentase Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditertibkan	3 %	3 %	1,6 %	1,96 %	1,96 %	-	%	
	Indeks Demokrasi								
	Persentase Peraturan Daerah Yang Diselesaikan	93,75	58,33	100	100	100	15,38	%	
	ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN								
	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP di atas CC	-	-	-	-	-	-	%	
	Persentase temuan kasus yang diselesaikan	6,4 %	56,25 %	56,25 %	85 %	88,9 %	-	%	
	Persentase kesinkronan program antara								
	a. RPJMD dengan RKPD	-	105,9 %	105,2 %	107,8	108,31	107,83	%	
	b. RKPD dengan APBD	-		78,32 %	77,31 %	82,89 %		%	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur								
	Aksesibilitas Daerah								
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	23,97	42,23	96,14	91,15	87	53,11 -	%	
	Persentase Jaringan							%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Irigasi Wewenang Kabupaten Dalam Kondisi Baik								
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	44,4	49,1	47,9	47,0	44,08	43,8	%	
	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	-	-	-	-		-	%	
	Persentase Panjang Abrasi Pantai Yang Dinormalisasi						-	%	
	Fasilitas Bank								
	Jumlah Bank, Kantor Kas, ATM	19	22	25	28	28	28	Unit	
	Fasilitas Listrik								
	Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Listrik (Rasio Elektrifikasi)	78,6	80,6	86,1	89,8	94,6	98,24	rasio	
	Ketersediaan Penginapan								
	Jumlah Penginapan/Hotel	13	13	16	16	16	17	Unit	
	Sumber Daya Manusia								
	Persentase Penempatan Pegawai Pemerintah Kab Berdasarkan Kulifikasi Pendidikan (%)	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Diklat Yang Dilaksanakan	-	-	5	3	3	4		
	Perekonomian Dan Sumber Daya Alam								
	Pertanian								
	Luas Areal Sawah Fungsional	11.042	11.290	11.290	11.290	11.290	11.036	(Ha)	
	Produktifitas Padi Sawah	4,05	4,42	4,73	4,08	4,53	4,85	(Ton/Ha)	
	Jumlah Produksi Padi	62.533	66.641	78.864	77.469	88,098	88.662	(Ton)	
	Jumlah Produksi Palawija Jagung	6.424	4.898	11.753	9.582	14,814	8.254	(Ton/Th)	
	Jumlah Produksi Hortikultura :								



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Buah-Buahan	36.721	85.983	50.182	51.633	-	-	(kuintal)	
	Sayuran	13.104	41.198	37.864	34.619	-	-	(kuintal)	
	Produksi Kelapa Sawit	12.971,76	13.806,3	13.594,1	13.729,87	-	-	(Ton/T h)	
	Produksi Karet	4.271	4.585	4.605	4.608	-	-	(Ton/T h)	
	Jumlah Ternak Besar	21.500	28.457	16.832	17.610	-	-	(Ekor/T h)	
	Jumlah Ternak Kecil	10.742	24.614	22.998	23.052	-	-	(Ekor/T h)	
	Jumlah Ternak Unggas	-	-	-	-	-	454,917	Ekor	
	Jumlah Kelompok Hutan Aktif	2	2	7	8	8	12		
	Jumlah Kelompok Tani								
	Kelas Pemula	-	-	-	-	1.083	1.137	Orang	
	Kelas Lanjut					99	161	Orang	
	Kelas Media					9	15	Orang	
	Kelas Utama	-	-	-	-	-	-	Orang	
	Jumlah GAPOKTAN Aktif	78	95	108	118	132	132	Orang	
	Jumlah Pokdakan Aktif								
	Kelas Pemula	-	-	-	-	-	12		
	Kelas Media	-	-	-	-	-	0		
	Kelas Utama	-	-	-	-	-	1		
	Jumlah KUB Nelayan Aktif	-	-	-	-	-	-		
	Kelas Pemula	-	-	-	42	58	60		
	Kelas Media	-	-	-	-	-	-		
	Kelas Utama	-	-	-	-	-	-		
	Angka Ketersediaan Pangan	75.759	79.365	70.632	75.531	83.077	-	(Ton/T h)	
	Nilai Tukar Petani	104,68	102,98	102,42	99,89	96,35	93,92	(Rasio)	
	Kehutanan Dan Pertambangan								
	Luas Kawasan Hutan Yang Direboisasi	-	-	-	250	250	225	(Ha)	
	Jumlah Kasus Ilegal Logging Yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	-		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Malampaui(>)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Produksi Hasil Hutan/kayu	-	4.964,63	5.832,85	4.686,3	1.426,00	639,000	(M3)	
	Jumlah Pendapatan Daerah Dari Sektor Pertambangan	-	-	-	313.014.854	406.279.580	-		
	Perikanan Dan Kelautan								
	Produksi Perikanan Tangkap	1.069,18	1.189,82	1.088,42	1.222,25	1.774,25	-	(Ton/T h)	
	Produksi Perikanan Budidaya	2.156,08	4.128,01	5.384,21	6.520,12	10.030,3	-	(Ton/T h)	
	Nilai Tukar Nelayan	-	108,30	108,56	100,43	99,39	96,45	(Rasio)	
	Lingkungan Hidup								
	Rasio Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	-	-	-	-	(%)	
	Jumlah Laporan Pencemaran	5	4	9	3	3	3		
	Jumlah Dokumen UKL/UPL	4	4	7	10	15	30	(Unit/T h)	



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dijabarkan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara umum, kondisi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan masih memerlukan kebijakan yang konstruktif untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah. Hal ini dikarenakan komposisi APBD masih didominasi oleh penerimaan pendapatan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat kecil sekali hanya sebesar 5 persen dari total APBD. Disamping itu, komposisi belanja pegawai yang masih mendominasi belanja APBD menjadi permasalahan tersendiri karena berimplikasi langsung pada terbatasnya anggaran untuk pembangunan (belanja modal)

Dalam rangka optimalisasi pencapaian program prioritas, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mendorong terjadinya pergeseran kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari prinsip *money follow function* menjadi *money follow priority program*. Kebijakan ini menitikberatkan pada pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan melalui program-program prioritas. Dengan demikian, capaian target, output dan outcome yang ingin dicapai dari program prioritas yang telah ditetapkan bisa lebih optimal.

Penganggaran terhadap kegiatan pembangunan sudah selayaknya dilakukan dengan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan target yang ingin dicapai dari program prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini menuntut pengelolaan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berazaskan :

1. *Fungsi otorisasi*, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. *Fungsi Perencanaan*, menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. *Fungsi pengawasan*, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. *Fungsi alokasi*, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. *Fungsi distribusi*, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. *Fungsi stabilisasi*, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Adapun Komponen Pendapatan Daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah yang bersal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retrebusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;



2. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan sejumlah fungsi tersebut, penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun 2016-2021, harus merujuk kepada sejumlah norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut meliputi:

1. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah*: merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan dan atau program;
2. *Disiplin Anggaran*: program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. *Keadilan Anggaran*: pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*: dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan *vertical reporting*, tetapi lebih penting daripada itu juga melakukan *horizontal reporting* sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban publik meliputi beberapa hal mendasar, yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas regulasi daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan telah memberikan pelayanan publik yang cepat, reponsif dan murah. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan *feasible* dan *reliable*, serta apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintahan terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.



3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Selama kurun waktu antara tahun 2012-2016, Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seluruhnya berjumlah Rp. 1.850.964.377.543,59 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 69.548.342.058,15 atau sekitar 3,76 persen, dana perimbangan Rp. 1.531.436.591.857,00 atau sekitar 82,73 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 249.979.443.628,00 atau sekitar 13,5 persen. Dari kondisi ini terlihat dengan jelas bahwa komposisi pendapatan daerah tersebut masih menunjukkan ketergantungan daerah yang cukup besar terhadap pemerintah pusat.

Tabel 3.1.
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2016

Uraian		2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN		552,128,920,442.09	602,151,769,693.54	696,683,687,407.96	811,914,424,453.00	947,438,846,561,56
1	Pendapatan Asli Daerah	14,669,257,351.56	18,795,419,858.63	36,083,664,847.96	48,885,964,453.00	46,335,718,372,56
a	Pajak Daerah	2,174,355,000.00	3,082,430,000.00	3,714,920,000.00	4,639,032,000.00	5,311,033,998,60
b	Retribusi Daerah	9,546,415,560.00	10,314,562,060.00	19,243,812,830.00	25,206,213,034.00	27,307,205,284,00
c	Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan	1,161,486,791.56	1,867,726,750.63	3,436,959,709.96	3,458,616,039,00	3,436,959,709,96
d	Lain-lain PAD yang sah	1,787,000,000.00	3,530,701,048.00	9,687,972,308.00	15,582,103,380,00	10,280,519,380,00
2	Dana Perimbangan	463,981,339,926.00	510,898,088,571.00	556,557,163,360.00	604,725,507,000.00	697,442,148,420,00
a	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	23,121,707,926.00	20,360,573,571.00	16,620,435,360.00	27,458,175,000,00	28,249,994,000,00
b	DAU	396,665,102,000.00	444,045,665,000.00	490,436,878,000.00	511,116,682,000,00	564,137,639,000,00
c	DAK	44,194,530,000.00	46,491,850,000.00	49,499,850,000.00	66,150,650,000,00	105,054,515,420,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	73,478,323,164.53	72,458,261,263.91	104,042,859,200.00	158,302,953,000.00	203,660,979,769,00
a	Hibah	-	-	-	-	-
b	Dana Darurat	-	-	-	-	-
c	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	10,896,044,164.53	12,233,476,263.91	12,233,476,200.00	16,093,500,000,00	11,565,382,769,00
d	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	-	3,787,200,000.00	2,000,000,000.00	-	-
e	Dana penyesuaian dan otonomi Daerah	62,582,279,000.00	56,437,585,000.00	89,809,383,000.00	142,209,453,000.00	192,095,597,000,00
Jumlah Pendapatan		552,128,920,442.09	602,151,769,693.54	696,683,687,407.96	811,914,424,453,00	947,438,846,561,56

Sumber : Dinas DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2016

Pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2012-2016 bersifat fluktuatif, mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan pendapatan masih bisa ditingkatkan dengan cara menggali sumber – sumber potensi pendapatan daerah. Hal ini merupakan peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi perimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*) di masa yang akan datang.

Pendapatan daerah tertinggi diperoleh Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015, meskipun tidak terlalu signifikan pertumbuhannya dari tahun-tahun sebelumnya namun pertumbuhan yang positif ini mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap upaya pembangunan daerah. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan oleh menurunnya pos-pos penyumbang pendapatan.



Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi komponen Belanja Daerah, proporsi komponen Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Selama Tahun Anggaran Tahun 2013-2015

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Belanja Tidak Langsung	61,49	56,91	57,19	58,84	59,22
a	Belanja Pegawai	58,05	55,42	54,00	50,50	42,76
b	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Belanja Hibah	3,04	0,30	1,97	2,79	1,76
e	Belanja Bantuan Sosial	0,03	0,58	0,62	0,03	0,03
f	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Belanja Bantuan Keuangan	0,27	0,53	0,45	5,45	14,66
h	Belanja tidak tetap/tak terduga	0,10	0,08	0,05	0,07	0,00
2	Belanja Langsung	38,51	43,09	42,81	41,16	40,78
a	Belanja Pegawai	5,60	5,89	6,32	5,62	4,13
b	Belanja Barang dan Jasa	16,68	18,15	17,54	15,75	16,53
c	Belanja Modal	16,23	19,06	18,95	19,79	20,13
Jumlah Belanja		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas DPPKAD Kab Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017

3.1.2. Neraca Daerah

Tabel 3.3
NERACA DAERAH Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	URAIAN	2015 (Unaudited)	2014 (Audited)
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	- Kas	44.467.157.655,96	60.826.574.989,00
1.1.2	- Investasi Jangka Pendek	-	-
1.1.3	- Piutang	4.083.916.799,00	4.083.916.799,00
1.1.4	- Piutang Lain-lain	2.976.581.354,49	2.976.581.354,49
1.1.5	- Persediaan	5.267.904.368	5.267.904.368
1.1.6	Penyisihan Piutang	(4.133.319.179,50)	1.024.503.875,00
1.1.7	Bagian Lancar Pinjaman/Tagihan	975.037.875,00	975.037.875,00
	JUMLAH ASET LANCAR		
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	- Investasi Non Permanen	-	-
1.2.2	- Investasi Permanen	12.870.000.000,00	11.870.000.000,00
2.2.3	- Cadangan Penyisihan Dana Bergulir	-	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	- Tanah	158.817.586.606,00	158.792.686.606,00
1.3.2	- Peralatan dan Mesin	186.457.303.233,02	176.570.590.552,58
1.3.3	- Gedung dan Bangunan	438.630.804.872,59	402.777.694.007,60



NO	URAIAN	2015 (Unaudited)	2014 (Audited)
1.3.4	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	529.614.349.697.94	414.067.623.916.94
1.3.5	- Aset Tetap Lainnya	21.975.418.885.25	20.946.625.135.24
1.3.6	- Konstruksi dalam Pengerjaan	1.712.720.100.00	6.409.022.954.00
1.3.7	- Akumulasi Penyusutan	(449.756.356.051.86)	-
	JUMLAH ASET TETAP	887.451.827.342.94	1.179.564.243.172.36
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	-	-
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-
1.5.2	- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
1.5.3	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
1.5.4	- Aset Tidak Berwujud	549.440.000.00	516.540.000.00
1.5.5	- Aset Lain-lain	117.253.383.365.95	114.626.894.147.95
	JUMLAH ASET LAINNYA	117.802.823.365.95	115.143.434.147.95
	JUMLAH ASET	1.072.049.641.198.51	1.379.683.188.830.80
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
2.1.2	- Utang Bunga	-	-
2.1.3	- Utang Pajak	-	-
2.1.4	- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
2.1.5	- Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.6	- Utang Beban	306.919.173.00	-
2.1.7	- Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	306.919.173.00	-
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	- Utang Dalam Negeri	-	-
2.2.2	- Utang Luar Negeri	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	60.826.574.989.00
3.1.2	- Cadangan untuk Piutang	-	7.011.032.153.49
3.1.3	- Cadangan untuk Persediaan	-	5.267.904.368.00
3.1.4	- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-	0.00
3.1.5	- Pendapatan yang Ditangguhkan	-	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	
3.2.1	- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	11.870.000.000.00
3.2.2	- Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	1.179.564.243.172.36
3.2.3	- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	-	115.143.434.147.95
3.2.4	- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	-	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		1.306.577.677.320,31
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	-	
3.3.1	- Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA	-	1.379.683.188.830.80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.072.049.641.198.51	1.379.683.188.830.80



NO	URAIAN	2015 (Unaudited)	2014 (Audited)
	DANA		

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, April 2016

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) yang dibantu lembaga berupa satuan kerja (OPD) yang bertindak sebagai *Chief Operation officer* (COO). Prinsip pemisahan ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya *checks and balances* serta mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah. Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah agar struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah lebih mengarah pada upaya pencapaian tujuan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan skala nasional.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun system akuntansi. Seiring dengan dilakukannya penyempurnaan di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya keuangan publik secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) dan melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Disamping itu pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, mendasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi.

Selama kurun waktu 2012-2016, Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seluruhnya berjumlah Rp. 1.957.601.001.838,48 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.142.214.428.795,48 atau sekitar 58.35 % dari total belanja dan belanja langsung sebesar Rp.815.386.573.043,00 atau sekitar 41,65 %.



Tabel 3.4
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Belanja Tidak Langsung	349,696,591,382.70	362,232,473,146.04	430,285,364,266.74	512,967,810,534.31	601,054,367,951.26
a	Belanja Pegawai	330,147,116,682.70	352,743,898,446.04	406,289,083,566.74	440,222,488,704.31	434,044,491,787.00
b	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
c	Belanja Subsidi	0	-	761,376,000.00	0	0
d	Belanja Hibah	17,304,300,000.00	1,933,200,000.00	14,857,330,000.00	24,355,939,230.00	17,909,611,600.00
e	Belanja Bantuan Sosial	172,600,000.00	3,666,800,000.00	4,639,000,000.00	260,000,000.00	303,927,875.00
f	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
g	Belanja Bantuan Keuangan	1,524,000,000.00	3,390,000,000.00	3,390,000,000.00	47,529,382,600.00	148,794,336,689.26
h	Belanja tidak tetap/tak terduga	548,574,700.00	498,574,700.00	348,574,700.00	600.000.000.00	-
2	Belanja Langsung	219,013,203,850.00	274,305,188,558.00	322,068,180,635.00	358,773,188,907.69	413,936,818,232.90
a	Belanja Pegawai	31,834,017,300.00	37,485,093,100.00	47,544,953,650.00	49,015,239,700.00	41,891,515,000.00
b	Belanja Barang dan Jasa	94,886,827,469.00	115,524,438,818.00	131,942,366,311.00	137,278,104,978.00	167,740,737,776.90
c	Belanja Modal	92,292,359,081.00	121,295,656,640.00	142,580,860,674.00	172,479,844,229.69	204,304,565,456.00
Jumlah Belanja		568,709,795,232.70	636,537,661,704.04	752,353,544,901.74	871,740,999,442.00	1,014,991,186,184.16

Sumber : Dinas DPPKAD Kab Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa belanja APBD Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terdapat peningkatan. Peningkatan belanja APBD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar berasal dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan komponen belanja langsung. Kondisi ini menunjukkan fenomena yang tidak seimbang dimana belanja pegawai yang tercakup dalam belanja tidak langsung mengalami peningkatan positif setiap tahunnya, namun belanja untuk pembangunan yang tertampung dalam belanja langsung mengalami pertumbuhan negatif setiap tahunnya. Kondisi ini harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga kedepannya pembangunan semakin meningkat dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan semakin maju dan sejahtera.

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi APBN (TP dan UB) di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2011-2016

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran TP dan UB (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	44.981.064.000	43.781.545.390
2	2012	10.537.926.000	10.234.294.655
3	2013	61.156.186.000	56.753.044.900
4	2014	33.650.377.000	33.494.387.650
5	2015 *	36.759.581.000	9.288.523.400
6	2016 *	18.504.878.000	-
Jml Keseluruhan		205.590.012.000	153.551.759.995

Sumber : KPPN Wilayah Provinsi Bengkulu Kab Bengkulu Selatan

* Realisasi Tahun 2015 sampai bulan September

* Tahun 2016 hanya Pagu Anggaran TP Sampai Bulan 31 Maret



Dana APBN (TP dan UB) dilihat dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011 Rp 55.981.064.000 turun menjadi Rp 10.537.926.000 dan naik kembali pada tahun 2013 sebesar Rp 61.156.186.000 dan kembali turun menjadi Rp 36.759.581.000 pada tahun 2015 dan secara keseluruhan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dana APBN TP dan UB sebesar Rp 205.590.012.000 dan realisasi sebesar Rp 153.551.759.995. Penurunan ini disebabkan beralihnya dana Urusan Bersama (UB) dari Program PNPM ke alokasi khusus berupa dana ADD

Tabel 3.6
Alokasi Dana APBD Provinsi Bengkulu Untuk Kab Bengkulu Selatan
Tahun 2012 -2016

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)
1	2012	17.815.077.923
2	2013	27.746.684.800
3	2014	36.072.819.610
4	2015	37.614.614.926
5	2016	50.724.201.000

Sumber : Bappeda Provinsi Bengkulu, 2016

Alokasi Dana APBD Provinsi Bengkulu Untuk Kab Bengkulu Selatan pada tabel diatas menunjukkan kenaikan pada setiap tahunnya.

Tabel 3.7
Alokasi Dana APBN di Provinsi Bengkulu Untuk Kab Bengkulu Selatan
Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)
1	2012	-
2	2013	74.022.093.000
3	2014	60.652.998.000
4	2015	134.930.488.000
5	2016	71.018.036.000

Sumber : Bappeda Provinsi Bengkulu, 2016

Alokasi Dana APBN di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dikarenakan tidak adanya dana UB .

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 - 2015

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	340,685,748,018.00	378,802,819,512.00	412,461,414,635.00
a	Belanja Gaji Dan Tunjangan	284,657,089,549.00	297,169,111,143.00	328,873,410,700.00
b	Belanja Tambahan Penghasilan	54,460,828,351.00	79,911,908,300.00	82,176,423,210.00
c	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	908,370,000.00	1,113,775,000.00	921,600,000.00
d	Biaya Pemungutan PBB	344,510,246.00	210,809,137.00	158,916,750.00
e	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	314,949,872.00	397,215,932.00	331,063,975.00
2	Belanja Langsung	166,998,065,985.80	175,149,282,166.00	246,978,629,612.44



a	Belanja Honorarium PNS	21,348,382,200.00	29,830,438,150.00	20,478,948,570.00
b	Belanja Honorarium NonPNS	13,480,033,000.00	15,857,558,245.00	17,280,305,000.00
c	Belanja Uang Lembur	752,189,800.00	595,621,500.000	543,643,500.00
d	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	388,200,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00
e	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	2,533,315,000.00	1,878,827,000.00	1,851,365,000.00
f	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	350,000,000.00	175,000,000.00	-
g	Belanja Makan Minum Pegawai	7,636,150,678.00	8,769,123,850.00	6,779,525,010.00
h	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari – Hari Tertentu	882,116,000.00	353,280,000.00	395,900,000.00
i	Belanja Perjalanan Dinas	40,296,855,110.00	42,800,826,967.00	36,096,308,984.00
j	Belanja Perjalanan Pindah tugas	-	-	-
k	Belanja Pemulangan Pegawai	40,800,000.00	18,550,000.00	12,950,000.00
l	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleir, peralatan dan perlengkapan dll)	92,770,057,197.80	126,379,007,271.00	163,478,683,548.44
Total		507,683,814,003.80	553,952,101,678.00	659,440,044,247.44

Sumber : Dinas DPPKAD Kab Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 - 2015

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran) (R)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2013	507,683,814,003.80	639,644,771,736.04	79,37
2	Tahun Anggaran 2014	553,952,101,678.00	753,853,544,901.74	73,48
3	Tahun Anggaran 2015	659,440,044,247.44	825,211,616,842.00	79,91

Sumber : Dinas DPPKAD Kab Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan investatif berdimensi dalam waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar Rp. 207,768,258,720.98 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 13.113.108.721.00 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 195.655.149.999.98 Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini :



Tabel 3.10
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penerimaan Pembiayaan					
a	Penggunaan SiLPA	22,819,140,590.61	37,493,002,042.50	57,169,857,493.78	64.885.104.486,04	41.712.288.650,44
b	Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	0	0	0	0	0
c	Penerimaan pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
d	Penerimaan Kembali pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
e	Penerimaan piutang Daerah	0	0	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	22,819,140,590.61	37,493,002,042.50	57,169,857,493.78	64.885.104.486,04	41.712.288.650,44
2	Pengeluaran Pembiayaan					
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
b	Penyertaan Modal	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
c	Pembayaran hutang pokok	2,465,187,825.01	1,400,253,167.78	0	200.000.000,00	0
d	Pemberian pinjaman ke perusahaan	0	0	0	0	0
e	Pemberian pinjaman dana bergulir	0	0	0	0	0
f	Pengembalian Dana Kepusat	2,238,265,800.00	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran	6,203,453,625.01	2,900,253,167.78	1,500,000,000.00	2.200.000.000,00	2.000.000.000,00

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2016 data sebelum perubahan

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan mengisi Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 - 2015

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	602,151,769,693.54	696,683,687,407.96	811.914.424.453.00
2.	Realisasi Belanja Daerah	636,537,661,704.04	752,353,544,901.74	871,740,999,442.00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,900,253,167.78	1,500,000,000.00	2.200.000.000,00
A	Defisit riil	-37,286,145,178.28	-57,169,857,493.78	-62,026,574,989.00
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	37,493,002,042.50	57,169,857,493.78	64.885.104.486,04
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-



NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	37,493,002,042.50	57,169,857,493.78	64.885.104.486,04
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	206,856,864.22	0.00	2,858,529,497.04

Sumber : Dinas DPPKAD Kab Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut.

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 - 2015

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	99.45	100.00	95.59
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-

Sumber : Dinas DPPKAD Kab Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Proyeksi dasar keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan menggunakan metode trend ekstrapolasi yang besaran persentase pertumbuhannya menyesuaikan dengan asumsi kondisi makro ekonomi daerah, yang mana untuk variabel pendapatan daerah lain-lain menggunakan pertimbangan besaran pertumbuhan rata-rata di periode 5 tahun sebelumnya. Khusus untuk persentase pertumbuhan dana perimbangan, oleh karena variabel ini merupakan variabel yang statis, di mana dana perimbangan yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan komponen yang disalurkan dari pusat, maka nilai besarnya sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini dana perimbangan diasumsikan akan bertumbuh berada di kisaran 10%-15%. Terkhusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) harus diikuti dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, karena DAK cenderung dipengaruhi oleh pelaksanaan kinerja atas Dana Alokasi Khusus yang diluncurkan sebelumnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah



seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Tabel 3.13
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan	Persentase
A	Belanja Tidak Langsung	430,285,364,266.74	464,469,197.934.00	82,682,446,267.57	16.12
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	304,090,729,166.74	332,155,250,704.31	28,064,521,537.57	8.45
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	100,284,579,400.00	106,367,238,000.00	6,082,658,600.00	5.72
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,113,775,000.00	930,000,000.00	(183,775,000.00)	(19.76)
4	Belanja Pemugutan Pajak Daerah	800,000,000.00	770,000.000	(30,000,000)	(3.90)
5	Belanja Subsidi	761,376,000.00	-	(761,376,000.00)	-
6	Belanja Hibah	14,857,330,000.00	24,355,939,230.00	9,498,609,230.00	39.00
7	Belanja Bantuan Sosial	4,639,000,000.00	260,000,000.00	(4,379,000,000.00)	(1,684.23)
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dan Partai Politik	3,390,000,000.00	47,529,382,600.00	44,139,382,600.00	92.87
9	Belanja Tidak Terduga	348,574,700.00	600,000,000.00	251,425,300.00	41.90
B	Belanja Langsung	179,487,319,961.00	184,817,969,678.00	5,330,649,717.00	2.88
1	Belanja Honorarium PNS	30,635,246,900.00	21,571,538,700.00	(9,063,708,200.00)	(42.02)
2	Belanja Honorarium Non PNS	16,256,602,750.00	17,376,595,000.00	1,119,992,250.00	6.45
3	Uang Lembur	653,104,000.00	624,370,000.00	(28,734,000.00)	(4.60)
4	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,530,384,383.00	10,579,050,735.00	48,666,352.00	0.46
5	Belanja Bahan/Material	12,667,572,968.00	14,676,185,889.00	2,008,612,921.00	13.69
6	Belanja Jasa Kantor	18,530,974,700.00	28,995,510,430.00	10,464,535,730.00	36.09
7	Belanja Premi Ausransi	5,259,801,675.00	199,500,000.00	(5,060,301,675.00)	(2,536.49)
8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,506,107,760.00	11,109,732,246.00	1,603,624,486.00	14.43
9	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,732,604,175.00	5,815,404,721.00	82,800,546.00	1.42
10	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	760,395,000.00	633,028,000.00	(127,367,000.00)	(20.12)
11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	198,250,000.00	197,143,000.00	(1,107,000.00)	(0.56)
12	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	451,460,100.00	399,566,100.00	(51,894,000.00)	(12.99)
13	Belanja Makanan Dan Minuman	9,616,109,100.00	7,294,621,088.00	(2,321,488,012.00)	(31.82)
14	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	438,202,500.00	253,000,000.00	(185,202,500.00)	(73.20)
15	Belanja Pakaian Kerja	59,200,000.00	66,730,000.00	7,530,000.00	11.28
16	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari – Hari tertentu	365,075,000.00	396,095,000.00	31,020,000.00	7.83
17	Belanja Perjalanan Dinas	43,631,376,050.00	37,903,384,419.00	(5,727,991,631.00)	(15.11)
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	186,000,000.00	64,000,000.00	(122,000,000.00)	(190.63)
19	Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS	1,981,229,250.00	2,219,235,000.00	238,005,750.00	10.72
20	Belanja Pemulangan Pegawai	26,100,000.00	24,000,000.00	(2,100,000.00)	(8.75)
21	Belanja Pemeliharaan	8,522,014,650.00	11,044,839,950.00	2,522,825,300.00	22.84
22	Belanja Jasa Konsultasi	1,210,374,000.00	876,501,000.00	(333,873,000.00)	(38.09)
23	Belanja Pengembangan SDM	167,500,000.00	74,040,000.00	(93,460,000.00)	(126.23)
24	Belanja Barang Yang akan	212,940,000.00	2,655,616,400.00	2,442,676,400.00	91.98



No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan	Persentase
	diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga				
25	Barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga	33,850,000.00	89,446,000.00	55,596,000.00	62.16
26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lainnya	376,225,000.000	212,000,000.00	(164,225,000.00)	(77.46)
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli/instruktur/narasumber	1,478,620,000.00	4,650,000.00	(1,473,970,000.00)	(31,698.28)
28	Belanja Sewa Alat Berat	0	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
29	Belanja Honorarium Koordinasi Aparat	0	216,450,000.00	216,450,000.00	100.00
39	Belanja Honorarium Tim Yang Dibentuk Bupati	0	75,425,000.00	75,425,000.00	100.00
31	Belanja Honorarium Satpol PP/Tim patrol/PPL	0	257,475,000.00	257,475,000.00	100.00
32	Belanja Honorarium Petugas Kesehatan/Paremedis	0	3,444,046,000.00	3,444,046,000.00	100.00
33	Belanja Honorarium Staf Bupati/Wakil Bupati/Sesda/Assisten	0	457,200,000.00	457,200,000.00	100.00
34	Belanja Upah Harian/Mingguan/Bulanan/Boongan	0	4,986,590,000.00	4,986,590,000.00	100.00
C	Pembiayaan Pengeluaran	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	(500,000,000.00)	(50.00)
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	(500,000,000.00)	(50.00)
	TOTAL	611,272,684,227,74	695,286,893,812,31	87,513,095,984.57	12.52

Sumber : Dinas DPPKAD Kab Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017

3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun 2017-2021

Asumsi dasar yang digunakan dalam proyeksi pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 antara lain adalah: (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b). Inflasi; (c) tingkat suku Bunga; (d) Harga Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit).

Guna memperkuat struktur APBD dan meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya peningkatan penerimaan PAD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan yang dimilikinya secara optimal. Terkait dengan perluasan kewenangan tersebut, pengelolaan sumber-sumber penerimaan dalam upaya peningkatan PAD telah dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi serta penetapan target penerimaan secara lebih rasional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka menunjang peningkatan



bagi hasil pajak dan bukan pajak.

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi.
4. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
5. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
7. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
8. Menerbitkan aturan di tingkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang lebih fokus pada upaya mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada
9. Melakukan pengkajian dan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang mendasari upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah
10. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.
11. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
12. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penagihan pajak dan retribusi
13. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
14. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
15. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Selain intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah penggalan sumber-sumber pungutan baru yang belum terjangkau, padahal potensi penerimaannya cukup besar sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan basis pajak secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyusunan peraturan-peraturan baru dan implementasinya untuk menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang potensial. Usaha-usaha ekstensifikasi yang telah dan akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjangring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun anggaran 2016-2021 diharapkan dapat menerbitkan kebijakan yang mendorong peningkatan sumber penerimaan baru, sekaligus juga mengintensifkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Beberapa upaya yang secara spesifik dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi daerah, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.
2. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk tentang pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal

Berdasarkan beberapa kebijakan di atas, maka diproyeksikan pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2016-2021 sebagai berikut :



Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2017 - 2021

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN		1,089,554,673,545.79	1,302,987,874,577.66	1,480,936,055,764.31	1,657,076,464,128.96	1,865,637,933,748.30
1	Pendapatan Asli Daerah	53,286,076,128.44	61,278,987,547.71	70,470,835,679.87	81,041,461,031.85	93,197,680,186.62
a	Pajak Daerah	6,107,689,098.39	7,023,842,463.15	8,077,418,832.62	9,289,031,657.51	10,682,386,406.14
b	Retribusi Daerah	31,403,286,076.60	36,113,778,988.09	41,530,845,836.30	47,760,472,711.75	54,924,543,618.51
c	Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan	3,952,503,666.45	4,545,379,216.42	5,227,186,098.89	6,011,264,013.72	6,912,953,615.78
d	Lain-lain PAD yang sah	11,822,597,287.00	13,595,986,880.05	15,635,384,912.06	17,980,692,648.87	20,677,796,546.20
2	Dana Perimbangan	802,058,470,683.00	972,367,241,285.45	1,100,722,327,478.27	1,219,830,676,600.01	1,362,805,278,090.01
a	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	32,487,493,100.00	37,360,617,065.00	42,964,709,624.75	49,409,416,068.46	56,820,828,478.73
b	DAU	648,758,284,850.00	796,072,027,577.50	897,982,831,714.13	986,680,256,471.24	1,094,682,294,941.93
c	DAK	120,812,692,733.00	138,934,596,642.95	159,774,786,139.39	183,741,004,060.30	211,302,154,669.35
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	234,210,126,734.35	269,341,645,744.50	309,742,892,606.18	356,204,326,497.11	409,634,975,471.67
a	Hibah		-	-	-	-
b	Dana Darurat		-	-	-	-
c	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	13,300,190,184.35	15,295,218,712.00	17,589,501,518.80	20,227,926,746.62	23,262,115,758.62
d	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya		-	-	-	-
e	Dana penyesuaian dan otonomi Daerah	220,909,936,550.00	254,046,427,032.50	292,153,391,087.38	335,976,399,750.48	386,372,859,713.05
Jumlah Pendapatan		1,089,554,673,545.79	1,302,987,874,577.66	1,480,936,055,764.31	1,657,076,464,128.96	1,865,637,933,748.30

Sumber : Dinas DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2016

Belanja daerah diarahkan seoptimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa program prioritas, diantaranya adalah revitalisasi sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas pertanian terutama produk pasca panen, pembangunan sentra produksi pertanian, pengembangan pengelolaan peternakan, pembangunan pariwisata, peningkatan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan.

Belanja Daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan lainnya, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dipergunakan mendanai pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2017 s/d 2021.



Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	704,763,913,194.88	821,428,694,313.74	944,642,998,460.80	1,086,339,448,229.92	1,249,290,365,464.41
a	Belanja Pegawai	514,325,754,244.83	602,424,811,521.18	692,788,533,249.36	796,706,813,236.76	916,212,835,222.28
b	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
c	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
d	Belanja Hibah	18,388,500,000.00	21,146,775,000.00	24,318,791,250.00	27,966,609,937.50	32,161,601,428.13
e	Belanja Bantuan Sosial	230,000,000.00	264,500,000.00	304,175,000.00	349,801,250.00	402,271,437.50
f	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
g	Belanja Bantuan Keuangan	171,060,658,950.05	196,719,757,792.56	226,227,721,461.44	260,161,879,681.66	299,186,161,632.76
h	Belanja tidak tetap/tak terduga	759,000,000.00	872,850,000.00	1,003,777,500.00	1,154,344,125.00	1,327,495,743.75
2	Belanja Langsung	405,499,219,594.00	520,027,057,077.00	574,275,030,627.00	605,826,160,234.00	653,840,104,791.00
a	Belanja Pegawai	40,500,840,168.00	55,940,345,453.10	65,951,397,271.07	70,246,536,998.17	79,633,517,547.90
b	Belanja Barang dan Jasa	167,770,647,991.00	218,337,110,189.65	234,447,176,718.10	252,614,253,225.81	266,056,391,209.68
c	Belanja Modal	197,227,731,435.00	245,749,601,434.25	273,876,456,637.83	282,965,370,010.02	308,150,196,033.42
Jumlah Belanja		1,110,263,132,788.88	1,341,455,751,390.74	1,518,918,029,087.46	1,692,165,608,464.84	1,903,130,470,255.79

Sumber : Dinas DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan Data yang diolah, 2017



Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN	17,063,571,720.09	31,499,349,813.08	30,318,599,713.15	26,694,854,857.58	29,376,649,424.84
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	19,063,571,720.09	36,499,349,813.08	35,318,599,713.15	31,694,854,857.58	34,376,649,424.84
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19,063,571,720.09	36,499,349,813.08	35,318,599,713.15	31,694,854,857.58	34,376,649,424.84
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih ditemui permasalahan-permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2014 mencapai 5,56 persen dan ini menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,13 persen, meskipun demikian masih sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,02 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2014 meningkat dari 3.201,9 milyar menjadi 3.582,2 milyar. Kenaikan nilai tambah mendorong peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari Rp. 21,5 juta menjadi Rp. 23,8 juta.

Saat ini lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 38,17 persen terhadap PDRB, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,55 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,6 persen.

Meskipun perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami perlambatan, namun berdasarkan hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun 2015, Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada Kuadran I yang memiliki persebaran pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang mengikuti pertumbuhan ekonomi biasanya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 sebesar 68,57 mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 67,61. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, prohuman development*) (Bappenas, 2015).

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.



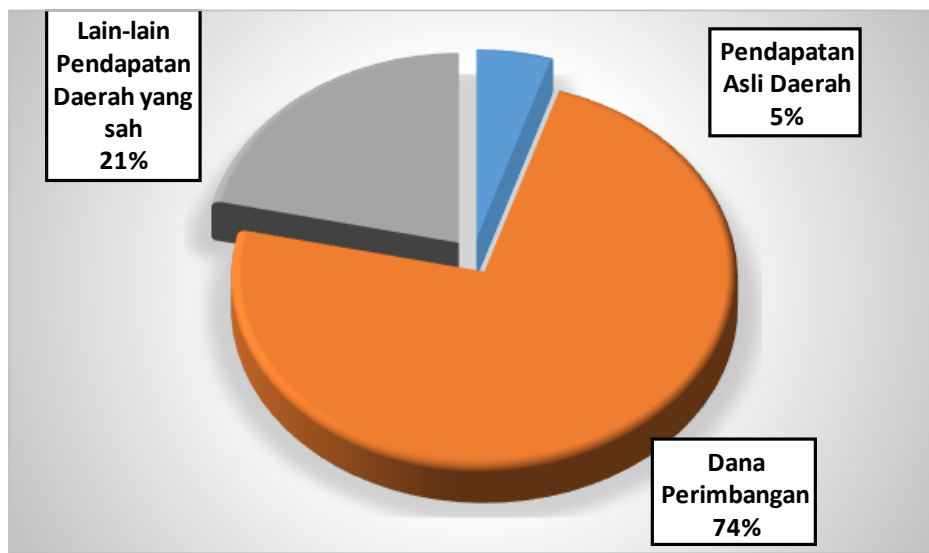
Berikut beberapa permasalahan yang telah dilakukan pengkajian berdasarkan kondisi secara umum di Kabupaten Bengkulu Selatan.

4.1.1. Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kondisi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan ruang fiskal yang sempit sehingga memiliki keterbatasan dalam membiayai kegiatan-kegiatan prioritas. Hal ini dapat diketahui dari rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal hanya sebesar 5 persen, sehingga berada pada kategori “sangat kurang”. Artinya, ketergantungan kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada dana pusat/fiskal pusat masih sangat besar, yakni Rp. 901 Milyar atau 95 persen.

Apabila kita melihat komposisi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, menggambarkan kesenjangan yang begitu lebar antara Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengembangan/pengelolaan potensi daerah dengan pendapatan dari Pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan serta dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp. 46,335,718,372.56, sedangkan Dana Perimbangan sebesar Rp. 697,442,148,420.00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 203,660,979,769.00. Berikut gambaran komposisi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan

Gambar 4.1
Gambaran Komposisi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016



Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2016

Sementara itu, beban APBD Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) yang mencapai angka 65 persen. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan pencapaian hasil pembangunan (belanja modal).

Disisi lain, pengelolaan aset daerah masih menunjukkan adanya permasalahan baik dari sisi administrasi yang belum tertata dengan baik sampai kepada keadaan fisik barang aset daerah yang tidak terjaga dengan baik. Hal-hal demikian memberikan pengaruh yang tidak baik bagi penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini atas



laporan keuangan Pemerintah Daerah mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih progresif dan konstruktif dalam pemanfaatan dan penggunaan APBD melalui reformasi perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

4.1.2. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan performa yang kurang baik, terkait upaya mewujudkan akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berkaca pada tata kelola pemerintahan Provinsi Bengkulu yang berada pada kategori buruk dengan ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan juga berada dalam kategori buruk. Hal ini karena secara garis koordinasi, tata kelola pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan berada dibawah pembinaan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wakil Pemerintahan Pusat di daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih belum optimalnya gerak mesin birokrasi dalam membuat terobosan dan inovasi yang mendorong peningkatan kinerja birokrasi, dikarenakan aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan tidak memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, diantaranya 1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi, 2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan serta 3) Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Permasalahan pembangunan dari sisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan, secara umum dapat dijabarkan dalam beberapa point berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang ditunjukkan nilai SAKIP masih rendah berada pada kategori C.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan adanya penilaian Ombudsman bahwa penyelenggara pelayanan publik belum seluruhnya memiliki standar pelayanan publik.
3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan nilai = 3,3024 peringkat ke-4 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Bengkulu.
4. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah.
5. Belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
6. Belum optimalnya implementasi serta realisasi program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



8. Kualitas sumber daya manusia aparatur masih sangat perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi, guna mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka perlu dilakukan akselerasi penerapan reformasi birokrasi serta penyempurnaan bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan dengan target meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan berbasis e-Government. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Bengkulu Selatan memerlukan percepatan dalam pembangunannya untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bengkulu.

4.1.3. Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar

Indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur usia hidup adalah angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka kematian bayi (IMR). Indikator ini merefleksikan pembangunan bidang kesehatan. Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, yang diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*Literacy Rate*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years School*). Indikator ini merefleksikan pembangunan bidang Pendidikan. Dan bidang ketiga selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang juga diakui secara luas adalah standar hidup layak. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini antara lain GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator hidup layak. Indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Namun demikian indikator tetap dipertahankan untuk memberi argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM.

Di Bidang Kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2014 tercatat 67,06 tahun. Angka ini sudah menunjukkan angka realistis yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sudah cukup baik. Namun dari sisi pelayanan kesehatan masih menggambarkan kualitas yang belum baik, yang ditandai dengan masih ditemukannya 27 kasus kematian bayi pada tahun 2014.

Pada Bidang Pendidikan, pada tahun 2014, tercatat Harapan Lama Sekolah 13,42 dan Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8,75. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum jenjang pendidikan yang ditempuh sudah memenuhi program wajib belajar sembilan tahun. Namun seiring dengan capaian tersebut, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam Bidang Pendidikan, diantaranya adalah perluasan akses pendidikan untuk seluruh masyarakat baik itu dari sisi ketersediaan sarana prasarana (sekolah) maupun layanan pendidikan. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, masih ada 16 (Enam Belas) desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD) dan 1 Kecamatan tidak memiliki SMP yaitu Kecamatan Bunga Mas. Sedangkan dari sisi peningkatan layanan pendidikan, masih ada 11 SD dan 4 SMP yang belum terakreditasi.



Tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang memiliki kualitas hidup dan daya saing yang baik.

4.1.4. Kemiskinan dan Pengangguran

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami penurunan dari 23,0 persen pada tahun 2012 menjadi 22,59 persen pada tahun 2013. Sedangkan Garis kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan meningkat dari Rp. 270.019 pada tahun 2012 menjadi Rp. 278.823 pada tahun 2013. Walaupun persentase penduduk miskin menurun, namun jumlah penduduk miskin secara riil mengalami kenaikan tipis dari 33,6 ribu jiwa pada tahun 2012 menjadi 33,7 ribu jiwa pada tahun 2013 atau setara 24 rumah tangga miskin. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 4,09 pada tahun 2012 menjadi 4,16 pada tahun 2013. Sebaliknya, indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 1,22 menjadi 1,10 pada tahun 2013.

Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki persentase penduduk miskin sebesar 22,59 persen, yang menempati urutan paling besar kedua setelah Kabupaten Kaur sebesar 23,3 persen (*Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2014*).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terlepas dari masih tingginya angka pengangguran yang ada. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2014 sebesar 69,1 persen. Menurut Sakernas Agustus 2014 pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 2,79 persen menjadi 3,3 persen. Sebanyak 24 persennya memiliki pengalaman pekerjaan dan berharap mendapatkan pekerjaan baru untuk menambah penghasilan. Lapangan usaha utama penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sektor pertanian 59,5 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa 14,8 persen, perdagangan 13,9 persen dan sisanya 11,8 persen lainnya. Sebanyak 14,9 persen status dalam pekerjaan adalah berusaha sendiri, 27,2 persen dibantu buruh tidak tetap/ keluarga, 4,7 persen dibantu buruh tetap, 19 persen buruh/karyawan, 9,4 persen pekerja bebas, dan 24,7 persen pekerja tidak dibayar/keluarga (*Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2015*)

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang berada pada usia produktif, agar mampu memproduksi dan memiliki produktivitas yang baik. Meskipun sebenarnya dari sisi pembangunan kualitas hidup manusia, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menunjukkan *progress* yang sangat baik dengan indikatornya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan tertinggi di Provinsi Bengkulu Selatan setelah Kota Bengkulu yaitu sebesar 68,57. Angka ini berada diatas IPM Provinsi sebesar 68,06, meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (68,90).

4.1.5. Infrastruktur Dasar

Infrastruktur merupakan pendukung pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar yang menjadi penopang pembangunan antara lain jalan, jembatan, kelistrikan, irigasi, jaringan air bersih serta pengelolaannya yang bertujuan



untuk peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, infrastruktur yang juga dominan dan strategis dalam rangka mendorong percepatan pembangunan adalah infrastruktur telekomunikasi dan informatika, yang memungkinkan adanya simplifikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, penyampaian informasi lebih cepat dan akurat serta peningkatan pengetahuan guna mendorong pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan infrastruktur jalan, kondisi dan kelas jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015, ada 110,447 km jalan negara, 128,8 km jalan provinsi, dan 1.343,937 km jalan kabupaten yang telah dibangun. Dari panjang jalan yang ada, 578,470 Km atau sekitar 52,36 persen dalam keadaan baik, 86,610 atau 7,84 persen dalam kondisi rusak dan 431.310 atau 39,04 persen berada dalam kondisi rusak berat.

Selain itu, infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan jaringan jalan ke pusat-pusat produksi pertanian relatif masih terbatas. Jaringan irigasi sangat penting mengingat sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup dominan menyumbang PDRB, yakni sekitar 38,17 persen pada tahun 2014, dengan nilai nominal Rp. 1.367.309,3 juta rupiah. Produksi padi sawah dan padi ladang pada tahun 2015 mencapai 88.662 ton.

Penyediaan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat tidak memadai untuk menjadi pengungkit bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena masih belum tersedianya koneksi intranet yang terintegrasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta belum adanya ketersediaan koneksi internet untuk masyarakat. Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan Smart City.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan ketersediaan debit air untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan produksi pertanian. Hal ini penting, karena peningkatan produksi pertanian menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah. Selain itu, penyediaan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi kebutuhan yang mutlak dan mendesak untuk segera direalisasikan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis elektronik (e-Government) dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, penyediaan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi kebutuhan yang mutlak dan mendesak untuk segera direalisasikan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis elektronik (e-Government) dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

4.1.6. Pertanian, Perikanan Dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan data, luas panen padi di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan dari 18.793 ha menjadi 19.639 ha pada tahun 2014. Sedangkan produksi beras juga meningkat dari 71.278 ton menjadi 88.098 ton pada tahun 2014. Produksi perikanan laut meningkat dari 1.222,25 ton pada tahun 2013 menjadi 1.774,25 ton pada tahun 2014 atau senilai 54,11 milyar rupiah. Jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi tercatat sebanyak 130 motor tempel dan 6 perahu tidak bermotor.



Produksi perikanan darat menurun dari 6.520,12 ton pada tahun 2013 menjadi 5.384,21 ton pada tahun 2014 atau senilai 129 milyar rupiah. Angka ini dapat lebih tinggi karena belum termasuk perkiraan nilai tangkap di perairan umum. Daerah potensial untuk usaha ini terletak di Kecamatan Seginim dan Air Nipis. Diperkirakan ada sekitar 3.544 rumah tangga berusaha di sektor budidaya perikanan dan 738 rumah tangga nelayan pada tahun 2014.

Namun permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengembangan sektor pertanian adalah minimnya ketersediaan air untuk irigasi yang disebabkan oleh sudah mulai kecilnya debit air. Kondisi ini mendorong munculnya alih fungsi lahan yang menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2014 berdasarkan laporan Statistik Pertanian dari BPS Kabupaten Bengkulu Selatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 11.290 ha. Sementara berdasarkan data hasil identifikasi dengan Foto Citra Satelit oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2015, bahwa luas lahan sawah yang ada sebesar 11.290 Ha (data BPS) diatas ternyata telah terjadi penurunan seluas 1.527 Ha atau 13,5 persen menjadi 9.763 Ha.

Terkait dengan ketahanan pangan, pada tahun 2013, di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat 30 desa rawan pangan.

4.1.7. Kepariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercatat berjumlah 23 lokasi, namun pengelolaannya masih kurang memadai. Beberapa tempat wisata yang pengelolaannya dikomersilkan atau insidentil adalah Pantai Pasar Bawah, Sirkuit Balap Pagar Dewa, Muara Kedurang, dan Air Terjun Geluguran. Saat ini baru ada 3 jenis situs yang telah diregistrasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jambi yaitu batu menhir, dolmen dan rumah adat Sebilo di Kecamatan Pino. Adapun sekitar 15 daftar situs lainnya masih dalam tahap penelitian diantaranya Bunker Jepang dan Meriam Honeysuit. Jumlah hotel/ losmen yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2014 berjumlah 16 unit yang seluruhnya berkelas melati. Jumlah kamar sedikit menurun dari 214 kamar menjadi 200 kamar pada tahun 2014. Sub sektor hotel, dan restoran menyumbang nilai tambah PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2014 hanya sebesar 1,61 persen.

4.1.8. Pengelolaan Lingkungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, diantaranya hutan dan hasil ikutannya yang terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Namun keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan.

Selain itu, Kabupaten Bengkulu Selatan juga kaya dengan aliran sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat. DAS yang mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan untuk irigasi lahan pertanian (sawah) dan atau kebutuhan baku air minum.



4.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan angka yang sangat baik yakni 94,00, dimana angka ini lebih tinggi dari IPG Provinsi Bengkulu sebesar 91,02 serta juga melebihi IPG nasional sebesar 90,34. Sedangkan indeks pemberdayaan gender pada tahun 2014 mencapai angka 58,63. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam bidang jabatan publik, dimana hanya 41,27% perempuan yang menduduki jabatan publik.

4.1.10. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung relatif rawan. Hal ini dapat dilihat dari kejadian pelanggaran/kejahatan yang terjadi selama tahun 2014 sebanyak 159 kasus, yang didominasi pencurian sebanyak 49 kasus, diikuti kasus kesusilaan terhadap anak 25 kasus, narkoba 22 kasus, penganiayaan 14 kasus, penipuan 7 kasus dan perjudian 6 kasus serta beberapa kasus-kasus lainnya sebanyak 31 kasus.

4.2. Isu-Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan yang ada, dirumuskan beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain:

4.2.1. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan yang baik menjadi agenda prioritas pembangunan baik agenda nasional maupun agenda daerah, karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang handal dalam memberikan layanan publik yang prima bagi masyarakat. Beberapa agenda dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain ; membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, serta menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, penyediaan koneksi intranet yang terintegrasi di seluruh organisasi perangkat daerah guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Seperti yang diketahui jumlah PNS Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung berkurang selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 jumlah PNS Kabupaten Bengkulu Selatan dari 6.003 pegawai turun menjadi 5.785 pegawai pada tahun 2015. Komposisi PNS Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 yaitu 2.920 laki-laki dan 2.865 perempuan. Jumlah terbesar berada pada Golongan III sebanyak 55 persen dan terkecil adalah golongan I sebanyak 0,6 persen. Sekitar 69,2 persen pegawai daerah berpendidikan S1 keatas, namun dengan banyaknya jumlah PNS yang berpendidikan S1 keatas tata kelola pemerintahan tetap menjadi isu strategis.

Beberapa fakta yang mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik menjadi isu strategis antara lain :

1. Birokrasi yang ada belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Hal ini ditunjukkan oleh indikator-indikator seperti penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN dimana masih ditemukan ASN yang tersandung masalah hukum terkait korupsi, peran Aparat



Pengawas Internal masih belum optimal serta manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan.

2. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah.

Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;

3. Manajemen pembangunan di daerah belum berjalan secara optimal

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan belum menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang efektif;

4. Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa fakta terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah daerah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;
- b. Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
- c. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien berbasis elektronik (e-government) dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) belum berjalan serta belum merata pada seluruh perangkat daerah.
- d. Manajemen SDM Aparatur (ASN) masih belum berjalan secara efektif. Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (*talent pool*) untuk kaderisasi kepemimpinan.
- e. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, diantaranya :
 - 1) Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien. Proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.
 - 2) Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik. Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Selain itu, masalah lain yang juga menghambat pelaksanaan pelayanan publik yaitu rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan



e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata.

4.2.2. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan APBD

Kemampuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik merupakan salah satu faktor pendukung optimalnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Sistem pengelolaan APBD harus dilakukan secara baik dan terintegrasi serta memunculkan sinkronisasi yang baik antara perencanaan, penganggaran, evaluasi serta pengendalian dalam kerangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun pada tahun 2016 mengalami degradasi menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menjadi sinyal bahwa masih banyak yang harus dilakukan perbaikan terutama dalam konteks sistem pengelolaan APBD. Beberapa komponen yang harus menjadi *entry point* dalam rangka optimalisasi sistem pengelolaan APBD antara lain penganggaran yang mengedepankan kinerja program prioritas pembangunan, manajemen penerimaan dan pengeluaran pendapatan daerah, manajemen pengadaan dan pengelolaan aset daerah serta evaluasi dan pengendalian dalam proses pengelolaan APBD.

4.2.3. Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus berkomitmen untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas didukung kuantitas yang memadai.

4.2.3.1 Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan ; peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; dan peningkatan kuantitas/kualitas tenaga pendidik (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ini dipengaruhi oleh terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah yang cukup besar terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Angka Melek Huruf sebagai indikator pembentuk Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat tinggi mencapai angka 96,9 persen dengan angka rata-rata lama sekolah 8,75 tahun.

4.2.3.2 Kesehatan

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan; peningkatan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

Ketersediaan tenaga medis menjadi salah satu cerminan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, karena dengan banyaknya tenaga medis yang memadai dan berkualitas, maka kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang cepat dan tanggap serta berkualitas dapat dipenuhi. Jumlah tenaga medis menurut Uraian jabatan



dan pendidikan yang ditamatkan tahun 2015 berjumlah 1.054 orang, ini merupakan modal utama dalam pelayanan kesehatan.

4.2.3.3 Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal

Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; peningkatan daya saing produk UKM; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB).

4.2.4. Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar

Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; pembangunan dan/atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Kondisi dan kelas jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2013 – 2015. Pada tahun 2015, ada 110,447 km jalan negara, 128,8 km jalan provinsi, dan 1.343,937 km jalan kabupaten yang telah dibangun. Dari panjang jalan kabupaten yang ada, sekitar 47 persen dalam keadaan rusak. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah terhadap kualitas jalan yang tentu akan berpengaruh terhadap kelancaran transportasi baik di perkotaan maupun perdesaan yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dimana transportasi merupakan faktor penunjang utama dalam setiap kegiatan masyarakat.

4.2.5. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 22,76 persen atau meningkat bila dibandingkan angka tahun sebelumnya. Jika melihat perbandingan antarkabupaten, Kabupaten Kaur dan Bengkulu Selatan adalah yang tertinggi persentasenya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode 2010 – 2013 berturut-turut adalah 22,64 persen, 22,55 persen, 22,98 persen dan 22,59 persen. Sedangkan pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 sebanyak 3.175 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2011 sebanyak 1.568 orang

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bengkulu Selatan harus dijadikan sebagai dasar menentukan kebijakan perumusan prioritas program pembangunan daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang dapat dilakukan antara lain ;

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Hal ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin.
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, yang bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.
3. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.



4.2.6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 11.036 ha yang terdiri dari 8.131 ha lahan irigasi dan 2.905 ha lahan non irigasi. Sedangkan luas lahan pertanian bukan sawah tercatat seluas 75.067 ha, terdiri dari 27.544 ha lahan perkebunan, 13.595 ha hutan rakyat, 8.729 ha tegal/ kebun, 976 ha ladang/ huma, 924 ha padang penggembalaan/ rumput, 8.752 ha lahan yang sementara tidak diusahakan dan 14.547 ha lahan lainnya. Tanaman kelapa sawit adalah komoditi perkebunan yang paling dominan di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu seluas 14.276,37 ha, dan selanjutnya tanaman karet seluas 4.637,5 ha. Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu Kecamatan Air Nipis sebesar 5.789 ton, Kecamatan Seginim sebesar 4.709 ton, dan Kecamatan Kedurang sebesar 3.231 ton. Produksi perikanan tangkap yang dihasilkan mengalami peningkatan sejak 2011 yaitu sebesar 1.189,82 ton pada tahun 2011, meningkat menjadi 1.774,25 ton pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap dilaporkan menurun menjadi 1.559,63 ton

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah yang apabila dikelola dengan baik maka akan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu, harus dilakukan upaya-upaya antara lain mengoptimalkan pengelolaan dan penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

4.2.7. Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan

Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah kurang lebih 26 lokasi. Pembangunan bidang pariwisata menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah, mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Selatan cukup melimpah. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat menjadi pengungkit terhadap berkembangnya potensi wisata lainnya seperti wisata budaya sehingga diharapkan dapat mendorong meningkatnya investasi bidang kepariwisataan.

4.2.8. Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2014 bernilai 94.00, sedangkan indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2014 bernilai 58,63. Dari data tersebut menyimpulkan kesetaraan gender antara laki – laki dan perempuan sudah berjalan dengan baik, namun dari sisi pemberdayaan dalam berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik masih kurang.

Isu ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6). Meningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-laki ber KB; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8) perlindungan anak dari



tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

4.2.9. Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan antara lain: (i) mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (ii) meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam; (iii) mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; (iv) menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup serta penegakan hukum; (v) meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal; (vi) menggali potensi sumberdaya yang terbarukan bekerjasama dengan multi *stakeholders*; dan (vii) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah.

4.2.10. Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan: (1) peningkatan kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri; (3) peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan bakat; (4) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan pengelola kegiatan kepemudaan;

Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui: (1) pemanfaatan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun internasional; (3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan; (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

4.2.11. Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)

Pada tahun 2015, Koperasi primer di Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah berbadan hukum ada sebanyak 219 koperasi yang terdiri dari KUD dan non KUD , terdiri dari 13 Koperasi Uni Desa dan 206 Non KUD. Banyaknya anggota koperasi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 yaitu 13.403.

Kebijakan utama bagi pelaku usaha ini adalah meningkatkan peranan UKMK sebagai pelaku yang strategis dalam pembangunan ekonomi Bengkulu. Oleh karena itu, program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan peran UKMK tersebut antara lain:



- a. Meningkatkan keterampilan pelaku UKM melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, promosi produk, pemasaran, dan pendampingan manajerial usaha secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan akses permodalan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui pola-pola kemitraan yang bersifat mutualistik dan saling menguntungkan.
- c. Menciptakan pelaku usaha UKM yang dapat dijadikan sebagai lokomotif pelaku ekonomi melalui program-program bantuan dan hibah yang bersifat kompetitif, transparan, dan berkeadilan.

4.2.12. Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin maju, mendorong semakin tingginya inovasi dalam teknologi, pergerakan arus informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan tidak mengenal batas waktu, serta memunculkan persaingan yang semakin ketat. Hal ini harus segera direspon dan diadopsi oleh setiap elemen masyarakat agar tidak tertinggal dalam kompetisi dan inovasi yang ada. Begitu juga dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari manual ke elektronik (e-Government) membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, tertintegrasikan dan berkualitas.

Infrastruktur bidang telekomunikasi dan informatika menjadi kebutuhan mutlak yang harus disediakan untuk mendorong percepatan penerapan reformasi birokrasi. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang baik, memungkinkan Kabupaten Bengkulu menjadi bagian integral dari sistem informasi global yang tertuang dalam rencana pengembangan e-Government nasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika menjadi isu pembangunan yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan infrastruktur dibidang informasi, komunikasi, dan telematika menjadi sangat penting. Sudah menjadi isu nasional apabila e-government harus sudah mulai diimplementasikan ke dalam setiap aspek pemerintahan dan pelayanan publik.

4.2.13. Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah dan penerapan nilai-nilai agama

Suku melayu serawai adalah suku yang paling dominan di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sekitar 76,87 persen. Suku lainnya seperti melayu pasemah tercatat sekitar 13,39 persen. Mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan memeluk agama Islam yaitu sebanyak 98,79 persen penduduk dan sisanya 1,21 persen beragama non muslim.

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keragaman suku, agama, dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya.



Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan harus mampu memfasilitasi peningkatan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen perubahan (*agents of change*) untuk membina umat menjadi sangat penting. Dan yang lebih penting adalah menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintahan mampu mengontrol diri dan mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang ada.

4.3. Penyelarasan Isu strategis Pembangunan Daerah

Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan selaras dengan isu strategis RPJMD Provinsi Bengkulu dan isu strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam merumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Dan Nasional, yang selaras dengan isu strategis nasional dalam RPJMN. Apabila pada kolom (4) dikosongkan, maka isu tersebut merupakan isu lokal. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :



Tabel 4.1

Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2016- 2021

Kabupaten/Kota : Bengkulu Selatan

Provinsi : Bengkulu

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)	Hukum Dan Aparatur
			Sub Bidang Aparatur
	1. Birokrasi yang ada belum sepenuhnya bersih dan akuntabel		• Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
	2. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah		• Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
	3. Manajemen pembangunan di daerah belum berjalan secara optimal		
	4. Birokrasi belum efektif dan efisien		• Birokrasi yang efektif dan efisien;
2.	Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan APBD	Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik	Ekonomi
			Reformasi Keuangan Negara
			• Peningkatan penerimaan negara;
			• Peningkatan kualitas belanja negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun daerah.
3.	Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar	Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar	Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama
	1. Pendidikan	1. Bidang Pendidikan	Pendidikan
			• Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas;
			• Peningkatan kualitas pembelajaran;
			• Peningkatan manajemen guru,



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
			<p>pendidikan kejuruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; • Peningkatan akses dan kualitas PAUD; • Penguatan tata kelola pendidikan.
	2. Kesehatan	2. Kesehatan	<p>Kesehatan dan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; • Percepatan perbaikan status gizi masyarakat; • Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; • Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; • Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan; • Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan; • Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; • Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan; • Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan; • Pengembangan jaminan



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
	3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Keunggulan Lokal	3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Keunggulan Lokal	kesehatan nasional
			Ekonomi Peningkatan Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula diekonomi kreatif;
4.	Rendahnya Kapasitas Infrastruktur Dasar	Rendahnya Kapasitas Infrastruktur Dasar	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan; Pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan ketersediaan lahan yang berkompetisi dengan sektor-sektor lain termasuk properti (perumahan dan permukiman); Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman; serta Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik.
5.		Rendahnya daya saing dan iklim	



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
		investasi daerah	
6		Belum terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa	
7.	Tingginya Angka Kemiskinan Dan Pengangguran	Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan	
8..	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan	Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati;
9.		Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing	
		1. Rendahnya kapasitas Pelabuhan Pulau Baai	
		2. Rendahnya Kapasitas Bandara udara Fatmawati	
		3. Belum Optimalnya Infrastruktur Kelistrikan	
		4. Rendahnya konektivitas akses Lintas Provinsi	
10	Belum Optimalnya Pengelolaan Kepariwisata	Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan	Ekonomi Peningkatan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
			wisata;
11.		Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing dan berkelanjutan	
12.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama</p> <p>Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; <p>Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal; Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; Peningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.
13.	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	<p>Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani;



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan/petambak garam; • Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; • Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; • Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; • Penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi; • Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; • Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; • Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan • Penanganan perubahan iklim



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
			serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan
14.	Rendahnya Peningkatan Daya Saing Kepemudaan Dan Keolahragaan	Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama Pemuda dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; • Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
15.	Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi (UKMK)	Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)	Ekonomi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> • Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah; • Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan; • Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
16.	Minimnya Infrastruktur dibidang Informasi Dan Telematika	Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika	Ekonomi Data dan Informasi Statistik <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan data dan informasi akibat pemekaran daerah dan desentralisasi; • Meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga; • Koordinasi antar instansi masih kurang; • Kurangnya jumlah SDM statistik yang professional; • Beragamnya jenis pengguna data memerlukan perlakuan khusus pada masing-masing pengguna; • Keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK.
17.	Belum Optimalnya Kehidupan Berdemokrasi, Pengembangan Budaya Daerah Dan Penerapan Nilai – Nilai Agama.	Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah dan penerapan nilai-nilai agama	Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan karakter dan jati diri bangsa; • Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; • Pelestarian warisan budaya; • Peningkatan promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya; dan • Pengembangan sumber daya kebudayaan. Agama <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
			<p>pemahaman dan pengamalan ajaran agama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerukunan umat beragama; • Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; • Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; • Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 – 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS”***.

Penjelasan Visi:

Masyarakat Madani yang ingin dicapai di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak sipilnya dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, beriman dan bertaqwa serta mampu menguasai teknologi, **informasi dan komunikasi**. Dengan demikian, masyarakat Bengkulu Selatan akan lebih berdaya saing, mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dalam lingkungan lokal, regional bahkan internasional. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,28 % pada Tahun 2014 menjadi 75,00 % pada tahun 2021, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,00%.

Dengan didukung oleh kondisi masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

- Elok** : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.
- Maju** : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.
- Aman** : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
- Sejahtera** : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.



5.2. MISI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, disusun misi sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian visi.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah.
5. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan.
6. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Penjelasan Misi:

Misi Kesatu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan wacana nasional dimana disetiap lini dan sektor pemerintahan baik itu pusat maupun daerah harus mampu melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan untuk melengkapinya telah dibentuk perangkat kelembagaan berupa Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance* dan *clean government*) dengan mengoptimalkan *Resources Base* aparatur Pemerintah Daerah pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang **MAJU**, mampu menerapkan pembangunan yang berorientasi masa depan dengan dukungan teknologi informasi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan *extra ordinary action* dari pemerintah daerah melalui upaya-upaya yang nyata dan berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan dukungan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang selama ini masih manual harus mulai dilakukan transformasi ke arah birokrasi yang berbasis elektronik untuk mewujudkan e-Government. Dengan e-Government maka rantai koordinasi dan bisnis proses/prosedur dalam birokrasi dapat dilakukan pemangkasan sehingga efektivitas dan efisiensi dapat diwujudkan.



Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan

Layanan pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan layanan yang optimal bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Hal ini penting sebagai prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang madani yang terpenuhi hak-hak nya terutama hak dalam mendapatkan pendidikan dan kesehatan sehingga memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi.

Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait upaya membentuk dan membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik sehingga memiliki kapabilitas dan berdaya saing. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Bengkulu Selatan **SEJAHTERA**, yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, usia harapan hidup cukup tinggi dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi Ketiga : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan

Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dan daya saing. Untuk bisa melaksanakan 4 (Empat) hal tersebut diperlukan dukungan infrastruktur berkualitas dan sangat dibutuhkan atau prioritas di daerah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa sasaran pembangunan infrastruktur menjadi prioritas.

Begitu juga halnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka mensukseskan pembangunan, penyediaan infrastruktur menjadi hal mutlak yang harus disediakan, baik itu dalam bidang infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran transportasi, pengembangan sektor pertanian, pariwisata, budaya, ekonomi dan infrastruktur lainnya, termasuk yang sangat penting adalah infrastruktur telekomunikasi dan informatika.

Misi ketiga (3) ini memayungi semua arah kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat dan harus disediakan oleh pemerintah daerah. Misi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan **ELOK**, dengan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Misi Keempat : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah

Indikator yang menunjukkan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diupayakan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang



baik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang mempunyai daya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang didukung selain oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas, melalui optimalisasi *Resources Base* yaitu UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang mempunyai daya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah. Hal ini karena Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan industri yang cukup besar. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan **SEJAHTERA**, dimana pendapatan dan daya beli masyarakat dapat meningkat.

Misi Kelima : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan

Sebagai salah satu prioritas nasional, kedaulatan pangan berada pada dimensi pembangunan sektor unggulan dan menjadi hal yang wajib bagi pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan masyarakat. Urusan kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Pasal 11) bahwa urusan pangan merupakan satu diantara delapan belas urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

Misi kelima diatas memayungi semua arah kebijakan, program, kegiatan yang berkaitan dengan urusan pangan atau kedaulatan pangan yang merupakan tugas wajib non pelayanan dasar pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan sasaran prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis Kementerian/Lembaga. Misi ini diharapkan dapat menjadi pendukung terhadap upaya mewujudkan masyarakat **SEJAHTERA**.

Misi Keenam : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Pelaksanaan pembangunan yang baik adalah yang mampu mengakomodir seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif sehingga pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Tanpa terkecuali, pembangunan juga harus melibatkan dan memfokuskan pada peningkatan peran pemuda dan perempuan dengan konsep kesetaraan gender, sehingga pembangunan akan dapat berjalan maksimal dan optimal.

Misi keenam ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan pemuda dan perempuan, sehingga mempunyai kualitas yang baik dan pada akhirnya dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Bengkulu Selatan **MAJU**.

Misi Ketujuh : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal

Pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi daerah yang kondusif dimana tatanan sosial kemasyarakatan, keamanan dapat terjamin sehingga



tercipta kondisi yang adil, harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah.

Misi ketujuh memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan dan keamanan sehingga tercipta keadilan, keharmonisan yang selalu berpedoman pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah. Misi untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan **AMAN**.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari dirumuskannya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Tujuan 1 :

- Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah

Tujuan 2 :

- Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi.

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)

Tujuan 3 :

- Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perluasan pelayanan publik.

Sasaran :

- Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik
- Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik



Tujuan 4 :

- Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa

Sasaran :

- Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
- Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Tujuan 1 :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

Sasaran :

- Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat
- Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan 2 :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat
- Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas
- Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja

Misi 3 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

Tujuan 1 :

- Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Sasaran :

- Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten

Tujuan 2 :

- Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten dalam bidang komunikasi dan informatika



Sasaran :

- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi, berkualitas dan merata di seluruh wilayah

Tujuan 3 :

- Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur permukiman

Sasaran :

- Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat

Tujuan 4 :

- Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian

Sasaran :

- Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah

Tujuan 5 :

- Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan
- Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana

Misi 4 : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah.

Tujuan 1 :

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing

Sasaran :

- Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal

Tujuan 2 :

- Menanggulangi angka pengangguran dan kemiskinan



Sasaran :

- Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar
- Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin

Tujuan 3 :

- Meningkatkan daya saing bidang kepariwisataan

Sasaran :

- Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat

Tujuan 4 :

- Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah

Sasaran :

- Meningkatnya investasi daerah

Misi 5 : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan.

Tujuan 1 :

- Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan kedaulatan pangan

Sasaran :

- Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat
- Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan

Misi 6 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan 1 :

- Meningkatkan daya saing kepemudaan

Sasaran :

- Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas.

Tujuan 2 :

- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran :

- Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah.
- Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak



Misi 7 : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Tujuan 1 :

- Meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis.

Sasaran :

- Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

Tujuan 2 :

- Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama

Sasaran :

- Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati

Tujuan 3 :

- Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal

Sasaran :

- Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah



Tabel 5.1
Rumusan Sasaran Dan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini atas laporan keuangan daerah	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi SAKIP	C	C	CC	B	B	B	B	B
	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	0	50	60	80	90	100	100	100
	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	C	C	CC	B	B	B	B	B
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase penerapan Perbup tentang Tata Kerja Organisasi (Tupoksi) lembaga/perangkat daerah	10	50	60	80	90	100	100	100
Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Jumlah Website yang dikelola Pemerintah daerah	2	3	5	10	20	30	40	40
	Jumlah OPD yang	2	3	4	25	30	40	40	40



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
berbasis elektronik (e-government)	mempergunakan aplikasi teknologi informasi (TI)								
Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di perizinan pelayanan terpadu	30	80	81	82	83	84	85	85
	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya baik	0	2	5	6	7	8	10	38
Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%)	40	45	50	60	70	80	80	80
Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)								
	Eselon II	20	20-30	30-40	40-50	60-70	70-80	80-100	80-100
	Eselon III	20	20-30	30-40	40-50	60-70	70-80	80-100	80-100
	Eselon IV	20	20-30	30-40	40-50	60-70	70-80	80-100	80-100
Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian	Tingkat Maturitas SPIP	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi	Intern Pemerintah (APIP)								
	Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan	50	60	70	80	90	90	90	90
Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat	Angka Partisipasi Murni PAUD (%)	0	50	60	70	80	90	90	90
	Angka Partisipasi Murni SD (%)	98,4	98,6	99,3	99,4	99,7	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni SLTP (%)	80,2	82,3	84,2	87,6	89,8	100	100	100
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,76	8,80	8,86	8,90	8,95	9,0	10	10
Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase SD yang terakreditasi	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100
	Persentase SMP yang terakreditasi	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100
	Jumlah Sekolah Terakreditasi SD & SMP	11331	00	31	31	31	21	21	12435
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Bayi /1000 penduduk	27	27-22	22-17	17-12	12-0	12-0	10-0	10-0
	Jumlah Kasus Kematian Ibu /1000 penduduk	3	3-1	1-0	1-0	1-0	1-0	1-0	1-0
	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	11	11-9	9-6	6-4	4-0	3-0	3-0	3-0



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,6	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30
	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/BPJS	63,01 %	64%	65%	67%	70%	72%	75%	75%
	Persentase Penduduk Miskin yang dilayani Jamkesda	49,9%	55%	60%	65%	75%	85%	85%	85%
Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	2	2	6	10	14	14	14	14
	Peningkatan Tipe RSUD Hasanuddin Damrah	C	C	C	B	B	B	B	B
	Jumlah Dokter Umum	39	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	51-54	51-54
	Jumlah Dokter Spesialis	5	6-10	10-13	13-16	16-19	19-22	22-25	22-25
Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja	CFR/TFR	2579	2516	2453	2390	2327	2321	2321	2321
	Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	50	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	75-80	75-80
Tersedianya sarana dan prasarana	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	0	0	50-60	60-70	70-80	80-90	80-90	80-90



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah kabupaten	Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik/sedang	0	0	50-60	60-70	70-80	80-90	80-90	80-90
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	0	0	50-60	60-70	70-80	80-90	80-90	80-90
Tersedianya sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi, berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Jumlah OPD yang memiliki koneksi internet terintegrasi	0	0	0	30-40	40	40	40	40
	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet	0	0	0	142-158	158	158	158	158
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100
	Rasio Elektrifikasi	94,6	95.4	96,6	97.5	98.4	99	99	99
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	42000



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m)	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	10500
	Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m)	31,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	91,000
	Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m)	20,000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	45,000
	Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi (m)	10,000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	35,000
	Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100
Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah	2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	6-7	6-7
	Persentase pengelolaan persampahan daerah	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana	Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana	0	1-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	50-60
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal	Jumlah Usaha Kecil menengah yang mendapatkan pembinaan	369	388	390	395	400	405	410	410
	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan	219	219	219-229	229-239	239-249	249-259	259-269	259-269
	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	0	0	5-7	7-9	9-11	11-13	13-15	13-15
	Jumlah sentra industri yang dikembangkan (Pengolahan makanan, Pengolahan ikan, Batu bata dll.)	10	13	16	19	21	24	27	130
	PPI yang dikembangkan	1	1	1	2	2	2	2	2
Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan	140	210	210	210	210	210	210	1400



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
yang luas dan berorientasi pasar									
Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	24,120	24.000-25.000	25.000-26.000	26.000-27.000	27.000-28.000	28.000-29.000	28.000-29.000	28.000-29.000
Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	0	0	2-3	3-4	4-5	5-6	5-6	5-6
	Kawasan Wisata Bahari	0	0	1	1	1	1	1	1
	Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan	22	22	22-24	24-26	26-28	28-29	28-29	28-29
Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	2	2	3	4	5	5	5	26
	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani	0	100	100	100	100	100	100	600
Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat	Jumlah Desa Mandiri Pangan	5	2	2	2	4	4	4	23
Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura								
	a. Padi	88,098	88,098-89,098	89,098-90,098	90,098-91,098	91,098-92,098	92,098-93,098	93,098-94,098	93,098-94,098



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
daya beli petani nelayan	b. Jagung	14,814	14,814-15,814	15,814-16,814	16,814-17,814	17,814-18,814	18,814-19,814	19,814-20,814	19,814-20,814
	Jumlah Desa mandiri benih	0	2	2	2	2	2	2	12
	Produksi perkebunan unggulan								
	a. Kelapa Sawit	164,619,912	173,573,112	182.526.312	191.479.512	200.432.712	209.385.912	218,339,112	218,339,112
	b. Karet	3,345,143	3.623.90	3.902.67	4.181.43	4.460.19	4.738.95	5,095,00	5,095,00
	Produksi Daging ternak								
	a. Sapi	177.13	179.052	180.974	182.896	184.818	186.74	221.4	221.4
	Produksi perikanan budidaya (ton)	6,520.12	6,846.13	7,188.43	7,547.85	7,925.25	8,321.51	8,737.58	8,737.58
Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas	Jumlah jenis komoditas industri berbasis pertanian yang dikembangkan	0	4	5	5	6	6	6	6
	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina	447	450	455	460	465	470	475	475
	Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha	1.915	1.915	1.93	1.98	1.99	2	2	11.73
	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda	0	5	5	5	5	5	5	25
	Jumlah event	0	15	19	21	25	30	30	30



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	olahraga yang diikuti tingkat nasional								
	Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat provinsi	0	93	95	98	100	105	105	105
	Peringkat prestasi berskala provinsi	0	52	59	67	71	81	81	330
Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks pembangunan gender	72,02	72,02	72,08	73.01	73,04	73.07	73,1	73,1
	Indeks pemberdayaan gender	58,63	59, 23	59.23	59.236	59.242	59.248	59.254	59.254
	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	0	0	0	0	0	30	30	30
Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	83	83	78	73	68	63	60	60
	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	75%	77, 5%	80%	82,5 %	85%	90%	90%	90%
Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan	Operasi penyakit masyarakat	16	14	12	9	4	3	3	58
	Persentase penegakan perda	18	17	20	23	28	30	30	35
	Safari Ramadhan (Mesjid)	0	55	90	150	200	250	300	300
	Jumlah sekolah yang	0	10	10	10	10	20	20	60



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
prinsip kekeluargaan dan gotong royong	memiliki muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal								
	Persentase Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat	-	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100



5.4 Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan selaras dengan RPJMD Provinsi dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan tujuan dan sasaran dari visi dan misi serta selaras dengan sasaran pokok pembangunan provinsi dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam hal kolom (7) dikosongkan, maka sasaran pembangunan tersebut merupakan sasaran lokal.

5.5 Prioritas Pembangunan Daerah

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e-Government.
2. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Penyediaan Infrastruktur dasar publik yang berkualitas dan prioritas.
4. Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
5. Pembangunan kualitas Lingkungan hidup dan Mitigasi bencana.
6. Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata.
7. Pemberdayaan pemuda, perempuan dan keluarga sejahtera.
8. Peningkatan ketertiban umum dan keamanan.
9. Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.



Tabel 5.2.

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2016- 2021

Kabupaten/Kota : Bengkulu Selatan

Provinsi : Bengkulu

NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya masyarakat madani menuju Bengkulu selatan emas (elok, maju, aman dan sejahtera)	1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	1.1.Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	1.1.1. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	
				a. Opini atas laporan keuangan pemerintahan daerah	a. Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi	a. Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L b. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Opini WTP atas Laporan Keuangan Kabupaten
			1.2.Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi	1.2.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	
				a. Nilai Evaluasi SAKIP b. Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP CC c. Hasil Penilaian Mandiri	a. Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi b. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP)



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Pemerintah Provinsi	Kementerian/Lembaga b. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP) Provinsi c. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP) Kabupaten/Kota
				1.2.2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		
				a. Persentase evaluasi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah		a. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :Tersusunnya OPD yang sesuai dengan beban kerja dan kaya fungsi sehingga efektif dan efisien menjalankan pemerintahan b. Restrukturisasi Organisasi Perangkat



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						Daerah (OPD) : Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi daerah dalam rangka restrukturisasi OPD
				1.2.3Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)		
				a. Jumlah website (media center) yang dikelola oleh pemerintah daerah b. Jumlah OPD yang mempergunakan aplikasi teknologi informasi (TI)		
			1.3.Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perluasan pelayanan publik	1.3.1,Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
				a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkulu Selatan di Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Jumlah unit penyelenggara	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang patuh pada norma dan prosedur pelayanan Publik (unit) 1. Merah 2. Kuning 3. Hijau	a. Kualitas Pelayanan Publik : Integritas Pelayanan Publik (Pusat) b. Kualitas Pelayanan Publik : Integritas Pelayanan Publik (Daerah)



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				<p>pelayanan publik yang nilai IKM nya baik</p>		<p>c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>d. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas : Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) Kementerian/Le mbaga</p> <p>e. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas : Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) Provinsi</p> <p>f. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas : Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) Kabupaten</p>
				1.3.2,Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata		



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				kelola dan partisipasi publik		
				a. Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%) b. Persentase SKPD yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan (%) : - Eselon II - Eselon III - Eselon IV	a. Birokrasi yang Efektif dan Efisien : Indeks Profesionalitas ASN b. Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3
			1.4.Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa	1.4.1.Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya profesionalisme Aparatur	
				a. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan - Eselon II - Eselon III - Eselon IV	Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan (%) : - Eselon II - Eselon III - Eselon IV	a. Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 b. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan aparatur pemerintah daerah
				1.4.2.Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja Pengawasan internal	



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				a. Jumlah kasus dan temuan b. Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan	Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%)	
		2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	2.1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	2.1.1.Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	
				a. APM PAUD (%) b. APM & APS SD (%) c. APM & APS SMP (%) d. Jumlah Perpustakaan e. Jumlah Pengunjung Perpustakaan f. Angka Melek Huruf (%)	- Angka partisipasi murni (APM) PAUD (%) - Angka partisipasi murni (APM) SD (%) - Angka partisipasi murni (APM) SLTP (%) - Angka partisipasi murni (APM) SLTA (%) - Angka buta aksara (%)	a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
				2.1.2.Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah	
				a. Persentase Guru SD & SMP yang bersertifikasi	- Persentase SD yang ter- akreditasi (%)	a. Persentase SD/MI berakreditasi minimal



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				b. Persentase SD & SMP yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase SLTP yang ter- akreditasi (%) - Persentase SLTA yang ter- akreditasi (%) - Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi (%) 	B b. Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B c. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B d. Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B e. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya f. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
			2.2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	2.2.1.Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
				a. AKB/1000 b. AKI/1000 c. Persentase Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang d. Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Harapan Hidup (tahun) - AKB/1.000 (Jiwa) - AKI/100.000 (Jiwa) - Persentase balita gizi buruk/gizi kurang (%) 	a. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup b. Meningkatnya Status



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						<p>Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup</p> <p>c. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)</p> <p>d. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah</p>
				<p>e. Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/ BPJS</p> <p>f. Jumlah Penduduk Miskin yang dilayani Jamkesda</p>		<p>a. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</p> <p>b. Meningkatnya Perlindungan Finansial : Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan</p>



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
				2.2.2.Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas	Meningkatnya akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan	
				a. Jumlah Puskesmas Terakreditasi b. Rasio Puskesmas/Pustu/ Poliklinik Per Jumlah Penduduk c. Akreditasi RSUD	- Jumlah puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap (Unit) - Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas (kecamatan) - Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki Sarana Kesehatan (Desa) - Jumlah rumah sakit ditingkatkan kelas dari B ke A (unit)	a. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan : Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi b. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi c. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
				d. Jumlah Dokter Umum e. Jumlah Dokter Spesialis f. Jumlah Desa yang belum memiliki bidan desa		a. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan : Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan b. Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan : Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
				2.2.3.Meningkatnya kualitas pengendalian	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan	



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja	pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	
				a. TFR b. Persentase Peserta KB (%)	- Pertumbuhan penduduk (%) - Rasio Akseptor KB (%)	a. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) b. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) c. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif d. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen)
				c. Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi		



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
		3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan	3.1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten untuk mencapai keseimbangan pembangunan	3.1.1. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	
				a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang b. Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik/sedang c. Persentase jembatan dalam kondisi baik	- Rasio Elektrifikasi (%) - Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%) - Prosentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)	a. Meningkatnya kemandapan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi menjadi 75 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen. Pada saat yang bersamaan dilaksanakan peningkatan kapasitas jalan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan 4.200 lajur-km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta perbaikan jalan (preservasi) sepanjang 45.592 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						Bali- Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
			3.2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten dalam bidang komunikasi dan informatika	3.2.1. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi, informasi, dan komunikasi yang terintegrasi, berkualitas dan merata diseluruh wilayah.		
				a. Jumlah OPD yang memiliki koneksi internet terintegrasi b. Jumlah desa/ kelurahan yang terkoneksi internet		a. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah USO, dengan prioritas daerah terpencil,terluar, dan perbatasan
			3.3.Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur permukiman	3.3.1.Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	
				a. Persentase rumah tangga berakses air bersih (%) b. Persentase rumah tangga bersanitasi (%) c. Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	- Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%) - Persentase rumah tangga terlayani	a. Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				d. Jumlah Desa yang belum memiliki jaringan listrik e. Rasio Elektrifikasi	pengelolaan air limbah bersanitasi (%) - Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%) - Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs)
			3.4.Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian	3.4.1.Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah		
				a. Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) b. Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m) c. Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m) d. Panjang jalan sentra produksi yang		a. Pusat-Pusat Pertumbuhan Penggerak Ekonomi Daerah Pinggiran Lainnya : Meningkatnya konektivitas dengan wilayah-wilayah sentra produksi bahan



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				ditingkatkan kualitasnya (m) e. Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi (Ha) f. Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)		baku;
			3.5.Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	3.5.1.Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan		
				a. Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah b. Persentase kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang c. Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS		
				d. Persentase pengelolaan persampahan daerah e. Jumlah TPS		a. Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs)
				3.4.2.Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	
				a. Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana	Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (%)	a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; b. Terlaksananya integrasi dan/atau pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						<p>dan daerah;</p> <p>c. Terlaksananya penguatan kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana di pusat dan daerah;</p> <p>d. Tersedianya sarana & prasarana mitigasi & kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan;</p> <p>e. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;</p> <p>f. Meningkatnya partisipasi dan peran serta multi-pihak</p>



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						(pemerintah, organisasi nonpemerintah lokal dan internasional, lembaga usaha, perguruan tinggi, media dan masyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; g. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah;
		4. Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM,	4.1.Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing	4.1.1.Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal	Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana Perdagangan rakyat	



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
		industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah		<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Usaha Kecil menengah dan koperasi yang mendapatkan pembinaan b. Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan permodalan dan peralatan (unit) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun) b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun) c. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun) d. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun) e. Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun) f. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019) g. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						(kumulatif selama 5 tahun)
				c. Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	- Jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi (unit)	
					Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	
				d. Jumlah sentra industri yang dikembangkan e. Jumlah kelompok usaha baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang mendapat pembinaan	- Jumlah BUMDES yang difasilitasi dalam pembentukan dan pengembangannya (unit)	
			4.2.Menanggulangi angka pengangguran dan kemiskinan	4.2.1.Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	
				a. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan b. Jumlah pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan	- Angka Pengangguran (%) - Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi (orang)	a. Tenaga Kerja (juta orang) b. Peningkatan daya saing tenaga kerja : Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				4.2.2. Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin		
				a. Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan b. Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi c. Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		a. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; b. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia c. Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta
			4.3. Meningkatkan daya saing	4.3.1. Meningkatnya daya saing sektor	Berkembangnya sektor pariwisata	



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
			bidang kepariwisataan	pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat		
				a. Jumlah objek wisata yang dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata lama tinggal (hari) - Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) - Jumlah Wisatawan Nusantara (orang) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata : Kontribusi terhadap PDB Nasional b. Pariwisata : Wisatawan manca negara (orang) c. Pariwisata : Wisatawan Nusantara (kunjungan) d. Pariwisata : Devisa (triliun rupiah) e. Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan f. meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi
				a. Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan		
				b. Jumlah Museum		
			4.4.Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah	4.4.1.Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi	
				a. Nilai investasi (Rp.)	- Nilai Investasi (Rp trilyun	a. Meningkatnya Kemampuan Fiskal Daerah :
				b. Jumlah jenis perizinan/non perizinan		



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				yang dilayani c. Rata-rata lama pelayanan perizinan		Meningkatnya Local Taxing Power sehingga Pemerintah Daerah memiliki diskresi dari segi penerimaan untuk mendukung efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dan peningkatan daya saing pemerintah daerah; b. Peningkatan Pelayanan Publik : Tersusunnya kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah.
		5.Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan	5.1.Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan kedaulatan pangan	5.1.1. Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat		
				a. Jumlah Desa Mandiri Pangan		
				5.1.2. Meningkatkan kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	
				a. Luas Areal Sawah yang di		



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				cetak		
				b. Produksi tanaman pangan dan hortikultura a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Sayuran c. Jumlah Desa mandiri benih d. Jumlah sentra produksi beras unggulan lokal	- Nilai Tukar Petani - NTP - Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) : a. padi b. Jagung c. Kedelai - Jumlah Ketersediaan Pangan (Kkal/Kap/Hr)	a. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP). b. Produksi Dalam Negeri : Padi (Juta Ton) c. Produksi Dalam Negeri : Jagung (Juta Ton) d. Produksi Dalam Negeri : Kedelai (Juta Ton) e. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Padi: meningkatkan jumlah surplus dari produksi dalam negeri; f. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Kedelai: meningkatkan produksi terutama untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tahu dan tempe; g. Peningkatan



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						<p>ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Jagung: meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan industri kecil;</p> <p>h. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Meningkatkan produksi daging sapi terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga;</p> <p>i. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Meningkatkan produksi gula untuk memenuhi kebutuhan langsung dan industri rumah tangga</p> <p>j. Peningkatan</p>



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						cadangan pangan pemerintah, khususnya beras dan cadangan pangan daerah
				e. Produksi perkebunan unggulan a. Kelapa Sawit b. Karet c. Kopi d. Kakao	Produksi Perkebunan unggulan (ton) a. Kelapa Sawit b. Karet c. Kopi	a. Perkebunan : Kelapa Sawit (ribu ton) b. Perkebunan : Karet (ribu ton) c. Perkebunan : Kakao (ribu ton) d. Perkebunan : Kopi (ribu ton) e. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor f. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan g. Meningkatnya neraca perdagangan (ekspor-impor) komoditi pertanian
				f. Produksi Daging ternak a. Sapi b. Kambing c. Unggas	Produksi daging ternak (ton) a. Sapi b. Kambing / Domba c. Unggas d. Produksi telur	Produksi Dalam Negeri : Daging Sapi (Ribuan Ton)



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				g. Produksi perikanan budidaya (ton)	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi Perikanan Tangkap (Ton) - Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produksi ikan (juta ton) b. Perikanan Tangkap (Juta Ton) c. Perikanan Budidaya (juta Ton) d. Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan (juta ton) e. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat kg/kapita/tahun; f. Pertumbuhan PDB perikanan g. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) h. Peningkatan nilai tukar nelayan serta pembudidaya ikan.
				h. Jumlah jenis komoditas industri berbasis pertanian yang dikembangkan		
				i. Jumlah unit pengolahan hasil ternak		
				6.1.1.Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan	
		6.Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam	6.1.Meningkatkan daya saing kepemudaan			



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
		pembangunan			mandiri;	
				a. Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina b. Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok) Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga	a. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda b. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama
				c. Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda		a. Laju Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba b. Menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
				d. Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional e. Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional a. PON b. POPNAS	a. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional b. Terwujudnya



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				provinsi f. Peringkat prestasi berskala provinsi g. Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi	c. POPCANAS d. POMNAS e. POSPENAS f. PORWIL	penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi
			6.2.Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.2.1.Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	
				a. Indeks pembangunan gender b. Indeks pemberdayaan gender	- Indeks pembangunan gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				c. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif d. Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik		a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah b. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
				6.2.2.Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	
				a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak b. Persentase kasus kekerasan yang diselesaikan c. Jumlah anak bermasalah yang dilindungi	- Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	
		7.Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal	7.1.Meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis	7.1.1.Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong		
				a. Operasi penyakit masyarakat b. Persentase penegakan perda		
			7.2.Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.2.1.Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati		
				a. Jumlah tempat ibadah b. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan		a. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama,



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
						b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
			7.3.Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal	7.3.1.Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah		
				a. Jumlah sekolah yang muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal b. Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat		a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yang tangguh; b. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya; c. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan



NO	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
1	VISI	MISI	TUJUAN	Sasaran/Indikator Sasaran/ <i>Impact</i>	Sasaran/Indikator Sasaran/ <i>Impact</i>	Sasaran/Indikator Sasaran/ <i>Impact</i>
						budaya;



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian misi, tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Untuk mewujudkan 7 (tujuh) misi, 20 (dua puluh) tujuan dan 30 (tiga puluh) sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015, maka disusunlah 31 (tiga puluh satu) strategi dan 47 (empat puluh tujuh) arah kebijakan dengan rincian : a) Misi I sebanyak 8 strategi dan 8 arah kebijakan; b) Misi II sebanyak 5 strategi dan 8 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 5 strategi dan 6 arah kebijakan dan d) Misi IV sebanyak 5 strategi dan 8 arah kebijakan; e) Misi V sebanyak 2 strategi dan 7 arah kebijakan; f) Misi VI strategi 3 dan 6 arah kebijakan; g) Misi VII Strategi 3 dan Arah Kebijakan 3

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

- Strategi Misi I** : 1. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
2. Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata kelola birokrasi
3. Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penerapan reformasi birokrasi
5. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)
6. Peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing
7. Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur
8. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian



pelaksanaan pemerintahan daerah

- Arah kebijakan Misi I :**
1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
 2. Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi
 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 4. Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat
 5. Percepatan transformasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan menuju e-Government
 6. Peningkatan standar kualitas pelayanan prima
 7. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan
 8. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur
 9. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

- Strategi Misi 2 :**
1. Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan merata
 2. Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan sesuai standar pelayanan
 3. Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
 4. Peningkatan Kemampuan dan kualitas Pelayanan Kesehatan disemua Lembaga Pelayanan Kesehatan
 5. Mengendalikan angka kelahiran penduduk dan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja

- Arah kebijakan Misi II :**
1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat
 2. Peningkatan standar pelayanan pendidikan
 3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
 4. Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin



5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan
6. Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Berkualitas
7. Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas
8. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja

C. Misi 3 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

- Strategi Misi 3** :
1. Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi infrastruktur jalan dan jembatan
 2. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
 3. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur komunikasi dan informatika di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
 4. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
 5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berorientasi pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan
 6. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

- Arah kebijakan Misi III** :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkualitas
 3. Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas
 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian
 5. Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah
 6. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan
 7. Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Bencana



D. Misi 4 : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah

- Strategi Misi 4** :
1. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya local
 2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi, serta produktivitas tenaga kerja
 3. Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial
 4. Membangun dan mengembangkan objek wisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing
 5. Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah dengan dukungan sistem pengelolaan yang professional

- Arah kebijakan Misi IV** :
1. Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi
 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan
 3. Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal
 4. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 5. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 6. Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata
 7. Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata
 8. Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional

E. Misi 5 : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan.

- Strategi Misi 5** :
1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan kualitas pangan masyarakat
 2. Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya

- Arah kebijakan** :
1. Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah



Misi V

2. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian
3. Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan
4. Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan
5. Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya
6. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan
7. Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan

F. Misi 6 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

- Strategi Misi 6** : 1. Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda
2. Meningkatkan kualitas dan akses peran perempuan dalam pembangunan
 3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan

- Arah kebijakan Misi VI** : 1. Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah
2. Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
 3. Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga
 4. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
 5. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik
 6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan

G. Misi 7 : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

- Strategi Misi 7** : 1. Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam lingkungan masyarakat
2. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan masyarakat
 3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal



- Arah kebijakan :** 1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah Misi VII masyarakat
2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan
3. Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan



Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)

MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintahan daerah
2	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata kelola birokrasi	Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi SAKIP - Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC - Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase evaluasi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penerapan reformasi birokrasi	Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah website (media center) yang dikelola oleh pemerintah daerah - Jumlah OPD yang mempergunakan Aplikasi



NO 1	TUJUAN 2	SASARAN 3	STRATEGI 4	ARAH KEBIJAKAN 5	INDIKATOR 6
			Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)	Percepatan transformasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan menuju e-Government	Teknologi Informasi
3	Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perluasan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik	Peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan standar kualitas pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkulu Selatan di Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya baik
		Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik	Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%) - Persentase OPD yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)
4	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II - Eselon III - Eselon IV
		Meningkatnya efektivitas penerapan sistem	Meningkatkan pengawasan dan	Penguatan Sistem Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus dan temuan - Persentase kasus dan



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
		pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi	pengendalian pelaksanaan pemerintahan daerah	Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	temuan yang terselesaikan

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat	Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan merata	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - APM PAUD (%) - APM & APS SD (%) - APM & APS SMP (%) - Jumlah Perpustakaan - Jumlah Pengunjung Perpustakaan - Angka Melek Huruf (%)
		Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan sesuai standar pelayanan	Peningkatan standar pelayanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Guru SD & SMP yang bersertifikasi - Persentase SD & SMP yang terakreditasi
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - AKB/1000 - AKI/1000 - Persentase Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang - Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk
				Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/ BPJS - Jumlah Penduduk Miskin yang dilayani Jamkesda
		Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana	Peningkatan Kemampuan dan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas Terakreditasi



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
		unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas	kualitas Pelayanan Kesehatan disemua Lembaga Pelayanan Kesehatan	layanan kesehatan	- Rasio Puskesmas/Pustu/ Poliklinik Per Jumlah Penduduk - Akreditasi RSUD
				Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Berkualitas	- Jumlah Dokter Umum - Jumlah Dokter Spesialis - Jumlah Desa yang belum memiliki bidan desa
		Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja	Mengendalikan angka kelahiran penduduk dan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja	Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas	- TFR - Persentase Peserta KB (%)
				Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja	- Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi

MISI 3 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten untuk mencapai keseimbangan pembangunan	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten	Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang - Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik/sedang - Persentase jembatan dalam kondisi baik
2	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten dalam bidang komunikasi dan informatika	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi, berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur komunikasi dan informatika di seluruh wilayah Kabupaten	Pembangunan dan pengembangan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkualitas	- Jumlah OPD yang memiliki jaringan internet terintegrasi - Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi jaringan internet



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
			Bengkulu Selatan		
3	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur permukiman	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rumah tangga berakses air bersih (%) - Persentase rumah tangga bersanitasi (%) - Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) - Jumlah Desa yang belum memiliki jaringan listrik - Rasio Elektrifikasi
4	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) - Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m) - Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m) - Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m) - Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi (Ha) - Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)
5	Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan yang	Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah - Persentase kesesuaian perizinan pemanfaatan



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
			berorientasi pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan	penataan ruang daerah	ruang dengan dokumen rencana tata ruang - Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS
				Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	- Persentase pengelolaan persampahan daerah - Jumlah TPS
		Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana	Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Bencana	- Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana

MISI 4 : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya lokal	Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi	- Jumlah Usaha Kecil menengah dan koperasi yang mendapatkan pembinaan - Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan
				Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan	- Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
				Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal	- Jumlah sentra industri yang dikembangkan - Jumlah kelompok usaha



					baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang mendapat pembinaan
2	Menanggulangi angka pengangguran dan kemiskinan	Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar	Meningkatkan kualitas dan kompetensi, serta produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	- Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan - Jumlah pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan
		Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin	Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	- Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan - Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi - Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Meningkatkan daya saing bidang kepariwisataan	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat	Membangun dan mengembangkan objek wisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing	Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata	- Jumlah objek wisata yang dikembangkan
				Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata	- Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan - Jumlah Museum
4	Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah dengan dukungan sistem pengelolaan yang profesional	Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	- Nilai investasi (Rp.) - Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani - Rata-rata lama pelayanan perizinan

MISI 5 : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6



1	Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat	Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan kualitas pangan masyarakat	Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah	- Jumlah Desa Mandiri Pangan
		Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan	Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya	Perluasan Areal Pertanian	- Luas Areal Sawah yang di cetak
				Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian	- Produksi tanaman pangan dan hortikultura a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Sayuran - Jumlah Desa mandiri benih - Jumlah sentra produksi beras unggulan lokal
				Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan	- Produksi perkebunan unggulan a. Kelapa Sawit b. Karet c. Kopi d. Kakao
				Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan	- Produksi Daging ternak a. Sapi b. Kambing c. Unggas
				Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya	- Produksi perikanan budidaya (ton)
				Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	- Jumlah jenis komoditas industri berbasis pertanian yang dikembangkan



				Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan	- Jumlah unit pengolahan hasil ternak
--	--	--	--	----------------------------------------------------------	---------------------------------------

MISI 6 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan daya saing kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas	Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda	Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	- Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina - Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha
				Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	- Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda
				Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga	- Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional - Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat provinsi - Peringkat prestasi berskala provinsi - Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dan akses peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	- Indeks pembangunan gender - Indeks pemberdayaan gender
				Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	- Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif - Persentase perempuan



					yang menduduki jabatan publik
		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Persentase kasus kekerasan yang diselesaikan - Jumlah anak bermasalah yang dilindungi

MISI 7 : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis	Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong	Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam lingkungan masyarakat	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Operasi penyakit masyarakat - Persentase penegakan perda
2	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan masyarakat	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tempat ibadah - Jumlah lembaga pendidikan keagamaan
3	Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal	Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal	Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sekolah yang muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal - Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat



Penyelarasan Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan selaras dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Bengkulu yang telah tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam yang selaras dengan jangka menengah Provinsi Dan Nasional dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam hal kolom (5) dikosongkan, maka strategi tersebut merupakan strategi lokal dan Dalam hal kolom (8) dikosongkan, maka arah kebijakan tersebut merupakan kebijakan lokal.



Tabel 6.2

Keselarasan Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2016- 2021

Kabupaten/Kota : Bengkulu Selatan

Provinsi : Bengkulu

No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah						
	a. Opini atas laporan keuangan pemerintahan daerah	a. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik	Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Peningkatan kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik						
	a. Nilai Evaluasi SAKIP b. Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP CC c. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata kelola birokrasi	Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	a. Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi	Penguatan sistem pengendalian internal	a. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan sistem dan manajemen



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	oleh Inspektorat						<p>informasi keuangan negara)</p> <p>b. Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK</p> <p>c. Pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya</p> <p>d. Mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
	a. Persentase evaluasi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah	a.Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak	a.Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	a. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi	Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan
				Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM)			



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis			kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)						
	a. Jumlah website (media center) yang dikelola oleh pemerintah daerah b. Jumlah OPD yang mempergunakan aplikasi teknologi informasi (TI)	a. Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penerapan reformasi birokrasi	a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government	Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government Penerapan sistem manajemen	a. Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat	a. Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja b. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah c. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi d. Penerapan e-government dalam pengelolaan pemerintahan	Akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur e-government, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur e-government Optimalisasi penerapan e-Government yang



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				kinerja nasional yang efektif			terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan on-line, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat
				Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah: meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah			Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government
5.	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik						
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkulu Selatan di	a.Peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang berkualitas	a. Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	a.Peningkatan standar kualitas pelayanan prima	a.Meningkatkan standar kualitas pelayanan	Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik
				Peningkatan			Meningkatkan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya baik	dan berdaya saing		Kualitas Belanja Negara Melalui Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran : Terkait dengan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah		publik	kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah
				Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan			a. Memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik b. Peningkatankerjasa ma antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik c. Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari d. Penetapan quick wins nasional



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							pelayanan publik e. Penguatan inovasi pelayanan publik f. Perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (best practices)
6.	Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik						
	a. Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%) b. Persentase SKPD yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	a. Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur	a. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat	a. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi .	Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan
7.	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara			.			
	a. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	a. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi	a. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi	a. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur	a. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi	Penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	- Eselon II - Eselon III - Eselon IV	aparatur		untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif		pendidikan dan kebutuhan b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi .	meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan Reform Leaders Academy (RLA)
8.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi						
	a. Jumlah kasus dan temuan b. Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan	a.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah		a.Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Penguatan sistem pengendalian internal	
9.	Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat						
	a. APM PAUD (%) b. APM & APS SD (%) c. APM & APS SMP (%) d. Jumlah Perpustakaan e. Jumlah Pengunjung Perpustakaan f. Angka Melek Huruf	Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan merata	Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas	a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta	a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	(%)			mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas		meningkatkan minat baca masyarakat	daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) b. Penurunan kesenjangan pendidikan dasar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang masih belum dapat menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 Tahun c. Penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar d. Perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>mendapatkan layanan pendidikan</p> <p>e. Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas</p> <p>f. Penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan budaya</p> <p>g. Pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu Atap di kecamatan/kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs</p> <p>h. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SD/MI/SMP/MTs baru</p> <p>i. Penurunan kesenjangan</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							pendidikan dasar antardaerah dan antarjenis kelamin
							j. Pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk menemukanli permasalahan partisipasi pendidikan
				Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas			a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar
							b. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan menengah perlu pula dilakukan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>c. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah</p> <p>d. Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler juga dilakukan</p> <p>e. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas</p> <p>a. Penjaminan bahwa Standar Nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD</p> <p>b. Penguatan forum pengembangan</p>
				Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini			



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru</p> <p>c. Penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya</p> <p>d. Pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik</p> <p>e. Peningkatan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD-HI)</p> <p>a. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses</p>
				Meningkatkan budaya gemar membaca			



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi</p> <p>b. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat</p> <p>c. Pembudayaan kegemaran membaca peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata yang mendukung pengembangan techno park, science park dan pelaksanaan revolusi mental</p>
				Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas			<p>a. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno</p> <p>b. Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							informasi c. dan komunikasi d. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis e. perpustakaan
10.	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing						
	a. Persentase Guru SD & SMP yang bersertifikasi b. Persentase SD & SMP yang terakreditasi	Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan sesuai standar pelayanan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan		Peningkatan standar pelayanan pendidikan	1. Peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik 2. Meningkatkan standar akreditasi pendidikan	
11	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat						
	a. AKB/1000 b. AKI/1000 c. Persentase Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang d. Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		Peningkatan akses pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak 2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit	



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	e. Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/ BPJS f. Jumlah Penduduk Miskin yang dilayani Jamkesda			Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan	Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin	menular	a. Pengembangan operasional pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan b. Pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk KB dan KR
				Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan			a. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta b. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan c. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan</p> <p>d. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan</p> <p>e. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan</p>
				Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan			Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin
12.	Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang						



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	berkualitas						
	a. Jumlah Puskesmas Terakreditasi b. Rasio Puskesmas/Pustu/ Poliklinik Per Jumlah Penduduk c. Akreditasi RSUD	Peningkatan Kemampuan dan kualitas Pelayanan Kesehatan disemua Lembaga Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan	1. Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan	a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar b. Peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu c. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta d. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan e. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya</p> <p>f. Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta</p> <p>g. Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer</p> <p>h. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar</p> <p>a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan</p>
				Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas			



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>sistem rujukan nasional, rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online</p> <p>c. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan</p> <p>d. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan</p> <p>e. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan</p> <p>f. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah</p> <p>g. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer</p>
	d. Jumlah Dokter Umum e. Jumlah Dokter Spesialis f. Jumlah Desa yang belum memiliki bidan desa			<p>Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan</p> <p>Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan</p>	Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Berkualitas		<p>Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB/PKB) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) dalam pelayanan KB</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK)</p> <p>b. Peningkatan mutu</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan</p> <p>c. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer</p> <p>d. Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK</p> <p>e. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan</p>
13.	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan						



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	kesehatan reproduksi remaja						
	a. Penurunan angka kelahiran bayi b. Persentase Peserta KB (%)	Mengendalikan angka kelahiran penduduk dan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja	Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja	Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas	Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas	1. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas	Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja
	c. Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi				Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja	2. Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja	
14.	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten						
	a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang b. Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik/sedang c. Persentase jembatan dalam kondisi baik	Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi infrastruktur jalan dan jembatan	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah	Mendorong Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
15.	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi, berkualitas dan merata di seluruh wilayah						
	a. Jumlah OPD yang memiliki jaringan internet terintegrasi b. Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi jaringan internet	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur komunikasi dan informatika di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan		Penyelenggaraan riset Telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK)	Pembangunan dan pengembangan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkualitas		Penyelenggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi /produk baru terdifusi ke sektor produksi
16.	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat						
	a. Persentase rumah tangga berakses air bersih (%) b. Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur permukiman di seluruh wilayah	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah	Mendorong Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur listrik	Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, melalui pembangunan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	c. Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) d. Jumlah Desa yang belum memiliki jaringan listrik e. Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	Kabupaten Bengkulu Selatan				b. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. c. Peningkatan cakupan sarana informasi dan komunikasi masyarakat	infrastruktur dasar perdesaan yang dapat menyerap tenaga kerja
17.	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah						
	a. Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) b. Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m) c. Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m) d. Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m) e. Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah		Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	direhabilitasi (Ha) f. Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)						
18.	Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan						
	a. Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah b. Persentase kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang c. Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berorientasi pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan			Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah		
	d. Persentase pengelolaan persampahan daerah e. Jumlah TPS	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berorientasi pada			Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan		



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
19.	Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana						
	a. Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana	Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Bencana	Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana	a. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan : Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah b. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan : Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyediaan peta ancaman dan risiko bencana untuk perencanaan pembangunan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>dan perencanaan tata ruang</p> <p>c. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan : Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan/revisi Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) RPJMD dan RTRW Prov/Kab/Kota</p> <p>d. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan : Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana antar wilayah melalui rencana penanggulangan bencana, rencana</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							kontinjensi, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi e. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan : Peninjauan ulang Indeks Risiko Bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah f. Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana : Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana g. Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana :



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat h. Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana : Penyediaan dan peningkatan sistim komunikasi untuk kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan
20.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal						
	a. Jumlah Usaha Kecil menengah dan koperasi yang mendapatkan pembinaan b. Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya lokal	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta Mengembangkan sarana Perdagangan rakyat	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik	Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi	b. Meningkatkan kapasitas teknis, permodalan dan peralatan UMKM serta kapasitas kelembagaan Koperasi .	a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan c. Peningkatan nilai tambah produk dan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional			jangkauan pemasaran d. Penguatan kelembagaan usaha e. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
	c. Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi				Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan	c. Mengembangkan sarana perdagangan rakyat	
	d. Jumlah sentra industri yang dikembangkan e. Jumlah kelompok usaha baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang mendapat pembinaan				Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal		
21.	Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar						
	a. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan b. Jumlah pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan	Meningkatkan kualitas dan kompetensi, serta produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	a. Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi	a. Penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
						<p>pada pasar kerja.</p> <p>b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja</p>	<p>kualitas pelatihan</p> <p>b. Revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan yang diberikan</p> <p>c. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal untuk memberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih</p> <p>d. Peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah</p> <p>e. Pemberian insentif bagi industri termasuk perusahaan kecil dan menengah untuk memberikan pelatihan bagi</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>karyawannya sehingga produktivitas mereka dapat ditingkatkan, antara lain dalam bentuk pembiayaan bersama (matching fund)</p> <p>f. Pemberian insentif bagi tenaga kerja/calon tenaga kerja untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan institusi/perusahaan tempat tenaga kerja tersebut bekerja sebagai bagian dari pengembangan karir</p> <p>g. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi didorong untuk meningkatkan kualitasnya agar</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							lulusannya memiliki keahlian khususnya keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja
22.	Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin						
	a. Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan b. Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi c. Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	Pencegahan, Pengu- rangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial.	
23.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian						



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	masyarakat						
	a. Jumlah objek wisata yang dikembangkan	Membangun dan mengembangkan objek wisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing	Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata	a. Pemasaran Pariwisata Nasional b. Pembangunan Destinasi Pariwisata c. Pembangunan Industri Pariwisata d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata	Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata	Peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya dan pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	a. Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara b. Mendorong peningkatan wisatawan nusantara, dengan strategi fokus pada 16 pasar wisatawan manca negara dan 16 pasar utama wisatawan domestik. c. Peningkatan pemasaran pariwisata nasional d. Dibentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih e. Pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. f. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata
	b. Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan c. Jumlah Museum				Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata	Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah	



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RRTR, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata</p> <p>g. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata</p> <p>h. Meningkatkan citra kepariwisataan</p> <p>i. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination management organisation (DMO)</p> <p>j. Pembinaan usaha pariwisata bagi</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							masyarakat lokal k. Fasilitas investasi usaha sektor pariwisata l. Fasilitas pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata m. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan n. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata o. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
24.	Meningkatnya investasi daerah						
	a. Nilai investasi (Rp.) b. Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani c. Rata-rata lama pelayanan perizinan	Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah dengan dukungan sistem pengelolaan yang profesional	Optimalisasi pengelolaan investasi	a. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha b. Peningkatan Investasi yang inklusif	Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	a. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha b. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah c. Pengembangan layanan investasi d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi e. Pendirian Forum Investasi f. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif g. Peningkatan persaingan usaha yang sehat h. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor i. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang j. Peningkatan kemitraan antara



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							PMA dan UKM lokal k. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi l. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha m. Pengembangan investasi lokal n. Pengembangan investasi keluar (outward investment) o. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA
25.	Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat						
	a. Jumlah Desa Mandiri Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan kualitas pangan masyarakat			Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah		
26	Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan						



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	pendapatan dan daya beli petani nelayan						
	a. Luas Areal Sawah yang di cetak	Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam		Perluasan Areal Pertanian		
	b. Produksi tanaman pangan dan hortikultura a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Sayuran c. Jumlah Desa mandiri benih d. Jumlah sentra produksi beras unggulan lokal			a. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian b. Peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramahlingkungan hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan untuk penggunaan industri dalam negeri	Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian	Meningkatkan eksplorasi sumber daya alam	a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor b. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi hasil pertanian, peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaaan dan pengawasan keamanan hayati c. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							pasar dana akses pasar termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran
	e. Produksi perkebunan unggulan a. Kelapa Sawit b. Karet c. Kopi d. Kakao			Peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramah lingkungan hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan untuk penggunaan industri dalam negeri	Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan	Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor
	f. Produksi Daging ternak a. Sapi b. Kambing c. Unggas				Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan	a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan b. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	
	g. Produksi perikanan budidaya (ton)			a. Peningkatan Produktivitas,	Peningkatan produksi dan mutu hasil	Meningkatkan produksi dan	a. Pendayagunaan potensi perairan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan b. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Perikanan c. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan d. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan e. Perbaikan Tata Kelola Perikanan	perikanan budidaya	pengolahan hasil perikanan tangkap Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya	umum daratan (PUD) untuk perikanan berwawasan lingkungan b. Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya dan percontohan teknologi budidaya yang benar melalui model pengembangan techno park dan science park c. Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasilokasi yang potensial d. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan, terutama di 100 sentra perikanan terpadu dan terintegrasi (hulu-hilir) e. Pengembangan balai benih ikan/udang dan perbaikan jalan produksi di sentra



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							produksi perikanan Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan f. Pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan g. Revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage dan rantai dingin di lokasi-lokasi yang tepat, terutama di 100 sentra perikanan h. Penguatan upaya pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) Pengembangan inovasi dan intermediasi teknologi perikanan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							i. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis WPP, penyusunan rencana pengelolaan perikanan didukung oleh penguatan data dan statistik perikanan j. Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidayaPenguatan standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan k. Menyusun perbaikan rejim pengelolaan perikanan melalui penataan dan pengaturan izin penangkapan dengan mekanisme pemberian izin yang adil, transparan dan efisien
	h. Jumlah jenis komoditas industri				Peningkatan nilai tambah produk	Optimalisasi pengelolaan	



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	berbasis pertanian yang dikembangkan				pertanian dan perkebunan	sumber daya hutan untuk menciptakan nilai tambah berbasis masyarakat	
	i. Jumlah unit pengolahan hasil ternak				Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan		
27.	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas						
	a. Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina b. Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha	Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda	Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga	a. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	Peningkatan peran, kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan	a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama c. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							pembangunan
	c. Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda				Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	Peningkatan pengetahuan pemuda/pelajar terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini	Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda
	d. Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional e. Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat provinsi f. Peringkat prestasi berskala provinsi g. Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	a. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi b. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga	a. Peningkatan kompetensi dan prestasi di bidang olah raga melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan. b. Pembangunan Kawasan olahraga terpadu berstandar Internasional. c. Peningkatan profesionalisme dan etika pembina,	a. Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan b. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan c. Pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan d. Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
						penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan	e. Peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi
28	Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah						
	a. Indeks pembangunan gender b. Indeks pemberdayaan gender	Meningkatkan kualitas dan akses peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	a. Peningkatan akses perempuan dalam layanan dasar pendidikan b. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							pembangunan, di tingkat nasional dan daerah c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender
	c. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif d. Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik			Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam jabatan public b. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Perempuan	Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya
29.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak						
	a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak b. Persentase kasus kekerasan yang diselesaikan c. Jumlah anak	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan	Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan	a. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO b. Meningkatkan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	a. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	bermasalah yang dilindungi			kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan			b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan c. Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait d. Peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran e. Penguatan mekanisme kerjasama antara



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan f. Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan
30	Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong						
	a. Operasi penyakit masyarakat b. Persentase penegakan perda	Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam lingkungan masyarakat			Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat		
31.	Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling						



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	menghargai dan menghormati						
	a. Jumlah tempat ibadah b. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat.	a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan b. Meningkatkan kerukunan umat beragama c. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah e. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	a. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat b. Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara	a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama c. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur d. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota e. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik</p> <p>f. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama</p> <p>g. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan</p> <p>h. Peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah</p> <p>i. Penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan keagamaan untuk menjamin hak</p>



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							beragama masyarakat j. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah k. Peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapat mengurangi beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) l. Peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji m. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) n. Peningkatkan perlindungan dan pembinaan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							jemaah haji
32.	Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah						
	a. Jumlah sekolah yang muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal b. Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat.	a. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek	Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan	a. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat b. Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara	a. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal b. Penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan c. Pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan d. Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa e. Pemberdayaan masyarakat adat



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							dan komunitas budaya
				b. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)			f. Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya
				c. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya			a. Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri b. Peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara c. Pertukaran karya budaya dan pelaku budaya d. Peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia
				d. Mengembangkan sumber daya kebudayaan			a. Peningkatan kualitas SDM kebudayaan b. Peningkatan



No	RPJMD Kabupaten/KOTA		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/KOTA	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat c. Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan d. Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan e. Penelitian dan pengembangan arkeologi nasional f. Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja, dan berfungsi sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan daerah jangka menengah. Program yang disusun untuk mewujudkan sasaran strategis, dengan memakai sumberdaya, sesuai dengan ketentuan serta berdasarkan strategi maupun arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah

1. Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

- Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1. Arah Kebijakan : Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi

- Program : 1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Arah Kebijakan : Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

- Program : 1. Program Penataan Kelembagaan



Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)

1. Arah Kebijakan : Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat

- Program :
 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 2. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
 3. Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik

1. Arah Kebijakan : Peningkatan standar kualitas pelayanan prima

- Program :
 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik

1. Arah Kebijakan : Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan.

- Program :
 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran : Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara

1. Arah Kebijakan : Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur

- Program :
 1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Sasaran : Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja birokrasi

1. Arah Kebijakan : Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Program :
 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan

Sasaran : Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat



1. Arah Kebijakan : Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat.

- Program :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 4. Program Pendidikan Non Formal

Sasaran : Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

1. Arah Kebijakan : Peningkatan standar pelayanan pendidikan.

- Program :
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat.

1. Arah Kebijakan : Peningkatan akses pelayanan kesehatan

- Program :
1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 5. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Sasaran : Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas

1. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan

- Program :
1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata



2. Arah Kebijakan : Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Berkualitas

- Program : 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja

1. Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas

- Program :
1. Program Keluarga Berencana
 2. Program pelayanan kontrasepsi
 3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

2. Arah Kebijakan : Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja

- Program :
1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

C. Misi 3 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten

1. Arah Kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

- Program :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 3. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
 4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 5. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi, berkualitas dan merata di seluruh wilayah

1. Arah Kebijakan : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur komunikasi dan informatika di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan



- Program :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 2. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
 3. Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat

2. Arah Kebijakan : Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas

- Program :
1. Program penyediaan dan pengolahan air baku
 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 4. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah

1. Arah Kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian

- Program :
1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan

1. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah

- Program :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
 2. Program Pemanfaatan Ruang
 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Arah Kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan

- Program :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana

1. Arah Kebijakan : Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Bencana

- Program : 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

D. Misi 4 : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah

Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis pada keunggulan lokal

1. Arah Kebijakan : Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi

- Program : 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan

- Program : 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3. Arah Kebijakan : Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal

- Program : 1. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Sasaran : Menurunnya angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja yang luas dan berorientasi pasar

1. Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja

- Program : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin

1. Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)



- Program :
 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sasaran : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat

1. Arah Kebijakan : Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata

- Program :
 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 2. Program Pengembangan Nilai Budaya
 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sasaran : Meningkatnya investasi daerah

1. Arah Kebijakan : Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang professional

- Program :
 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 2. Program Peningkatan Pelayanan Publik

E. Misi 5 : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan

Sasaran : Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat

1. Arah Kebijakan : Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah

- Program :
 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan

1. Arah Kebijakan : Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian

- Program :
 1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2. Arah Kebijakan : Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan

- Program :
 1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan



3. Arah Kebijakan : Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan

➤ Program : 1. Program peningkatan produksi hasil peternakan

4. Arah Kebijakan : Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya

➤ Program : 1. Program pengembangan budidaya perikanan

5. Arah Kebijakan : Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan

➤ Program : 1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

6. Arah Kebijakan : Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan

➤ Program : 1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

F. Misi 6 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Sasaran : Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas

1. Arah Kebijakan : Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah

➤ Program : 1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

2. Arah Kebijakan : Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba

➤ Program : 1. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

3. Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga

➤ Program : 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga



Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah

1. Arah Kebijakan : Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

- Program :
 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2. Arah Kebijakan : Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik

- Program :
 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Sasaran : Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak

1. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan

- Program :
 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

G. Misi 7 : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal

Sasaran : Meningkatnya tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong

1. Arah Kebijakan : Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat

- Program :
 1. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
 2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Sasaran : Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati



1. Arah Kebijakan : Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan

➤ Program : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran : Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya lokal sebagai kekayaan daerah

1. Arah Kebijakan : Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan

➤ Program : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



Tabel 7.1

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah	Strategi : Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini atas laporan keuangan daerah	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	BPKAD	(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Strategi : Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata kelola birokrasi Arah Kebijakan : Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP	C	C	CC	B	B	B	B	B	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pemerintahan Umum	Setda	(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
													Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemerintahan Umum	Setda	
													Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintahan Umum	Setda	
				Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	0	50	70	75	75	75	75	75	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pemerintahan Umum	Ipda	(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
				Hasil Penilaian	C	C	Cc	B	B	B	B	B	Program Peningkatan	Pemerintahan	Ipda	e - Government



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
				Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat									Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Umum		
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Strategi : Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Arah Kebijakan : Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persentase penerapan Perbup tentang Tata Kerja Organisasi (Tupoksi) lembaga/perangkat daerah	10	50	60	80	90	100	100	100	Penataan Kelembagaan	Pemerintahan Umum	Setda	(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
		Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Strategi : Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penerapan reformasi birokrasi Arah Kebijakan: Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah Website yang dikelola Pemerintah daerah Jumlah OPD yang menggunakan aplikasi teknologi informasi (TI)	2 2	3 3	5 4	10 25	15 30	20 40	20 40	80 40	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan informatika Komunikasi dan informatika	Diskominfo Diskominfo	(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
		Meningkatkan kinerja pemerintahan yang berorientasi	Strategi : Peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing Arah Kebijakan	Indeks	30	80	81	82	83	84	85	85	Program	Bidang	DPM-PTSP,	(Prioritas 1)



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		asi pada peningkatan dan perluasan pelayanan publik	:Peningkatan standar kualitas pelayanan prima	Kepuasan Masyarakat di perizinan pelayanan terpadu									Peningkatan Pelayanan Publik	Penanaman Modal	Setda	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
				Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya baik	0	2	5	6	7	8	10	38	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pembinaan dan pengawasan	Ipda	
		Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan partisipasi publik	Strategi : Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur Arah Kebijakan : Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan													(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
				Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%)	40	45	50	60	70	80	80	80	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BK-PSDM	
				Persentase OPD yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	40	45	50	60	70	80	80	80	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	BK-PSDM	
		Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Strategi : Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)												(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju
				Eselon II	20	20-30	30-40	40-50	60-70	70-80	80-100	80-100	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian	BK-PSDM	
			Arah Kebijakan: Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur	Eselon III	20	20-30	30-40	40-50	60-70	70-80	80-100	80-100	Program	Kepegaw	BK-PSDM	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
													peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	aian		e - Government
				Eselon IV	20	20-30	30-40	40-50	60-70	70-80	80-100	80-100	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian	BK-PSDM	
																(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
				Strategi : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan daerah												
				Arah Kebijakan : Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPIP	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pembinaan dan pengawasan	Ipda	
					Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pembinaan dan pengawasan	Ipda	
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan merata	Strategi : Meningkatkan angka partisipasi sekolah dan minat baca masyarakat. Arah Kebijakan : Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat													(Prioritas 2) Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
					Angka Partisipasi Murni PAUD (%)	0	50	60	70	80	90	90	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Dikbud	
					Angka Partisipasi Murni SD (%)	98,4	98,6	99,3	99,4	99,7	100	100	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud	
					Angka Partisipasi Murni SLTP (%)	80,2	82,3	84,2	87,6	89,8	100	100	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
				Jumlah Perpustakaan	61	61	61-65	65-70	70-75	75-80	80-85	80-85	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	
				Jumlah Pengunjung Perpustakaan	468,000	468,000	468,000-475,000	475,000-485,000	485,000-495,000	495,000-505,000	495,000-505,000	495,000-505,000	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	
				Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,76	8,80	8,86	8,90	8,95	9,0	10	10	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Dikbud	
													Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud	
													Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Dikbud	
													Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	
		Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Strategi : Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan sesuai standar pelayanan													
				Arah Kebijakan : Peningkatan standar pelayanan pendidikan	Persentase SD yang terakreditasi	50-60	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud	(Prioritas 2) Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
					Persentase SMP yang terakreditasi	50-60	60-70	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud	
					Persentase Guru SD yang berijazah minimal S1	50-60	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Dikbud	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
													Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Dikbud	
				Persentase Guru SMP yang berijazah minimal S1	50-60	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Dikbud	
													Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Dikbud	
				Jumlah Sekolah Terakreditasi SD SMP	113 31	0 0	3 1	3 1	3 1	2 1	2 1	124 35	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Dikbud	
		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat	Strategi : Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat													(Prioritas 2) Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
				Arah Kebijakan : Peningkatan akses pelayanan kesehatan												
				Jumlah Kasus Kematian Bayi /1000 penduduk	27	27-22	22-17	17-12	12-0	12-0	10-0	10-0	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Kasus Kematian Ibu /1000 penduduk - Persentase Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang - Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	3	3-1	1-0	1-0	1-0	1-0	1-0	1-0	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	11	11-9	9-6	6-4	4-0	3-0	3-0	3-0	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
													Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
				Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,6	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan	(Prioritas 2) Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
				Arah Kebijakan : Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/BPJS	63,01 %	64%	65%	67%	70%	72%	75%	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penduduk Miskin yang dilayani Jamkesda	49,9%	55%	60%	65%	75%	85%	85%	85%	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang berkualitas	Strategi : Peningkatan Kemampuan dan kualitas Pelayanan Kesehatan disemua Lembaga Pelayanan Kesehatan													(Prioritas 2) Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
			Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	0	2	6	10	14	14	14	60	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
													Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	
				Rasio Puskesmas/Pustu/Poliklinik Per Jumlah Penduduk	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
													Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			
				Peningkatan Tipe RSUD Hasanuddin Damrah	C	C	C	B	B	B	B	B	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	Rumah Sakit	
				Arah Kebijakan : Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Dokter Umum	39	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	51-54	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	(Prioritas 2) Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
					Jumlah Dokter Spesialis	5	6-10	10-13	13-16	16-19	19-22	22-25	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, akses pelayanan KB dan kesehatan	Strategi : Mengendalikan angka kelahiran penduduk dan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja											
				Arah Kebijakan : Peningkatan	TFR	2579	2516	2453	2390	2327	2321	2221	Program Keluarga	Pengendalian	DPPKB-P3A	(Prioritas 2) Peningkatan



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		reproduksi remaja	pelayanan KB yang berkualitas										Berencana	Penduduk dan KB		layanan pendidikan dan kesehatan
				Persentase Kepesertaan KB (%)	70	75	80	85	87	90	90	90	Program pelayanan kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan KB	DPPKB-P3A	
													Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	Pengendalian Penduduk dan KB	DPPKB-P3A	
													Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	DPPKB-P3A	
			Arah Kebijakan : Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja	Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	50	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	75-80	75-80	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian Penduduk dan KB	DPPKB-P3A	(Prioritas 2) Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
													Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pengendalian Penduduk dan KB	DPPKB-P3A	
3	Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten	Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi infrastruktur jalan dan jembatan													
			Arah Kebijakan: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	0	0	50-60	60-70	70-80	80-90	80-90	80-90	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	(Prioritas 3) Penyediaan infrastruktur dasar public yang berkualitas dan prioritas
													Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
													Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
													Program Pembangunan	PU dan Penataan	DPU-PR	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
				Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik/sedang	0	0	50-60	60-70	70-80	80-90	80-90	80-90	sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Ruang		
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	0	0	50-60	60-70	70-80	80-90	80-90	80-90	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
													Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
													Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
													Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
													Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
		Tersedia nya sarana dan prasaran a teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegr asi, berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur komunikasi dan informatika di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan													(Prioritas 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju e - Government
			Arah Kebijakan: Pembangunan dan pengembangan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkualitas	Jumlah OPD yang memiliki jaringan internet terintegrasi	0	0	0	30-40	40	40	40	40	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	Kominfo	
				Jumlah desa/ kelurahan yang terkoneksi jaringan internet	0	0	0	142-158	158	158	158	158	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan informatika	Kominfo	
			Meningka Strategi:													



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		tnya akses dan kualitas infrastruktur permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan													
		rangka memenuhi kebutuhan hak atas kehidupan layak bagi masyarakat	Arah Kebijakan: Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Perumahan dan kawasan permukiman	Disperkim	(Prioritas 3) Penyediaan infrastruktur dasar public yang berkualitas dan prioritas
													Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Perumahan dan kawasan permukiman	Disperkim	
													Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan dan kawasan permukiman	Disperkim	
				Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan dan kawasan permukiman	Disperkim	
				Rasio Elektrifikasi	0	95,4	96,6	97,5	98,4	99	99	99	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Perumahan dan kawasan permukiman	Disperkim	
				Kawasan Kampung Nelayan Terpadu	0	0	1	1	1	1	1	1	Program pembangunan perumahan	Perumahan dan kawasan permukiman	Disperkim	
													Program Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Terpadu	Kelautan Perikanan	Dinas Perikanan	
		Meningkatkan akses dan kualitas	Strategi: Membangun, mengembangkan dan memelihara													



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan													
													Prog penetapan&strategi kebijakan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Perumahan dan kawasan permukiman	Disperkim	(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
													Program pengembangan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	
		Arah Kebijakan: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)		3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	42000	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
													Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m)		0	500	1000	1500	2000	2500	3000	10500	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
													Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m)		31,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	91,000	Program pembangunan jalan dan jembatan	Bina Marga	DPU-PR	
													Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
				Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m)	20,000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	45,000	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Bina Marga	DPU-PR	
													Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/direhabilitasi (m)	10,000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	35,000	Prog.pengemb.& pengelolaan jar.irigasi,rawa&jaringan irigasi lainnya	Pengairan	DPU-PR	
													Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	0	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Prog.pengemb.& pengelolaan jar.irigasi,rawa&jaringan irigasi lainnya	Pengairan	DPU-PR	
													Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
		Meningkatkan kualitas pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Strategi: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berorientasi pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan													(Prioritas 5) Pembangunan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana
				Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah	2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	6-7	6-7	Program Perencanaan Tata Ruang	PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
				Persentase kesesuaian	0	0-Jan	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Program Pemanfaatan	PU dan Penataan	DPU-PR	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
			lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah	perizinan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang									Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ruang PU dan Penataan Ruang	DPU-PR	
				Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS	50-60	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	DPU-PR, Dinas LHK	
			Arah Kebijakan: Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan daerah	50-60	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas LHK	
				Jumlah TPS	32	32-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	55-60	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas LHK	
			Meningkatnya penyelenggaraan mitigasi sebagai upaya menurunkan resiko bencana	Strategi: Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana												
4	Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unggul dan berdaya saing berbasis	Arah Kebijakan: Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana	1-10	1-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	50-60	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Damkar dan Penyelamatan	BPBD	(Prioritas 5) Pembangunan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana
			Strategi: Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya lokal	Jumlah Usaha Kecil menengah	369	388	390	395	400	405	410	410	Program Pengembangan Kewirausahaan	Koperasi, UKM	Dinas Perindagkop-UM	(Prioritas 6) Pengembangan UMKM, industri,



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
	yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah	pada keunggulan lokal	perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi	yang mendapatkan pembinaan									dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			ekonomi kreatif dan pariwisata
				Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan	219	219	219-229	229-239	239-249	249-259	259-269	259-269	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi, UKM	Dinas Perindagkop-UM	
			Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	0	0	5-7	7-9	9-11	11-13	13-15	13-15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Perdagangan	Dinas Perindagkop-UM	(Prioritas 6) Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata
			Arah Kebijakan : Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal	Jumlah sentra industri yang dikembangkan (Pengolahan makanan, Pengolahan ikan, Batu bata dll.)	10	13	16	19	21	24	27	130	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	Dinas Perindagkop-UM	(Prioritas 6) Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata
				Jumlah kelompok usaha baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang mendapat pembinaan	12	18	18	18	18	18	18	120	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perindagkop-UM	
				PPI yang dikembangkan	1	1	1	2	2	2	2	2	Program pengembangan perikanan tangkap	Perikanan	Dinas Perikanan	
			Strategi: Meningkatkan kualitas dan kompetensi, serta produktivitas tenaga kerja													(Prioritas 6) Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata
				Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan	140	210	210	210	210	210	210	1400	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	
				Jumlah	2	4	4	4	4	4	4	26	Program	Tenaga	Dinas	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		berorientasi pasar		pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan									Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kerja	Nakertrans	
		Menurunnya angka kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin	Strategi: Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)													
				Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	24,120	24.000-25.000	25.000-26.000	26.000-27.000	27.000-28.000	28.000-29.000	28.000-29.000	28.000-29.000	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Sosial	(Prioritas 7) Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan keluarga sejahtera
													Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial	
				Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi	0	100	125	150	175	200	200	950	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial	
				Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	0	11	11	11	11	11	11	66	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial	
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai	Strategi: Membangun dan mengembangkan objek wisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing Arah Kebijakan : Pembangunan dan pengembangan													
				Jumlah objek wisata yang dikembangkan	0	0	2-3	3-4	4-5	5-6	5-6	5-6	Program Pengembangan Destinasi	Pariwisata	Dinas Pariwisata	(Prioritas 6) Pengembangan UMKM, industri,



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		salah satu pilar perekonomian masyarakat	objek wisata untuk menjadi destinasi wisata	n									Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata	ekonomi kreatif dan pariwisata
				Kawasan Wisata Bahari	0	0	1	1	1	1	1	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
			Arah Kebijakan : Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata	Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan	22	22	22-24	24-26	26-28	28-29	28-29	28-29	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)	
				Jumlah Museum	-	0	0	1	1	1	1	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)	
		Meningkatkan investasi daerah	Strategi: Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah dengan dukungan sistem pengelolaan yang profesional													(Prioritas 6) Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata
				Jumlah nilai investasi berskala Nasional	2	2	3	4	5	5	5	26	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	DPM-PTSP, Setda	
			Arah Kebijakan : Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	Jumlah jenis perizinan/number perizinan yang dilayani	0	100	100	100	100	100	100	600	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Penanaman Modal	DPM-PTSP, Setda	
				Rata-rata lama pelayanan perizinan	0	5	4	3	2	1	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Penanaman Modal	DPM-PTSP, Setda	
		Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor	Strategi: Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan kualitas pangan													



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
	pertanian ramah lingkungan	Meningkatnya kesejahteraan yang ditandai peningkatan pendapatan dan daya beli petani nelayan	masyarakat Arah Kebijakan: Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah	Jumlah Desa Mandiri Pangan	5	2	2	2	4	4	4	23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
			Strategi: Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya													
			Arah Kebijakan: Perluasan Areal Pertanian	Luas Areal Sawah yang di cetak	0	0	0	0	0	50 Ha	50 Ha	100 Ha	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, DPU-PR	(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
			Arah Kebijakan: Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian	Produksi tanaman pangan dan hortikultura												(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
				a. Padi	88,098	88,098-89,098	89,098-90,098	90,098-91,098	91,098-92,098	92,098-93,098	93,098-94,098	93,098-94,098	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				b. Jagung	14,814	14,814-15,814	15,814-16,814	16,814-17,814	17,814-18,814	18,814-19,814	19,814-20,814	19,814-20,814	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				c. Kedelai	492.54	492.54-502.54	502.54-512.54	512.54-522.54	522.54-532.54	532.54-542.54	542.54-552.54	542.54-552.54	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				d. Sayuran									Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				Jumlah Desa mandiri benih	0	2	2	2	2	2	2	12	Program peningkatan produksi	Pertanian	Dinas Pertanian	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
													pertanian/perkebunan			
				Penanganan Hasil Beras Unggulan (ETJ) (Paket)	0	1	1	1	1	1	1	6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
													Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
			Arah Kebijakan: Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan	Produksi perkebunan unggulan												(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
				a. Kelapa Sawit	164,619,912	173,573,112	182,526,312	191,479,512	200,432,712	209,385,912	218,339,112	218,339,112	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				b. Karet	3,345,143	3,623,90	3,902,67	4,181,43	4,460,19	4,738,95	5,095,00	5,095,00	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				c. Kopi	1,494,537	1.556.367	1.618.197	1.680.027	1.741.857	1.803.687	1,903,687	1,903,687	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				d. Kakao	722,617	723,13	723.643	724.156	724.669	725.182	726.182	726.182	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
			Arah Kebijakan: Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan	Produksi Daging ternak												(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
				a. Sapi	177.13	179.052	180.974	182.896	184.818	186.74	221.4	221.4	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				b. Kerbau	209.87	218.615	227.36	236.105	244.85	253.595	262.34	262.34	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				c. Kambing	37.33	38.853	40.376	41.899	43.422	44.945	46.47	46.47	Program peningkatan produksi hasil	Pertanian	Dinas Pertanian	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
				d. Unggas	169.23	176.282	183.334	197.438	197.438	204.49	211.54	211.54	peternakan Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	(Prioritas 4) Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan
				Arah Kebijakan: Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya	6,520.12	6,846.13	7,188.43	7,547.85	7,925.25	8,321.51	8,737.58	8,737.58	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	
				Arah Kebijakan: Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	0	4	5	5	6	6	6	6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian	
				Arah Kebijakan: Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan	25	27	29	32	34	36	36	36	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian	
6	Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berintegritas	Strategi: Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda													(Prioritas 7) Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan keluarga sejahtera
			Arah Kebijakan: Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina	447	450	455	460	465	470	475	475	Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pemuda dan olahraga Pemuda dan olahraga	Dispora Dispora	
				Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha	1.915	1.915	1.93	1.98	1.99	2	2	11.73	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pemuda dan olahraga	Dispora	



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
			Arah Kebijakan: Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda	0	5	5	5	5	5	5	25	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Pemuda dan olahraga	Dispora	(Prioritas 7) Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan keluarga sejahtera
			Arah Kebijakan: Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga	Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional	0	15	19	21	25	30	30	30	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan olahraga	Dispora	(Prioritas 7) Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan keluarga sejahtera
				Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat provinsi	0	93	95	98	100	105	105	105	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan olahraga	Dispora	
				Peringkat prestasi berskala provinsi	0	52	59	67	71	81	81	330	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pemuda dan olahraga	Dispora	
				Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi	0	0	1	1	0	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan olahraga	Dispora	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas kehidupan perempuan dalam pembangunan daerah	Strategi: Meningkatkan kualitas dan akses peran perempuan dalam pembangunan												
			Arah Kebijakan: Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	72,02	72,02	72,08	73,01	73,04	73,07	73,1	73,1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	(Prioritas 7) Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan keluarga sejahtera
				Indeks pemberdayaan gender	58,63	59,23	59,23	59,236	59,242	59,248	59,254	59,254	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	
			Arah Kebijakan: Peningkatan keterlibatan perempuan dalam	Persentase perempuan yang menjadi anggota	0	0	0	0	0	30	30	30	Program keserasian kebijakan peningkatan	Pemberdayaan Perempuan dan	DPPKB-P3A	(Prioritas 7) Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
			politik dan jabatan publik	legislatif									kualitas Anak dan Perempuan	Perlindungan Anak		keluarga sejahtera
													Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	
				Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik	177	222	252	282	312	3341	3341	3341	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	
													Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	
		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Strategi: Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan													
				Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	83	83	78	73	68	63	60	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	
					Persentase kasus kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	
					Jumlah anak bermasalah yang dilindungi	0	2	4	6	8	10	10	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKB-P3A	
				Kepemilikan Akta Kelahiran	75%	77,5%	80%	82,5 %	85%	90%	90%	90%	Program Penataan Administrasi	Catatan Sipil	Disdukcapil	(Prioritas 7) Pemberdayaan pemuda, perempuan, dan keluarga sejahtera



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
7	Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal	Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang aman, adil dan harmonis dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong	Strategi: Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam lingkungan masyarakat	Anak									Kependudukan			
			Arah Kebijakan: Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat	Operasi penyakit masyarakat	16	14	12	9	4	3	3	58	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Ketertiban dan perlindungan masyarakat	Satpol PP-PBK	(Prioritas 8) Peningkatan Ketertiban Umum Dan Keamanan
				Persentase penegakan perda	18	17	20	23	28	30	30	35	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketertiban dan perlindungan masyarakat	Satpol PP-PBK	
													Program pengembangan wawasan kebangsaan	Ketertiban dan perlindungan masyarakat	Satpol PP-PBK	
													Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketertiban dan perlindungan masyarakat	Satpol PP-PBK	
		Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghargai dan menghormati	Strategi: Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan masyarakat													
			Arah Kebijakan: Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	Safari Ramadhan (Mesjid)	0	55	90	150	200	250	300	300	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Setda	Setda	(Prioritas 9) Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya
		Berkembangnya nilai adat istiadat dan budaya	Strategi: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap													



NO	Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		lokal sebagai kekayaan daerah	pelestarian adat istiadat dan budaya lokal													
			Arah Kebijakan: Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan	Jumlah sekolah yang memiliki muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal	0	10	10	10	10	20	20	60	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Dikbud	(Prioritas 9) Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya
													Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Dikbud	
				Persentase Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat	-	0	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100	90-100	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Dikbud	
													Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Dikbud	



Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penyelarasan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Bengkulu serta Kegiatan Prioritas, Program Prioritas, dan Prioritas Nasional yang telah tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah merumuskan program pembangunan daerah yang selaras dengan Kegiatan Prioritas, Program Prioritas, dan Prioritas Nasional dalam RPJMN. Dalam hal kolom (7), (8) dan (9) dikosongkan, maka program tersebut merupakan program lokal.



Tabel 7.2

Keselarasan Program Prioritas Pembangunan

RPJMD Tahun 2016- 2021

Kabupaten/Kota : Bengkulu Selatan

Provinsi : Bengkulu

Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1 01			Pendidikan							
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Ya	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	Angka Partisipasi Murni PAUD (%)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	Pendidikan
						Angka Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)		Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	Pendidikan
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Ya	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	Angka Partisipasi Murni SD (%)	Program dikdas/Bantuan keuangan kepada kab/kota	Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	Pendidikan
						Angka Partisipasi Murni SLTP (%)	Program dikdas/Bantuan keuangan kepada kab/kota	Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	Pendidikan
						Angka Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)		Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	Pendidikan
					Peningkatan Standar Pelayanan Publik	Persentase SD Yang Terakreditasi	Program dikdas/Bantuan keuangan kepada kab/kota	Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	Pendidikan
						Persentase SMP Yang Terakreditasi	Program dikdas/Bantuan keuangan kepada kab/kota	Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/Daerah Khusus	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;	Pendidikan
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Ya	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	Angka Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)				Pendidikan
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Ya	Peningkatan Standar Pelayanan Publik	Persentase Guru SD yang berijazah minimal S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan dan penjaminan mutu	Pendidikan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota			Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Tenaga Kependidikan	Sekolah	pendidikan;	
						Persentase Guru SMP yang berijazah minimal S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;	Pendidikan
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Ya	Peningkatan Standar Pelayanan Publik	Persentase Guru SD yang berijazah minimal S1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;	Pendidikan
						Persentase Guru SMP yang berijazah minimal S1		Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;	Pendidikan
						Jumlah Sekolah Terakreditasi SD, SMP	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;	Pendidikan
1	02		Kesehatan							
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Ya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	Program Peningkatan Kesehatan Anak dan Balita	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak	Kesehatan
						Jumlah Dokter Umum	Program Pengembangan SDM Kesehatan	Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;	Kesehatan
						Jumlah Dokter Spesialis	Program Pengembangan SDM Kesehatan	Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;	Kesehatan
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Ya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	Program Peningkatan Kesehatan Anak dan Balita	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak	Kesehatan
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Ya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat";	Kesehatan
1	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Ya	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
						Rasio Puskesmas/Pustu/Poliklinik Per Jumlah Penduduk	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
1	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah	Ya	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu	Kesehatan



Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		kesehatan		prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	pelayanan kesehatan	Kesehatan
						Rasio Puskesmas/Pustu/Poliklinik Per Jumlah Penduduk	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	
						Peningkatan Tipe RSUD Hasanuddin Damrah	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	
1	02	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Ya	Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/BPJS		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat dan Pembiayaan Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
						Persentase Penduduk Miskin yang dilayani Jamkesda		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat dan Pembiayaan Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
1	02	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi /1000 penduduk	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Manajemen dan pencegahan penyakit	Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak	Kesehatan
						Jumlah Kasus Kematian Ibu /1000 penduduk - Persentase Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang - Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Manajemen dan pencegahan penyakit	Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak	Kesehatan
1	03		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
1	03	01	Program pembangunan jalan dan jembatan	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal



Kode	Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota			Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dan Jembatan		
					Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m)	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
1	03	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
					Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m)	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
1	03	21	Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
1	03	22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
1	03	24	Program pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi,rawa&jaringan irigasi lainnya	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi (m)	Program pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi,rawa&jaringan irigasi lainnya	Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	Peningkatan produksi padi dan pangan lain;	Kedaulatan Pangan
						Persentase jaringan irigasi wewenang	Program pengembangan	Rehabilitasi dan	Peningkatan	Kedaulatan



Kode	Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota			Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						kabupaten dalam kondisi baik (%)	&pengelolaan jaringan irigasi,rawa&jaringan irigasi lainnya	Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	produksi padi dan pangan lain;	Pangan
1	03	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan aksesibilitas;	Daerah Tertinggal
1	03		Program Perencanaan Tata Ruang	Ya	Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah	Jumlah dokumen peraturan terkait penataan ruang daerah		Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan	Pembangunan 10 PKSN Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;	Daerah Perbatasan
1	03		Program Pemanfaatan Ruang	Ya	Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah	Persentase kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang		Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan	Pembangunan 10 PKSN Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;	Daerah Perbatasan
1	03		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ya	Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah	Persentase kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang		Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan	Pembangunan 10 PKSN Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;	Daerah Perbatasan
1	04		Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
1	04		Program penyediaan dan pengolahan air baku	Ya	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	Peningkatan ketersediaan air baku	Perumahan dan Permukiman
1	04		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Ya	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi	Penyediaan akses air minum dan sanitasi;	Perumahan dan Permukiman
1	04		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Ya	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Terintegrasi	Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh);	Perumahan dan Permukiman
						Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan	Fasilitasi peningkatan kualitas	Perumahan dan Permukiman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Terintegrasi	hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh);	
1 04	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Ya	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	Rasio Elektrifikasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM	Ketersediaan infrastruktur dan energi;	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
1 04	Program Pembangunan Perumahan	Ya	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas	Kawasan Kampung Nelayan Terpadu	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Penyediaan Perumahan Baru MBR	Fasilitasi penyediaan hunian layak baru;	Perumahan dan Permukiman
1 04	Prog penetapan&strategi kebijakan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Ya			Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)	Fasilitasi penyediaan hunian layak baru;	Perumahan dan Permukiman
1 05	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1 05	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Ya	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat	Operasi penyakit masyarakat		Penindakan Kejahatan Terorisme	Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;	Stabilitas keamanan dan ketertiban
1 05	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ya	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat	Persentase penegakan perda		Penindakan Kejahatan Terorisme	Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;	Stabilitas keamanan dan ketertiban
1 05	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Ya	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat	Persentase penegakan perda		Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi	Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme	Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi
			Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	Safari Ramadhan (Mesjid)		Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi	Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme	Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi
1 05	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ya	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat	Persentase penegakan perda		Penindakan Kejahatan Terorisme	Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;	Stabilitas keamanan dan ketertiban
1 05	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Ya	Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi dan simulasi	Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana	Program pengurangan risiko bencana			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	alam		Penanggulangan Bencana					
1 06	Sosial							
1 06	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Ya	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	Antar Kelompok Pendapatan
1 06	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Ya	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	Antar Kelompok Pendapatan
			Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	Antar Kelompok Pendapatan
				Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	Antar Kelompok Pendapatan
1 06	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Ya	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	Antar Kelompok Pendapatan
				Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.	Antar Kelompok Pendapatan
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2 01	Tenaga Kerja							
2 01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ya	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan	Program Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja	Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja	Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;	Antar Kelompok Pendapatan
				Jumlah pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang diadakan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja	Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;	Antar Kelompok Pendapatan
2 02	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
2 01	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Ya	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
2 01	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Ya	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
			Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum



Kode	Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						anak		
				Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
2	01	Ya	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
				Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
			Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
				Persentase kasus kekerasan yang diselesaikan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
				Jumlah anak bermasalah yang dilindungi	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
2	03		Pangan					
2	03	Ya	Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian		Program peningkatan diversifikasi pangan	Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan	Peni ngkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;	Kedaulatan Pangan
			Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah	Jumlah Desa Mandiri Pangan	Program peningkatan diversifikasi pangan	Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi	Peni ngkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;	Kedaulatan Pangan
2	05		Lingkungan Hidup					
		Ya	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan daerah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan	Ketersediaan infrastruktur dan energi;	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
				Jumlah TPS	Program Pengendalian	Ketersediaan	Ketersediaan	Percepatan

Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Perumahan, Air dan Persampahan	infrastruktur dan energi;	Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
2	06		Administrasi Kependudukan Dan Capil							
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ya	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak				
2	08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	08		Program Keluarga Berencana	Ya	Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas	TFR	Program Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.	Kesehatan
2	08		Program pelayanan kontrasepsi	Ya	Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas	Persentase Kepesertaan KB (%)	Program Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.	Kesehatan
2	08		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Ya	Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas	Persentase Kepesertaan KB (%)	Program Keluarga Berencana	Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.	Kesehatan
2	08		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Ya	Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas	Persentase Kepesertaan KB (%)	Program Keluarga Berencana	Pembangunan Keluarga	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.	Kesehatan
2	08		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Ya	Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja	Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	Program Pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak	Pembinaan Remaja	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.	Kesehatan
2	08		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Ya	Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja	Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	Program Pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak	Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kesehatan
2	10		Komunikasi Dan Informatika							
2	10		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ya	Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah Website yang dikelola Pemerintah daerah	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Desa dan Kawasan Perdesaan
					Pembangunan dan pengembangan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkualitas	Jumlah OPD yang memiliki jaringan internet terintegrasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK;	Perkotaan



Kode		Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional			
							Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	10		Program Pengembangan Aplikasi Informatika		Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah OPD yang mempergunakan aplikasi teknologi informasi (TI)	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK;	Perkotaan
			Pembangunan dan pengembangan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkualitas		Jumlah desa/ kelurahan yang terkoneksi jaringan internet	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Desa dan Kawasan Perdesaan	
2	11		Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah							
2	11		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Ya	Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi	Jumlah Usaha Kecil menengah yang mendapatkan pembinaan	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Koperasi dan Kemitraan Usaha	Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;	Antar Kelompok Pendapatan
2	11		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Ya	Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Kemitraan Usaha	Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;	Antar Kelompok Pendapatan
2	12		Penanaman Modal							
2	12		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Ya	Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi	Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha
2	12		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Ya	Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan sistem perizinan nasional	Pengembangan layanan perizinan terpadu;	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha
						Rata-rata lama pelayanan perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan sistem perizinan nasional	Pengembangan layanan perizinan terpadu;	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha
						Peningkatan Standar Kualitas pelayanan prima	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional	Pengembangan layanan perizinan terpadu;	Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha
2	13		Kepemudaan Dan Olah Raga							
2	13		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Ya	Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Desa dan Kawasan Perdesaan



Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13		Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Ya	Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina	Program peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Desa dan Kawasan Perdesaan
2	13		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Ya	Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Desa dan Kawasan Perdesaan
2	13		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Ya	Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap permuda	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			
2	13		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Ya	Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga	Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional	Program Pembinaan Olahraga Prestasi/ Program Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga			
						Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat provinsi	Program Pembinaan Olahraga Prestasi/ Program Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga			
2	13		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Ya	Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga	Peringkat prestasi berskala provinsi	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga			
2	13		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Ya	Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang olahraga	Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
2	16		Kebudayaan							
2	16		Program Pengembangan Nilai Budaya	Ya	Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata	Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan		Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Desa dan Kawasan Perdesaan
					Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas	Jumlah sekolah yang memiliki muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal		Pengembangan kapasitas lembaga	Pembangunan SDM, pemberdavaan,	Desa dan Kawasan



Kode	Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota		Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
							Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kegiatan kemasyarakatan			kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal	dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Perdesaan
				Persentase Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat			Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal	Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;	Desa dan Kawasan Perdesaan
2	16		Ya	Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata	Jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan		Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa;	Revolusi Mental
2	16		Ya	Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan	Jumlah sekolah yang memiliki muatan lokal adat istiadat dan budaya lokal		Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa;	Revolusi Mental
				Persentase Jumlah desa yang memiliki perdes tentang adat			Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa;	Revolusi Mental
				Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata	Jumlah Museum		Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa;	Revolusi Mental
2	17			Perpustakaan					
2	17		Ya	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	Jumlah Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
					Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
					Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
3				Urusan Pilihan					
3	01			Kelautan Dan Perikanan					
3	01		Ya	Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku, kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan	Industri perikanan dan hasil laut;	Maritim dan Kelautan
3	01		Ya	Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal	PPI yang dikembangkan	Program pengembangan perikanan tangkap	Pembangunan/pen- gembangan pelabuhan umum	Konektivitas (Tol) laut dan industri maritim;	Maritim dan Kelautan
3	01		Ya	Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,	Industri perikanan dan hasil laut;	Maritim dan Kelautan



Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								serta Karantina Ikan		
3	02		Pariwisata							
3	02		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Ya	Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Pengembangan 10 destinasi wisata;	Pembangunan Pariwisata
						Kawasan Wisata Bahari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Pengembangan 10 destinasi wisata	Pembangunan Pariwisata
3	02		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Ya	Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk menjadi destinasi wisata	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Promosi Melalui Media Sosial Elektronik, Cetak, Ruang dan Online	Promosi wisata Indonesia;	Pembangunan Pariwisata
3	03		Pertanian							
3	03		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
						Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
					Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian	Penanganan Hasil Beras Unggulan (ETJ) (Paket)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Reformasi Subsidi Pupuk dan Benih, Pengembangan Desa Mandiri Benih	Peni ngkatan produksi padi dan pangan lain;	Kedaulatan Pangan
					Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah jenis komoditas industri berbasis pertanian yang dikembangkan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Reformasi Subsidi Pupuk dan Benih, Pengembangan Desa Mandiri Benih	Peni ngkatan produksi padi dan pangan lain;	Kedaulatan Pangan
3	03		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Ya	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria
						Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (m)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria
						Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan,	Reforma Agraria



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perke Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan bunan	pemanfaatan dan produksi atas TORA	
				Panjang jalan sentra produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria
				Luas jaringan irigasi usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi (m)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria
				Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria
			Perluasan Areal Pertanian	Luas Areal Sawah yang di cetak	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain	Peni ngkatan produksi padi dan pangan lain;	Kedaulatan Pangan
			Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan	Reforma Agraria
				a. Padi				
				b. Jagung				



Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional			
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						c. Kedelai		produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	produksi atas TORA		
						d. Sayuran					
						Jumlah Desa mandiri benih	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Reformasi Subsidi Pupuk dan Benih, Pengembangan Desa Mandiri Benih	Peni ngkatan produksi padi dan pangan lain;	Kedaulatan Pangan	
						Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan	Produksi perkebunan unggulan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria
							a. Kelapa Sawit				
							b. Karet				
							c. Kopi				
							d. Kakao				
3	03		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Ya	Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan	Produksi Daging ternak	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria	
						a. Sapi					
						b. Kerbau					
						c. Kambing					
						d. Unggas					
	03		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Ya	Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan	Jumlah unit pengolahan hasil ternak	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penyediaan, dan Pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, perternakan dan perkebunan	Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA	Reforma Agraria	
3	06		Perdagangan								
3	06		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ya	Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pembangunan Sarana & Prasarana serta Perbaikan Regulasi Perdagangan, Retail, & Logistik Pangan	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Kedaulatan Pangan	
3	07		Perindustrian								
3	07		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Ya	Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal	Jumlah sentra industri yang dikembangkan (Pengolahan makanan, Pengolahan ikan, Batu bata dll.)	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra	Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi	Desa dan Kawasan Perdesaan	



Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata	untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa – kota;	
3	07		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Ya	Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya lokal	Jumlah sentra industri yang dikembangkan (Pengolahan makanan, Pengolahan ikan, Batu bata dll.)	Program Penataan Struktur Industri	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata	Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa – kota;	Desa dan Kawasan Perdesaan
						Jumlah kelompok usaha baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang mendapat pembinaan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata	Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa – kota;	Desa dan Kawasan Perdesaan
4			Urusan Dasar Penunjang							
4	01		Administrasi Pemerintahan							
4	01		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ya	Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.	Reformasi Birokrasi
						Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.	Reformasi Birokrasi
4	01		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ya	Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.	Reformasi Birokrasi
4	01		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Ya	Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Pengawasan yang Independen dan Profesional	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan	Reformasi Birokrasi



Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							KDH		administrasi keuangan.	
						Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan yang Independen dan Profesional	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.	Reformasi Birokrasi
4	01		Penataan Kelembagaan	Ya	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persentase penerapan Perbup tentang Tata Kerja Organisasi (Tupoksi) lembaga/perangkat daerah	Program Penataaan Peraturan Per-Undang-Undangan	Penataan kelembagaan Birokrasi	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	Reformasi Birokrasi
4	02		Pengawasan							
4	02		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Ya	Peningkatan standar kualitas pelayanan prima	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya baik	Program Mengintemsifikan Pengaduan Masyarakat	Penguatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan;	Reformasi Birokrasi
4	02		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ya	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan yang Independen dan Profesional	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.	Reformasi Birokrasi
						Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan yang Independen dan Profesional	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.	Reformasi Birokrasi
						Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan yang Independen dan Profesional	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.	Reformasi Birokrasi
4	03		Perencanaan							
4	03		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya	Peningkatan kualitas dan konsistensi rencana pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah	Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS				
4	04		Keuangan							
4	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ya	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini atas laporan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Peni ngkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Reformasi Birokrasi



Kode			Bidang Urusab Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJMN Nasional		
								Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	05		Kepegawaian							
4	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penerapan Manajemen ASN	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	Reformasi Birokrasi
					Persentase SKPD yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penerapan Manajemen ASN	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	Reformasi Birokrasi	
4	05		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penerapan Manajemen ASN	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;	Reformasi Birokrasi
					Eselon II					
					Eselon III					
					Eselon IV					



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan berbagai aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang prioritas dan berkualitas. Pelaksanaan pembangunan 2016 – 2021 telah diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan, maka dilakukan melalui pelaksanaan program prioritas yang disertai dengan arah kebijakan, strategi, target dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai sebagai bentuk implementasi dari kontrak politik yang telah disampaikan kepada masyarakat. Indikasi rencana program prioritas disusun dengan memperhatikan substansi serta prioritas program pembangunan daerah, yang bersumber dari Rencana Strategis secara sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan rencana yang akan dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan masih bersifat indikatif dimana dalam pelaksanaannya nanti diselaraskan dengan arah kebijakan, isu strategis baik itu lingkup daerah maupun isu strategis nasional yang berkembang, serta kondisi faktual yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Rekapitulasi Indikasi kebutuhan pendanaan sesuai dengan bidang urusan terangkum pada tabel 8.1 serta Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan bidang urusan terangkum pada tabel 8.2 berikut ini :



Tabel 8.1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Belanja Langsung Per OPD
Tahun 2016-2021

NO	OPD	PAGU ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13,281,174,022	26,839,235,523	27,610,287,000	28,438,595,610	29,291,753,478	30,170,506,083
	Kesehatan						
2.	Dinas Kesehatan	35,085,392,000	44,162,476,200	35,552,014,000	36,257,129,000	38,208,978,006	42,029,875,809
3.	UPTD RSUD Hasanudin Damrah	46,619,279,000	71,929,222,000	80,955,512,350	94,341,428,475	95,007,541,494	104,508,295,643
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	187,228,446,270	66,365,686,600	98,771,592,200	109,793,136,040	122,341,289,958	138,584,072,618
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
5.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	21,557,555,300	16,755,430,000	24.431.723.200	22.400.435.520	23.666.279.072	28,223,502,979
	Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat						
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1,950,779,000	5,985,900,000	6,971,040,700	7,246,758,000	8,263,438,542	8,509,078,396
7.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	2,041,060,000	2,885,043,470	2,984,362,000	3,146,162,000	3,462,862,000	3,365,262,000
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,151,051,000	3,356,953,100	4,082,185,060	5,021,867,766	4,788,086,143	5,387,434,657
	Sosial						
9.	Dinas Sosial	1,319,392,000	3,994,703,000	4,955,203,000	5,056,498,150	5,498,123,058	5,875,829,210
II.	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						



NO	OPD	PAGU ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tenaga Kerja						
10.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1,355,092,000	2,063,602,000	4,455,134,800	4,668,547,920	4,762,122,612	5,428,312,653
	Pengendalian, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2,402,427,640	3,789,788,140	5,260,086,200	5,645,721,920	6,952,006,994	7,203,167,962
	Pangan						
12.	Dinas Ketahanan Pangan	858,065,000	1,858,065,000	3,378,475,000	3,547,165,000	3,764,064,200	4,140,470,720
	Lingkungan Hidup						
13.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	11,565,194,920	7,327,722,386	14,447,863,600	24,191,854,840	23,770,680,674	22,804,895,786
	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil						
14.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1,790,248,000	3,040,720,000	4,740,400,000	3,204,400,000	3,306,300,000	3,508,850,000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3,236,761,000	2,677,678,000	4,766,117,000	5,273,865,000	5,406,216,000	6,065,267,800
	Perhubungan						
16.	Dinas Perhubungan	1,512,955,660	1,115,987,400	6,898,907,880	9,892,798,960	4,698,664,422	5,416,031,564
	Komunikasi Dan Informatika						
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	370,854,000	4,676,241,000	6,113,671,000	7,299,181,000	6,923,393,000	7,346,393,000



NO	OPD	PAGU ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah						
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	2,210,156,300	5,086,496,250	5,832,654,700	6,169,977,700	8,220,513,000	7,004,686,800
	Penanaman Modal						
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	909,082,000	1,465,120,000	3,153,804,500	3,126,304,500	3,203,804,500	3,153,804,500
	Kepemudaan Dan Olah Raga						
20.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	956,839,500	3,035,691,000	5,686,615,600	6,087,746,560	6,477,490,616	5,866,666,578
	Perpustakaan Dan Kearsipan						
21.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1,232,449,400	1,235,535,000	1,897,740,450	2,003,360,000	2,165,457,773	1,114,778,661
III. Urusan Pilihan							
	Perikanan						
22.	Dinas Perikanan	4,677,362,400	4,703,582,750	4,820,203,000	5,258,323,799	5,722,154,578	6,226,370,837
	Pariwisata						
23.	Dinas Pariwisata	40.000.000	4,769,853,000	15,584,374,900	19,256,362,890	20,190,728,379	21,554,648,417
	Pertanian						
24.	Dinas Pertanian	12,854,700,400	14,998,110,000	18,257,114,750	17,339,434,525	19,265,917,550	19,479,781,372
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
	Pengawasan						
25.	Inspektorat	1,414,573,900	2,039,217,750	3,557,504,715	3,752,266,937	4,195,961,830	4,237,498,713
	Perencanaan ,Penelitian Pengembangan						
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	6,895,331,800	7,991,412,600	11,360,016,000	14,941,860,850	16,713,886,530	21,919,112,793
	Kuangan						
27.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15,443,543,693	13,856,457,900	16,975,773,218	17,752,175,611	18,152,803,577	19,946,671,996
	Kepegawaian Dan						



NO	OPD	PAGU ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan Serta Pelatihan						
28.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,387,206,700	4,548,685,000	6,777,560,700	5,917,597,050	7,293,893,150	6,522,954,000
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Dan Perangkat Daerah						
29.	Sekretariat DPRD	33,723,433,695	28,677,938,400	32,481,998,530	35,056,606,003	38,201,062,703	38,201,062,703
30.	Sekretariat Daerah						
	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	14,154,847,000	22,993,826,625	23,376,715,154	24,311,783,760	25,284,255,111	26,295,625,315
	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Setda)	1,347,000,000	2,060,625,000	1,918,760,000	1,844,600,000	2,678,008,000	1,906,240,000
	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam (Setda)	645,000,000	660,000,000	1,655,000,000	2,029,000,000	2,232,800,000	2,402,360,000
	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana (Setda)	1,414,000,000	1,260,109,000	2,078,000,000	2,711,420,000	2,035,000,000	4,610,000,000
	Bagian Administrasi Pembangunan (Setda)	1,317,550,000	1,715,000,000	2,077,000,000	2,264,900,000	2,533,230,000	2,786,553,000
	Bagian Hukum (Setda)	1,192,080,000	1,146,500,000	3,088,560,000	4,056,272,000	4,447,526,000	2,497,443,000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda)	1,497,403,000	2,949,727,000	2,853,599,200	3,667,806,670	3,528,673,247	4,476,106,874
	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	1,901,000,000	1,644,273,000	4,583,582,000	4,904,942,050	5,251,588,198	5,625,706,557
	Bagian Humas, Protokol Dan Santel Sekretariat Daerah	4,912,482,000	4,674,250,000	7,067,280,000	7,774,008,000	8,551,408,800	9,406,549,680
31.	Ulu Manna	444,698,000	468,342,000	690,680,170	764,398,111	840,837,922	924,921,714
32.	Air Nipis	322,181,500	419,056,500	908,913,400	1,030,304,740	1,130,885,214	1,264,723,735
33.	Kedurang	368,716,700	465,824,000	868,949,200	730,481,600	807,132,600	878,153,000
34.	Kedurang Ilir	645,764,000	513,506,000	872,710,000	959,181,000	1,054,295,500	1,160,924,850
35.	Pino Raya	482,350,000	627,535,000	720,959,500	790,538,350	867,072,885	930,762,574
36.	Pino	412,391,000	481,843,000	758,466,000	832,116,000	877,812,000	963,784,500



NO	OPD	PAGU ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Bunga Mas	434,930,000	462,803,000	1,147,098,000	1,163,000,000	1,317,000,000	1,181,000,000
38.	Kota Manna	413,121,000	433,140,500	560,119,200	616,130,720	632,817,420	687,744,192
39.	Pasar Manna	413,121,000	433,140,500	1,059,205,000	636,269,000	642,012,500	796,852,550
40.	Manna	418,298,000	418,298,000	514,937,200	566,430,000	623,074,000	627,369,000
41.	Seginim	431,493,000	438,867,000	466,587,000	533,887,000	575,257,000	622,000,000
Total/Tahun		451,238,832,800	405,499,219,594	520,027,057,077	574,275,030,627	605,826,160,234	653,840,104,791

TABEL 8.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(1)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				601.052.367.951	-	704.763.913.194	-	821.428.694.313	-	944.642.998.460	-	1.086.339.448.229	-	1.249.290.365.462	-	5.407.517.787.609	
	Belanja Gaji Dan Tunjangan				434.044.491.787		514.325.754.244		602.424.811.521		692.788.533.249		796.706.813.236		916.212.835.222		3.956.503.239.259	
	Belanja Bunga				-		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Subsidi				-		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Hibah				17.909.611.600		18.388.500.000		21.146.775.000		24.318.791.250		27.966.609.937		32.161.601.428		141.891.889.215	
	Belanja Bantuan Sosial				303.927.875		230.000.000		264.500.000		304.175.000		349.801.250		402.271.437		1.854.675.562	
	Belanja Bagi Hasil				-		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Bantuan Keuangan				148.794.336.689		171.060.658.950		196.719.757.792		226.227.721.461		260.161.879.681		299.186.161.632		1.302.150.516.205	
	Belanja Tidak Tetap/Tak Terduga						759.000.000		872.850.000		1.003.777.500		1.154.344.125		1.327.495.743		5.117.467.368	
	BELANJA LANGSUNG				451.238.832.800	-	405.499.219.594	-	520.027.057.077	-	574.275.030.627	-	605.826.160.234	-	653.840.104.791	-	3.210.706.405.123	
	URUSAN WAJIB																	
	Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar																	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	1.343.745.228	12 Bulan	1.343.745.228	12 Bulan	1.414.184.472	12 Bulan	1.456.610.006	12 Bulan	1.500.308.306	12 Bulan	1.545.317.556	72 Bulan	8.603.910.796	Dikbud
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			154 Unit	557.190.500	159 Unit	1.357.190.500	159 Unit	1.858.936.500	159 Unit	1.914.704.595	159 Unit	1.972.145.733	159 Unit	2.031.310.105	949 Unit	9.691.477.933	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	420 org	862.136.500	420 org	867.874.000	420 org	893.910.220	420 org	920.727.527	420 org	948.349.352	2.100 org	4.492.997.599	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			17 dokumen	119.316.000	17 dokumen	119.316.000	17 dokumen	119.316.000	17 dokumen	122.895.480	17 dokumen	126.582.344	17 dokumen	130.379.815	102 dokumen	737.805.639	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini			240 sekolah	1.778.541.500	240 sekolah	1.778.541.500	240 sekolah	1.778.541.500	240 sekolah	1.831.897.745	240 sekolah	1.886.854.677	240 sekolah	1.943.460.318	1.440 sekolah	10.997.837.240	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			126 sekolah	7.285.305.500	126 sekolah	7.385.305.501	126 sekolah	7.703.451.631		7.934.555.180	126 sekolah	8.172.591.835	126 sekolah	8.417.769.590	738 sekolah	46.898.979.238	
	Program Pendidikan Non Formal			300 orang	150.000.000	300 orang	150.000.000	300 orang	150.000.000	300 orang	154.500.000	300 orang	159.135.000	300 orang	163.909.050	1.800 orang	927.544.050	
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan			90%	938.402.000	90%	938.402.000	90%	325.000.000	90%	334.750.000	90%	344.792.500	90%	355.136.275	100%	3.236.482.775	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			12 Bln	1.108.673.294	12 Bln	12.449.598.294	12 Bln	12.752.982.897	12 Bln	13.135.572.384	12 Bln	13.529.639.555	12 Bln	13.935.528.742	72 Bln	66.911.995.166	
	Program Pengembangan Nilai budaya				-	11 Kecamatan	55000000	11 Kecamatan	55000000	11 Kecamatan	56650000	11 Kecamatan	58349500	11 Kecamatan	60099985	55 kec	285.099.485	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Pengelolaan Kekayaan budaya			0	11 Kecamatan	275.000.000	11 Kecamatan	310.000.000	11 Kecamatan	319.300.000	11 Kecamatan	328.879.000	11 Kecamatan	338.745.370	55 Kecamatan	1.571.924.370		
		Program Pengelolaan keragaman budaya			-	4 kali	125.000.000	4 kali	275.000.000	4 kali	283.250.000	4 kali	291.747.500	4 kali	300.499.925	20 kali	1.275.497.425		
					13.281.174.022		26.839.235.523		27.610.287.000		28.438.595.610		29.291.753.478		30.170.506.083		155.631.551.716		
		Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar															-		
		DINAS KESEHATAN															-		
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bln	12 bln	886.074.000	12 bln	760.406.000	12 bln	1.381.428.640	12 bln	1.519.571.504	12 bln	1.671.528.654	12 bln	1.838.681.520	72 bln	8.057.690.318	Kesehatan
	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		60 bh laptp, 30 bh printer, 21 bh AC, 14 bh kuilkas reagen, 1 pkt parkir, 1 pkt pagar, 1 paket paping blok, 1 unit labkesling, 5 ruangan kantor, 1 bh	30%	1.822.139.000	20%	4.206.352.000	20%	3.955.709.740	10%	3.016.849.570	10%	1.606.296.586	10%	1.766.926.245	100%	16.374.273.141	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		129 org	14 org	92.500.000	14 org	413.550.000	15 org	763.400.000	28 org	839.740.000	28 org	173.614.000	28 org	190.975.400	134 org	2.473.779.400	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	3 Dokumen Anggran, 1 Dokumen Laporan Keuangan, 6 Dokumen Pelaporan	3 Dokumen Anggran, 1 Dokumen Laporan Keuangan, 6 Dokumen Pelaporan	166.386.000	3 Dokumen Anggran, 1 Dokumen Laporan Keuangan, 6 Dokumen Pelaporan	176.722.400	3 Dokumen Anggran, 1 Dokumen Laporan Keuangan, 6 Dokumen Pelaporan	360.106.800	3 Dokumen Anggran, 1 Dokumen Laporan Keuangan, 6 Dokumen Pelaporan	396.117.480	3 Dokumen Anggran, 1 Dokumen Laporan Keuangan, 6 Dokumen Pelaporan	435.729.228	3 Dokumen Anggran, 1 Dokumen Laporan Keuangan, 6 Dokumen Pelaporan	479.302.151	15 Dokumen Anggran, 5 Dokumen Laporan Keuangan, 30 Dokumen Pelaporan	2.014.364.059	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Obat Yang Tersedia	65%	85%	6.383.299.000	95%	4.938.330.000	100%	4.072.582.965	100%	4.479.841.262	100%	5.516.299.435	100%	6.067.929.379	100%	31.458.282.041	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	4 PKM	4 PKM	21.751.971.000	4 PKM	29.044.913.500	4 PKM	17.055.899.465	2 PKM	17.245.834.155	2 PKM	18.970.417.571	2 PKM	20.867.459.328	14	124.936.495.019	
		Program pengawasan obat dan makanan	Terlaksananya pengawasan obat dan makanan	< 1 %	20%	97.211.000	20%	107.029.000	10%	102.811.500	10%	113.092.650	10%	124.401.915	10%	136.842.107	1	681.388.172	
		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah obat asli indonesia	-	-	-	-	-	3 Sampel, 3 Keg, 1 Dok, 2 Kali	94.300.000	4 Sampel, 3 Keg, 1 Dok, 2 Kali	103.730.000	3 Sampel, 4 Keg, 1 Dok, 2 Kali	114.103.000	2Sampel, 3 Keg, 1 Dok, 2 Kali	125.513.300	11 Sampel, 16 Keg, 5 Dok, 10 Kali	437.646.300	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	20%	20%	2.239.838.000	40%	1.658.711.500	50%	1.559.339.800	70%	1.715.273.780	80%	1.886.801.158	100%	2.075.481.274	100%	11.135.445.512	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	75%	75%	259.558.000	80%	314.415.000	85%	294.432.600	90%	323.875.860	100%	356.263.446	100%	391.889.791	100%	1.940.434.697	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dok LPPD	2 Dok	65.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	220.000.000	2 Dok	242.000.000	2 Dok	266.200.000	12 Dok	1.193.200.000	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terlaksananya ProgramLingkungan Sehat Perumahan	-	14	54.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	54.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		109 Desa,10TTu, 4Kel,	-	-	-	143 Desa, 16 Keg,10 TTU,28 PKM,1 TPA,35 Pokmas,30 Titik,8TP2	621.335.600	143 Desa, 16 Keg,10 TTU,28 PKM,1 TPA,35 Pokmas,30 Titik,8TP2	683.469.160	143 Desa, 16 Keg,10 TTU,28 PKM,1 TPA,35 Pokmas,30 Titik,8TP2	751.816.076	143 Desa, 16 Keg,10 TTU,28 PKM,1 TPA,35 Pokmas,30 Titik,8TP2	826.997.684	527 Desa, 96 Keg,50 TTU,40 TP2,22 Kel,145 Pokmas,172 Titik	2.883.618.520		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	1	237.654.000	1	311.386.000	1	385.157.300	1	423.673.030	1	466.040.333	1	512.644.366	1	2.336.555.029		
		Program Survellans dan imunisasi		1 Paket	60.000.000	1 Paket	79.355.500	1 Paket	375.000.000	1 Paket	412.500.000	1 Paket	653.750.000	1 Paket	719.125.000	5 Paket	2.299.730.500		
		Program Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa						14 PKM	350.000.000	14 PKM	385.000.000	14 PKM	423.500.000	14 PKM	465.850.000	14 PKM	1.624.350.000		
		Program Peningkatan Kesehatan Jamaah haji	Jumlah Jamaah Haji					150 orang	185.000.000	150 orang	203.500.000	150 orang	223.850.000	150 orang	246.235.000	600 orang	858.585.000		
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	2 Unit	529.426.000	3 Unit	1.279.533.000	4 Unit	2.432.786.850	2Unit	2.676.065.535	2 unit	2.943.672.089	1 unit	3.238.039.297	14 PKM	13.099.522.771	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan	-	-	-	300 Orang	120.000.000	300 Orang	541.000.000	300 Orang	595.100.000	300 Orang	654.610.000	1200 Orang	720.071.000	600	2.630.781.000	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	Pertemuan 3 kali pengelola program, 86 org nakes terlatih	3 kali,90 orang	118.843.000	3 kali,90 orang	122.843.000	3 kali,90 orang	185.727.300	3 kali,90 orang	204.300.030	3 kali,90 orang	224.730.033	3 kali,90 orang	247.203.036	18 kali,560 orang	1.103.646.399	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					-	-	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	60.500.000	1 Tahun	66.550.000	4Tahun	232.050.000	
		Pengendalian dan Pengawasan makanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan makanan	-	20%	62.663.000	20%	68.929.300	20%	200.074.000	10%	220.081.400	10%	242.089.540	10%	266.298.494	100%	1.060.135.734	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jamkes/BPJS	80%	2%	208.830.000		310.000.000		354.752.940		390.228.234		429.251.057		472.176.163		2.165.238.394	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		4 kali	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	4 Kali	31.168.500	4 Kali	34.285.350	4 Kali	37.713.885	4 Kali	41.485.274	4 Kali	244.653.009	
					35.085.392.000		44.162.476.200		35.552.014.000		36.257.129.000		38.208.978.006		42.029.875.809		231.295.865.015		
		Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar															-		
		RSUD HASANUDIN DAMRAH															-		
		Program Penyediaan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	3.886.600.000	12 Bulan	3.925.282.000	12 Bulan	5.887.923.000	12 Bulan	6.476.715.300	12 Bulan	7.124.386.830	12 Bulan	7.836.825.513	12 Bulan	35.137.732.643	RSUD HD
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12 Bln, 17 Alat,30 Unit,5 Unit		-		-		-		-	12 Bln, 17 Alat,30 Unit,5 Unit	2.000.000.000	12 Bln, 17 Alat,30 Unit,5 Unit	2.200.000.000	12 Bln, 17 Alat,30 Unit,5 Unit	4.200.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4 Bidang		-		-		-		-	4 Bidang	500.000.000	4 Bidang	550.000.000	4 Bidang	1.050.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000		-		-		-		-		-	12 Bulan	50.000.000	
			Program Obat & Perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	5 Kategori			5 Kategori	1.041.389.000	5 Kategori	1.145.527.900	5 Kategori	1.260.080.690	5 Kategori	1.386.088.759	5 Kategori	1.524.697.635	5 Kategori	6.357.783.984	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	1 Rumah								-	1 Rumah	2.500.000.000		2.750.000.000	1 Rumah	5.250.000.000	
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	20 Unit	3 Unit	14.268.759.000	20 Unit	36.429.231.000	20 Unit	39.335.409.450	20 Unit	49.959.315.285	20 Unit	40.477.216.985	20 Unit	44.524.938.684	20 Unit	224.994.870.404	
			Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana prasarana dan SDM bidang sistem informasi rumah sakit	1 Billing Sistem				-				-	1 Billing Sistem	1.650.000.000	1 Billing Sistem	1.815.000.000	1 Billing Sistem	3.465.000.000	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.000.000.000	1 Kegiatan	30.000.000.000	1 Kegiatan	34.000.000.000	1 Kegiatan	36.000.000.000	1 Kegiatan	38.160.000.000	1 Kegiatan	41.976.000.000	1 Kegiatan	208.136.000.000	
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Standarisasi Pelaksanaan Kesehatan	8 Bidang	8 Bidang	413.920.000	8 Bidang	533.320.000	8 Bidang	586.652.000	8 Bidang	645.317.200	8 Bidang	1.209.848.920	8 Bidang	1.330.833.812	8 Bidang	4.719.891.932	
							46.619.279.000		71.929.222.000		80.955.512.350		94.341.428.475		95.007.541.494		104.508.295.643		493.361.278.962	
			Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar																-	
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																-	
			Program administrasi perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 KEG	12 BLN	1.110.377.500	12 BLN	1.119.435.700	12 BLN	1.341.000.000	12 BLN	1.410.381.000	12 BLN	1.612.000.000	12 BLN	1.675.000.000	72 BLN	8.268.194.200	DPU-PR
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		4 KEG	12 Bln	1.415.646.500	12 Bln	761.631.500	12 Bln	1.092.000.000	12 Bln	1.028.000.000	12 Bln	774.000.000	12 Bln	797.000.000	72 BLN	5.868.278.000	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1 KEG	20 ORG	50.000.000	20 ORG	75.000.000	20 ORG	80.000.000	20 ORG	100.000.000	20 ORG	110.000.000	20 ORG	120.000.000	120 Orang	535.000.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	3 KEG	7 Dok	137.175.350	7 Dok	177.319.350	11 Dok	233.000.000	11 Dok	244.000.000	11 Dok	262.000.000	11 Dok	288.000.000	47 Dok	1.341.494.700	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			-	-	-	-	1 Paket	14.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	4 Paket	71.000.000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	60.000.000.000	1 Dok	60.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program pengembangan data dan informasi	Tersajinya data dan informasi yg akuntabel	3 KEG	5 DOK	484.979.850	5 DOK	180.080.850	6 DOK	360.000.000	6 DOK	390.000.000	6 DOK	470.000.000	6 DOK	540.000.000	34 DOK	2.425.060.700	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			-	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	65.000.000	4 Dok	230.000.000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-	368 Stel	133.347.000		-		-		-	368 Stel	133.347.000		
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah			15 BUKU	99.670.000	15 BUKU	113.510.000	15 BUKU	120.000.000	15 BUKU	130.000.000	15 BUKU	140.000.000	15 BUKU	150.000.000	90 BUKU	753.180.000	
		Program penguasaan/pemilikan lahan	Terwujudnya penguasaan/pemilikan lahan	1 KEG	-	-	-	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.550.000.000	1 Paket	5.000.000.000	4 Paket	17.550.000.000		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1 KEG/TAHUN	25.200.200	1 KEG/TAHUN	25.200.200	1 KEG/TAHUN	25.200.200	1 KEG/TAHUN	30.000.000	1 KEG/TAHUN	35.000.000	1 KEG/TAHUN	40.000.000	1 KEG/TAHUN	180.600.600	
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	2 KEG	65 PAKET	130.778.004.000	26 PAKET	34.996.148.900	30 Paket	45.007.999.200	30 Paket	54.009.599.040	30 Paket	64.811.518.848	30 Paket	77.275.380.118	211 Paket	406.878.650.106	
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	2 KEG	1 TAHUN	840.000.000	1 TAHUN	863.969.500	1 TAHUN	782.000.000	1 TAHUN	890.000.000	1 TAHUN	1.031.913.000	1 TAHUN	1.186.700.000	6 TAHUN	5.594.582.500	
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang	2 KEG	-	-	-	2 Paket	125.000.000	2 Paket	135.000.000	2 Paket	145.000.000	2 Paket	155.000.000	8 Paket	560.000.000		
		Program peningkatan sarana&prasaranan kebinamargaan	Terwujudnya pelayanan prima untuk publik	6 KEG	12 BLN	141.473.370	12 BLN	200.000.000	12 BLN	2.776.000.000	12 BLN	2.799.726.000	12 BLN	800.000.000	12 BLN	860.000.000	72 BLN	7.577.199.370	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan			8 DESA	2.600.710.300		-		-		-		-		-	8 DESA	2.600.710.300	
		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong			18 Paket	3.218.374.000	25 Paket	4.612.000.000	20 Paket	5.580.520.000	21 Paket	6.138.572.000	24 Paket	6.730.000.000	26 Paket	7.427.672.000	134 Paket	33.707.138.000	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			8 Unit	1.883.120.000	8 Unit	1.275.250.000	15 UNIT	2.785.000.000	20 UNIT	2.970.000.000	20 UNIT	3.283.000.000	25 UNIT	3.495.000.000	96 UNIT	15.691.370.000	
		Program Kerjasama Pembangunan			4 Keg	977.999.000	4 Keg	1.471.005.900	4 Keg	1.676.957.800	4 Keg	1.848.000.000	4 Keg	2.178.000.000	4 Keg	2.704.000.000	24 Keg	10.855.962.700	
		Program Pembangunan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah			12 DESA	194.390.000	13 DESA	85.790.200	14 Desa	326.000.000	15 Desa	337.000.000	16 Desa	350.000.000	17 Desa	362.000.000	87 Desa	1.655.180.200	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			-	-	-	1 DOK	300.000.000	1 DOK	320.000.000	1 DOK	380.000.000	1 DOK	250.000.000	3 DOK	1.250.000.000		
		Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan			-	-	-	1 Paket	4.340.000.000	1 Paket	4.400.000.000	1 Paket	4.700.000.000	1 Paket	4.750.000.000	4 Paket	18.190.000.000		

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Kinerja Dalam Pelaksanaan Kegiatan	11 KEG	-	-	12 BLN	1.027.401.550	12 BLN	915.000.000	12 BLN	900.000.000	12 BLN	860.000.000	12 BLN	856.000.000	60 BLN	4.558.401.550	DISPERKIM
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik	4 KEG	-	-	19 UNIT	799.392.100	45 UNIT	940.000.000	54 UNIT	710.000.000	60 UNIT	400.000.000	60 UNIT	504.000.000	238 UNIT	3.353.392.100	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1 KEG	-	-	-	-	60 Pcs	80.000.000	-	-	-	-	-	-	60 Pcs	80.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik	1 KEG	-	-	10 ORG	25.000.000	15 ORG	73.750.000	17 ORG	80.000.000	20 ORG	87.000.000	16 ORG	86.400.000	78 ORG	352.150.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersajinya Dokumen Pelaporan Skpd Yg Akuntabel	5 KEG	-	-	10 DOK	128.890.450	10 DOK	151.000.000	10 DOK	162.000.000	10 DOK	176.000.000	11 DOK	248.000.000	11 DOK	865.890.450	
			Program Pengembangan Data Dan Informasi	Tersajinya Data Dan Informasi Yg Akuntabel	4 KEG	-	-	30 DOK/1 PAKET	300.000.000	30 DOK/1 PAKET	437.500.000	31 DOK/1 PAKET	499.000.000	31 DOK/1 PAKET	565.000.000	31 DOK/1 PAKET	640.000.000	31 DOK/1 PAKET	2.441.500.000	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			-	-	1 PAKET	14.000.000	1 PAKET	15.400.000	1 PAKET	17.400.000	1 PAKET	18.400.000	1 PAKET	19.400.000	1 PAKET	84.600.000	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		1 KEG	-	-	1 DOK	19.315.900	1 DOK	31.750.000	1 DOK	41.000.000	1 DOK	45.000.000	1 DOK	50.000.000	5 DOK	187.065.900	
			Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik	1 KEG	-	-	0%	-	1 DOK	92.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	1 DOK	92.000.000	
			Program Penguasaan/Pemilikan Lahan	Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Masyarakat/Daerah	1 KEG	-	-	1,7 Ha	350.000.000	2 Ha	500.000.000	2,5 Ha	550.000.000	3 Ha	605.000.000	3,5 Ha	665.000.000	16,7 Ha	2.670.000.000	
			Program Pengembangan Perumahan/Permukiman	Terlaksananya Pengembangan Perumahan/Permukiman	12 KEG	6 PAKET	2.087.000.000	1 PAKET	10.067.220.000	12 PAKET	8.086.200.000	10 PAKET	6.829.500.000	10 PAKET	7.855.300.000	10 PAKET	8.126.466.000	12 PAKET	43.051.686.000	
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1 KEG	-	-	0%	-	1 PAKET	1.500.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	1 PAKET	1.500.000.000	
			Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum&Limbah Masyarakat	Tersedianya Pengelolaan Air Minum&Limbah Masyarakat	5 KEG	1	2.400.000.000	1	4.024.210.000	4 PAKET	2.070.000.000	3 PAKET	2.295.652.020	3 PAKET	2.518.217.222	3 PAKET	3.783.538.944	5 PAKET	17.091.618.186	
			Program Penyediaan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan	Terperuhnya Sarana Prasarana Pembangunan Pedesaan	5 KEG	1	-	-	-	5 PAKET	1.717.000.000	4 PAKET	1.888.700.000	4 PAKET	2.077.570.000	5 PAKET	2.285.327.000	5 PAKET	7.968.597.000	
			Perenc.Bidang Perkim	Terlaksananya Teknis Kegiatan Dengan Efektif Dan Terarah	3 KEG	1	-	1	-	3 PAKET	365.000.000	3 PAKET	380.000.000	3 PAKET	390.000.000	3 PAKET	1.155.000.000	3 PAKET	2.290.000.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
					2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terciptanya Pemukiman Penduduk Daerah Yg Sehat	4 KEG	1 PAKET	2.600.721.300	-	-	4 PAKET	1.650.000.000	3 PAKET	1.590.000.000	3 PAKET	958.890.000	4 PAKET	1.996.979.000	4 PAKET	8.796.590.300	
		Program Pembangunan Saluran Drainase & Gorong-Gorong	Termanfaatnya Saluran Drainase/Gorong2 Untuk Mengalirkan Air Hujan& Mengurangi Genangan Air Penyebab Banjir	3 KEG	2 PAKET	3.300.000.000	-	-	3 PAKET	4.109.985.000	3 PAKET	4.520.983.500	3 PAKET	4.973.081.850	3 PAKET	5.470.390.035	3 PAKET	22.374.440.385	
		Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Terfasilitasinya Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	2 KEG	2 PAKET	10.700.000.000	-	-	2 PAKET	900.000.000	2 PAKET	990.000.000	2 PAKET	1.089.000.000	2 PAKET	1.197.900.000	2 PAKET	14.876.900.000	
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya Pengelolaan Areal Pemakaman	2 KEG	1	-	1	-	8 LOKASI	242.000.000	8 LOKASI	266.200.000	8 LOKASI	292.820.000	8 LOKASI	322.102.000	40 LOKASI	1.123.122.000	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis&Cepat Tumbuh	Terciptanya Wilayah Perkotaan Yg Maju Dan Berkembang	6 KEG	3 PAKET	469.834.000	-	-	6 PAKET	555.138.200	6 PAKET	680.000.000	6 PAKET	755.000.000	6 PAKET	817.000.000	6 PAKET	3.276.972.200	
						21.557.555.300		16.755.430.000		24.431.723.200		22.400.435.520		23.666.279.072		28.223.502.979		137.034.926.071	
		Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar																	
		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bln	12 bln	927.482.000	12 bln	3.471.022.000	12 bln	4.459.024.200	12 bln	4.527.316.000	12 bln	4.798.438.542	12 bln	4.837.078.396	72 bln	23.020.361.138	Satpol PP-PBK
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		21 unit	15 Unit	48.325.000	24 Unit	379.069.500	34 Unit	404.772.500	23 Unit	417.792.500	23 Unit	650.000.000	23 Unit	680.000.000	142 Unit	2.579.959.500	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	55	55 orang	54.475.000	170 Orang	32.767.000	316 orang	296.000.000	316 orang	296.000.000	316 orang	296.000.000	316 orang	300.000.000	1.025 Orang	1.275.242.000	
		Program Peningkatan Sumber daya Aparatur		7 org/KI	30 Orang	30.000.000	30 Orang	52.500.000	30 Orang	32.000.000	30 Orang	38.000.000	30 Orang	72.000.000	30 Orang	80.000.000	180 Orang	304.500.000	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	28 Dok	28 Dok	18.326.000	36 doc	15.346.000	36 doc	81.244.000	36 doc	88.244.000	66 doc	115.000.000	66 doc	88.000.000	328 doc	406.160.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				-	0	-	0	15.000.000	0	17.000.000	0	19.000.000	0	41.000.000	0	92.000.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				-	0	-	2 Dok	10.000.000	2 Dok	12.000.000	2 Dok	13.000.000	2 Dok	13.000.000	8 Dok	48.000.000	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			54 kali	189.009.000	89 kali	577.706.000	101 kali	607.706.000	123 kali	645.000.000	138 kali	790.000.000	138 kali	800.000.000	643 kali	3.609.421.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program perlindungan konsomen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya konsomen dan pengamanan perdagangan	10 Kali	-	-	-	-	27 Kali	54.000.000	30 Kali	57.000.000	40 Kali	59.000.000	40 Kali	60.000.000	147 Kali	230.000.000	
		Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penegakan perda		-	-	-	-	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	48 Bulan	260.000.000	
		Program Pemeliharaan kantibmas untuk pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan kantibmas untuk pencegahan tindak kriminal	13 kali	9 kali	36.572.000	88 kali	635.442.000	93 kali	562.131.500	98 kali	604.912.500	100 kali	866.000.000	100 kali	995.000.000	439 kali	3.700.058.000	
		Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran			12 Bulan	646.590.000	12 Bulan	822.047.500	12 Bulan	384.162.500	24 Bulan	488.493.000	24 Bulan	515.000.000	24 Bulan	535.000.000	96 Bulan	3.391.293.000	
		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							1 Dok	10.000.000							1 Dok	10.000.000	
						1.950.779.000	-	5.985.900.000	-	6.971.040.700	-	7.246.758.000	-	8.263.438.542	-	8.509.078.396	-	38.926.994.638	
		Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar																-	
		DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	272.690.300	12 bulan	268.583.470	12 bulan	289.262.000	12 bulan	314.462.000	12 bulan	330.662.000	12 bulan	344.562.000	72 bulan	1.820.221.770	Kesbang polinmas
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		18 unit/kali	18 unit/kali	97.485.000	34 unit	161.760.000	13 unit	106.000.000	17 unit	132.500.000	30 unit	183.000.000	37 unit	173.500.000	32 unit	854.245.000	
		Program Peningkatan Displin Aparatur		40 stel		-	90 stel	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	90 Stel	75.000.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4 kali			4 kali	63.800.000	4 kali	75.000.000	4 kali	99.500.000	4 kali	124.700.000	4 kali	125.000.000	4 kali	488.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	-	dokumen	14 dokumen	38.584.700	14 dokumen	59.200.000	14 dokumen	47.400.000	14 dokumen	48.000.000	14 dokumen	52.800.000	14 dokumen	55.500.000	84 dokumen	301.484.700	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		4 laporan	4 laporan	1.202.300.000	24 keg./ 200 orang	1.286.700.000	24 keg./ 200 orang	1.371.700.000	24 keg./ 200 orang	1.441.700.000	24 keg./ 200 orang	1.491.700.000	24 keg./ 200 orang	1.516.700.000	124 keg./ 1000 orang	8.310.800.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		3 kali	3 kali/ laporan	217.000.000	490 orang/ 3 laporan.	460.000.000	490 orang/ 3 laporan.	480.000.000	490 orang/ 3 laporan.	495.000.000	490 orang/ 3 laporan.	510.000.000	490 orang/ 3 laporan.	525.000.000	2400 orang/18 laporan	2.687.000.000	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		50 orang		-	50 orang/ 1 laporan	135.000.000	50 orang/ 1 laporan	135.000.000	50 orang/ 1 laporan	135.000.000	50 orang/ 1 laporan	135.000.000	50 orang/ 1 laporan	135.000.000	250 orang/ 5 laporan	675.000.000	
		Program pendidikan Politik Masyarakat		laporan	4 laporan	213.000.000	90 org, 3 kasus,2 kali, 16 lap.	375.000.000	100 org, 3 kasus,2 kali, 16	480.000.000	100 org, 3 kasus,2 kali, 16 lap.	480.000.000	100 org, 3 kasus,2 kali, 20 lap.	635.000.000	100 org, 3 kasus,2 kali, 17 lap.	490.000.000	490 org, 15 kasus,10 kali, 89 lap.	2.673.000.000	
						2.041.060.000	-	2.885.043.470	-	2.984.362.000	-	3.146.162.000	-	3.462.862.000	-	3.365.262.000	-	17.884.751.470	
		Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar																	
		BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	302.623.500	12 Bulan	376.384.500	12 Bulan	353.548.000	12 Bulan	420.000.000	12 Bulan	499.000.000	12 Bulan	595.000.000	72 Bulan	2.546.556.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab	
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 BLN	12 BLN	385.327.500	12 BLN	443.967.000	12 BLN	488.363.700	12 BLN	537.200.070	12 BLN	590.920.077	12 BLN	650.012.085	72 BLN	3.095.790.432	BPBD
			Program Peningkatan Disiplin Paratur	Meningkatnya Disiplin aparatur	150 Stel		-			150 STEL	400.000.000						205 Stel	400.000.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			130 Org	0	130 Org	400.000.000	130 Org	142.900.000	130 Org	976.730.000	130 Org	156.951.000	130 Org	156.951.000	650 org	1.833.532.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		80 Dok	108.243.500	80 Dok	149.300.500	80 Dok	215.870.000	80 Dok	259.044.000	80 Dok	310.344.000	80 Dok	373.023.800	143 Dok	1.415.825.800	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Dokumen Pengembangan Data/Informasi	12 Bulan	0	-	12 Dok	115.000.000	12 Dok	270.000.000	12 Dok	324.000.000	12 Dok	388.800.000	12 Dok	466.560.000	12 Dok	1.564.360.000	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			0	-	20 Dok	34.843.500	20 Dok	80.400.000	20 Dok	96.480.000	20 Dok	115.776.000	20 Dok	138.931.200	100 Dok	466.430.700	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		10 Dok	1 Dok	9.856.500	9 Dok	36.000.000	9 Dok	72.000.000	9 Dok	86.400.000	9 Dok	103.680.000	10 DOK	40.000.000	47 Dok	347.936.500	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	11 Kecamatan	11 Kec	245.000.000	11 Kec	280.000.000	11 Kec	308.000.000	11 Kec	338.800.000	11 Kec	372.680.000	11 Kec	409.948.000	11 Kec	1.954.428.000	
			Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong - Gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Gorong - Gorong	8 Paket			5 Paket	175.000.000	5 Paket	210.000.000	5 Paket	252.000.000	5 Paket	302.400.000	5 Paket	362.880.000	40 Paket	1.302.280.000	
			Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Terlaksananya Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	15 Paket			15 Paket	150.000.000	15 Paket	165.000.000	15 Paket	181.500.000	15 Paket	199.650.000	15 Paket	219.615.000	75 Paket	915.765.000	
			Program dan Rhabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya dan Rhabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 Paket			2 Paket	100.000.000	2 Paket	140.000.000	3 Paket	154.000.000	4 Paket	169.400.000	2 Paket	186.340.000	13 Paket	749.740.000	
			Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	11 KEC			11 KEC	226.957.600	11 KEC	249.653.360	11 KEC	274.618.696	11 KEC	302.080.566	11 KEC	332.288.622	11 KEC	1.385.598.844	
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	6 Kecamatan	6 Kec	100.000.000	6 Kec	569.500.000	6 Kec	626.450.000	6 Keca	689.095.000	6 Kec	758.004.500	6 Kec	833.804.950	6 Kec	3.576.854.450	
			Program Pengurangan Risiko Bencana	Terlaksananya Pengurangan Risiko Bencana	1 Kali	1 Keg		1 Keg	300.000.000	1 Keg	360.000.000	1 Keg	432.000.000	1 Keg	518.400.000	1 Keg	622.080.000	5 Keg	2.232.480.000	
							1.151.051.000	-	3.356.953.100	-	4.082.185.060	-	5.021.867.766	-	4.788.086.143	-	5.387.434.657	-	23.787.577.725	
			Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar																-	
			DINAS SOSIAL.																-	
06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		470.384.000	12 Bulan	688.304.800	12 Bulan	706.084.000	12 Bulan	741.388.200	12 Bulan	778.457.610	12 Bulan	817.380.491	60 Bulan	4.201.999.101	Sosial
06	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12 Bln		96.458.000	29 Unit	1.007.559.000	55 Unit	474.458.000	58 Unit	299.180.900	54 Unit	654.139.945	55 Unit	556.846.942	251	3.088.642.787	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
06	03		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 bulan		13.500.000	10 Orang	42.000.000	10 Orang	13.500.000	10 Orang	14.175.000	10 Orang	14.883.750	10 Orang	15.627.938	50 Orang	113.686.688	
06	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	7 Dokumen		69.760.000	10 Dokumen	64.700.000	22 Dokumen	129.861.000	22 Dokumen	136.354.050	22 Dokumen	143.171.753	23 Dokumen	150.330.340	99 Dokumen	694.177.143	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				-		-	1 Dok	50.300.000	1 Dok	11.000.000	1 Dok	11.000.000	2 Dok	31.000.000	5 Dokumen	103.300.000	
06	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpncil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	11 kecamatan		95.000.000	11 Kecamatan	175.000.000	11 Kecamatan	314.000.000	11 Kecamatan	329.700.000	11 Kecamatan	346.185.000	11 Kecamatan	363.494.250	11 Kecamatan	1.623.379.250	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				-	1 Dokumen	13.000.000	1 Dok	13.000.000	1 Dok	13.000.000	1 Dok	13.000.000	2 Dok	25.000.000	6 Dokumen	77.000.000	
			Program Peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah				-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	21.000.000	1 Dok	22.050.000	1 Dok	23.152.500	5 Dokumen	106.202.500	
06	02		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pendamping Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	11 kecamatan		360.000.000	8 Kegiatan	749.000.000	12 Kegiatan	1.045.000.000	13 Kegiatan	1.192.250.000	12 Kegiatan	1.101.862.500	13 Kegiatan	1.343.955.625	58 Kegiatan	5.792.068.125	
			Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang di bina	3 Kali		-	20 Orang	37.473.300	20 Orang	60.000.000	20 Orang	63.000.000	20 Orang	66.150.000	20 Orang	69.457.500	100 Orang	296.080.800	
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran nila- nilai kesadaran kebangsaan	5 kali		50.000.000	1 Keg	65.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	63.000.000	1 Keg	66.150.000	1 Keg	69.457.500	1 Keg	373.607.500	
			Program Pantli Asuhan Dan Pantli Jompo				-	12 Bulan	624.403.000	12 Bulan	630.000.000	12 Bulan	661.500.000	12 Bulan	694.575.000	12 Bulan	729.303.750	720 Bulan	3.339.781.750	
			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah Pelatihan keterampilan bagi penyandang penyakit	20 Orang	20 orang	54.290.000	40 orang	33.562.900	140 Orang	120.000.000	140 Orang	126.000.000	140 Orang	132.300.000	140 Orang	138.915.000	600 Orang	605.067.900	
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman				60.000.000	1 areal	64.700.000	1 areal	80.000.000	1 areal	84.000.000	1 areal	88.200.000	1 areal	92.610.000	1	469.510.000	
			Program pembangunan perumahan				-	4 Unit	100.000.000	5 Unit	150.000.000	10 Unit	157.500.000	12 Unit	165.375.000	14 Unit	173.643.750	41	746.518.750	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi	425 orang		50.000.000	4 Keg	290.000.000	6 Keg	344.000.000	6 Keg	361.200.000	6 Keg	379.260.000	6 Keg	398.223.000	28 Keg	1.822.683.000	
			Program pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah anak penyandang cacat dan trauma yang dibina	1 dokumen		-		-	74	700.000.000	83	735.000.000	87	771.750.000	90	810.337.500	334	3.017.087.500	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah				-	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	47.250.000	2 Dokumen	49.612.500	3 Dokumen	67.093.125	10 Dokumen	228.955.625	

[illegible]

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
					2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		Program Administrasi dan Perkantoran	Tercapainya Admin istrasi dan kantor dengan baik	12 bulan	12 bulan	237.072.500	12 bulan	574.044.000	12 bulan	612.746.200	12 bulan	636.961.920	12 bulan	662.259.994	12 bulan	688.691.972	72 bulan	3.411.776.586	DPPKB dan P3A
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yg memadai		15 Unit	187.160.000	24 Unit	152.000.000	51 Unit	458.000.000	27 unit	611.000.000	35 Unit	333.000.000	30 Unit	217.000.000	182 unit	1.958.160.000	
3		ProgramPeningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur					-	2 kali	20.000.000	2 kali	35.000.000	-	-	2 kali	35.000.000	6 kali	90.000.000		
4		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	56 Stel	-	-	-	-	-	-	56 Stel	33.600.000	-	-	-	-	56 Stel	33.600.000	
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	2 org	35.000.000		-	2 org	35.000.000	
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			5 Dok	54.000.000	5 Dok	55.884.140	6 Dok	100.000.000	7 Dok	123.000.000	7 Dok	127.000.000	7 Dok	136.000.000	37 Dok	595.884.140	
7		Program perencanaan pembangunan daerah			1 dokumen	10.836.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	2 dokumen	35.836.000	
8		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				-	-	-	dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	4 dokumen	55.000.000	
9		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Peningkatan Pelayanan Prima		-	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	4 dokumen	55.000.000	
10		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	2 dokumen	35.000.000	
11		Program Keluarga Berencana				1.130.359.140	1	989.800.000	-	1.441.280.000	3	795.000.000	3	980.000.000	3	1.035.000.000		6.371.439.140	
12		Program Kesehatan Reproduksi Remaja				-		-		160.000.000		135.000.000		620.000.000		620.000.000		1.535.000.000	
13		Pelayanan Kontrasepsi				-		-		90.000.000	7	400.000.000	6	610.000.000	8	705.000.000		1.805.000.000	
14		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				-		788.060.000		988.060.000		973.060.000		1.116.060.000		1.118.060.000		4.983.300.000	
15		Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan	Terlaksanya tenyang penyuluhan tentang kesehatan ibu, bayi dan anak			-		-		100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	0	100.000.000		400.000.000	
16		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Berkembangnya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling					-		245.000.000		270.000.000	-	245.000.000		255.000.000		1.015.000.000	
17		Peningkatan Penanggulangan NARKOBA,PMS,HIV/AIDS						-		175.000.000		192.000.000		209.000.000		215.000.000		791.000.000	
18		Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak				60.000.000		95.000.000		95.000.000		205.000.000		215.000.000		220.000.000		890.000.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab	
					2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
19		Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			-	1	-	-	-	10.000.000	20.000.000	25.000.000	55.000.000						
20		Program Ppengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PADU					-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	100.000.000						
21		Promosi KIA melalui kelompok Kegiatan di Masyarakat					-		20.000.000		22.000.000	50.000.000	70.000.000	162.000.000					
22		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			-	-	100.000.000	-	105.000.000	-	50.000.000	-	180.000.000	-	180.000.000	615.000.000			
23		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	Terwujudnya kelembagaan PUG			273.000.000	2	100.000.000	-	50.000.000	7	430.000.000	7	619.000.000	7	650.900.000	45	2.122.900.000	
24		Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan			100.000.000	5	385.000.000	1	205.000.000	4	280.600.000	3	282.712.000	4	284.866.240		1.538.178.240	
25		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Adanya Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			350.000.000	0	550.000.000	0	310.000.000	5	313.500.000	6	517.975.000	6	522.649.750		2.564.124.750	
						2.402.427.640		3.789.788.140		5.260.086.200		5.645.721.920		6.952.006.994		7.203.167.962		31.253.198.856	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																-	
		DINAS KETAHANAN PANGAN																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		12	195.996.000	12	372.502.000	12	439.475.000	12	514.665.000	12	576.914.200	12	665.470.720	72	2.765.022.920	Pangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Aparatur yang Nyaman dan Baik	0	47	229.425.000	121	455.750.000	79	617.000.000	96	838.200.000	62	834.000.000	61	690.000.000	466	3.664.375.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	0	-	-	-	-	80	30.000.000	81	48.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	163	103.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	2	10.500.000	4	15.000.000	4	16.500.000	4	17.000.000	4	19.000.000	18	78.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Lengkap	5	7	11.643.000	7	19.313.000	33	75.000.000	34	109.300.000	34	118.650.000	34	151.000.000	149	484.906.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4	70.000.000	
		Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,8	80	414.876.000	81	1.000.000.000	81	2.032.000.000	82	1.990.500.000	82	2.167.500.000	83	2.530.000.000	83	10.134.876.000	
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				-		-	1	150.000.000		-		-		-	1	150.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerja yang Terstruktur	0	1	6.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	2	26.125.000	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Standar Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4	70.000.000	
					858.065.000		1.858.065.000		3.378.475.000		3.547.165.000		3.764.064.200		4.140.470.720		17.546.304.920	
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																-	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	3.495.704.400	12 Bulan	3.813.193.265	12 Bulan	3.323.708.000	12 Bulan	3.656.078.800	12 Bulan	4.021.686.680	12 Bulan	4.423.855.348	72 Bln	22.734.226.493	LHK
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12 bulan		1.025.502.420		1.176.750.171		3.151.072.000		3.246.141.200		3.562.555.320		4.050.510.852		16.212.531.963	
	Program peningkatan disiplin aparatur			236 stel	82.120.000		-	236 stel	108.980.700	236 stel	139.878.770	236 stel	153.866.647	236 stel	169.253.312	1.180 Stel	654.099.429	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1 dokumen	6 Orang	21.217.000	6 Orang	23.850.000	6 Orang	30.000.000	6 Orang	137.250.000	6 Orang	150.800.000	6 Orang	44.930.000	18 Orang	408.047.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	6 dok	6 Dok	174.504.500	6 Dok	191.954.950	8 Dok	146.447.500	8 Dok	161.092.250	8 Dok	176.001.475	8 Dok	192.301.623	48 Dok	1.042.302.298	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan pembangunan Daerah	1 dokumen	2 dokumen	43.042.500	1 dokumen	3.300.000	1 dokumen	15.125.000	1 dokumen	3.993.000	1 dokumen	4.392.300	2 dokumen	34.760.000	8 dok	104.612.800	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			2 Dokumen	23.534.500	1 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	30.454.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	8 dokumen	113.988.500	
	Program Peningkatan Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	Terkumpulnya data/informasi	1 dokumen	1 dokumen	22.750.000		-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	17.000.000	1 dokumen	18.000.000	5 dokumen	88.750.000	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan daerah	10 bin	1 paket	638.118.500	1 Paket	600.000.000	1 Paket	1.432.922.700	1 Paket	3.443.214.970	1 Paket	2.453.836.467	1 Paket	2.764.281.414	6 Paket	11.332.374.051	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas lingkungan ruang terbuka hijau yang nyaman dan Asri		1 paket	396.664.400	1 paket	108.980.000	1 paket	619.683.500	1 paket	1.813.101.850	1 paket	1.762.417.035	1 paket	1.870.838.739	6 paket	6.571.685.524	
	Program Perencanaan Tata ruang		1 dok	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	121.000.000	3 dokumen	331.000.000	
	Program Pengembangan sarana dan prasarana Persampahan			10 bin	22.783.000	10 bin	25.065.000	-	-	10 bin	30.324.173	10 bin	33.356.590	10 bin	36.400.000	50 bin	147.928.763	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		12 bulan	12 bulan	226.287.000	12 bulan	299.084.000	12 bulan	647.888.700	12 bulan	369.052.997	12 bulan	484.460.797	12 bulan	537.350.000	72 bulan	2.564.123.494	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		12 bulan	-	-	-	-	-	-	4 kali	95.000.000	4 kali	95.000.000	4 kali	95.000.000	12 kali	285.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan data/informasi/statistik daerah	4 dokumen	-	-	-	2 kali	75.000.000	2 kali	75.000.000	2 kali	150.000.000	6 kali	300.000.000				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	12 bulan	98.430.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	277.456.000	12 bulan	351.510.330	12 bulan	438.136.863	12 bulan	465.020.000	72 bulan	1.780.553.193	
		Program Sarana dan Prasarana Fisik perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Dicapaian nya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	8 paket	-	-	-	-	-	9 Kali	930.000.000	6 kali	560.000.000	6 kali	560.000.000	21 kali	2.050.000.000		
		Program pemanfaatan Potensi suber daya hutan	Program pemanfaatan Potensi suber daya hutan	12 Bln	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	750.000.000		
		Program rehabilitasi Hutan dan Lahan	Hutan yang direhabilitasi	12 Bln	-	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	150.000.000		
		Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan	Kawasan hutan yang dilindungi	1 dokumen	-	1.156.457.350	-	100.000.000	-	10 paket	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	30 paket	2.156.457.350		
		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam				-		12 bulan	66.810.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	265.000.000	52 bulan	741.810.000		
		Program peningkatan kualitas dan Akses informasi SDA dan Lingkungan hidup				-		-	-	12 bln	180.000.000	12 bln	660.000.000	12 bln	190.000.000	36 bln	1.030.000.000		
		Program peningkatan pengendalian polusi			4 Keg	481.469.500		-	4 Keg	1.677.810.500	7 Keg	2.100.288.500	7 Keg	2.028.288.500	7 Keg	2.045.288.500	29 Keg	8.333.145.500	
		Program Pengembangan Ekosistem dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan			1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	225.370.000	-	-	1 kegiatan	225.370.000	1 kegiatan	225.370.000	5 kegiatan	731.110.000	
		Program pengelolaan dan rehabilitas ekosistem pesisir dan Laut			12 Bln	970.659.850	12 Bln	287.098.000	12 Bln	2.397.910.000	12 Bln	990.000.000	12 Bln	715.000.000	12 Bln	120.155.000	72 Bln	5.480.822.850	
06	02	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jenis Industri hasil hutan	60 Orang, 11 Kelompok	12 Bln	336.361.000	12 Bln	303.447.000	-	12 Bln	848.447.000	12 Bln	1.760.000.000	12 Bln	510.000.000	60 Bln	3.758.255.000		
		Prgram Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Dokumen Perencanaan	8 Kelompok		-	-	-	1 kegiatan	30.000.000	3 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	150.000.000	2 kegiatan	100.000.000	6 keg	430.000.000	
		Program penyuluhan kegiatan RHL DAN KTA	Peserta penyuluhan	120 Orang	8 klmpk	41.869.000	-	-	-	16 klmpk	290.000.000	16 klmpk	290.000.000	16 klmpk	290.000.000	56 klmpk	911.869.000		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Produksi hasil pertambangan	25 O/Gas 40 Titik		-	-	-	-	120 org	50.000.000	120 org	50.000.000	120 org	50.000.000	360 org	150.000.000		
		Program pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Terlaksananya pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	2 Dokumen	4 Dokumen	511.499.500	1 Dokumen	75.000.000	-	7 Dokumen	939.256.000	7 Dokumen	828.512.000	7 Dokumen	809.256.000	152 Dokumen	3.163.523.500		
06	04	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	90 Orang, 7 Paket		1 paket	68.000.000	2 paket	135.000.000	-	2 paket	250.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	100.000	9 paket	653.100.000		
20	06	06 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	2 Dokumen		-	-	-	-	5 Paket	1.000.000.000	-	-	-	-	5 Paket	1.000.000.000		
						11.565.194.920	-	7.327.722.386	-	14.447.863.600	-	24.191.854.840	-	23.770.680.674	-	22.804.895.786	-	104.108.212.206	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																-	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																-	
06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	411.840.000	12 bulan	483.220.000	12 bulan	533.400.000	12 bulan	584.400.000	12 bulan	634.300.000	12 bulan	659.300.000	8 bln, 12 kali	3.306.460.000	DUKCAPIL
06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		26 Unit	26 Unit	463.523.000	57 unit	1.225.500.000	55 unit	2.119.000.000	57 unit	445.000.000	55 unit	460.000.000	54 unit	464.000.000	3 unit,150 M	5.177.023.000	
06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		6 orang	6 orang	11.000.000	12 orang	48.000.000	10 orang	41.000.000	10 orang	48.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	58 orang	248.000.000	
06	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan laporan kinerja SKPD yang akuntabel	17 dok	17 dok	126.500.000	17 dok	142.000.000	18 dok	190.000.000	33 dok	210.000.000	32 dok	220.000.000	32 dok	262.000.000	167 dok	1.150.500.000	
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				-	-	10.000.000	-	20.000.000	-	50.000.000	-	25.000.000	-	28.000.000	-	133.000.000	
10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran anak	2500 kk, 800 pndh dtg, 4200 akta, 1000 ktp	2500 kk, 800 pndh dtg, 4200 akta, 1000 ktp	703.835.000	2500 kk, 800 pndh dtg, 5200 akta, 13000 ktp	1.117.000.000	10.000 kia, 12.500 kk, 800 pnd dtg, 6000 akta	1.822.000.000	10.000 kia, 12.500 kk, 800 pnd dtg, 6200 akta, 13.000 ktp	1.852.000.000	10.000 kia, 12.500 kk, 800 pnd dtg, 7.000 akta, 13.000 ktp	1.902.000.000	10.000 kia, 12.500 kk, 800 pnd dtg, 7.000 akta, 13.000 ktp	2.007.000.000	40.000 kia, 46.000 kk, 36525 akta, 38.000 ktp, 83 kali, 10	9.403.835.000	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	7 dokumen	125.000.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	23.550.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	23.550.000	2 dokumen	47.100.000		
						1.790.248.000	-	3.040.720.000	-	4.740.400.000	-	3.204.400.000	-	3.306.300.000	-	3.508.850.000	-	19.590.918.000	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																-	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bln	12 bln	532.582.000	12 bln	686.076.000	12 bln	715.899.000	12 bln	805.976.000	12 bln	875.976.000	12 bln	914.754.000	72 bln	4.531.263.000	PMD
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12 bln	12 bln	245.610.000	12 bln	242.861.000	12 bln	263.880.000	12 bln	273.093.000	12 bln	283.227.000	12 bln	294.375.000	72 bln	1.603.046.000	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		6 org	6 org	12.000.000	7 org	21.000.000	8 org	26.400.000	9 org	29.040.000	11 org	31.944.000	12 org	35.138.400	50 og	155.522.400	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	12 bln	12 bln	160.483.000	12 bln	167.959.000	12 bln	215.208.000	12 bln	236.729.000	12 bln	260.402.000	12 bln	286.442.000	72 bln	1.327.223.000	
		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah		dok	dok	20.483.000	dok	19.782.000	dok	27.691.000	dok	30.460.000	dok	33.506.000	dok	36.856.600	dok	168.778.600	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan	142 Desa	142 Desa	800.000.000	142 Desa	465.585.000	142 Desa	848.000.000	142 Desa	875.125.000	142 Desa	886.375.000	142 Desa	875.012.000	142 Desa	4.750.097.000	
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	12 bln	12 bln	277.917.000	12 bln	200.000.000	12 bln	493.189.000	12 bln	542.507.000	12 bln	596.758.000	12 bln	656.434.000	72 bln	2.766.805.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	12 bln	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	72 bln	3.000.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		12 bln	12 bln	150.000.000	12 bln	139.415.000	12 bln	585.000.000	12 bln	781.000.000	12 bln	618.100.000	12 bln	763.410.000	72 bln	3.036.925.000	
		Program Peningkatan Peran Perempuan pedesaan		50 klp	122.083.000	50 klp	-	50 klp	150.000.000	50 klp	165.000.000	50 klp	181.500.000	50 klp	199.650.000	300 klp	818.233.000		
		Program Bina sarana dan prasarana	Terlaksananya Bina sarana dan prasarana	12 bln	12 bln	390.000.000	12 bln	235.000.000	12 bln	540.850.000	12 bln	594.935.000	12 bln	654.428.000	12 bln	943.295.800	72 bln	3.358.508.800	
		Program Pengentasan Kemiskinan Dan Peretasan Keteringgalan		12 bln	-	12 bln	-	12 bln	400.000.000	12 bln	440.000.000	12 bln	484.000.000	12 bln	532.400.000	72 bln	1.856.400.000		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	25.603.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	27.500.000	2 dok	53.103.000			
					3.236.761.000		2.677.678.000		4.766.117.000		5.273.865.000		5.406.216.000		6.065.267.800		27.425.904.800		
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															-		
		DINAS PERHUBUNGAN															-		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	515.115.500	12 Bulan	370.995.500	12 Bulan	515.650.000	12 Bulan	583.215.000	12 Bulan	657.536.500	12 Bulan	739.290.150	72 Bulan	3.381.802.650	DISHUB	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bln	250.620.000	12 bln	248.619.500	12 bln	652.118.200	12 bln	817.330.020	12 bln	999.063.022	12 bln	1.198.969.324	72 bln	4.166.720.065		
		Program Peningkatan disiplin Aparatur			-	50 stel	57.500.000	50 stel	77.000.000	50 stel	84.700.000	50 stel	93.170.000	50 stel	102.487.000	250 stel	414.857.000		
		Program Peningkatan sumber daya Aparatur		6 Orang	135.600.000	6 Orang	45.812.500	10 Orang	164.076.000	10 Orang	180.483.600	10 Orang	198.531.960	10 Orang	218.385.156	52 Orang	942.889.216		
		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		4 laporan	130.823.500	4 laporan	96.476.800	4 laporan	193.403.680	4 laporan	212.744.340	4 laporan	212.744.340	4 laporan	234.019.474	24 laporan	1.080.212.134		
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			-	0	8 keg	3.499.000.000	4 keg	1.308.900.000	2 keg	119.790.000	2 keg	131.769.000	16 Keg	5.059.459.000			
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		0	-	0	-	0	-	5 Ha	700.000.000	0	-	0	-	5 Ha	700.000.000		
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi perhubungan			0	0	3 unit	412.500.000	3 unit	453.750.000	3 unit	499.125.000	3 unit	549.037.500	12 unit	1.914.412.500			
		Program peningkatan pelayanan angkutan		10 kali	85.000.000	12 kali	195.200.000	13 kali	345.000.000	13 kali	345.000.000	13 kali	449.500.000	13 kali	564.450.000	74 kali	1.984.150.000		
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan							2 Paket	4.000.000.000					2 Paket	4.000.000.000			
		Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		20 unit	304.746.660	20 unit	75.000.000	20 unit	280.000.000	20 unit	368.000.000	20 unit	464.800.000	20 unit	571.280.000	1200 unit	2.063.826.660		
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			-	-	2 unit	388.660.000	2 unit	427.526.000	2 unit	470.278.600	2 unit	517.306.460	4 unit	1.803.771.060			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah			-		-	1 kali / kegiatan	220.000.000	1 kali / kegiatan	242.000.000	1 kali / kegiatan	306.130.000	1 kali / kegiatan	336.743.000	4 kali / kegiatan	1.104.873.000	
		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Aparatur			-		-	3 dokumen	46.000.000	3 dokumen	50.600.000	3 dokumen	80.790.000	3 dokumen	88.869.000	12 dokumen	266.259.000	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		0	-	0	-	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.000.000	1 dokumen	39.000.000	1 dokumen	42.900.000	4 dokumen	123.900.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		2 buku	46.050.000	1 buku	9.400.200	2 buku	60500000	2 buku	66.550.000	2 buku	73.205.000	2 buku	80.525.500	11 buku	336.230.700	
		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	16.982.900	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	6 dokumen	191.982.900	
					1.512.955.660	-	1.115.987.400	-	6.898.907.880	-	9.892.798.960	-	4.698.664.422	-	5.416.031.564		29.535.345.885	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	247.236.000	12 bln	356.657.000	12 bln	406.099.000	12 bln	442.700.000	12 bln	483.912.000	12 bln	483.912.000	72 bulan	2.420.516.000	Diskominf o
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12	-	5 unit	1.033.074.000	5 unit	1.160.691.000	5 unit	810.000.000	5 unit	620.000.000	5 unit	975.000.000	23 unit	4.598.765.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	12	-	35 style	65.000.000	35 style	75.000.000	35 style	70.000.000	35 style	100.000.000	35 style	110.000.000	215 style	420.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya Aparatur	12	-	10 Org	45.800.000	10 Org	50.000.000	10 Org	50.000.000	10 Org	60.000.000	10 Org	60.000.000	50 org	265.800.000	
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			-		-	10 dokumen	8.500.000	10 dokumen	9.000.000	10 dokumen	9.500.000	10 dokumen	10.000.000	40 dokumen	37.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	-	12	0	5 dok	90.477.000	5 dok	98.481.000	5 dok	110.981.000	5 dok	117.981.000	5 dok	119.981.000	25 dok	537.901.000	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Website yang dikelola Pemerintah daerah		-	29 Desa	700.948.000	28 Desa	505.000.000	28 Desa	1.135.000.000	28 Desa	1.085.000.000	28 Desa	1.100.000.000	142 Desa	4.525.948.000	
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya pengkajian dan penelitian bidang kominfo		-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	200.000.000	5 dokumen	800.000.000	
		Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Jumlah OPD yang mempergunakan aplikasi teknologi informasi (TI)		-		-	1 dok	1.340.000.000	1 dok	1.090.000.000	1 dok	820.000.000	1 dok	840.000.000	2 dok	4.090.000.000	
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya fasilitasi peningkatan SDM bidang kominfo	2 kali	-	5 orang	220.000.000	5 orang	220.000.000	5 orang	900.000.000	5 orang	670.000.000	5 orang	640.000.000	15 orang	2.650.000.000	
		Program Tata Kelola dan Pembinaan Persandian			-		115.000.000	0	319.000.000	0	472.000.000	0	492.000.000	0	513.000.000		1.911.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Operasional Pengamanan dan Pengawasan Persandian			-	10 berkas	872.000.000	10 berkas	630.000.000	10 berkas	712.000.000	10 berkas	792.000.000	10 berkas	802.000.000	30 berkas	3.808.000.000		
		Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terlaksananya kerja sama informasi dan media masa	3 kali	10 dok	123.618.000	10 dok	650.000.000	10 dok	654.000.000	10 dok	485.000.000	10 dok	565.000.000	10 dok	565.000.000	50 dok	3.042.618.000	
		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah/aparatur				-		300.000.000	0	458.500.000	0	904.000.000	0	919.500.000	0	884.500.000		3.466.500.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				-	1 laporan	9.400.000	1 laporan	10.500.000	1 laporan	10.500.000	1 laporan	10.500.000	1 laporan	25.000.000	5 laporan	65.900.000	
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				-	10 dok	17.885.000	10 dok	17.900.000	10 dok	18.000.000	10 dok	18.000.000	10 dok	18.000.000	50 dok	89.785.000	
						370.854.000	-	4.676.241.000	-	6.113.671.000	-	7.299.181.000	-	6.923.393.000	-	7.346.393.000	-	32.729.733.000	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																-	
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN ,KOPERASI DAN USAHA MIKRO																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	825	494.560.500	958	452.751.250	1058	475.600.000	1158	493.600.000	1258	520.000.000	1358	546.700.000	6615	2.983.211.750	Dinas Perindagkop-UKM
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			36	555.007.800	36	653.082.200	73	783.482.200	36	954.082.200	41	1.108.632.200	40	1.285.482.200	262	5.339.768.800	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			0	-	0	-	10	55.000.000	5	60.000.000	3	65.000.000	4	70.000.000	22	250.000.000	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		17	67.588.000	14	190.177.300	57	289.500.000	15	330.000.000	15	370.000.000	16	427.400.000	134	1.674.665.300	
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			0	-	101	88.000.000	101	98.000.000	101	107.000.000	108	1.115.000.000	101	125.000.000	512	1.533.000.000	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah Usaha Kecil menengah yang mendapat pembinaan		0	-	26	174.000.000	66	185.400.000	96	195.800.000	96	212.000.000	86	170.000.000	370	937.200.000	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	11	11	80.000.000	54	432.400.000	274	453.300.000	279	499.000.000	284	548.000.000	285	527.000.000	1.187	2.539.700.000	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan	64	64	160.000.000	187	326.000.000	257	352.000.000	258	378.000.000	264	404.000.000	254	424.500.000	1.284	2.044.500.000	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	262	262	77.857.500	288	570.643.000	667	596.000.000	287	376.500.000	288	909.000.000	288	436.000.000	2.080	2.966.000.500	
		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	MeningkatnyaKerjasama Perdagangan Internasional	-	-	-	1	35.000.000	13	120.000.000	13	160.000.000	13	180.000.000	13	200.000.000	53	695.000.000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	-	-	-	3	160.000.000	3	180.000.000	4	205.000.000	4	220.000.000	4	235.000.000	18	1.000.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	15	15	372.142.500	24	378.442.500	29	485.372.500	29	492.995.500	29	501.380.800	29	510.604.600	155	2.740.938.400		
			Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Terlaksananya Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-	-	-	15	360.000.000	258	393.000.000	188	417.000.000	308	440.000.000	308	463.000.000	1.077	2.073.000.000		
06	01		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya Kapasitas Iptek Sistem Produksi	13	-	-	13	250.000.000	12	320.000.000	13	400.000.000	13	480.000.000	13	590.000.000	64	2.040.000.000		
06	02		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah sentra industri yang dikembangkan (Pengolahan makanan, Pengolahan ikan, Batu bata dll.)	81	81	223.000.000	111	416.000.000	420	421.000.000	370	446.000.000	370	462.500.000	370	481.000.000	1.722	2.449.500.000		
			Program Penataan Struktur Industri	Terlaksananya Penataan Struktur Industri	-	-	-	3	300.000.000	3	350.000.000	5	375.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	21	1.875.000.000		
06	04		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri yang dikembangkan (Pengolahan makanan, Pengolahan ikan, Batu bata dll.)	5	5	180.000.000	5	300.000.000	57	275.000.000	70	280.000.000	70	285.000.000	10	63.000.000	217	1.383.000.000		
							2.210.156.300		5.086.496.250		5.832.654.700		6.169.977.700		8.220.513.000		7.004.686.800		34.524.484.750		
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																-		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	-	
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12 bln	418.800.000	12 bln	450.997.000	12 bln	669.000.500	12 bln	669.000.500	12 bln	669.000.500	12 bln	671.500.500	60 Bln	3.548.299.000	DPM-PTSP	
2			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		12	36 unit	315.041.000	30 unit	318.277.000	38 unit	651.804.000	57 unit	630.000.000	55 unit	707.500.000	57 unit	680.000.000	273 unit	3.302.622.000		
3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		12		-	-		44 steel	30.000.000	50 steel	30.000.000	50 steel	30.000.000	50 steel	30.000.000	194 steel	120.000.000		
4			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12	9 orang	40.000.000	2 orang	9.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	66 orang	169.000.000		
5			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	12	9 dokumen	106.944.000	9 dokumen	97.572.500	11 dokumen	185.000.000	11 dokumen	185.000.000	11 dokumen	185.000.000	11 dokumen	185.000.000	62 dokumen	944.516.500		
6			Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Peningkatan Pengembangan data/informasi/statistik daerah		80 brosur	12.297.000	1 brosur	-	81 brosur	20.000.000	151 brosur	20.000.000	151 brosur	20.000.000	151 brosur	20.000.000	614 brosur	92.297.000		
7			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-		21.400.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		141.400.000		
8			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala Nasional			21	36.082.500	44	200.000.000	44	200.000.000	44	200.000.000	44	200.000.000	193	836.082.500			
9			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi		4 dokumen	16.000.000	4 dokumen	21.400.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	24 dokumen	157.400.000		
10			Program Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal				-	13	66.124.000	13	70.000.000	13	70.000.000	13	70.000.000	13	70.000.000	65	346.124.000		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab	
					2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
11		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan sistem Informasi Penanaman Modal			30 kali	33.532.000	35 kali	70.000.000	35 kali	70.000.000	35 kali	70.000.000	35 kali	70.000.000	170 kali	313.532.000			
12		Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			300 dokumen	358.085.000	355 dokumen	400.000.000	425	394.304.000	485	394.304.000	515	369.304.000	2.080	1.915.997.000			
13		Program Penanganan dan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Penngaduan dan Informasi Layanan			-	1.842	52.650.000	1.889	160.000.000	1.889	160.000.000	1.889	160.000.000	1.894	110.000.000	940300%	642.650.000		
14		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informal			-		2 paket	90.000.000	2 paket	90.000.000	2 paket	90.000.000	2 paket	90.000.000	8 paket+Y72	360.000.000		
15		Program Identifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah						12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	48 Bln	400.000.000		
16		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						16 kali	325.000.000	16 kali	325.000.000	16 kali	325.000.000	16 kali	375.000.000	64 kali	1.350.000.000		
17		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pem. Kab. Bengkulu Selatan di Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.	-				1 tim	43.000.000	1 tim	43.000.000	1 tim	43.000.000	1 tim	43.000.000	4 tim	172.000.000		
18		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani	-				1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	4 unit	200.000.000		
						909.082.000	1.465.120.000		3.153.804.500		3.126.304.500		3.203.804.500		3.153.804.500		15.011.920.000		
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															-		
		DINAS PEMUDAAN DAN OLAH RAGA															-		
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12 Bulan	-	12 Bulan	302.514.000	12 Bulan	735.909.000	12 Bulan	735.909.000	12 Bulan	735.909.000	12 Bulan	735.909.000	12 Bulan	3.246.150.000	DISPORA
02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		2 Mobil, 36 Motor, 90 unit, 14 buah	2 Mobil, 36 Motor, 90 unit, 14 buah	-	1 mobil, 36 motor, 100 unit	268.736.000	1 mobil, 36 motor, 100 unit	295.609.600	1 mobil, 36 motor, 100 unit	325.170.560	1 mobil, 36 motor, 100 unit	357.687.616	1 mobil, 36 motor, 100 unit	393.456.378	1 mobil, 36 motor, 100 unit	1.640.660.154	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	0	0	10 orang, 3 kali	125.435.000	10 orang, 3 kali	125.435.000	10 orang, 3 kali	125.435.000	10 orang, 3 kali	125.435.000	50 orang, 12 kali	501.740.000	
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		120 orang	-	-	10 orang, 3 kali	95.435.000	10 orang, 3 kali	95.435.000	10 orang, 3 kali	95.435.000	10 orang, 3 kali	95.435.000	10 orang, 3 kali	95.435.000	50 orang, 12 kali	477.175.000	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	-	64 Dokumen	14 dokumen	-	14 dokumen	94.913.500	14 dokumen	218.073.500	14 dokumen	218.073.500	14 dokumen	192.073.500	14 dokumen	236.073.500	64 Dokumen	959.207.500	
		Program perencanaan pembangunan daerah				-	1dokumen	6.855.000	-	-	-	-	-	1dokumen	38.737.500	2 dokumen	45.592.500		
		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				-	1 dokumen	26.278.500	2 Dok	53.833.500	2 Dok	53.833.500	2 Dok	34.833.500	2 Dok	55.833.500	9 Dok	224.612.500	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Program Pengembangan Dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina	-	-	-	-	270.000.000	295.000.000	320.000.000	345.000.000	1.230.000.000							
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina	274 orang, 175 sekolah	62 orang, 35 sekolah	550.500.000	100 orang, 35 sekolah	987.000.000	100 orang, 35 sekolah	1.085.700.000	100 orang, 35 sekolah	1.194.270.000	100 orang, 35 sekolah	1.313.697.000	100 orang, 35 sekolah	1.445.066.700	474 orang, 175 sekolah	6.576.233.700	
			Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirusahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha	-	-	-	-	220.000.000	250.000.000	270.000.000	290.000.000	1.030.000.000							
			Program Upaya Pencegahan Penyalahan Narkoba	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pemuda	-	-	-	-	220.000.000	230.000.000	250.000.000	255.000.000	955.000.000							
			Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga	Peringkat prestasi berskala provinsi	-	-	-	-	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000	5.105.100.000							
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah event olahraga yang diikuti tingkat nasional	2095 orang	167 orang	382.139.500	492 orang, 1 tim, 5 lomba	427.339.000	492 orang, 1 tim, 5 lomba	360.000.000	492 orang, 1 tim, 5 lomba	360.000.000	492 orang, 1 tim, 5 lomba	360.000.000	2862 orang, 5 kali, 20 lomba	2.249.478.500			
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana olahraga yang direvitalisasi			-	800.000.000	880.000.000	968.000.000	1.064.800.000	0	3.712.800.000							
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	15 kali upacara	2 kali kegiatan upacara	24.200.000	2 kali kegiatan upacara	26.620.000	2 kali kegiatan upacara	26.620.000	2 kali kegiatan upacara	26.620.000	2 kali kegiatan upacara	26.620.000	10 kali kegiatan upacara	157.300.000			
							956.839.500	3.035.691.000	5.686.615.600	6.087.746.560	6.477.490.616	5.866.666.578	28.111.049.854							
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar														-			
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														-			
06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12 bln	576.122.500	12 bln	294.540.800	12 bln	334.200.000	12 bln	399.060.000	12 bln	419.013.000	12 bln	439.963.650	72 Bulan	2.462.899.950	DINAS PERPUSARA RDA
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12		321.877.400		174.291.400		666.991.865		352.500.000		433.554.773		455.232.511	49000%	2.404.447.949	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12		-		-		30.000.000		-		40.000.000	73	70.000.000			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12		4.000.000		4.000.000		10.000.000		15.000.000		15.750.000	50 Orang	65.287.500			
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	-	12		29.051.000		28.851.000		34.500.000		68.000.000		71.400.000	99 Dokumen	306.772.000			
			Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah				-		-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	5 Dokumen	55.000.000			
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				-		-		45.000.000		157.250.000		165.112.500	3 Dokumen	367.362.500			
			Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan				251.774.000		601.767.300		616.000.000		646.800.000		679.140.000	11 Kecamatan	2.795.481.300			
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan									50.000.000		52.500.000	-	102.500.000				

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab		
					2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	45 Dokumen		43.384.000		125.844.000		125.000.000		234.750.000		246.487.500		-	58 Kegiatan	775.465.500		
		Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Kearsipan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana	12				-		4.048.585		20.000.000		21.000.000		-		45.048.585		
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				-		-	1 Dok	6.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	2 Dok	30.000.000	5 Dokumen	66.000.000		
		Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen		6.240.500	1 Dokumen	6.240.500	2 Dokumen	16.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	43.075.000	10 Dokumen	133.056.000		
						1.232.449.400		1.235.535.000		1.897.740.450		2.003.360.000		2.165.457.773		1.114.778.661		9.649.321.284		
		Urusan Pemerintahan Pilihan																-		
		DINAS PERIKANAN																-		
06	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12 bln	687.777.400	12 bln	677.262.450	12 bln	672.633.410	12 bln	699.636.760	12 bln	725.350.000	12 bln	712.135.400	72 bln	4.174.795.420	Perikanan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-		-	6 orang	50.000.000	6 orang	55.000.000	7 orang	60.500.000	8 orang	66.550.000	27 orang	232.050.000		
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		90%	12 bln	303.727.000	12 bln	280.105.000	12 bln	323.929.000	12 bln	429.821.000	12 bln	468.703.900	12 bln	511.574.600	72 bln	2.317.860.500		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	-	90%	13 dok	24.883.000	13 dok	34.500.000	18 dok	66.853.800	18 dok	61.719.000	18 dok	67.891.100	18 dok	74.679.400	98 dok	330.526.300		
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan	luas Pembebasan lahan		0%	-	1 paket	630.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	780.000.000		
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	jumlah data dan informasi						5 dok 3 unit	260.000.000	5 dok, 3 unit	674.000.000	5 dok, 3 unit	688.000.000	5 dok, 3 unit	693.000.000	dok., 12 unit	2.315.000.000		
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)	90%	3 BBI	2030305000	3 BBI	2.750.375.300	3 BBI	2.086.900.000	3 BBI	2.126.377.000	3 BBI	2.263.968.000	3 BBI	2.444.509.000	3 BBI	13.702.434.300		
		Program pengembangan perikanan tangkap	PPI yang dikembangkan	90%	7 org	1.500.000.000	7 org 2 kegiatan	130.670.000	125 org ,2 kegiatan	287.400.000	134 org 2 kegiatan	288.100.000	135 org 2 kegiatan	335.830.578	136 org 2 kegiatan	361.051.000	10 kegiatan , 562 oeg	2.903.051.578		
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Perikanan Tangkap							3 dok	80.000.000	3 dok	87.000.000	3 dok	95.000.000	3 dok	103.000.000	12 dok	365.000.000		
		Program Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap							-	45 unit	448.000.000	45 unit	488.000.000	45 unit	496.000.000	45 unit	503.000.000	180 unit	1.935.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	100%	11 kec.	130.670.000	11 kec.	200.670.000	11 kec.	394.486.790	11 kec.	298.920.000	11 kec.	420.911.000	11 kec.	606.871.437	22 kec.	2.052.529.227	
		Program Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Terpadu	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Terpadu	1 kawasan							2 Desa	49.750.039	2 desa	100.000.000	2 desa	150.000.000	6 desa	299.750.039	
						4.677.362.400		4.703.582.750		4.820.203.000		5.258.323.799		5.722.154.578		6.226.370.837		31.407.997.364	
		Urusan Pemerintahan Pilihan																-	
		DINAS PARIWISATA																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12		-	12 bln	540.230.000	12 bln	623.000.000	12 bln	685.300.000	12 bln	753.830.000	12 bln	1.029.212.000		3.631.572.000	DISPAR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12		-	-	250.000.000	-	1.059.200.000	-	541.420.000	-	897.632.000	-	788.218.200		3.536.470.200	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	12		-	-	10.000.000	-	295.000.000	-	322.300.000	-	354.530.000	-	389.983.000		1.371.813.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12		-	-	130.000.000	-	450.000.000	-	495.000.000	-	544.500.000	-	598.950.000		2.218.450.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	-	12		-	-	401.000.000	-	430.000.000	-	439.000.000	-	481.800.000	-	529.980.000		2.281.780.000	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Jumlah objek wisata yang dikembangkan			-	-	62.000.000	-	62.000.000	-	68.200.000	-	75.020.000	-	82.522.000		349.742.000	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah objek wisata yang dikembangkan			-	-	120.000.000	-	80.539.600	-	80.544.060	-	88.598.466	-	148.514.130		518.196.256	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program pengembangan destinasi pariwisata			-	-	-	-	104.000.000	-	114.400.000	-	125.840.000	-	138.424.000		482.664.000	
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				-	-	-	OPD, Desa, PAUD	36.300.000	OPD, Desa, PAUD	39.930.000	OPD, Desa, PAUD	43.923.000	OPD, Desa, PAUD	48.315.300		168.468.300	
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	-			-	3 Lokasi Daerah Tangkapan Sungai	200.000.000	3 Lokasi Daerah Tangkapan Sungai	200.000.000	3 Lokasi Daerah Tangkapan Sungai	220.000.000	3 Lokasi Daerah Tangkapan Sungai	217.800.000	3 Lokasi Daerah Tangkapan Sungai	244.420.000		1.082.220.000	
		Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan				-	-	800.000.000	-	800.000.000	-	880.000.000	-	923.000.000	-	932.230.000		4.335.230.000	
		Program Perencanaan Tata Ruang				-	-	-	-	997.400.000	-	1.537.140.000	-	1.690.854.000	-	1.729.259.400		5.954.653.400	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				-	-	-	-	40.000.000	-	1.300.000.000	-	1.102.434.845	-	1.117.815.193		3.560.250.038	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				-	-	-	-	143.000.000	-	157.300.000	-	173.030.000	-	190.333.000		663.663.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan			-	-	-	-	500.000.000	-	770.000.000	-	797.500.000	-	877.250.000		2.944.750.000		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			-	-	-	-	2.489.000.000	-	2.707.317.000	-	2.685.490.000	-	2.872.337.652		10.754.144.653		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			-	-	-	-	300.000.000	-	330.000.000	-	363.000.000	-	399.300.000		1.392.300.000		
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah			-	-	-	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	145.200.000	1 Dokumen	159.720.000		556.920.000		
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			-	-	-	-	140.000.000	-	154.000.000	-	169.400.000	-	186.340.000		649.740.000		
		Program pengembangan pemasaran pariwisata			-	-			105.000.000	-	670.100.000	-	919.820.000	-	963.391.000		3.718.041.100		
		Program Pengembangan Destinasi pariwisata			-	-			1.190.000.000	-	4.688.170.000	-	5.658.600.000	-	5.815.246.000		23.595.327.580		
		Program pengembangan Kemitraan							40.000.000	-	783.865.100	-	1.155.935.100	-	1.461.288.610		1.528.537.596		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-	-			177.757.900	-	200.730.200	-	242.803.220	-	250.171.472		263.791.896		
									40.000.000		4.769.853.000		15.584.374.900		19.256.362.890		20.190.728.379		
		Urusan Pemerintahan Pilihan																-	
		DINAS PERTANIAN																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	60 bulan	12 Bulan	498.134.000	12 Bulan	711.979.250	12 Bulan	697.990.000	12 Bulan	614.228.000	12 Bulan	643.596.000	12 Bulan	736.455.000	72 bulan	3.902.382.250	Pertanian
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	13 unit	383.487.800	12 unit	407.580.000	46 unit	1.040.200.000	35 unit	77.000.000	37 unit	147.000.000	36 unit	413.700.000	179 unit	2.468.967.800	
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	120	13 Laporan/dokumen	112.153.250	14 Laporan / Dokumen	115.000.000	24 Laporan / Dokumen	148.553.500	24 Laporan / Dokumen	152.000.000	24 Laporan / Dokumen	152.000.000	24 Laporan / Dokumen	153.500.000	120 Laporan / Dokumen	833.206.750	
		Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	0	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	217.260.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	159.000.000	1 Dokumen	701.260.000	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	94	20 kelompok tani	75.000.000	11 kecamatan	774.880.000	11 kecamatan	263.471.000	11 kecamatan	134.825.000	11 kecamatan	109.807.500	11 kecamatan	120.788.250	11 kecamatan	1.478.771.750	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	76	11 kecamatan	991.275.000	11 Kecamatan	1.300.000.000	11 Kecamatan	1.747.230.000	11 Kecamatan	1.890.278.000	11 Kecamatan	1.982.841.020	11 Kecamatan	2.181.125.122	11 Kecamatan	10.092.749.142	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Alat Mesin Pertanian	847 unit	4 perusahaan	332.252.000	4 perusahaan	50.000.000	4 perusahaan	862.625.000	4 perusahaan	72.600.000	4 perusahaan	572.600.000	4 perusahaan	599.860.000	24 perusahaan	2.489.937.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Padi Jagung Kelapa Sawit	14,814ton, 13	75 paket	9.859.000.350	75 paket	8.661.265.750	75 paket	7.863.527.250	75 paket	12.882.831.525	75 paket	13.923.073.030	75 paket	13.390.353.000	450 paket	66.580.050.905	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	penanggulangan penyakit hewan	11 Kecamatan	11 kecamatan	202.304.000	11 kecamatan	1.830.000.000	11 kecamatan	2.042.508.000	11 kecamatan	350.000.000	11 kecamatan	350.000.000	11 kecamatan	360.000.000	11 kecamatan	5.134.812.000	
		Program Peningkatan Produksi Peternakan	produksi daging Ternak besar ternak kecil	7 ton, 206,56 t	11 kecamatan	389.250.000	11 kecamatan	729.000.000	11 kecamatan	795.750.000	11 kecamatan	30.000.000	11 kecamatan	300.000.000	11 kecamatan	300.000.000	11 kecamatan	2.544.000.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	120	-	-	-	1 unit	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	25.000.000		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pembangunan Perencanaan Daerah	0	1 dokumen	11.844.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	2 dokumen	31.844.000		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	0	-	-	-	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	6 Laporan	58.000.000		
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				-	-	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	3 Laporan	75.000.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120	0	-	0	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	72 bulan	100.000.000		
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	847 unit	-	-	1 keg	403.405.000	1 keg	2.500.000.000	1 keg	350.000.000	1 keg	350.000.000	1 keg	385.000.000	5 keg	3.988.405.000	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya jumlah kelompok pelaksana Sekolah Lapang Agribisnis		-	-	-	-	-	20 kali	570.672.000	20 kali	520.000.000	20 kali	600.000.000	60 kali	1.690.672.000		
					-	12.854.700.400	-	14.998.110.000	-	18.257.114.750	-	17.339.434.525	-	19.265.917.550	-	19.479.781.372	-	102.195.058.597	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																	
		INSPEKTORAT DAERAH																-	
06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	12 Bln	249.431.200	12 Bln	427.729.400	12 Bln	721.812.500	12 Bln	788.993.000	12 Bln	893.757.500	12 Bln	893.757.500	72 Bln	3.975.481.100	IPDA
		Program Pembinaan Pengembangan Aparatur		6 Orang	-	-	-	6 Orang	72.628.535	6 Orang	79.891.389	6 Orang	87.255.527	6 Orang	88.481.080	24 orang	328.256.531		
		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		12 Bln	12 Bln, 10 OK, 12 buah, 23	162.691.200	12 Bln, 30 OK, 15 buah, 30	431.306.200	12 Bln, 40 OK, 52 buah, 28	295.991.850	12 Bln, 40 OK, 40 buah, 28	305.103.535	12 Bln, 50 OK, 47 buah, 50	315.126.389	12 Bln, 50 OK, 5 buah, 50	326.151.527	75 Bln, 220 buah, 216 unit, 150	1.836.370.701	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	180 Stel	-	-	-	180 Stel	218.750.000	220 Stel	103.125.000	80 stel	118.593.000	-	-	480 stel	440.468.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10orang	10 orang	15.000.000	15 orang	100.000.000	17 Orang, 2 Kali, 1	350.000.000	19 Orang, 4 kali, 2 dokumen	385.000.000	20 Orang, 6 kali, 3 dokumen	442.750.000	21 Orang, 6 kali 3 dokumen	442.750.000	101 Orang, 18 kali, 9	1.735.500.000	
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		- 10 Dokumen	10 Dokumen	52.833.500	8 Dokumen	58.116.850	14 Dokumen, 25LHP	60.100.000	17 Dokumen, 35 LHP	66.110.000	21 Dokumen, 50 LHP	72.721.000	24 Dokumen, 55 LHP	79.993.100	95 Dokumen, 160 LHP	389.874.450	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Peogram Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	1dokumen	1 dokumen	13.195.000	-	1 dokumen	62.500.000	1 dokumen	68.750.000	1 dokumen	79.062.500	1 dokumen	79.062.500	6 dokumen	302.570.000		
		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Nilai Evaluasi SAKIP	39 Laporan	67 LHP,57 dokumen	906.423.000	90 LHP,58 dokumen.	997.065.300	95 Lhp, 61dokumen, 20 orang	110 Lhp,72 dokumen, 25 orang	1.232.794.013	130 LHP, 77 dokumen, 35 orang	1.356.072.914	140 Lhp,92 dukumen, 35 orang	1.491.680.006	632 LHP, 417 dokumen, 115 orang	7.104.757.063		
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	10orang	10 orang	15.000.000	15 orang	25.000.000	30 Orang	123.750.000	40 Orang	138.125.000	50 Orang	158.593.000	125 Orang	163.593.000	270 Orang	624.061.000	
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	218.750.000	3 Dokumen	240.625.000	4 Dokumen	276.718.000	9 Dokumen	276.718.000	18 Dokumen	1.012.811.000		
		Program Mengintensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Mengintensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	1unit	-	-	-	1 unit 51 Laporan	312.500.000	2 unit 70 Laporan	343.750.000	2 unit 85 laporan	395.312.000	5 unit 206 Laporan	395.312.000	9 unit,412 laporan	1.446.874.000		
						1.414.573.900	-	2.039.217.750	-	3.557.504.715	-	3.752.266.937	-	4.195.961.830	-	4.237.498.713	-	19.197.023.845	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															-		
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN															-		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	12 Bln	777.229.300	12 Bln	863.528.800	12 Bln	1.065.016.000	12 Bln	1.171.517.600	12 Bln	1.288.669.360	12 Bln	1.417.536.296	72 Bln	6.583.497.356	Bappeda Litbang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bln		1.336.782.000	-	2.234.870.500	-	1.787.000.000	-	1.470.700.000	-	1.512.770.000	-	1.114.047.000	-	9.456.169.500	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4 org	6 org	30.000.000	10 org	50.000.000	10 org	75.000.000	10 org	82.500.000	10 org	90.750.000	10 org	99.825.000	10 org	428.075.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Dokumen Data/Informasi	13 Dokumen	2 Dok	354.942.000	3 Dok	515.000.000	5 Dok	1.280.000.000	8 Dok	2.008.000.000	8 Dok	2.228.800.000	8 Dok	2.667.580.000	34 Dok	9.054.322.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10 dokumen	8 dok	252.532.400	8 dok	259.834.400	8 dok	350.000.000	8 dok	385.000.000	8 dok	423.500.000	8 dok	465.850.000	48 dok	2.136.716.800	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Dokumen	1 dokumen	62.159.500	1 dokumen	54.857.500	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	66.343.250	1 dokumen	73.011.900	1 dokumen	80.316.523	6 dokumen	396.688.673	
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Terlaksananya Perencanaan Sosial Budaya	29 Dokumen	20 Dok	640.064.000	35 dok	1.264.000.000	35 dok	1.600.000.000	35 dok	1.760.000.000	35 dok	1.936.000.000	35 dok	2.129.600.000	175 dok	9.329.664.000	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang	5 Dokumen	1 dokumen	376.821.500	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	350.000.000	2 dokumen	764.503.650	5 dokumen	1.741.325.150		
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	4 Laporan	1 laporan	221.032.500	-	-	1 kegiatan	425.000.000	3 laporan	110.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	55.000.000	7 laporan	866.032.500	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab		
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
			Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	2 Laporan	5 kali	427.774.500	10 kali	131.664.500	10 kali	550.000.000	10 kali	650.000.000	10 kali	605.000.000	10 kali	665.500.000	55 kali	3.029.939.000		
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya	1 Dokumen		77.000.000	-	190.000.000	-	585.000.000	-	1.393.500.000	-	1.537.850.000	-	1.692.135.000	-	5.475.485.000		
			Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang	8 Dokumen		-	-	360.087.000	-	350.000.000	-	610.000.000	-	997.705.270	-	1.117.846.324	-	3.435.638.594		
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4 Dokumen		-	-	-	-	125.000.000	-	662.500.000	-	501.250.000	-	882.625.000	-	2.171.375.000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan yang menerapkan KLHS	17 Dokumen		1.700.494.100	-	1.481.833.400	-	1.678.000.000	-	1.936.800.000	-	2.014.580.000	-	4.238.448.000	-	13.050.155.500		
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	25 Dokumen		638.500.000	-	547.000.000	-	1.225.000.000	-	2.085.000.000	-	2.761.500.000	-	4.106.900.000	-	11.363.900.000		
			Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	20 Orang	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	80.000.000	1 kegiatan	96.000.000	1 kegiatan	106.400.000	3 kegiatan	282.400.000		
			Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	1 kegiatan	38.736.500	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	65.000.000	5 kegiatan	273.736.500		
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	-	-	-	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	165.000.000	1 kegiatan	181.500.000	1 kegiatan	250.000.000	4 kegiatan	746.500.000	
							6.895.331.800		7.991.412.600		11.360.016.000		14.941.860.850		16.713.886.530		21.919.112.793		79.821.620.573		
			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																-		
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																-		
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12	2.128.734.369	12	1.923.550.900	12	2.220.197.405	12	2.406.800.246	12	2.406.800.246	12	2.593.888.334	72	13.679.971.500	BPKAD	
02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	12	2.596.012.863	12	1.074.374.000	12	1.748.040.828	12	1.249.159.978	12	1.149.159.978	12	3.199.159.978	72	11.015.907.625		
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20 Orang	20	116.110.000	20	76.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	120	392.110.000		
06			Program Peningkatan Pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	12 Bulan	12	230.288.000	12	264.237.000	12	264.060.500	12	266.480.500	12	268.942.850	12	268.942.850	72	1.562.951.700		
16			Program Penataan dan Penguasaan, Pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya jumlah lahan Pemda yang bersertifikat	125 Persil Sertifikat Tanah pemerintah	125	539.639.280	125	550.000.000	125	760.000.000	125	770.000.000	125	790.000.000	125	790.000.000	750	4.199.639.280		
17			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	9.513.718.681	WTP	9.635.900.000	WTP	11.528.335.915	WTP	12.568.916.860	WTP	13.047.082.476	WTP	12.516.271.404	WTP	68.810.225.336		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab	
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
19		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	142 Desa	142	186.990.500	142	142.013.000	142	193.600.000	142	212.960.000	142	212.960.000	142	234.256.000	852	1.182.779.500		
19		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Kebijakan KDH	laporan Dokumen SPIP dan Laporan SOP	16	88.477.000	16	89.417.000	16	108.194.570	16	119.014.027	16	119.014.027	16	130.915.430	96	655.032.054		
21		Program Perencanaan Pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	8	43.573.000	8	48.344.000	8	48.344.000	8	48.344.000	8	48.344.000	8	96.688.000	48	333.637.000		
30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas pengembangan Aparatur	-	-	8	52.622.000	8	55.000.000	8	60.500.000	8	60.500.000	8	66.550.000	40	295.172.000			
						15.443.543.693		13.856.457.900		16.975.773.218		17.752.175.611		18.152.803.577		19.946.671.996		102.127.425.995		
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																-		
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	-	
06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi	12 Bln	12 Bln	597.454.500	12 bln	707.293.500	12 bln	638.456.300	12 bln	693.689.450	12 bln	763.978.450	12 bln	898.747.300	72 bln	4.299.619.500	Kepegaw aian dan Diklat	
06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		90%	263 Unit	434.453.400	115 Unit	416.964.400	131 Unit	904.097.000	42 unit	334.506.700	128 Unit	803.606.700	44 Unit	353.606.700	723 Unit	3.247.234.900		
06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Peningkatan Disiplin	-	-	-	0	-	50 Stel	35.000.000	1 unit	120.000.000	50 Stel	40.000.000	-	100 Stel	195.000.000			
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan			10 Dokuemn	59.500.000	28 Dokumen	173.867.000	3 Dokumen	119.500.000	10 Dokuemn	25.000.000	10 Dokuemn	25.000.000	28 Dokumen	144.742.000	14 Dokumen	547.609.000		
06	04	Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS	Tersedianya Fasilitas pindah/purna tugas	101 Orang	101 Orang	42.324.000	205 Orang	42.324.000	125 Orang	55.000.000	125 Orang	61.000.000	125 Orang	72.000.000	125 Orang	85.000.000	806 Orang	357.648.000		
06	29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)	59 Orang	1 keg	30.000.000	1 keg	38.676.000	1 keg	44.000.000	-	-	-	-	1 keg	50.000.000	4 keg	162.676.000		
20	06	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	60 Dokumen	80 Dokumen	151.794.400	168 Dokumen	186.452.400	3 Dokumen	223.068.400	38 Dokumen	244.618.000	68 Dokumen	268.308.000	68 Dokumen	278.308.000	68 Dokumen	1.352.549.200	
06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan	10 Dokumen	11 Dokumen	61.500.000	14 Dokumen	94.792.000	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	47.000.000	5 Dokumen	49.000.000	15 Dokumen	88.500.000	55 dokumen	385.792.000		
06	15	Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	Tersedianya Dokumen	-	0%	-	-	-	0 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	32.500.000	10 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	37.000.000	40 Dokumen	134.500.000		
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			0%	-	1000 ASN	50.769.000	1000 ASN	45.000.000	1000 ASN	49.500.000	1000 ASN	49.500.000	1000 ASN	49.500.000	5000 ASN	244.269.000		
		Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga			0%	-	6000 ASN	81.500.000	6000 ASN	100.000.000	6000 ASN	109.000.000	6000 ASN	115.000.000	6000 ASN	122.000.000	6000 ASN	527.500.000		
		Program Pendidikan Kedinasan			59 Orang	1.193.543.000	74 org	901.559.500	260 Org	1.285.000.000	172 org	845.500.000	172 org	934.000.000	172 org	953.050.000	838 org	6.112.652.500		
06	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan	90%	90%	1.816.637.400	90%	1.854.487.200	90%	3.253.439.000	90%	3.355.282.900	90%	4.138.500.000	90%	3.462.500.000	90%	17.880.846.500		
						4.387.206.700		4.548.685.000		6.777.560.700		5.917.597.050		7.293.893.150		6.522.954.000		35.447.896.600		
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																-		
		SEKRETARIAT DPRD																-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	9.803.542.945	12 Bulan	7.585.587.000	12 Bulan	8.434.145.700	12 Bulan	10.486.667.003	12 Bulan	11.535.223.703	12 Bulan	11.312.000.000	72 Bulan	59.157.166.351	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			7.197.259.875		4.475.063.900		6.362.966.790		5.293.034.000		6.051.340.000		6.114.000.000		35.493.664.565	
	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				-	0%	-	1 Paket	100.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	1 Paket	100.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Kedisiplinan Aparatur di Sekretariat DPRD		162 Stel	324.640.000	81 Stel	216.595.000	162 Stel	274.000.000	81 Stel	284.000.000	162 Stel	406.377.000	81 Stel	310.000.000	810 stel	1.815.612.000	
	Prog. Pening. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Kualitas Sumber Daya Aparatur		94 Kali	986.500.000	94 Kali	289.000.000	94 Kali	300.000.000	94 Kali	382.202.000	94 Kali	439.532.000	94 Kali	439.532.000	564 Kali	2.836.766.000	
	Prog. Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan		20 Laporan	340.295.500	20 Laporan	276.894.200	21 Laporan	328.551.930	21 Laporan	443.786.000	21 Laporan	480.101.000	21 Laporan	500.700.000	106 Laporan	2.370.328.630	
	Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan	Tersedianya Pengembangan		1 Paket	171.005.500	1 Paket	182.542.500	1 Paket	200.000.000	1 Paket	241.189.000	1 Paket	277.624.000	1 Paket	288.000.000	1 Paket	1.360.361.000	
	Prog. Peningkatan Kapasitas Lembaga Dprd	Terlaksananya Peningkatan			14.744.365.875		15.508.744.800		16.322.680.410		17.749.314.000		18.810.635.000		18.987.900.000		102.123.640.085	
	Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Terlaksananya Optimalisasi			155.824.000		107.867.000		118.653.700		129.375.000		148.230.000		188.660.000		848.609.700	
	Prog. Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan			-	1 Paket	35.644.000	1 Paket	41.000.000	1 Paket	47.039.000	1 Paket	52.000.000	1 Paket	60.270.703	4 Paket	235.953.703	
					33.723.433.695	-	28.677.938.400	-	32.481.998.530	-	35.056.606.003	-	38.201.062.703	-	38.201.062.703		206.342.102.034	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																	
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN																	-
	BAGIAN UMUM (SETDA)																-	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.685.202.000	12 bulan	8.321.188.375	12 bulan	8.654.035.910	12 bulan	9.000.197.346	12 bulan	9.360.205.240	12 bulan	9.734.613.450	12 bulan	47.755.442.322	Setda Bag Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	9.867.512.500	12 bulan	12.695.101.650	12 bulan	13.202.905.716	12 bulan	13.731.021.945	12 bulan	14.280.262.822	12 bulan	14.851.473.335	12 bulan	78.628.277.968	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	23 Stel	23 Stel	199.100.000	78 Stel	272.275.000	78 Stel	283.166.000	78 Stel	294.492.640	78 Stel	306.272.346	78 Stel	318.523.239	78 Stel	1.673.829.225	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 Bln	12 Bln	100.000.000	12 Bln	110.000.000	12 Bln	114.400.000	12 Bln	118.976.000	12 Bln	123.735.040	12 Bln	128.684.442	12 Bln	695.795.482	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan	4 Dokumen	11 dokumen	238.755.500	11 dokumen	116.687.500	11 dokumen	121.355.000	11 dokumen	126.209.200	11 dokumen	131.257.568	11 dokumen	136.507.871	66 dokumen	870.772.639	
	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil	12 Bln	12 Bln	668.277.000	12 Bln	711.835.000	12 Bln	740.308.400	12 Bln	769.920.736	12 Bln	800.717.565	12 Bln	832.746.268	12 Bln	4.523.804.969	
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bln		340.500.000		699.369.100		190.479.328		198.098.501		206.022.441		214.263.339		1.848.732.709	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 dokumen	12 Bln	55.500.000	12 Bln	67.370.000	12 Bln	70.064.800	12 Bln	72.867.392	12 Bln	75.782.088	12 Bln	78.813.371	12 Bln	420.397.651	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					14.154.847.000	-	22.993.826.625	-	23.376.715.154	-	24.311.783.760	-	25.284.255.111	-	26.295.625.315		136.417.052.965		
	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (SETDA)																-		
	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	11	11	160.000.000	11	176.000.000	11	176.000.000	11	176.000.000	11	176.000.000	11	176.000.000	11	1.040.000.000	Pemerintah Umum	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Perbatasan	-	-	-		50.000.000		60.000.000		72.000.000		86.400.000		103.680.000		372.080.000		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	235.000.000	1	253.000.000	1	253.000.000	1	253.000.000	1	253.000.000	1	378.000.000	6	1.625.000.000		
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			-		-		-		-		800.000.000		-		800.000.000		
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	1	250.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	6	1.510.000.000		
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			200.000.000		170.000.000		-								370.000.000		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5	5	75.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	34	555.000.000		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	12 Bln	12 Bln	60.000.000	12 Bln	66.000.000	12 Bln	79.200.000	12 Bln	95.040.000	12 Bln	114.048.000	-	-	12 Bln	414.288.000		
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru	12 Bln	12 Bln	367.000.000	12 Bln	1.013.625.000	-	998.560.000	-	896.560.000	-	896.560.000	-	896.560.000	12 Bln	5.068.865.000		
					1.347.000.000		2.060.625.000		1.918.760.000		1.844.600.000		2.678.008.000		1.906.240.000		11.755.233.000		
	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam (SETDA)																-		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12 bln	12 bln	0	12 bln	100.000.000	12 bln	120.000.000	12 bln	144.000.000	12 bln	172.800.000	12 bln	207.360.000	72 bln	744.160.000	Bag Ekonomi	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	12 bln	12776 RTS/RTM	70.000.000	12776 RTS/RTM	70.000.000	12776 RTS/RTM	70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		420.000.000		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber	12 bln		190.000.000		100.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000	48 bln	800.000.000		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	12 bln						675.000.000		810.000.000		900.000.000		950.000.000		3.335.000.000		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							12 bulan	120.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	300.000.000	48 bulan	945.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Peningkatan Kualitas KelembagaanBUMD						12 bulan	100.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	175.000.000	12 bulan	200.000.000	48 bulan	625.000.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	12 bln		150.000.000	0	150.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		1.120.000.000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bln		235.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000		320.000.000		1.635.000.000	
					645.000.000		660.000.000		1.655.000.000		2.029.000.000		2.232.800.000		2.402.360.000		9.624.160.000	
		BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (SETDA)															-	
		Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 dokumen	10 Dok	543.990.000	10 Dok	307.561.000	10 Dok	560.000.000	10 Dok	575.500.000	10 Dok	530.000.000	10 Dok	1.120.000.000	60 Dok	3.637.051.000	Bagian Ortala
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 dokumen		27.877.000		30.000.000		50.000.000		63.600.000		70.000.000		85.000.000		326.477.000	
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 dokumen		115.133.000		64.300.000		193.000.000		260.000.000		120.000.000		300.000.000		1.052.433.000	
		Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen		110.174.500		122.860.000		280.000.000		390.000.000		390.000.000		650.000.000		1.943.034.500	
		Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1 dokumen		105.692.000		157.388.000		380.000.000		490.320.000		300.000.000		535.000.000		1.968.400.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 dokumen		83.285.500		64.000.000		215.000.000		282.000.000		150.000.000		700.000.000		1.494.285.500	
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 dokumen		427.848.000		514.000.000		400.000.000		650.000.000		475.000.000		1.220.000.000		3.686.848.000	
					1.414.000.000	-	1.260.109.000	-	2.078.000.000	-	2.711.420.000	-	2.035.000.000	-	4.610.000.000	-	14.108.529.000	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SETDA)															-	
		Program pengembangan data/informasi		1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	253.000.000	1 Dokumen	1.403.000.000	BAGADMI N PEMBANGUNAN
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeluaran Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	487.550.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	605.000.000	1 Dokumen	665.500.000	1 Dokumen	732.050.000		3.540.100.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dok	130.000.000	5 Dok	500.000.000	5 Dok	715.000.000	5 Dok	731.500.000	5 Dok	799.650.000	5 Dok	879.615.000	4 Dokumen	3.755.765.000	
		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi		1 Kali	470.000.000	1 Kali	485.000.000	1 Kali	582.000.000	1 Kali	698.400.000	1 Kali	838.080.000	1 Kali	921.888.000	1 Kali	3.995.368.000	
					1.317.550.000	-	1.715.000.000	-	2.077.000.000	-	2.264.900.000	-	2.533.230.000	-	2.786.553.000	-	12.694.233.000	
		BAGIAN HUKUM (SETDA)															-	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			72.450.000		86.620.500		190.282.550		650.000.000		650.000.000		450.000.000,0	12 Bulan	2.099.353.050	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	12 bulan		343.120.000		326.999.000		1.450.000.000		1.600.000.000		1.648.763.000		797.443.000	12 Bulan	6.166.325.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen		776.510.000		732.880.500		1.448.277.450		1.806.272.000		2.148.763.000		1.250.000.000	12 Bulan	8.162.702.950	
						1.192.080.000	-	1.146.500.000	-	3.088.560.000	-	4.056.272.000	-	4.447.526.000	-	2.497.443.000	-	16.428.381.000	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDA)																-	
		Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			-		119.529.000		131.481.900		144.630.090		159.093.099		175.002.409			729.736.498	
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Terlaksananya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	110 Org	110 Org	55.000.000	110 Org	-	110 Org	60.500.000	110 Org	66.550.000	110 Org	73.205.000	110 Org	80.525.500	110 Org	335.780.500	Bag Kesra
		Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	11 Karang Taruna	Juml Karang Taruna	81.000.000		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		691.510.000	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya	110 Org			110 Org	103.000.000	110 Org	113.300.000	110 Org	124.630.000	110 Org	137.093.000	110 Org	150.802.300	110 Org	628.825.300	
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	55 Pemuda	Jumlah Pemuda	114.000.000	Jml UKS	130.000.000	Jml UKS	192.500.000	Jml UKS	231.000.000	Jml UKS	277.200.000	Jml UKS	332.640.000	Jml UKS	1.277.340.000	
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	117 PNS Setda	Jumlah PNS Setda	40.000.000	Jumlah PNS Setda	67.000.000	177 PNS Setda	73.700.000	177 PNS Setda	81.070.000	177 PNS Setda	89.177.000	177 PNS Setda	98.094.700		449.041.700	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan	55 Masjid	55 Masjid	812.403.000		1.336.222.000		1.469.844.200		1.635.325.670		1.821.054.697		2.029.795.919		9.104.645.486	
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	127 org jama'ah haji	127 org jama'ah haji	395.000.000		973.976.000		570.273.100		1.118.400.910		679.030.451		1.287.144.046		5.023.824.507	
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	110 orang	110 orang		110 orang	120.000.000	110 orang	132.000.000	110 orang	145.200.000	110 orang	159.720.000	110 orang	175.692.000	110 orang	732.612.000	
						1.497.403.000	-	2.949.727.000	-	2.853.599.200	-	3.667.806.670	-	3.528.673.247	-	4.476.106.874	-	18.973.315.991	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (SETDA)																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	12 Bln		-		-		1.031.619.000		1.134.780.900		1.248.258.990		1.373.084.889		4.787.743.779	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bln		920.000.000		662.160.000		931.893.000		978.487.650		1.027.412.033		1.078.782.634		5.598.735.317	
		Program Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Kali		-		-		582.000.000		640.200.000		704.220.000		774.642.000,0		2.701.062.000	
		Program Pengembangan data/Informasi				50.000.000		150.000.000		230.000.000		253.000.000		278.300.000		306.130.000		1.267.430.000	
		Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan		931.000.000		832.113.000		1.808.070.000		1.898.473.500		1.993.397.175		2.093.067.034		9.556.120.709	
						1.901.000.000		1.644.273.000		4.583.582.000		4.904.942.050		5.251.588.198		5.625.706.557		23.911.091.804	
		BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL (SETDA)																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln		4.100.000.000	4	4.401.000.000	2	4.660.000.000	2	5.126.000.000	2	5.638.600.000	2	6.202.460.000	12	30.128.060.000	Bagian Humas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12 Bln	182.482.000	4	140.000.000	1	710.280.000	1	781.308.000	1	859.438.800	1	945.382.680	8	3.618.891.480		
		Program kerjasama informasi dan media massa	Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa	12 Bln	630.000.000	3	133.250.000	1	1.697.000.000	1	1.866.700.000	1	2.053.370.000	1	2.258.707.000	7	8.639.027.000		
					4.912.482.000		4.674.250.000		7.067.280.000		7.774.008.000		8.551.408.800		9.406.549.680		42.385.978.480		
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															-		
		KECAMATAN ULU MANNA															-		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	12 Bln	172.915.200	12 Bln	185.215.600	12 Bln	203.734.860	12 Bln	224.299.470	12 Bln	246.729.417,00	12 Bln	271.402.358,70	72 Bln	1.304.296.906	Kantor Camat Ulu Manna
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	12 Bln	137.816.000	12 Bln	155.441.000	12 Bln	170.985.100	12 Bln	196.883.610	12 Bln	216.571.971	12 Bln	238.229.168	72 Bln	1.115.926.849	
		Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	20 Stel				20 Stel	33.000.000	20 Stel	36.300.000	20 Stel	39.930.000	20 Stel	43.923.000	20 Stel	153.153.000		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan	6 Dok	22 Dok	28.920.800	22 Dok	32.563.000	22 Dok	38.516.050	22 Dok	42.367.655	22 Dok	46.604.421	22 Dok	51.264.863	124 Dok	240.236.788	
		Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Program Penataan	12 Bln	12 Bln	36.585.600	12 Bln	36.585.600	12 Bln	40.244.160	12 Bln	44.268.576	12 Bln	48.695.434	12 Bln	53.564.977	72 Bln	259.944.347	
		Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	1 Dok	1 Dok	4.305.000	1 Dok	4.305.000	1 Dok	4.735.500	1 Dok	5.209.050	1 Dok	5.729.955	1 Dok	6.302.951	6 Dok	30.587.456	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	10 Desa	10 Desa	12.215.000	10 Desa	12.215.500	10 Desa	65.258.600	10 Desa	68.484.460	10 Desa	75.332.906	10 Desa	82.866.197	10 Desa	316.372.663	
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	10 Desa	10 Desa	20.440.000	10 Desa	20.440.000	10 Desa	24.528.000	10 Desa	26.980.800	10 Desa	29.678.880	10 Desa	32.646.768	10 Desa	154.714.448	
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	10 Desa				10 Desa	10.000.000	10 Desa	11.000.000	10 Desa	12.100.000	10 Desa	13.310.000	10 Desa	46.410.000		
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	10 Desa				10 Desa	8.000.000	10 Desa	8.800.000	10 Desa	9.680.000	10 Desa	10.648.000	40 Desa	37.128.000		
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan	10 Desa				10 Desa	31.900.000	10 Desa	35.090.000	10 Desa	38.599.000	10 Desa	42.458.900	40 Desa	148.047.900		
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitas Keuangan	10 Desa	10 Desa	8.700.400	10 Desa	8.700.000	10 Desa	15.940.000	10 Desa	17.534.000	10 Desa	19.287.400	10 Desa	21.216.140	10 Desa	91.377.940	
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Penanggulangan Penyakit masyarakat	20 Peserta	20 Peserta	4.925.000		20 Peserta	5.417.500	20 Peserta	5.959.250	20 Peserta	6.555.175	20 Peserta	7.210.693	100 Peserta	30.067.618		
		Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan			1 Keg	4.649.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	11.000.000	1 Keg	12.100.000	1 Keg	13.310.000	5 Keg	51.059.000		
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2 Dok	2 Dok	9.270.000	1 Dok	4.583.300	2 Dok	14.000.000	2 Dok	15.400.000	2 Dok	16.940.000	2 Dok	18.634.000	11 Dok	78.827.300	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	2 Dok	8.605.000	2 Dok	3.644.000	1 Dok	14.420.400	1 Dok	14.821.240	1 Dok	16.303.364	2 Dok	17.933.700	17 Dok	75.727.704	
						444.698.000	-	468.342.000	-	690.680.170	-	764.398.111	-	840.837.922	-	924.921.714	-	4.133.877.917	
		KECAMATAN AIR NIPIS																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	12 bln	190.111.500	12 bln	193.007.500	12 bln	237.520.000	12 bln	263.772.000	12 bln	287.149.200	12 bln	322.864.120	72 bln	1.494.424.320	Kantor Camat Air Nipis
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bln	12 bln	13.480.000	12 bln	111.115.000	12 bln	165.213.400	12 bln	187.734.740	12 bln	192.408.214	12 bln	210.899.035	72 bln	880.850.389	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	12 Bln	-	-	-	54 Stel	24.000.000	54 Stel	27.000.000	54 Stel	28.000.000	54 Stel	34.000.000	54 Stel	113.000.000		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan	12 Bln	35 Buku	21.585.000	35 Buku	21.145.000	52 Buku	60.500.000	52 Buku	66.550.000	52 Buku	73.205.000	52 Buku	80.525.500	278 Buku	323.510.500	
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat	12 Bln	10 Desa	10.400.000	10 Desa	18.029.500	20 desa	38.000.000	20 desa	42.000.000	20 desa	46.000.000	20 desa	50.000.000	110 Desa	204.429.500	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Program Penataan Administrasi Kependudukan	12 Bln	20 Desa	34.141.000	20 Desa	34.141.000	20 Desa	70.180.000	20 Desa	77.198.000	20 Desa	84.917.800	20 Desa	93.409.580	120 Desa	393.987.380	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	12 Bln	-	-	-	10 desa	30.000.000	10 desa	35.000.000	10 desa	40.000.000	10 desa	45.000.000	40 Desa	150.000.000		
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	12 Bln	-	5 Buku	6.268.500	5 Buku	53.000.000	5 Buku	63.500.000	5 Buku	74.000.000	5 Buku	84.500.000	25 Buku	281.268.500		
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	12 Bln	50 org	5.000.000	50 org	5.000.000	50 Org	20.000.000	50 Org	25.000.000	50 Org	30.000.000	50 Org	35.000.000	300 org	120.000.000	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	12 Bln	-	-	-	50 Org	25.000.000	50 Org	30.000.000	50 Org	35.000.000	50 Org	40.000.000	200 org	130.000.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	12 Bln	-	0	-	130 org	25.000.000	130 org	30.000.000	130 org	35.000.000	130 org	40.000.000	520 Org	130.000.000		
		Program peningkatan efesiensi perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya efesiensi perdagangan Dalam Negeri	12 Bln	10 Lokasi	17.050.000	10 Lokasi	17.050.000	10 Lokasi	24.000.000	10 Lokasi	26.000.000	10 Lokasi	28.000.000	10 Lokasi	30.000.000	60 Lokasi	142.100.000	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Dana Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Dana Desa	12 Bln	10 Desa	8.300.000		8.300.000	20 Desa	60.500.000	20 Desa	66.550.000	20 Desa	73.205.000	20 Desa	80.525.500	100 Desa	297.380.500	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Penyakit masyarakat	12 Bln	50 Org	5.000.000	50 Org	5.000.000	50 Org	16.000.000	50 Org	18.000.000	50 Org	20.000.000	50 Org	22.000.000	300 Org	86.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bln	10 Dok	17.114.000			5 Dok	10.000.000	5 Dok	12.000.000	5 Dok	14.000.000	10 dok	16.000.000	35 dok	69.114.000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12 Bln		-		-	10 Dok	50.000.000	10 Dok	60.000.000	10 Dok	70.000.000	10 Dok	80.000.000	40 Dok	260.000.000	
			KECAMATAN KEDURANG				322.181.500	-	419.056.500	-	908.913.400	-	1.030.304.740	-	1.130.885.214	-	1.264.723.735	-	5.076.065.089	
																			-	Kantor Camat Kedurang
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	12 bln	192.737.800	12 bln	197.363.300	12 bln	197.363.300	12 bln	282.385.000	12 bln	310.608.000	12 bln	358.419.000	72 bln	1.538.876.400	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bln	76 unit	41.975.000	83 unit	107.531.000	9 Unit	437.789.000	35 Unit	141.000.000	35 Unit	160.638.600	35 Unit	177.000.000	275 unit	1.065.933.600	
			Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	12 Bln	0	-	0	-	0	-	25 stel	30.250.000	30 stel	36.602.000	40 stel	40.262.000	95 stel	107.114.000	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan	12 Bln	24 dok	42.380.400	24 dok	48.795.000	39 dok	66.233.200	39 dok	79.592.000	39 dok	90.000.000	39 dok	90.000.000	204 dok	417.000.600	
			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12 Bln	2 kali	20.753.000	2 kali	32.953.000	2 kali	27.474.000	2 kali	32.968.800	2 kali	49.000.000	2 kali	51.000.000	12 kali	214.148.800	
			Penataan Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Program Penataan Administrasi Kependudukan	12 Bln	100 Org	21.236.500	200 Org	37.043.700	200 Org	37.043.700	200 Org	40.700.000	200 Org	52.700.000	200 Org	30.600.000	1.100 Org	219.323.900	
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				-	0	-	25 Orang	20.000.000	25 Orang	24.000.000	25 Orang	20.000.000	25 Orang	25.000.000	100 org	89.000.000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				-		-	2 Kegiatan	30.000.000	2 Kegiatan	42.500.000		-		-	4 Kegiatan	72.500.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa	-	19 desa	19.380.000	19 Desa	20.398.000	19 Desa	20.398.000	19 Desa	22.437.800	19 Desa	27.700.000	19 Desa	29.700.000	114 desa	140.013.800	
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	12 Bln	1 Kali	20.070.000	1 Kali	21.740.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	37.000.000	1 Kali	40.000.000	6 Kali	148.810.000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah			4 Dok	10.184.000	0	-	1 Dok	7.000.000	1 Dok	9.000.000	1 Dok	10.000.000	5 Dok	22.000.000	12 Dok	58.184.000	
			Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	12 Bln	0	-	0	-	1 Dok	10.648.000	1 Dok	10.648.000	1 Dok	12.884.000	1 Dok	14.172.000	4 Dok	48.352.000	
							368.716.700	-	465.824.000	-	868.949.200	-	730.481.600	-	807.132.600	-	878.153.000	-	4.119.257.100	
			KECAMATAN KEDURANG ILIR																-	
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12 bln	186.000.000	12 bln	158.564.000	12 bln	213.800.000	12 bln	236.364.000	12 bln	260.298.000	12 bln	286.327.800	12 bln	1.341.353.800	Kantor Camat Kedurang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			unit	322.950.000		225.366.000		248.050.000		272.855.000		300.140.500		330.154.550		1.699.516.050	Kantor Kecamatan Kedurang Ilir	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-	-	40 Style	37.440.000	40 Style	40.000.000	40 Style	43.702.000	40 Style	48.072.000	160 Style	169.214.000		
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			-	-	-	-	4 Dok	75.500.000	4 Dok	86.550.000	4 Dok	98.205.000	4 Dok	110.525.500	4 Dok	370.780.500		
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				39.611.000		43.212.000		65.000.000		76.184.000		82.702.000		91.072.000		397.781.000		
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				-	-	-	10 dok	5.440.000	10 dok	6.000.000	10 dok	8.000.000	10 dok	9.500.000	50 Dok	28.940.000		
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			2 kali	19.064.000	2 kali	19.064.000	2 kali	25.410.000	2 kali	27.951.000	2 kali	30.746.000	2 kali	33.820.000	12 kali	156.055.000		
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			300 org	29.700.000	350 Org	29.700.000	400 Org	35.000.000	450 Org	39.000.000	500 Org	42.000.000	550 Org	45.000.000	2550 Org	220.400.000		
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			12 desa	5.500.000	12 Desa	5.500.000	12 Desa	9.680.000	12 Desa	10.648.000	12 Desa	11.712.000	12 Desa	12.884.000	12 Desa	55.924.000		
	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			1 kali	15.750.000	1 Kali	15.750.000	1 Kali	55.530.000	1 Kali	49.783.000	1 Kali	50.160.000	1 Kali	53.277.000	1 Kali	240.250.000		
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			8 Dok	15.339.000	0	4.500.000	7 Dok	44.510.000	7 Dok	50.261.000	7 Dok	56.387.000	7 Dok	61.925.000	36 Dok	232.922.000		
22	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat			0	-		-	1 Kali	12.100.000	1 Kali	13.310.000	1 Kali	14.641.000	1 Kali	16.105.000	5 Kali	56.156.000		
19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			12 desa	11.850.000	12 desa	11.850.000	24 desa	45.250.000	24 desa	50.275.000	24 desa	55.602.000	24 desa	62.262.000	24 desa	237.089.000		
					645.764.000	-	513.506.000	-	872.710.000	-	959.181.000	-	1.054.295.500	-	1.160.924.850	-	5.206.381.350		
	KECAMATAN PINO RAYA																-		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	12 bln	281.001.000	12 bln	281.001.000	12 bln	329.254.500	12 bln	368.833.350	12 bln	405.367.885	12 bln	405.367.885	72 bln	2.070.825.620	Kantor Camat Pino Raya	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bln	5 Unit	89.005.000	3 Unit	139.505.000	6 Unit	139.505.000	14 Unit	139.505.000	6 Unit	169.505.000	5 Unit	149.005.000	39 Unit	826.030.000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	12 Bln		-	0	-		-	20 stel	20.000.000	20 stel	20.000.000	20 stel	20.000.000	80 Stel	60.000.000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan	12 Bln	35 Buku	15.038.000	35 Buku	15.038.000	75 Buku	28.166.000	75 Buku	28.166.000	75 Buku	28.166.000	75 Buku	28.166.000	370 Buku	142.740.000		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12 Bln	10 Desa	24.445.000	10 Desa	24.445.000	20 Desa	29.445.000	20 Desa	29.445.000	20 Desa	39.445.000	20 Desa	49.445.000	100 Desa	196.670.000	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Program Penataan Administrasi Kependudukan	12 Bln	12 bln	19.865.000	12 bln	19.865.000	12 bln	19.865.000	12 bln	24.865.000	12 bln	24.865.000	12 bln	39.054.689	72 bln	148.379.689	
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				-	0	-	1 Kali	2.017.000	1 Kali	2.017.000	1 Kali	2.017.000	1 Kali	2.017.000	4 Kali	8.068.000	
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				-	0	-	1 Dokumen	3.026.000	1 Dokumen	3.026.000	1 Dokumen	3.026.000	1 Dokumen	3.026.000	4 Dokumen	12.104.000	
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				-	0	20.604.500	50 Org	25.604.500	50 Org	25.604.500	50 Org	25.604.500	50 Org	25.604.500	50 Org	123.022.500	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				-	0	-	5 Kelompok	7.000.000	5 Kelompok	7.000.000	5 Kelompok	7.000.000	5 Kelompok	7.000.000	20 Kelompok	28.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa	12 Bln		-	0	15.576.500	1 Keg	15.576.500	1 Keg	20.576.500	1 Keg	20.576.500	1 Keg	30.576.500	4 Keg	102.882.500	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	12 Bln	10 Lokasi	36.500.000	10 Lokasi	36.500.000	10 Lokasi	36.500.000	10 Lokasi	36.500.000	10 Lokasi	36.500.000	10 Lokasi	36.500.000	60 Lokasi	219.000.000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	12 Bln	20 Desa	-	20 Desa	50.000.000	20 Desa	55.000.000	20 Desa	55.000.000	20 Desa	55.000.000	20 Desa	75.000.000	120 Desa	290.000.000	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				6.496.000	0	10.000.000	50 Org	10.000.000	50 Org	10.000.000	50 Org	10.000.000	50 Org	15.000.000	100 Org	61.496.000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah				10.000.000	5 Dok	5.000.000	5 Dok	10.000.000	5 Dok	10.000.000	5 Dok	10.000.000	15 Dok	25.000.000	50 dok	70.000.000	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur				-	0	10.000.000	10 Dok	10.000.000	10 Dok	10.000.000	10 Dok	10.000.000	10 Dok	20.000.000	40 Dok	60.000.000	
							482.350.000	-	627.535.000	-	720.959.500	-	790.538.350	-	867.072.885	-	930.762.574	-	4.419.218.309	
			KECAMATAN PINO																-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12 Bln	182.515.000	12 Bln	194.966.000	12 Bln	246.463.000	12 Bln	270.909.000	12 Bln	259.500.000	12 Bln	285.450.000	12 Bln	1.439.803.000	Kantor Camat Pino
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12	12 Bln	128.216.000	12 Bln	128.837.000	12 Bln	158.720.000	12 Bln	127.892.000	12 Bln	171.482.000	12 Bln	188.630.000	72 Bln	903.777.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	30.000.000	12 Bln	16.000.000	12 Bln	20.000.000	12 Bln	39.930.000	12 Bln	33.923.000	72 Bln	139.853.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
					2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan	12 Bln	12 Bln	18.920.000	12 Bln	24.812.000	12 Bln	61.294.000	12 Bln	70.223.000	12 Bln	79.645.000	12 Bln	88.210.000	72 Bln	343.104.000	
		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			30 Desa	10.000.000	30 Desa	20.000.000	30 Desa	41.000.000	30 Desa	44.000.000	30 Desa	47.000.000	30 Desa	50.400.000	30 Desa	212.400.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1 dok	3.500.000	0	-	1 Dok	10.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	2 dok	30.000.000	5 Dok	73.500.000	
		Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Program Penataan Administrasi Kependudukan	12 Bln	16 Ds/Kel	36.585.000	16 Ds/Kel	40.244.000	16 Ds/Kel	44.268.000	16 Ds/Kel	48.695.000	16 Ds/Kel	53.564.000	16 Ds/Kel	58.921.000	96 Ds/Kel	282.277.000	
		Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	12 Bln	12 Bln	-	0	-	1 Dok	5.209.000	1 Dok	8.729.000	1 Dok	6.302.000	1 Dok	6.933.000	4 Dok	27.173.000	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12 Bln	16 Ds/ Kel	12.215.000	12 Bln	20.500.000	12 Bln	80.880.000	12 Bln	97.968.000	12 Bln	106.764.000	12 Bln	116.341.000	72 Bln	434.668.000	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	12 Bln	16 Ds/ Kel	20.440.000	16 Ds/ Kel	22.484.000	16 Ds/ Kel	24.732.000	16 Ds/ Kel	27.205.000	16 Ds/ Kel	29.926.000	16 Ds/ Kel	30.918.000	96 Ds/ Kel	155.705.000	
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	12 Bln	0	-	0	-	15 desa	5.500.000	15 desa	6.050.000	15 desa	6.655.000	15 desa	7.320.500	60 desa	25.525.500	
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	12 Bln	0	-	0	-	30 desa	10.500.000	60 desa	30.205.000	15 desa	10.000.000	15 desa	7.320.000	72 Bln	58.025.000	
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	12 Bln	0	-	0	-	57 Desa/Kel	22.000.000	41Desa/Kel	30.150.000	41Desa/Kel	19.965.000	41Desa/Kel	21.960.000	180 Desa/Kel	94.075.000	
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12 Bln	0	-	0	-	12 Bln	31.900.000	12 Bln	35.090.000	12 Bln	32.079.000	12 Bln	37.458.000	72 Bln	136.527.000	
						412.391.000	-	481.843.000	-	758.466.000	-	832.116.000	-	877.812.000	-	963.784.500	-	4.326.412.500	
		KECAMATAN BUNGA MAS																-	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12 bln	143.840.000	12 bln	197.827.000	12 bln	243.098.000	12 bln	253.000.000	12 bln	305.000.000	12 bln	322.000.000	72 bln	1.464.765.000	Kantor Camat Bunga Mas
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5 Unit	104.094.000	3 Unit	109.799.000	6 Unit	525.000.000	14 Unit	435.000.000	6 Unit	460.000.000	5 Unit	220.000.000	39 Unit	1.853.893.000	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	20 Stel	12.000.000	20 stel	15.000.000	20 stel	12.000.000	20 stel	15.000.000	80 Stel	54.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan			35 Buku	21.989.000	35 Buku	21.989.500	75 Buku	76.000.000	75 Buku	114.000.000	75 Buku	133.000.000	75 Buku	131.000.000	370 Buku	497.978.500	
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			10 Desa	18.677.000	10 Desa	18.677.000	20 Desa	37.000.000	20 Desa	41.000.000	20 Desa	46.000.000	20 Desa	51.000.000	100 Desa	212.354.000	
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			20 Desa	53.790.000	20 Desa	47.749.500	20 Desa	57.000.000	20 Desa	64.000.000	20 Desa	70.000.000	20 Desa	80.000.000	120 Desa	372.539.500	
15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				-	-	-	10 desa	25.000.000	10 desa	30.000.000	10 desa	35.000.000	10 desa	40.000.000	40 Desa	130.000.000	
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				-	-	-	5 Buku	10.000.000	5 Buku	15.000.000	5 Buku	20.000.000	5 Buku	25.000.000	5 Buku	70.000.000	
16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				-	-	-	50 Org	12.000.000	50 Org	15.000.000	50 Org	20.000.000	50 Org	25.000.000	50 Org	72.000.000	
17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				-	-	-	50 Org	10.000.000	50 Org	15.000.000	50 Org	20.000.000	50 Org	25.000.000	200 org	70.000.000	
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				-	-	-	1 Keg	12.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	17.000.000	1 Keg	20.000.000	4 Keg	64.000.000	
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			10 Lokasi	15.010.000	10 Lokasi	15.160.000	10 Lokasi	20.000.000	10 Lokasi	22.000.000	10 Lokasi	25.000.000	10 Lokasi	28.000.000	60 Lokasi	125.170.000	
19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			20 Desa	66.881.000	20 Desa	48.449.000	20 Desa	57.000.000	20 Desa	65.000.000	20 Desa	72.000.000	20 Desa	80.000.000	120 Desa	389.330.000	
20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				-	-	-	50 Org	20.000.000	50 Org	25.000.000	50 Org	30.000.000	50 Org	35.000.000	100 Org	110.000.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			5 Dok	10.649.000	5 Dok	3.152.000	5 Dok	7.000.000	5 Dok	9.000.000	5 Dok	12.000.000	15 Dok	34.000.000	50 dok	75.801.000	
30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				-	-	-	10 Dok	24.000.000	10 Dok	30.000.000	10 Dok	40.000.000	10 Dok	50.000.000	40 Dok	144.000.000	
					434.930.000	-	462.803.000	-	1.147.098.000	-	1.163.000.000	-	1.317.000.000	-	1.181.000.000	-	5.705.831.000	
	KECAMATAN KOTA MANNA																-	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningtkanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 Bln	175.894.000	12 Bln	194.983.000	12 Bln	219.855.000	12 Bln	241.840.500	12 Bln	241.840.500	12 Bln	266.024.550	72 Bulan	1.340.437.550	Kecamatan Kota Manna
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningtkanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 unit	76.334.000	10 Unit	81.874.000	10 Unit	130.864.000	10 Unit	143.950.000	10 Unit	158.345.000	10 Unit	158.345.000	60 Unit	749.712.000	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Meningtkanya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	12 bulan	65 dok	42.995.000	60 Dok	46.385.500	60 Dok	60.723.000	60 Dok	66.795.300	60 Dok	66.795.300	60 Dok	73.474.830	360 Dok	357.168.930	

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	7 dokumen	65 dok	42.995.000	60 Dok	46.385.500	45 Dok	59.000.000	60 Dok	77.176.500	60 Dok	77.176.500	60 Dok	84.894.150	360 Dok	387.627.650		
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	12 bulan	33.260 Jiwa	43.321.000	33.592 Jiwa	43.321.000	33.924 Jiwa	55.385.000	34.256 Jiwa	60.923.500	34.588 Jiwa	60.923.500	34.588 Jiwa	67.015.850	169.952 Jiwa	330.889.850		
		Program Peningkatan Keamanan dan keamanan lingkungan		30 org	5.766.500	30 org	5.766.500	-	45org	7.675.000	50 Org	7.675.000	50 Org	8.442.500	145 org	35.325.500			
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		4 Dok	1.667.000	4 Dok	1.667.500	-	4 Dok	2.218.000	4 Dok	2.440.000	4 Dok	2.440.000	24 Dok	10.432.500			
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		33 OK	8.000.000	40 OK	8.000.000	-	60 OK	8.000.000	70 OK	8.000.000	70 OK	8.800.000	323 OK	40.800.000			
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Dokumen	12 Kali	9.000.000	12 Kali	9.000.000	12 Kali	15.000.000	12 Kali	16.500.000	12 Kali	16.500.000	12 Kali	18.150.000	36 Kelurahan, 30 Desa	84.150.000		
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	2 desa, 7 kelurahan	1 Kali Kegiatan	15.551.000	1 Kali Kegiatan	15.551.000	1 Kali Kegiatan	22.000.000	1 Kali Kegiatan	20.698.000	1 Kali Kegiatan	22.768.000	1 Kali Kegiatan	22.768.000	6 Kali Kegiatan	119.336.000	
		Program Data/informasi/statistik daerah		10 Dok	2.236.000	10 Dok	2.236.000	-	10 Dok	2.236.000	-	10 Dok	2.459.600	10 Dok	9.167.600				
		Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	10 Dok	11.996.500	5 Dok	3.996.000	5 Dok	12.750.000	5 Dok	14.025.000	5 Dok	14.712.500	5 Dok	26.183.750	35 Dok	83.663.750	
		program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		9 Desa	20.360.000	9 Desa	20.360.000	-	9 Desa	20.360.000	9 Desa	20.360.000	9 Desa	22.396.000	60 Desa	103.836.000			
					413.121.000		433.140.500		1.059.205.000		636.269.000		642.012.500		796.852.550		3.980.600.550		
		KECAMATAN MANNA															-		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bln	239.653.500	12 bln	240.353.500	12 bln	306.000.000	12 bln	256.000.000	12 bln	256.000.000	72 Bulan	1.554.007.000	Kantor Camat Manna		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	109 Unit	88.718.000	8 Unit	87.193.000	8 unit	95.000.000	6 Unit	212.230.000	6 Unit	268.874.000	146 Unit	1.025.184.000			
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	12 bulan	8 Dok	36.384.500	8 Dok	33.616.000	8 Dok	40.000.000	8 Dok	37.000.000	8 Dok	37.000.000	48 Dok	221.000.500			
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	12 bulan	1 Kali	9.993.000	1 Kali	12.043.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	6 kali	87.036.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	12 bulan	1 keg	12.464.000	1 keg	20.931.500	1 keg	21.937.200	1 keg	21.000.000	1 keg	21.000.000	1 keg	21.000.000	6 keg	118.332.700	
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	1 Kali	18.065.000	1 Kali	19.041.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	6 Kali	122.106.000	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	2 Dok	13.020.000	1 Dok	5.120.000	1 Dok	7.000.000	1 Dok	5.200.000	1 Dok	5.200.000	2 Dok	5.200.000	8 Dok	40.740.000	
						418.298.000	-	418.298.000	-	514.937.200	-	566.430.000	-	623.074.000	-	627.369.000	-	3.168.406.200	
		KECAMATAN SEGINIM																-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	162.593.000	12 Bulan	172.767.000	12 Bulan	171.687.000	12 Bulan	181.987.000	12 Bulan	173.357.000	12 Bulan	258.600.000	12 Bulan	1.120.991.000	Kantor Camat Seginim
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Peningkatan kualitas infrastruktur Kantor	261/unit/paket /buah	2 unit, 100 buah	135.000.000	3 unit	125.500.000	4unit	158.000.000	18 unit	207.500.000	20 unit	257.500.000	20 unit	207.000.000	261 unit	1.090.500.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran	64 Dokumen	14 dokumen	24.700.000	14 dokumen	25.900.000	14 dokumen	26.200.000	14 dokumen	26.200.000	14 dokumen	26.200.000	14 dokumen	26.200.000	64 Dokumen	155.400.000	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkat kan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kec Seginim	10 dok,5000 Orang	1000 orang	36.000.000		36.000.000	-	42.000.000	-	44.000.000	-	44.000.000	-	46.000.000	0	248.000.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Terlaksananya data informasi daerah yg akurat			4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		25.200.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa		121 desa,6 kel	21 Desa,1 kel	17.500.000		17.500.000	-	17.500.000	-	17.500.000	-	17.500.000	-	17.500.000		105.000.000	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	6 dokumen	27.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				7.500.000	3 dok	7.500.000	3 dok	7.500.000	3 dok	7.500.000	3 dok	7.500.000	3 dok	7.500.000	18 dok	45.000.000	
		Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri			21 Desa, 1 kel	30.000.000	21 Desa, 1 kel	30.000.000	21 Desa, 1 kel	30.000.000	21 Desa, 1 kel	35.000.000	21 Desa, 1 kel	35.000.000	21 Desa, 1 kel	35.000.000	21 Desa, 1 kel	195.000.000	
		Program peningkatan pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT)				5.000.000	-	5.000.000	0	5.000.000	-	5.500.000	-	5.500.000	-	5.500.000		31.500.000	
		Program Perencanaan pembangunan Daerah				4.500.000		10.000.000							10.000.000	20 dokumen	24.500.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
				2016 (kondisi awal)		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					431.493.000	-	438.867.000	-	466.587.000	-	533.887.000	-	575.257.000	-	622.000.000	-	3.068.091.000	

TABEL 8.3
PROYEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 -2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG	601.052.367.951,00	704.763.913.194,88	821.428.694.313,74	944.642.998.460,80	1.086.339.448.230,92	1.249.290.365.464,42
Belanja Gaji Dan Tunjangan	434.044.491.787,00	514.325.754.244,83	602.424.811.521,18	692.788.533.249,36	796.706.813.236,76	916.212.835.222,28
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	17.909.611.600,00	18.388.500.000,00	21.146.775.000,00	24.318.791.250,00	27.966.609.937,50	32.161.601.428,13
Belanja Bantuan Sosial	303.927.875,00	230.000.000,00	264.500.000,00	304.175.000,00	349.801.250,00	402.271.437,50
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	148.794.336.689,00	171.060.658.950,05	196.719.757.792,56	226.227.721.461,44	260.161.879.681,66	299.186.161.632,76
Belanja Tidak Tetap/Tak Terduga		759.000.000,00	872.850.000,00	1.003.777.500,00	1.154.344.125,00	1.327.495.743,75
BELANJA LANGSUNG	451.238.832.800,00	405.499.219.594,00	520.027.057.077,00	574.275.030.626,91	605.826.160.233,92	653.840.104.791,46
TOTAL	1.052.291.200.751,00	1.110.263.132.788,88	1.341.455.751.390,74	1.518.918.029.087,71	1.692.165.608.464,84	1.903.130.470.255,88



Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi Program, Indikator, Target, dan Pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mendukung prioritas nasional. Hal ini bertujuan agar daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan Program, Indikator, Target, dan Pendanaan pembangunan daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional dan akan dituangkan dalam dokumen rencana daerah, dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah

Penyelarasan ini dimaksudkan mengetahui kontribusi kegiatan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan beserta lokasi yang terindikasi mendukung kegiatan strategis nasional sesuai dokumen RTRW. Bertujuan agar daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mengidentifikasi kontribusi kegiatan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan beserta lokasinya yang selaras dengan kegiatan strategis nasional berdasarkan kesesuaian dengan dokumen RTRW.

TABEL 8.4
KESELARASAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Da Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	APBD Kabupaten/Kota (000.000)						APBD Provinsi (000.000)						APBN (Dana Prioritas Nasional) (Rp Miliar)						APBN (DAK) (Rp Miliar)											
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
	1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
1		Usuran Wajib Pelayanan Dasar																																		
1	01	Pendidikan																																		
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Ya	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	Angka Partisipasi Murmi PAUD (%)		1,778.542	1,778.542	1,778.542	1,831.898	1,886.855	1,943.460	4,292.885	5,135.500	2,712.500	2,797.200	2,797.200	2,890.370	32,931.90																	
					Angka Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)																															
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Ya	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan	Angka Partisipasi Murmi SD (%)		7,285.306	7,385.306	7,703.452	7,934.555	8,172.592	8,417.770		12,000.000	12,000.000	12,000.000	12,000.000	12,000.000								9	6.210	27.780								
					Angka Partisipasi Murmi SLTP (%)																											0.930	17.100			
				Peningkatan Standar Pelayanan Publik	Persentase SD Yang Terakreditasi																															
					Persentase SMP Yang Terakreditasi																															
		Program Pendidikan Non Formal	Ya	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca masyarakat	Angka Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)		167.380	870.500	870.500	870.500	870.500	870.500																								
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Ya	Peningkatan Standar Pelayanan Publik	Persentase Guru SD yang berijazah minimal S1		938.402	938.402	325.000	334.750	344.793	344.793																								
					Persentase Guru SMP yang berijazah minimal S1																															
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Ya	Peningkatan Standar Pelayanan Publik	Persentase Guru SD yang berijazah minimal S1		1,108.673	12,449.598	12,752.983	13,135.572	13,529.640	13,935.529																								
					Persentase Guru SMP yang berijazah minimal S1																															
					Jumlah Sekolah Terakreditasi SD																															
					SMP																															
1	02	Kesehatan																																		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Ya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang		21,751.971	29,044.913	17,055.899	17,245.834	18,970.418	20,867.459																								
					Jumlah Dokter Umum																															
					Jumlah Dokter Spesialis																															
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Ya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Jumlah Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang		259.56	314.42	294.43	323.88	356.26	391.89	800.000	2,000.000	2,650.000	2,650.000	2,650.000	2,650.000	1,646.70																	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Ya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk		237.654	311.386	385.157	423.673	466.040	512.644	2,325.000	4,000.000	4,328.000	4,353.000	4,353.000	3,778.000																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	APBD Kabupaten/Kota (000.000)						APBD Provinsi (000.000)						APBN (Dana Prioritas Nasional) (Rp Miliar)						APBN (DAK) (Rp Miliar)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Ya	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	persen				2.500.000	2.750.000							101,094.20											
				Rasio Puskesmas/Poliklinik, Per Jumlah Penduduk																									
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Ya	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia layanan kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi		14,268.759	36,429.231	39,335.409	49,959.315	40,477.217	44,524.939												2.198	11.748	111.691			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan Da Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	APBD Kabupaten/Kota (000.000)						APBD Provinsi (000.000)						APBN (Dana Prioritas Nasional) (Rp Miliar)						APBN (DAK) (Rp Miliar)					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Ya	Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	Jumlah nilai investasi berskala Nasional			36.083	200.000	200.000	200.000	200.000																		
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	Ya	Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi dan pengembangan sistem pendukung yang profesional	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dilayani								1.063.687	1.328.350	815.000	850.000	890.000	890.000												
					Rata-rata lama pelayanan perizinan				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000																		
					Peningkatan Standar Kualitas pelayanan prima	Indeks kepuasan masyarakat di perizinan pelayanan terpadu																									
2	13		Kepemudaan Dan Olah Raga	Ya																											
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Ya	Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan daerah	Jumlah kelompok pemuda produktif yang dibina		550.500	987.000	1,085.700	1,194.270	1,313.697	1,445.066	-	200.000	1,000.000	1,100.000	1,100.000	1,100.000												

[illegible]

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	APBD Kabupaten/Kota (000.000)						APBD Provinsi (000.000)						APBN (Dana Prioritas Nasional) (Rp Miliar)						APBN (DAK) (Rp Miliar)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Jumlah Desa mandiri benih														9,145.60											
			Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan	Produksi perkebunan unggulan								7,309.955	20,573.004	24,080.000	25,000.000	35,000.000	50,000.000	13,851.30											
				a. Kelapa Sawit																									
				b. Karet																									
				c. Kopi																									
				d. Kakao																									
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Ya	Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan	Produksi Daging ternak		389.250	729.000	795.750	30.000	300.000	300.000	25,815.069	14,628.650	40,778.560	82,338.360	142,367.000	181,325.915												
				a. Sapi																									
				b. Kerbau																									
				c. Kambing																									
				d. Unggas																									
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Ya	Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan perikanan	Jumlah unit pengolahan hasil ternak								600.000	820.000	830.000	915.000	1,135.000	1,445.000												
3	06	Perdagangan																											
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ya	Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi		372.142	378.442	485.373	492.996	501.381	510.605													2.277		8.000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



TABEL 8.5

KESELARASAN INDIKASI LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI DAERAH

RPJMD Tahun 2016- 2021

Kabupaten/Kota : Bengkulu Selatan

Provinsi : Bengkulu

No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pegembangan jaringan transmisi dan distribusi					Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032; - Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 terkait”mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas					Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. BS Tahun 2011-2031; - Pasal 7 ayat (1) huruf b terkait”mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.” - Pasal 10 huruf b terkait’ b. sistem jaringan prasarana energi - Pasal 13 ayat (1) terkait’ Sistem



No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik”. - Pasal 8 ayat (1) huruf c terkait’ b. sistem jaringan prasarana energi - Pasal 23 ayat (2) huruf e terkait” pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Bengkulu, meliputi Air Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim					jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya terdapat jaringan energi listrik, terdiri atas : - pembangkit tenaga listrik; - jaringan transmisi tenaga listrik
2	Pembangunan					Perda No. 2 Tahun	Penyediaan Koneksi				Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang RTRW



No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	serat optic antar seluruh kabupaten/kota					2012Tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032; - Pasal 8 ayat (1) huruf d terkait’ d. sistem jaringan telekomunikasi	Jaringan Internet Masyarakat				Kab. BS Tahun 2011-2031; - Pasal 10 huruf b terkait’ b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
3	Pengembangan transmisi penyiaran TVRI					- Pasal 25 ayat (1) dan (2) terkait’ (1)Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi sistem terestrial yang terdiri					- Pasal 14 terkait’ (1)Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas : a. jaringan terestrial; b. jaringan seluler; dan c. jaringan satelit. (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikembangkan terutama di Kecamatan Kota Manna



No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dari sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan. (2)Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.					(3) Jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan di seluruh kecamatan terutama Kecamatan Kota Manna, Pasar Manna, Manna, Pino, Pino Raya, Seginim, Ulu Manna, Kedurang dan Kecamatan Bunga Mas yaitu melalui perluasan jaringan telepon seluler pada wilayah-wilayah yang telah berkembang dan pengembangan BTS di setiap ibukota kecamatan. (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada



No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											ayat (1) huruf c merupakan teknologi telekomunikasi yang juga akan dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan terutama di wilayah perkotaannya.
4	Pengembangan SMK berbasis potensi daerah	Pembangunan Unit Sekolah Unggulan	10 kab/kota			PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2/2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI BENGKULU Pasal 2 mengenai penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pertumbuhan wilayah Provinsi Bengkulu yang					



No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						merata dan terpadu dengan ruang yang aman melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana					
5	Kesiapsiagaan pendidikan dalam kebencanaan	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi siswa/SD s/d SMA di Daerah rawan Bencana		Workshop dan TTX Penanggulangan Bencana (Banjir, lonsor, gempa, tsunami dan kebaka		PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2/2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI BENGKULU Pasal 56 ayat 10 point e					



No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ran hutan)		peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai kebencanaan, pembentukan forum kebencanaan, simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta sekolah siaga bencana yang terorganisir dengan baik					
6	Distribusi guru	'Pokja Pemetaan dan Pemerataan Guru SMA/SMK	10 kab/kota								
7	Evaluasi kurikulum			Pemberdayaan Tim Pengem							



No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan Dalam RTRW dan/atau RZWP3K
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokas i	Nama Kegiata n	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				bangun Kurikulum SMK							



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Kinerja Kunci pada aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah pertumbuhan PDRB/pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, inflasi, angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka, angka melek huruf dan angka usia harapan hidup. Pada aspek pelayanan umum, IKK nya diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk dan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Indikator Kinerja Kunci pada aspek daya saing daerah diantaranya angka konsumsi rumah tangga perkapita dan rasio kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada waktu tertentu. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.

Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit



berdasarkan jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Angka konsumsi RT perkapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Untuk lebih jelasnya, penetapan indikator kinerja daerah secara rinci sebagaimana ditampilkan dalam tabel 9.1 berikut:



Tabel 9.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	4,02	4,34	4,71	5,07	5,43	5,79	6,15
2	Laju Inflasi Kabupaten (%)	3,25	6,6	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3
3	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	26,4	28,4	30,6	32,8	35,0	37,2	39,4
4	IPM	68,8	69,4	70	70,6	71,2	71,8	71,8
	Pendidikan							
A.2	Kesejahteraan Sosial Pendidikan							
5	Angka Melek Huruf (%)	96.9	96.9-97.9	97.9-98.9	98.9-99.9	99.9-100	100	100
6	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.75	8.95	9.12	9.29	9.45	9.62	9.62
7	Angka partisipasi murni	90.45	91.35	91.45	91.54	91.63	91.72	91.72
	SD	98,4	98,6	99,3	99,4	99,7	100	100
	SLTP	80,2	82,3	84,2	87,6	89,8	100	100
8	Angka partisipasi kasar	99.12	99.22	99.32	99.42	99.52	99.62	99.62
	SD	100	100	100	100	100	100	100
	SLTP	87,3	88,3	88,7	89,2	89,7	90.00	90.00
9	Angka pendidikan yang ditamatkan (tahun)	13,22	13,60	14,10	14,60	15,10	15,60	15,60



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Sekolah Terakreditasi SD SMP	113 31	0 0	3 1	3 1	3 1	2 1	124 35
	Kesehatan							
10	Angka kelangsungan hidup bayi	986	988	989	990	991	992	992
11	Angka usia harapan hidup (tahun)	67,06	67,06	67,06	67,06	70.00	70.00	70.00
12	Persentase balita gizi buruk (%)	0,08	0	0	0	0	0	0
	Kemisikinan							
	Angka Kemiskinan (%)	22,76	20.81	19.77	18.79	17.85	16.95	16.95
14	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	79.00	80.23	81,60	82.70	83.80	84.90	84.90
	Kepemilikan Lahan							
15	Persentase penduduk yang tidak memiliki lahan	-	-	-	-	-	-	-
	Kesempatan Kerja							
16	Rasio Penduduk yang bekerja	61,219	67,341	74,075	81,482	89,631	98,594	98,594
17	Pengangguran terbuka (%)	2.43	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
	Kriminalitas							
18	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	80	85	90	96	98	100	100
A.3	Seni Budaya dan Olahraga							
19	Jumlah Grup Kesenian	6	7	8	8	9	10	10
20	Jumlah Gedung kesenian	0	0	1	1	1	2	2
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.1	Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
	Pendidikan Dasar							
21	Angka partisipasi sekolah	99.73	99.74	99.75	99.76	99.77	99.78	99.78
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	70.20	71.30	71.50	71.70	71.90	72.10	72.10



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Rasio Guru murid	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
	Kesehatan							
24	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 70	1 : 71	1 : 69	1 : 65	1 : 60	1 : 55	1 : 55
25	Rasio puskesmas, poliklinik pustu persatuan penduduk	1 : 1359	1 : 1359	1 : 1355	1 : 1350	1 : 1340	1 : 1330	1 : 1330
26	Rasio dokter persatuan penduduk	0,031	0,034	0,037	0,039	0,043	0,046	0,046
27	Rasio tenaga medis persatuan penduduk							
	- Bidan	0.201	0.206	0.211	0.216	0.221	0.226	0.226
	- Perawat	0.272	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.297
28	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	0	2	6	10	14	14	14
	Sarana dan Prasarana Umum							
29	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Jalan Kabupaten)	0	0	50-60	60-70	70-80	80-90	80-90
30	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.230613123	0.233687965	0.236762807	0.239837648	0.24291249	0.245987332	0.245987332
	Perhubungan							
31	Jumlah Pelabuhan terminal bis	1	1	1	1	1	1	1
	B.2 Pelayanan Penunjang							
	Penanaman Modal							
32	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal dalam negeri	72	72	74	76	78	80	80
33	Jumlah nilai investasi berskala Nasional	2	2	3	4	5	5	5
	KUKM							
34	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	17-18
35	Jumlah Koperasi Non KUD	202	202 - 204	204 - 206	206 - 208	208 - 210	210 - 212	210 - 212
36	Jumlah UMKM non BPR/LKMUUKM	1234	1234 - 1239	1239 - 1243	1243 - 1246	1246 - 1249	1249 - 1255	1249 - 1255



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Jumlah BPR	0	0	0	1	1	1	3
	Ketenagaan Kerja							
38	Angka partisipasi angkatan kerja	71.01	71-75	75-80	80-85	85-90	90-95	90-95
	KB dan KS							
39	Jumlah Pasangan Usia Subur	31900	32439	32967	33495	34023	34551	34551
40	Jumlah Peserta KB	25,534-25,791	25,791-26,048	26,048-26,315	26,315-26,572	26,572-26,829	26,829-27,086	26,829-27,086
	Pertanahan							
41	Persentase Luas lahan bersertifikat	40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	60-65
	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
42	Jumlah LSM	-	-	-	-	-	-	-
	Perpustakaan							
43	Jumlah Perpustakaan	226	229	232	235	238	241	241
44	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	1833	1833-2016	2017-2217	2218-2439	2440-2683	2684-2952	2684-2952
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							
45	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4/10.000	4/10.000	9/10.000	14/10.000	20/10.000	25/10.000	30/10.000
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
C.1	Kemampuan ekonomi Daerah							
46	Angka konsumsi RT per kapita	61.73-64.81	64.81-68.05	68.05-71.46	71.46-75.03	75.03-78.78	78.78-82.72	78.78-82.72
47	Persentase konsumsi RT untuk non pangan	38.27-40.18	40.18-42.19	42.19-44.3	44.3-46.51	46.51-48.84	48.84-51.28	48.84-51.28
48	Produktifitas 9 sektor PRDB	4.5-4.7	4.7-4.9	4.9-5.2	5.2-5.4	5.4-5.7	5.7-6	5.7-6
49	Pertanian	361,411-379,481	379,481-398,455	398,455-418,378	418,378-439,297	439,297-461,262	461,262-484,325	461,262-484,325
50	Pertambangan dan penggalian	3,168-3,326	3,326-3,492	3,492-3,667	3,667-3,850	3,850-4,043	4,043-4,245	4,043-4,245
51	industri pengolahan	15,245-16,007	16,007-16,807	16,807-17,647	17,647-18,530	18,530-19,456	19,456-20,429	19,456-20,429
52	Listrik	1,957-2,054	2,054-2,157	2,157-2,265	2,265-2,378	2,378-2,497	2,497-2,622	2,497-2,622



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Bangunan	46,972-49,320	49,320-51,786	51,786-54,375	54,375-57,094	57,094-59,949	59,949-62,946	59,949-62,946
54	Perdagangan	264,932-278,178	278,178-292,087	292,087-306,691	306,691-322,026	322,026-338,127	338,127-355,034	338,127-355,034
55	Pengangkutan dan komunikasi	87,896-92,290	92,290-96,905	96,905-101,750	101,750-106,838	106,838-112,180	112,180-117,789	112,180-117,789
56	Keuangan	49,537-52,013	52,013-54,614	54,614-57,345	57,345-60,212	60,212-63,223	63,223-66,384	63,223-66,384
57	Jasa-jasa	244,385-256,604	256,604-269,434	269,434-282,906	282,906-297,051	297,051-311,904	311,904-327,499	311,904-327,499
C.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
	Aksesibilitas Daerah							
58	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
59	Panjang Jalan	741,95-764,20	764,20-840,62	840,62-924,69	924,69-1.017,16	1.017,16-1.118,87	1.118,87-1.230,76	1.118,87-1.230,76
	Fasilitas Bank							
60	Jumlah Bank	15-16	15-17	15-18	15-19	15-20	15-21	15-21
	Fasilitas Listrik							
61	Jumlah RT yang menggunakan listrik	20.960-22.008	22.008-23.108	23.108-24.263	24.263-25.477	25.477-26.750	26.750-28.088	26.750-28.088
	Ketersedian Penginapan							
62	Jumlah Penginapan/Hotel	16	17	18	19	20	21	21



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iklim Berinvestasi							
63	Angka kriminalitas	284	255-230	229-207	206-185	184-167	166-150	166-150
64	Jumlah Peristiwa Kejahatan Yang Diselesaikan	145-152	152-159	159-167	167-176	176-185	185-194	185-194
65	Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas	29-26	26-23	23-21	21-19	19-17	17-15	17-15
66	Sumber Daya Manusia							
67	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	208-228	228-251	251-276	276-304	304-334	334-368	334-368
68	Rasio Ketergantungan	-	-	-	-	-	-	-



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 merupakan instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama 6 (Enam) tahun kedepan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju dan sejahtera.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh : (1). komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2). konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3). kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4). partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah.

RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah terutama pada akhir periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan umum, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program kerja OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian RPJMD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021, maka seluruh pemangku amanah diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada. Bagi OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 menjadi acuan



utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) OPD selama periode 2016-2021 serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dan Renja OPD digunakan sebagai bahan penyusunan APBD selama periode 2016-2021. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 yang meliputi :

1. Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku amanah lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya
2. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD 2016-2021 yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan, Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 2017-2021.

BUPATI BENGKULU SELATAN

H.DIRWAN MAHMUD